BADAN POM

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

TAHUN 2024

Balai Besar POM di Surabaya
Jalan Karang Menjangan No. 20 Surabaya
Telp. 031-5020575,5048833
Email : bbpom_surabaya@pom.go.id

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target Tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan

secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya.

Surabaya, 24 Februari 2025

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI SURABAYA

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 34 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi, diperoleh 10 (sepuluh) sasaran strategis memperoleh capaian kategori **Sangat Baik** dan 1 (satu) sasaran strategis tidak dimasukkan kedalam perhitungan evaluasi NPSS. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 101,12% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2024;
2. Capaian indikator sasaran strategis kedua pada tahun 2024 sebesar 106,88% dengan kriteria **Sangat Baik**, ini keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya;
3. Capaian indikator sasaran strategis ketiga pada tahun 2024 sebesar 103,16% dengan kriteria **Sangat Baik**, Hal ini menun jukkan BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya;
4. Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 101,21% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya tahun 2024;
5. Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 100,59% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2024;
6. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 120,00% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada tahun 2024;

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

7. Pada tahun 2024 pada sasaran strategis ketujuh yaitu Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya, memperoleh Capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 118,59% dengan kriteria **Sangat Baik**;
8. Capaian indikator sasaran strategis kedelapan pada tahun 2024 sebesar 100,15% dengan kriteria **Sangat Baik**, menunjukkan bahwa BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal;
9. Pada tahun 2024 capaian Indikator sasaran strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal tidak dimasukkan kedalam perhitungan NPSS.
10. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh sebesar 110,28% dengan kriteria **Sangat Baik** pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
11. Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,56% dengan kriteria **Sangat Baik** pada tahun 2024, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya mewujudkan terkelolanya Keuangan secara Akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 antara 93,33% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa” dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama penilaian indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan terlalu tinggi. Beberapa upaya perbaikan yang terus dilakukan Balai Besar POM di Surabaya agar dapat mencapai nilai yang maksimal seperti melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan; melakukan Koordinasi dan Komunikasi dengan Pejabat pengadaan sehingga pengadaan tidak sampai terlambat atau bisa tepat waktu; dan segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal. Sedangkan terdapat 4 capaian indikator kinerja tertinggi dengan capaian sebesar 120,00% pada indikator “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar”; “Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar”; “Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal”; “Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri”.

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis.Capaian TE untuk 21 (dua puluh satu) kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 ini bervariasi, dengan Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan antara 0 s.d 0,52. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan

Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.617.386.000,-. Realisasi anggaran pada tahun 2024 adalah Rp69.473.776.680,- atau 96,82%. BBPOM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2024.

Surabaya, 24 Februari 2025

Plt Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya,

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
BADAN POM

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

HIGHLIGHT

Selama tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **UPT Terbaik Pendampingan Kegiatan PJAS**

2. SDN Mojo VI Kota Surabaya sebagai sekolah intervensi Balai Besar POM di Surabaya memperoleh **Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS Aman Kategori SD**

3. SMPN 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagai sekolah intervensi Balai Besar POM di Surabaya memperoleh **Juara I Tingkat Nasional Sekolah Regional Barat dengan PJAS Aman Kategori SMP**

4. Pasar Nambangan Kota Surabaya sebagai lokus intervensi Balai Besar POM di Surabaya memperoleh **Juara II Tingkat Nasional Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas untuk Regional Barat**

5. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Peringkat III Pengguna Transaksi Digipay Terbanyak**

SERTIFIKAT PENGHARGAAN
KPPN SURABAYA II
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya (432784)
Atas Pencapaian Prestasi Sebagai Peringkat III Pengguna Transaksi Digipay Terbanyak
Surabaya, 19 Juni 2024
KEPALA KANTOR,
Marno

6. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Peringkat II Pengguna KKP Transaksi Terbanyak Kategori Pagu Sedang 25-100 M**

SERTIFIKAT PENGHARGAAN
KPPN SURABAYA II
MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya (432784)
Atas Pencapaian Prestasi Sebagai Peringkat II Pengguna KKP Transaksi Terbanyak Kategori Pagu Sedang 25-100 M
Surabaya, 19 Juni 2024
KEPALA KANTOR,
Marno

7. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Peringkat I Satket terbaik atas Transaksi KKP Terbanyak Periode Januari s.d September Tahun 2024**

SERTIFIKAT
Penghargaan
KPPN SURABAYA II
Memberikan Penghargaan Kepada :
Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Surabaya (432784)
Atas Pencapaian Prestasi Sebagai Peringkat I Satker Terbaik Atas Transaksi KKP Terbanyak Periode Januari s.d. September Tahun 2024
Surabaya, 18 Oktober 2024
Kepala Kantor
Ditandatangani secara Elektronik
MARNO

8. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Terbaik Kedua Unit Kearsipan II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Piagam Penghargaan
NOMOR : KA.03.1.01.24.13
Diberikan Kepada :
Balai Besar POM di Surabaya
sebagai
Terbaik Kedua
Unit Kearsipan II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan"
berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023
Jakarta, 18 Januari 2024
Plt. Kepala Badan,
Dr. Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt. M.Pharm, MARS

9. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **10 Terbaik Kelompok Lembaga pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat "Pelayanan Prima"**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Piagam Penghargaan
Diberikan Kepada
BALAI BESAR POM SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Sebagai
10 Terbaik Kelompok Lembaga pada PEKPPP Tahun 2024 dengan Predikat "Pelayanan Prima"
Jakarta, 9 Oktober 2024
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
ABDULLAH AZWAR ANAS

10. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024** atas **Inovasi GEMPUR JATIM "Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur"**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Atas Inovasi

Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur

Sebagai

Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024

Jakarta, 8 Oktober 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ABDULLAH AZWAR ANAS

11. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima"**

A

BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada:

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

sebagai:

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024
Dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori

"PELAYANAN PRIMA"

Jakarta, November 2024
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

12. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Peringkat II Ketegori PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM sebagai Badan Publik "Informatif"**

BADAN POM

ANUGERAH

Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

2024

KATEGORI PPID PELAKSANA UPT BALAI BESAR POM

PERINGKAT 2

BALAI BESAR POM DI SURABAYA

SEBAGAI BADAN PUBLIK

INFORMATIF

Jakarta, 3 Desember 2024
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

13. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Regional Terbaik Kedua Penghargaan UPT dengan Implementasi Regionalisasi Terbaik**

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
Diberikan kepada:
BBPOM di Surabaya
Sebagai Regional Terbaik Kedua
Penghargaan UPT dengan Implementasi Regionalisasi Terbaik
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

14. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Apresiasi atas Dedikasi dan Komitmen secara proaktif mengimplementasikan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Alam Indonesia), memberikan pendampingan untuk naik kelas, sehingga berhasil meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam**

BADAN POM
PIAGAM PENGHARGAAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
Memberikan Apresiasi kepada:
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
Atas dedikasi dan komitmennya secara proaktif mengimplementasikan program NUANSA (Naik Kelas UMK Obat Bahan Alam Indonesia), memberikan pendampingan untuk naik kelas, sehingga berhasil meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi serta mendukung kemajuan Usaha Mikro Kecil Obat Bahan Alam.
Jakarta, 10 Desember 2024
TARUNA IKRAR
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

15. BBPOM di Surabaya berhasil meraih **Apresiasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)**

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGAAN
UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)
NOMOR: MHA-04.UM.04.01 TAHUN 2024
Diberikan kepada:
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
Yang telah:
Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024
Jakarta, 10 Desember 2024
Menteri Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Natalius Pigai

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 2
1.3 Struktur Organisasi 3
1.4 Isu Strategis 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Rencana Strategis 15
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024 17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 19
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 21
2.5 Metode Pengukuran 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 30
3.2 Evaluasi Tahun ke-5 266
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 274
3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 278
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja 309
3.6 Realisasi Anggaran 318
BAB IV PENUTUP 338
4.1 Kesimpulan 338
4.2 Saran 339
LAMPIRAN 347
LAMPIRAN I 347
LAMPIRAN II 373

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya 3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember 7
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur 8
Gambar 4. Visi dan Misi 15
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya 16
Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance 30
Gambar 7. Perbandingan NPSS dan NP Tahun 2023 dan tahun 2024 31
Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan 2024 33
Gambar 9. Grafik Perbandingan Capaian Strategis dengan Balai Setara 36
Gambar 10. Persentase Obat Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak 41
Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2024 41
Gambar 12. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 42
Gambar 13. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak 46
Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2024 47
Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang 47
Gambar 16. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted 51
Gambar 17. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted 51
Gambar 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 52
Gambar 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 52
Gambar 20. persentase makanan yang aman dan bermutu 56
Gambar 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 57
Gambar 22. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 57
Gambar 23. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat 61
Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 62
Gambar 25. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 63
Gambar 26. Nilai Komponen Pendukung Indeks Kesadaran Masyarakat 67

Gambar 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 68
Gambar 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 69
Gambar 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 80
Gambar 30. Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 80
Gambar 31. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 81
Gambar 32. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 s.d 2024 81
Gambar 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020 hingga Tahun 2024 92
Gambar 34. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 93
Gambar 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 101
Gambar 36. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 101
Gambar 37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 105
Gambar 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 106
Gambar 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024 110
Gambar 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 111
Gambar 41. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2024 120
Gambar 42. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 120
Gambar 43. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 126
Gambar 44. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 127
Gambar 45. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 127
Gambar 46. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya 133

Gambar 47. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 133
Gambar 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 hingga Tahun 2024..... 140
Gambar 49. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 141
Gambar 50. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 148
Gambar 51. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Tahun - sebelumnya. 152
Gambar 52. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 153
Gambar 53. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2020 hingga tahun 2024 158
Gambar 54. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 159
Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman Tahun 2020 hingga Tahun 2024..... 166
Gambar 56. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 167
Gambar 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 hingga Tahun 2024..... 173
Gambar 62. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 173
Gambar 70. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 173
Gambar 57. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 hingga Tahun 2024 180
Gambar 58. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 181
Gambar 59. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 hingga Tahun 2024 186
Gambar 60. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 186
Gambar 64. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2024 192
Gambar 65. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Balai Setara dan Target Nasional 193
Gambar 66. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2024 203
Gambar 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2024..... 204
Gambar 68. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024 210

Gambar 69. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 211
Gambar 77. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 219
Gambar 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024..... 224
Gambar 72. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain225
Gambar 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 hingga Tahun 2023 230
Gambar 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional 231
Gambar 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2020 hingga tahun 2024 239
Gambar 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Surabaya dengan Balai Lain yang Sejenis/setara dengan target nasional 240
Gambar 77. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 244
Gambar 78. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2024..... 244
Gambar 79. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional 245
Gambar 87. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 245
Gambar 81. Realisasi Masing-masing Komponen pada Nilai EKA..... 246
Gambar 82. Perbandingan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 252
Gambar 83. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 256
Gambar 84. Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional 263

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan 5
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya 17
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 19
Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 22
Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024 32
Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai yang Setara 34
Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 37
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 40
Tabel 9. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 43
Tabel 10. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 44
Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 45
Tabel 12. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 49
Tabel 13. Rencana Aksi pada Indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat 49
Tabel 14. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 51
Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 53
Tabel 16. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 54
Tabel 17. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 55
Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 58
Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 59
Tabel 20. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan 59
Tabel 21. Realisasi Persentase Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 60
Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 64
Tabel 23. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 64
Tabel 24. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 64
Tabel 25. Realisasi Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 66
Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu 72

Tabel 27. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 72
Tabel 28. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu 72
Tabel 29. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 78
Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 84
Tabel 31. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 85
Tabel 32. Realisasi Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 90
Tabel 33. Jumlah Responden Per-Jenis Layanan tahun 2024 90
Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 96
Tabel 35. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 96
Tabel 36. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM 96
Tabel 37. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024 99
Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi 102
Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi 103
Tabel 40. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi 103
Tabel 41. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2024 104
Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 107
Tabel 43. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 107
Tabel 44. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan 107
Tabel 45. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024 109
Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 116
Tabel 47. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu 116
Tabel 48. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 119
Tabel 49. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 . 122

Tabel 50. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan..... 123
Tabel 51. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024..... 125
Tabel 52. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan..... 128
Tabel 53. Rencana Aksi Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan..... 129
Tabel 54. Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2024..... 132
Tabel 55. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja..... 135
Tabel 56. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) 136
Tabel 57. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024..... 139
Tabel 58. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja..... 143
Tabel 59. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 143
Tabel 60. Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 147
Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024..... 147
Tabel 62. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja..... 149
Tabel 63. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024..... 149
Tabel 64. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024..... 151
Tabel 65. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja 154
Tabel 66. Rencana Aksi pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan..... 154
Tabel 67. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2024..... 157
Tabel 68. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman..... 161
Tabel 69. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman..... 162
Tabel 70. Upaya Peningkatan Kinerja Pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman..... 163
Tabel 71. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2024..... 165
Tabel 72. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah desa pangan aman 168
Tabel 73. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman..... 169
Tabel 74. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2024..... 172
Tabel 75. **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**..... 174
Tabel 76. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 175

Tabel 77. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 179
Tabel 78. . Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 183
Tabel 79. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 183
Tabel 80. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 185
Tabel 81. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 187
Tabel 82. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 188
Tabel 83. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 190
Tabel 84. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 196
Tabel 85. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan 197
Tabel 86. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2024 202
Tabel 87. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya 205
Tabel 88. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya..... 206
Tabel 89. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2024 209
Tabel 90. Kategori Penilaian SAKIP 209
Tabel 91. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2023 211
Tabel 92. Hasil Penilaian AKIP BBPOM di Surabaya per Komponen 214
Tabel 93. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 215
Tabel 94. Rencana Aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya 216
Tabel 95. Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2024 218
Tabel 96. Kategori Penilaian Pengelolaan Kearsipan 218
Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024..... 219
Tabel 98. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya 220
Tabel 99. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2024 223
Tabel 100. Efiensi Anggaran pada Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya..... 227
Tabel 101. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya 227
Tabel 102. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 229
Tabel 103. Efiesiensi atas Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP 234
Tabel 104. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 234
Tabel 105. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya..... 238
Tabel 106. Realisasi indikator tahun 2024 dari Pusat Data dan Informasi 240

Tabel 107. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal 241
Tabel 108. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 241
Tabel 109. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2024 243
Tabel 110. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 247
Tabel 111. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran 247
Tabel 112. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 249
Tabel 113. Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024 251
Tabel 114. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024 252
Tabel 115. Efiensi Anggaran pada Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya 253
Tabel 116. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 253
Tabel 117. Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Surabaya tahun 2024 255
Tabel 118. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Surabaya tahun 2024 256
Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara 258
Tabel 120. Komponen Penilaian PDN 261
Tabel 121. Realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Surabaya tahun 2024 262
Tabel 122. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2020 hingga tahun 2024 262
Tabel 123. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri 264
Tabel 124. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja 264
Tabel 125. Tabel xx. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Trend Analysis) 266
Tabel 126. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis) 270
Tabel 127. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Strategis Tahun 2020 sampai dengan 2024 274
Tabel 128. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 278
Tabel 129. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 319
Tabel 130. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 323
Tabel 131. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 326
Tabel 132. Tingkat Efisiensi Kegiatan 329
Tabel 133. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 330

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial Masaraat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, BBPOM di Surabaya menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai kosumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi BBPOM di Surabaya dengan kebijakan penguatan kapasitas BBPOM di Surabaya untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Surabaya ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat,

dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 23 Tahun 2021 tanggal 08 Juni 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
b. Balai POM di Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 (enam) kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
c. Balai POM di Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 (lima) kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM

dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3 Struktur Organisasi

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 23 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Surabaya yang mengawal pencapaian 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4 Isu Strategis

a. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektlitas pengawasan Obat dan Makanan;

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

b. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 142 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan Balai Besar POM di Surabaya	S-2	Apoteker	D-IV / S-1 Lain	D-III	SMA sederajat	SMP sederajat
PNS dan CPNS	18	35	49	11	7	-
PPPK	-	-	12	-	-	-
PPNPN	3	-	5	2	-	-
Outsourcing	-	-	5	0	24	1
Total	21	35	71	13	31	1

Sumber Daya Lainnya

a. Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m2 dan luas bangunan 4.496,09 m2, didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya. Adapun Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya
   - Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
   - Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
   - Laboratorium Pengujian Covid-19
   - Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.
   - Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No.SP DIPA- 063.01.2.432784/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 sebesar Rp73.956.636.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selama tahun 2024 terdapat beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang menyebabkan perubahan pagu DIPA yaitu pada tanggal 16 Agustus 2024 Balai Besar POM di Surabaya mengalami penurunan pagu menjadi Rp71.756.636.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan pada tanggal 5 November 2024 dilakukan revisi kembali sehingga pagunya menjadi Rp71.617.386.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Kedua revisi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai pada Satker lain di Lingkungan Badan POM.

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 hingga 111404' Bujur Timur dan 7012' hingga 8048' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km2. Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya Balai POM di Kediri dan Balai POM di Jember

Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini.

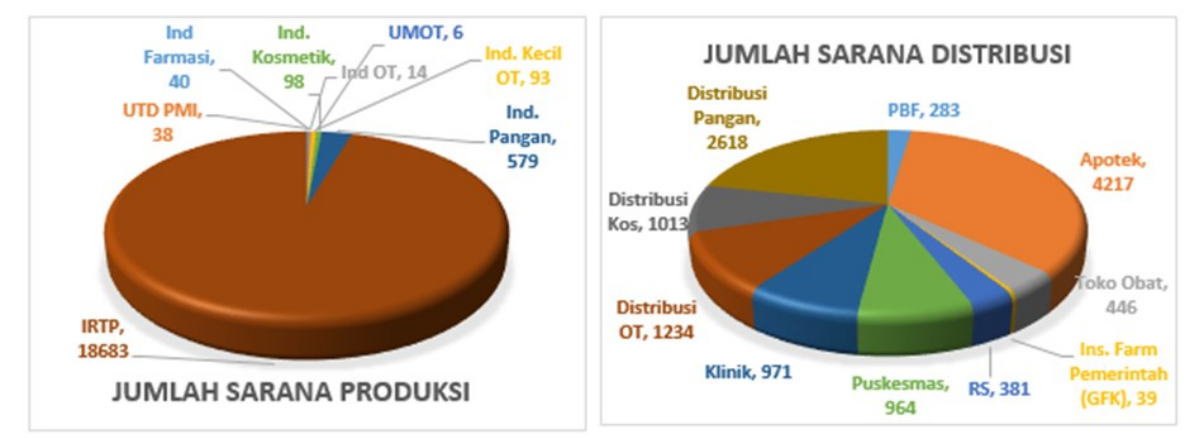

Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain:

1. **Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa**

   Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

   Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible.

   BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

   Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan

penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. **Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online**

   Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. **Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

   Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. **Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa**

   Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program

Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 572 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. **Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)**

   Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya terus berkomitmen untuk mempertahankan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), dengan upaya mempertahankan dan mengembangkan 31 inovasi yang sudah berjalan.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

6. **Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)**

   Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan

sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. **UMKM di Jawa Timur**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantren preneur di bawah naungan Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan

pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara siginfikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. **Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak**

   Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Surabaya turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.

9. **Program Makan Bergizi Gratis (MBG)**

   MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama.

Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Program MBG juga dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja sama lintas sektor, yaitu adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. BBPOM di Surabaya siap untuk melakukan pengawalan pada program ini sebagai wujud dukungan untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth, Internal Process, Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2020-2024 dan Reviu Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :

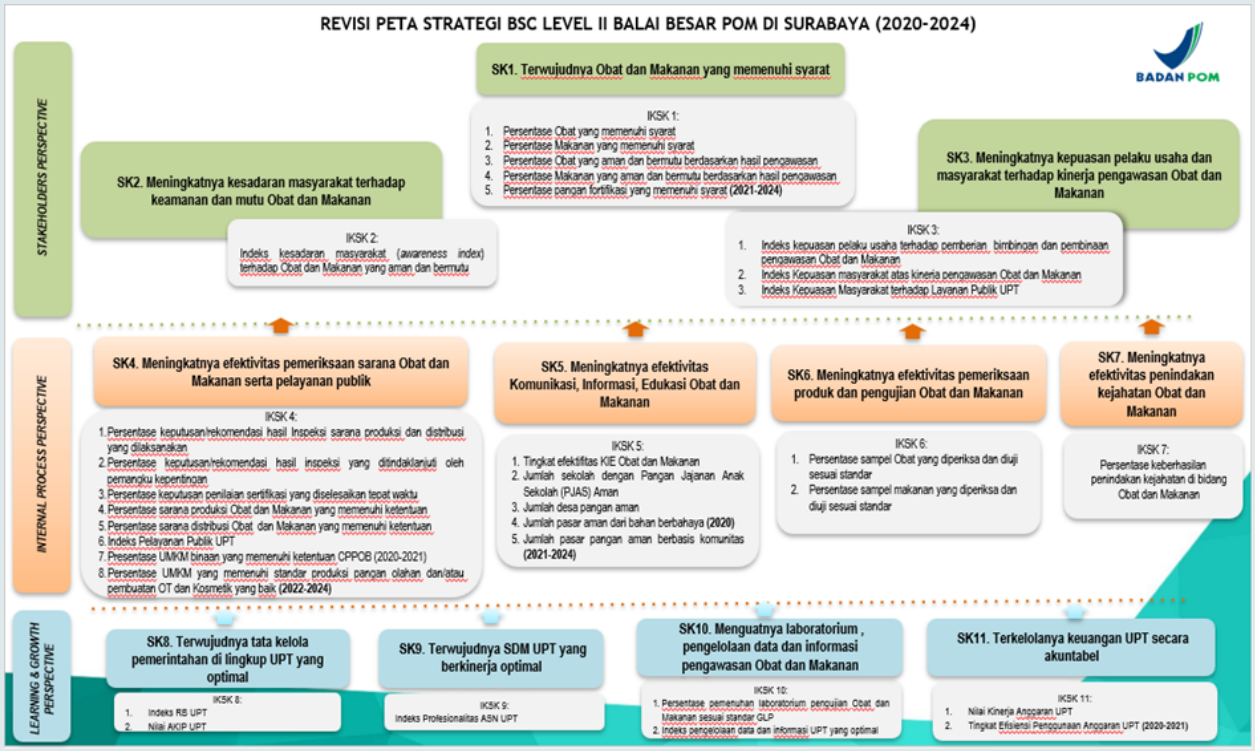

Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 34 (tiga puluh empat) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024.

Pada tahun 2021, telah dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 BBPOM di Surabaya mengacu pada Reviu Renstra BPOM dan berlaku mulai 01 Oktober 2021. Reviu Renstra BBPOM di Surabaya tidak merubah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, hanya terdapat sedikit perubahan pada kebijakan dan strategi, serta perubahan nomenklatur indikator dan perubahan jumlah indikator dari 29 indikator menjadi 34 indikator.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,03
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	450
		Jumlah desa pangan aman	47
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	32
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92,20
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	87,10
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	96.40

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 71.756.636.000,- (Tujuh puluh satu milyar tujuh ratuh lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2024 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya. Jika dibandingkan dengan RKT tahun 2024, terdapat perubahan target PK tahun 2024 pada indikator Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPOM per 2 Januari 2023. Perubahan target dari 4,60 menjadi 4,70 dikarenakan adanya perubahan instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.54 Persen
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.62 Persen
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.81 Persen
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	85.3 Persen
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85 Persen
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.3 Persen
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89.42 Persen

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96 Persen
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.86 Persen
		Indeks Pelayanan Publik	4.95 Indeks
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97 persen
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 persen
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.2 Persen
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138 Lembaga
		Jumlah desa pangan aman	45 Lembaga
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30 Lembaga
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 persen
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 persen
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 persen
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.74 persen
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3 indeks
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84.5 indeks
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.4 indeks

	Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.14 indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.5 indeks
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	95.23 persen
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	82.25 persen
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.5 persen
10	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	90.86 persen
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	90.31 persen
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	96.43 persen
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90 Persen
		Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	60 persen
	Kegiatan :		Anggaran :
	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		43.786.795.000
	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		27.969.841.000

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu di-*monitoring* dan dievaluasi setiap bulan melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2024 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat		92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	92,54	731.065.440
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	90,62	441.144.400
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	94,81	271.327.560
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan		85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	85,30	109.206.100
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	73.227.000
7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												84,50	420.739.000
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												96,40	376.612.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												80,14	477.951.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												92,50	99.058.000

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NO	SASARAN STRATEGIS		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	60.560.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	89,42	252.781.600
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	623.046.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	494.501.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	70,86	806.867.000
		Indeks Pelayanan Publik							4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95	182.700.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		10,80	31,10	50,80	60,00	70,60	76,50	83,80	89,10	91,30	96,00	97,00	420.728.000
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota				44,43	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	95,00	43.092.400
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	95,20	12.303.179.000

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NO	SASARAN STRATEGIS		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
	edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman			5,00	23,00	43,10	50,00	60,00	68,10	75,00	85,80	95,00	138	633.934.000
		Jumlah desa pangan aman			10,00	22,50	40,63	52,50	62,50	71,25	80,00	85,00	95,00	45	1.254.377.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00	0,00	3,30	15,00	41,10	52,90	66,20	72,90	82,90	100,00	100,00	30	512.560.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	11,00	20,00	27,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	969.027.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,00	10,00	20,00	30,00	38,00	45,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00	100,00	546.030.500
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7,73	10,63	20,30	22,40	22,99	31,94	37,62	48,55	59,06	63,57	66,82	70,00	1.510.697.000
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya												95,23	28.711.864.580
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya												85,25	2.128.134.000
		Nilai Pengelolaan Kearsipan												96,50	42.588.000
10	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya												90,86	379.874.300
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												88,74	16.233.794.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	239.457.600
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	0,00	58,00	63,00	43,50								90,31	215.512.430
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)												96,43	108.141.360

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NO	SASARAN STRATEGIS		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Anggaran
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												90,00	65.469.730
		Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri												60,00	17.389.000
															71.756.636.000

2.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 85 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	●
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	●
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	●
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	●
Sangat Kurang	<50	●

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada data base *online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi *e-performace*.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC). Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi Simakin pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level pimpinan eselon 2 hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara menganalisis Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Organisasi disertai dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) dan Nilai Perspektif (NP), dengan mengacu pada aplikasi SIMETRIS, membandingkan NPSS tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, membandingkan realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra, membandingkan realisasi kinerja 2024 dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, melakukan upaya perbaikan, melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian, melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyampaikan informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya.

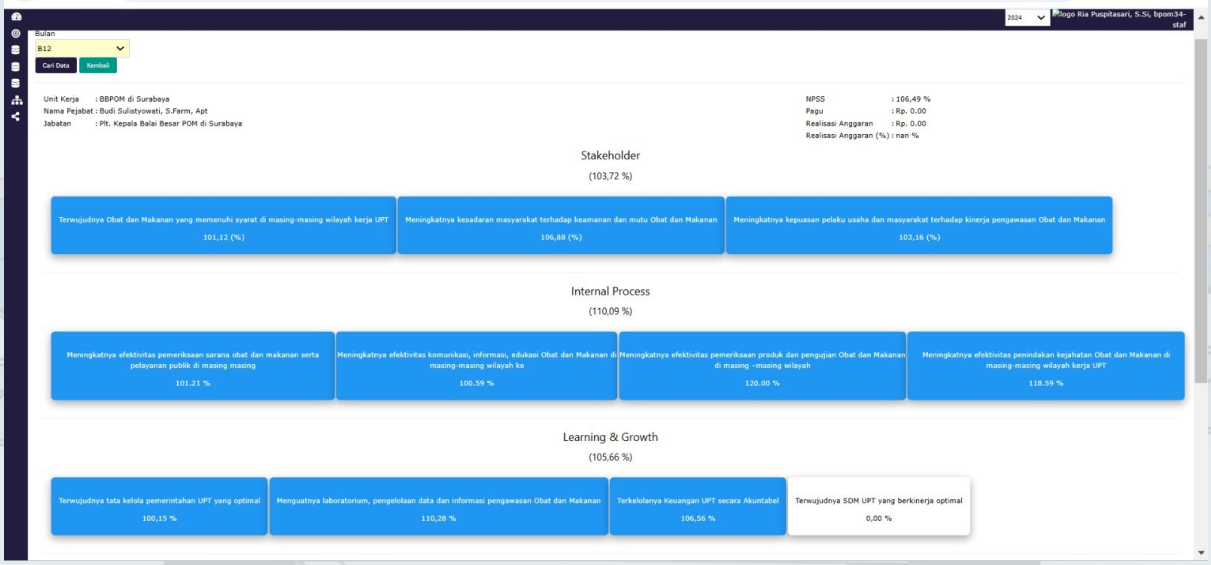

Gambar 6. Pencapaian Sasaran Strategis per Perspektif pada Aplikasi e-Performance

Berdasarkan Aplikasi *e-performance* yang merupakan aplikasi yang perencanaan dan kinerja bagian dari aplikasi SIMETRIS yang juga diimplementasikan di BBPOM di Surabaya, diperoleh nilai NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2024 sebesar 106,49% dengan Predikat **Istimewa.** Nilai tersebut terdiri atas NP Perspektif Stakeholder sebesar 103,72% dengan kategori **Sangat Baik**, NP Perspektif Internal Proses sebesar 110,09% dengan kategori **Sangat Baik,** dan NP Perspektif Learning & Growth sebesar 105,66% dengan kategori **Sangat Baik.** Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target dari semua perspektif.

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

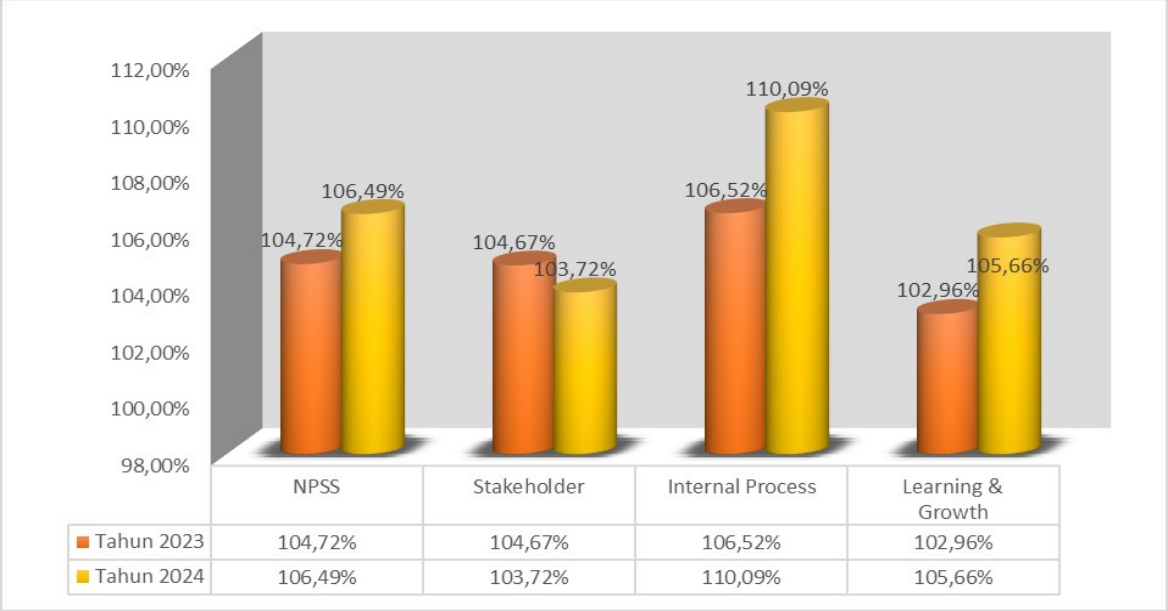

Gambar 7. Perbandingan NPSS dan NP Tahun 2023 dan tahun 2024

NPSS BBPOM di Surabaya tahun 2024 naik sebesar 1,77% jika dibandingkan NPSS tahun 2023. Dari 3 (tiga) NP terdapat 2 (dua) NP yang mengalami kenaikan pada tahun 2024, yaitu NP Internal Proses naik sebesar 3,57% dan NP *Learning & Growth* naik sebesar 2,70%, sedangkan 1 (satu) NP lainnya, yaitu NP Stakeholder mengalami penurunan pada tahun 2024 sebesar -0,95%.

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target atas 11 sasaran strategis dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No.	PERSPEKTIF / SASARAN STRATEGIS	NP/NSS	KRITERIA
1	**Stakeholder**	**103,72**	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	101,12	Sangat Baik
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	106,88	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	103,16	Sangat Baik
2	**Internal Process**	**110,09**	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	101,21	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	100,59	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	120	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	118,59	Sangat Baik
3	**Learning Growth**	**105,66**	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	100,15	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	Exclude perhitungan NPSS
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	110,28	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	106,56	Sangat Baik
NPSS		**106,49**	**Sangat Baik**

Dari 11 sasaran strategis, terdapat 10 (sepuluh) sasaran strategis yang mencapai kriteria **Sangat baik**, dan 1 (satu) sasaran strategis yang Exclude dari perhitungan NPSS yaitu sasaran strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal. Capaian sasaran strategis tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian sasaran strategis tahun 2023, diperoleh hasil seperti grafik di bawah ini:

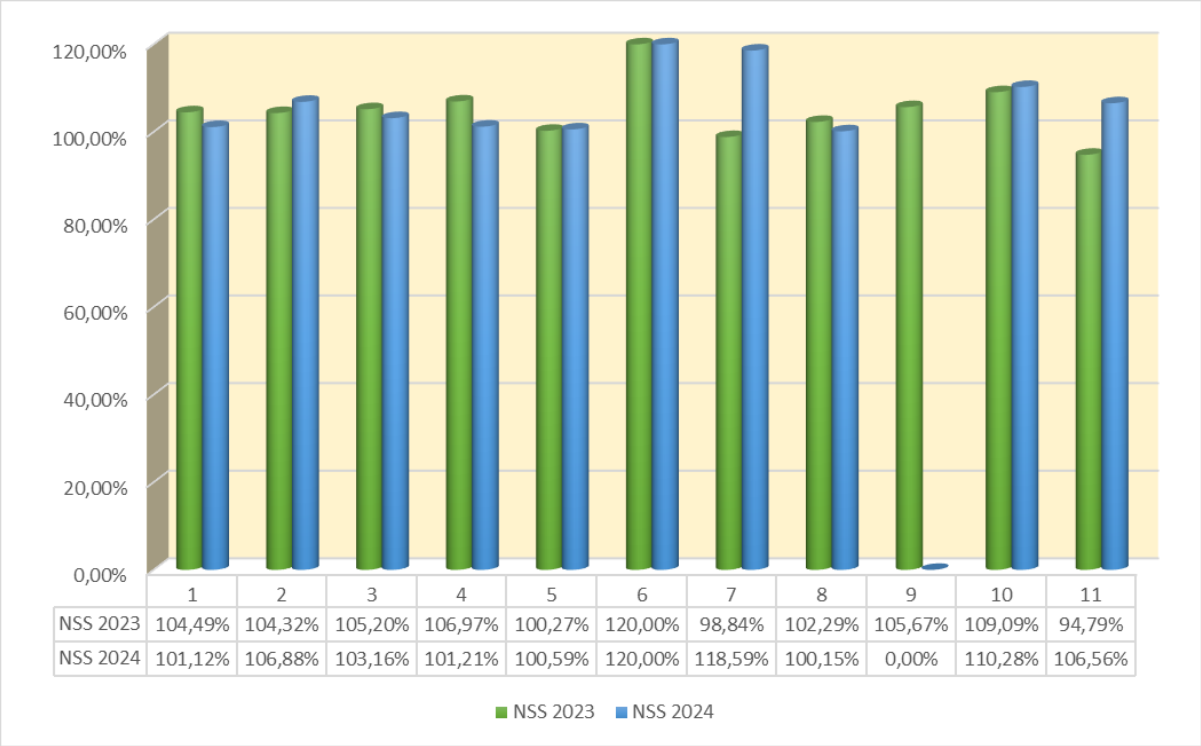

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NSS 2023	104,49%	104,32%	105,20%	106,97%	100,27%	120,00%	98,84%	102,29%	105,67%	109,09%	94,79%
NSS 2024	101,12%	106,88%	103,16%	101,21%	100,59%	120,00%	118,59%	100,15%	0,00%	110,28%	106,56%

Gambar 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023 dengan 2024

Terdapat 5 (lima) NSS tahun 2024 yang naik dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran strategis:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 2,56%
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 0,32%
- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya naik sebesar 19,75%
- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan naik sebesar 1,19%
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel naik sebesar 11,77%

Terdapat 1 (satu) NSS tahun 2024 yang sama dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

Terdapat 5 (lima) NSS tahun 2024 yang turun dibandingkan tahun 2023, yaitu pada sasaran strategis:

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 3,37%
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 2,04%
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya turun sebesar 5,76%
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal turun sebesar 2,14%
- Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal turun sebesar 105,67% (Exclude dari perhitungan NPSS).

Bila dibandingkan dengan pencapaian 4 (empat) balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan Balai yang Setara

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM DI SURABAYA	CAPAIAN BBPOM DI JAKARTA	CAPAIAN BBPOM DI SEMARANG	CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG	CAPAIAN BBPOM DI YOGYAKARTA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	101,12	99,52	101,15	101,16	102,95
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	106,88	100,11	102,64	108,80	101,81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	103,16	103,54	102,03	101,44	100,85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	101,21	102,32	102,97	101,82	103,35

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM DI SURABAYA	CAPAIAN BBPOM DI JAKARTA	CAPAIAN BBPOM DI SEMARANG	CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG	CAPAIAN BBPOM DI YOGYAKARTA
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	100,59	100,23	100,14	100,00	100,01
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	118,59	105,86	107,18	85,98	103,03
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	100,15	101,07	97,83	99,51	99,48
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	-	-	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	110,28	111,84	111,46	110,41	111,56
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	106,56	108,76	100,91	114,51	114,85
	NPSS	**106,49**	**105,13**	**104,77**	**104,63**	**105,70**

Keterangan : Capaian dengan kriteria **Cukup**

Dari data tabel Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dengan balai yang setara di atas dihasilkan grafik perbandingan sebagai berikut:

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

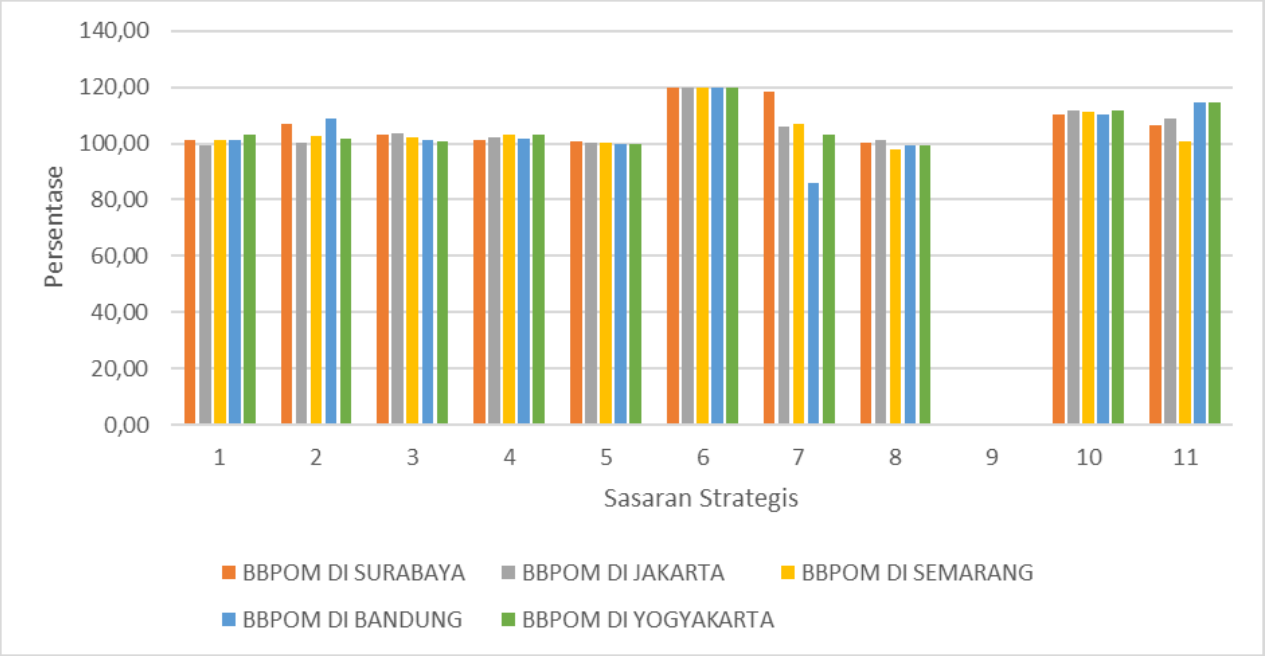

Gambar 9. Grafik Perbandingan Capaian Strategis dengan Balai Setara

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diketahui bahwa diantara 5 Balai yang diperbandingkan terdapat masing-masing 3 sasaran strategis pada BBPOM di Jakarta, BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta yang targetnya belum mencapai 100% dengan informasi sebagai berikut:

- 1 Balai (BBPOM di Jakarta) tidak mencapai target pada sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT, dimana IKU yang diukur adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan dan Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.
- 1 Balai (BBPOM di Bandung) tidak mencapai target pada sasaran strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT, dimana IKU yang diukur adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
- 3 Balai (BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta) tidak mencapai target pada sasaran strategis Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal, dimana IKU yang diukur adalah Indeks RB dan Nilai AKIP

Secara keseluruhan, jika dilihat dari perhitungan NPSS kelima Balai diketahui bahwa NPSS tertinggi diraih oleh BBPOM di Surabaya, dan NPSS terendah pada BBPOM di Bandung.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah diperjanjian 11 Sasaran Strategis dan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,54	93,07	100,58
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,62	89,83	99,13
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,81	91,93	96,96
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,30	87,89	103,04
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,00	105,88
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,50	90,31	106,88
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,40	97,26	100,89
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,14	86,56	108,01
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,50	93,04	100,58

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	98,25	100,97
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,42	94,43	105,60
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	93,63	97,53
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,98	102,83
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	66,75	94,21
		15	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,95	5,00	101,01
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,00	100,00	103,09
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,18	104,40
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,20	97,43	102,34
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00
		20	Jumlah desa pangan aman	45	45	100,00
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	83,01	118,59
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	95,23	93,98	98,69
		26	Nilai AKIP UPT	85,25	85,37	100,14
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,50	98,06	101,62
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,86	86,37	95,06
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,74	89,23	100,55
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	120,00
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,31	93,51	103,54
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,43	90,00	93,33
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90,00	98,44	109,38
		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	78,29	120,00

Dari 34 (tiga puluh empat) indikator terdapat 24 (dua puluh empat) indikator BBPOM di Surabaya tahun 2024 yang mencapai target dengan kategori **Sangat Baik**, 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kategori **Baik,** dan 7 (tujuh) indikator mencapai target dengan kategori **Cukup.** Kategori **Sangat Baik** dan **Baik** menunjukkan bahwa indikator telah mencapai target tahun 2024.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja UPT

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Surabaya telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan NSS sebesar **101,12%** dan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.**

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,54	93,07	100,58		Sangat Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

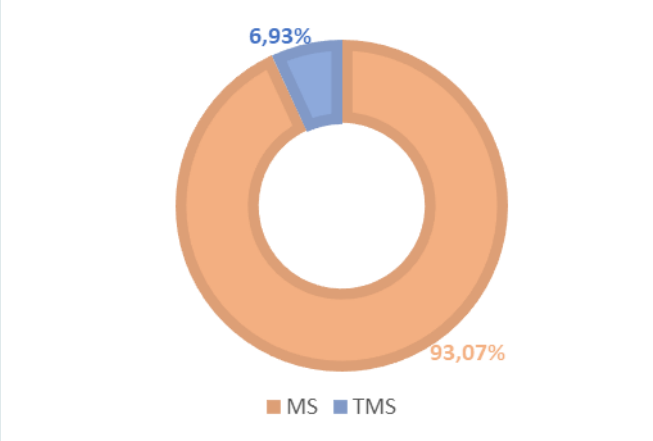

Gambar 10. Persentase Obat Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 93,07%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 1790 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 1666 sampel MS (memenuhi syarat), 124 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji sebanyak 100 sampel (Obat Tradisional 87 sampel; kosmetik 9 sampel; obat 3 sampel dan Suplemen Kesehatan 1 sampel), tidak memenuhi ketentuan penandaan 23 sampel (obat tradisional 10 sampel; obat 7 sampel; kosmetik 5 sampel dan Suplemen Kesehatan 1 sampel) dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel yaitu obat tradisional. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 **telah mencapai target** yaitu 100.58 % dengan kriteria "**Sangat Baik".**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

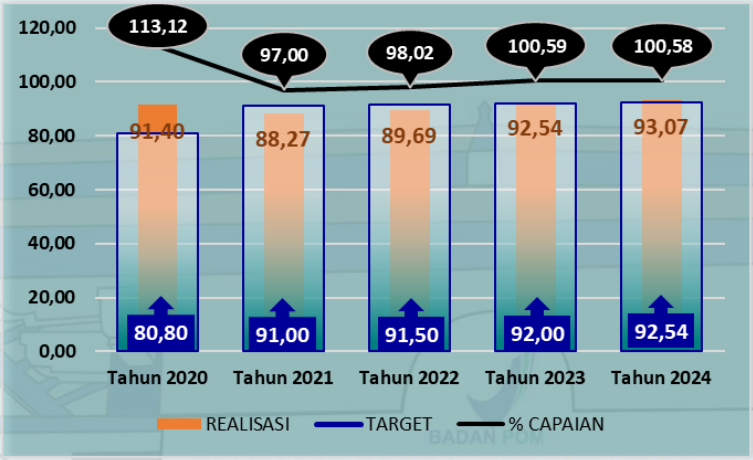

Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020, namun realisasi naik di tahun 2022 dan tahun 2023 begitu juga dengan capaiannya sehingga berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi data base untuk target renstra di tahun 2024 yaitu target awal 92,50% menjadi 92,54 %.

Penurunan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2021 disebabkan adanya kenaikan target dari IKU tahun 2020 ke 2021 yaitu 80,8% menjadi 91,00%. Untuk Realisasi Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu dari 92,54% menjadi 93,07% sehingga indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat telah memenuhi target tahun 2024 yaitu dengan capaian sebesar 100,58% dengan kriteria **"Sangat Baik".**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

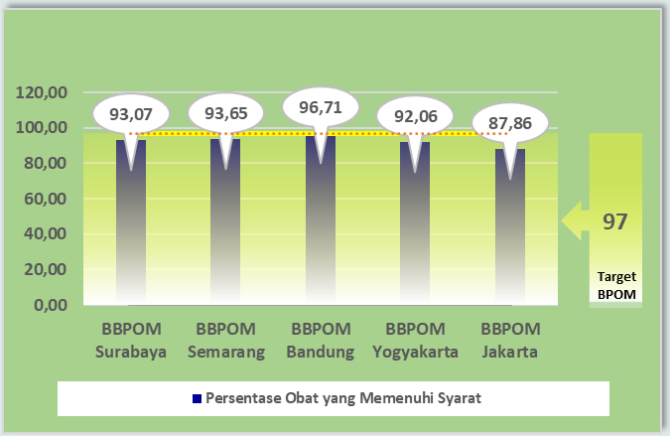

Gambar 12. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Jakarta. Realisasi kinerja semua Balai sesuai tabele di atas berada di bawah target BPOM/target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 sudah mencapai target dengan kriteria Sangat Baik. Dari 1790 sampel acak obat yang di sampling oleh BBPOM di Surabaya dan dilakukan pemeriksaan penandaan dan pengujian didapatkan hasil sebagai berikut yaitu 1666 sampel MS (memenuhi syarat), 124 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 100 sampel (Obat Tradisional 87 sampel; kosmetik 9 sampel; obat 3 sampel dan Suplemen Kesehatan 1 sampel), tidak memenuhi ketentuan penandaan 23 sampel (obat tradisional 10 sampel; obat 7 sampel; kosmetik 5 sampel dan Suplemen Kesehatan 1 sampel) dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 1 sampel yaitu obat tradisional.

Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi ketentuan penandaan adalah sampel obat tradisional. Hasil uji yang tidak memenuhi syarat dengan parameter uji mikrobiologi yaitu enterobacteraceae dan ALT dan tidak memenuhi ketentuan penandaan disebabkan antara lain pada penandaan tidak

mencantumkan alamat produsen, tidak ada kode produksi/nomor batch, klaim berlebihan, tidak mencantumkan expired date, tidak sesuai dengan label yang disetujui BPOM

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, BPOM di Kediri, BPOM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

Dari target 1786 sampel acak yang harus disampling dan diuji tahun 2024, realisasinya adalah sebesar 1790 (100,22%), kelebihan sampling obat sebanyak 4 (empat) sampel disebabkan ditemukan adanya sampel di peredaran yang sudah lama tidak di sampling.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 9. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Obat yang memenuhi syarat	717.991.164	689.144.633	95,98	100.58	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 10. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (acak)	317.427.615	36	kali/trip	36	Perjalanan sampel di lapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
					B	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	6.020.000	1	kali/trip	1	
					C	Perkuatan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar	5.732.000	1	kali/trip	1	
					D	Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.040.000	1	kali/trip	2	Revisi
					E	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan	6.020.000	1	kali/trip	1	
		Pengujian/Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	F	Perkuatan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024	10.920.000	1	kali/trip	1	
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	385.728.955	1	Paket Lelang	1	

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase Obat yang Memenuhi Syarat antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan dengan mengundang pelaku usaha khususnya pelaku usaha obat tradisional di Jawa Timur dalam forum FGD sehingga diharapkan pelaku usaha obat tradisonal dapat menerapkan aturan sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap hasil uji maupun terkait penandaan pada label produk

Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai POM Kediri, Balai POM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Dari target 1786 sampel acak yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 1790 (100,22%) . Kelebihan sampling obat disebabkan ditemukan adanya produk obat yang sudah lama tidak disampling beredar dipasaran

g. Upaya peningkatan kinerja.

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya dan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi capaian kinerja Lapkin interim 2024 diperoleh informasi bahwa target Lapkin 2024 telah tercapai yaitu 100,58 %

Akan tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB dan pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2025 dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 11. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	**90,62**	**89,83**	**99,13**		Cukup

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

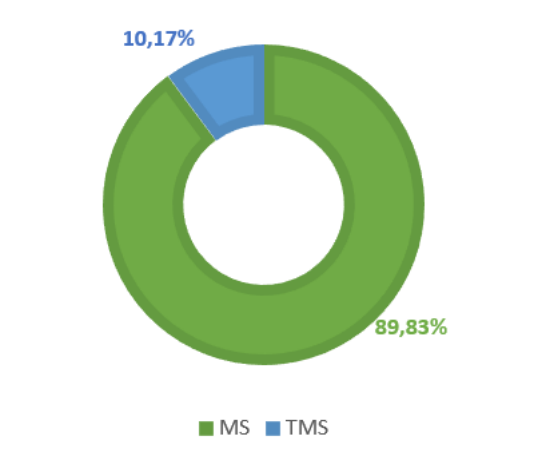

Gambar 13. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Acak

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 89,83%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 757 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 680 sampel MS (memenuhi syarat), 77 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi memenuhi syarat hasil uji 62 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 11 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan penandaan sebanyak 4 sampel. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 **belum mencapai target** yaitu 99,13 % dengan kriteria "**Cukup".**

b. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.**

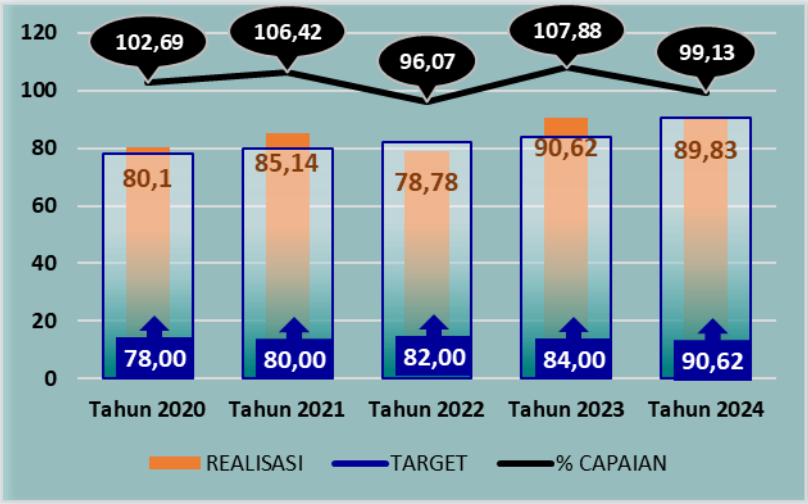

Gambar 14. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat perbedaan target Renstra dari 86% menjadi 90,62% pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi mencapai 90,62% sehingga dijadikan baseline di tahun 2024. Penurunan capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2024 disebabkan karena kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap produk pangan baik terhadap mutu produk pangan maupun penandaan pada label produk pangan.

Untuk Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari 90,62% menjadi 89,83% sehingga Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat belum memenuhi target yaitu dengan capaian 99,13%. dengan kriteria **"Cukup"**

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.**

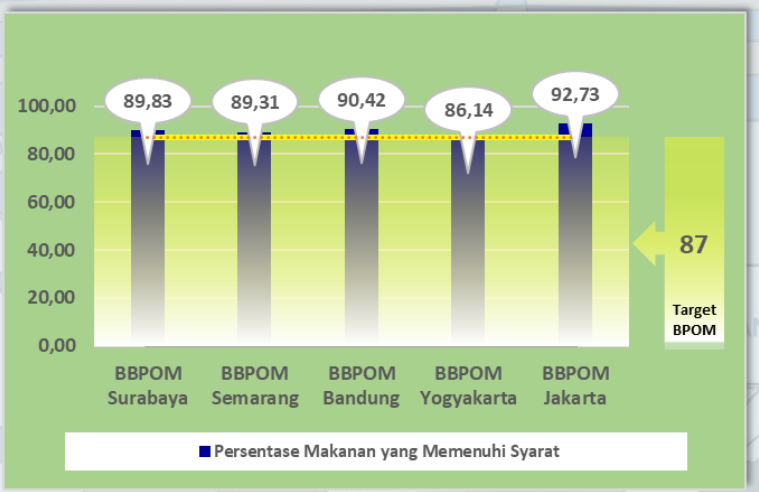

Gambar 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang

Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Jakarta dan yang terendah adalah BBPOM di Yogyakarta dan hanya BBPOM di Yogyakarta

yang realisasi dari ke 5 UPT berada di bawah target BPOM/target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 **belum mencapai target** yaitu 99,13 % dengan kriteria "**Cukup".** Dari pemeriksaan 757 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 680 sampel MS (memenuhi syarat), 77 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi memenuhi syarat hasil uji 62 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 11 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan penandaan sebanyak 4 sampel.

Pada pengujian kimia tidak memenuhi syarat hasil uji antara lain:

- Sampel manisan, dengan TMS Sakarin dan Siklamat yang melebihi batas dan Rasio BTP Pemanis.
- Sampel pangan olahan dengan nomor izin edar PIRT (TMS pemanis Siklamat dan Rasio Pengawet),
- Sampel dengan nomor izin edar MD (mengandung pengawet Benzoat yang melebihi batas) dan sampel dengan nomor izin edar dari Kementan (pala bubuk TMS Aflatoksin total).
- Sampel dengan kategori gula kelapa dengan No. Izin Edar PIRT dengan TMS Uji Sulfit
- Sampel dengan kategori AMDK dengan TMS Mikrobiologi A. Pseudomonas
- Sampel kategori bumbu dengan TMS Pengawet dan Mikrobiologi
- Beberapa sampel kategori pangan berhahan dasar daging sapi (bakso sapi, abon sapi), teh, jelly,
- Enzim Diastase dan Hidroksi Metil Furfural pada madu.
- Sedangkan TMS Mikrobiologi pada parameter Salmonella, E. Coli, Angka Enterobacteriaceae dan Ankga Kapang Khamir (AKK)
- Sesuai Pedoman Sampling, bahwa pada sampel acak dilakukan evaluasi penandaan sehingga hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan hasil uji akhir.
- TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya: mencantumkan klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 12. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	439.429.505	434.994.840	98,99	99,13	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran untuk pencapaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat efisien karena % realisasi anggaran lebih rendah dari pada % capaian indikator. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran reagen kegiatan Pengujian Laboratorium Sampel Makanan dan kegiatan Pengadaan Sampel Makanan. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 13. Rencana Aksi pada Indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	335.624.710	1	Paket Lelang	1	
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	103.804.795	12	kali/trip	12	Perjalanan sampel di lapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan acak dan Pengadaan sampel makanan acak, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan acak adalah 755 sampel, dengan realisasi sampling adalah 757 sampel atau 100,26%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel

regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas.

7. Upaya peningkatan kinerja.

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II, diperoleh informasi bahwa target triwulan II sudah tercapai. Sedangkan pada triwulan III target capaian tidak tercapai, dikarenakan penambahan sampel yang diuji dengan hasil TMS yang signifikan. Sampai dengan TW IV target belum tercapai, terdapat 77 sampel yang tidak Memenuhi Syarat dengan Nomor Izin Edar MD, ML, PIRT dan 1 (satu) dengan nomor izin edar dari Kementan. Terdapat beberapa sampel dengan Nomor Izin Edar MD yang diproduksi oleh sarana yang masuk dalam cakupan wilayah BBPOM Surabaya. Sudah dilakukan Pemeriksaan sarana terkait produk pangan olahan dengan hasil uji yang TMS, misalnya ke produsen madu di tanggal 24 November 2024. Untuk produk pangan dengan no izin PIRT telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penerbit PIRT atau ke produsen PIRT yang berada dalam cakupan UPT BBPOM/BPOM lain.

BADAN POM
AI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 14. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,81	91,93	96,96		Cukup

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Obat MS = (Jumlah Sampel Targeted Obat MS dibagi Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

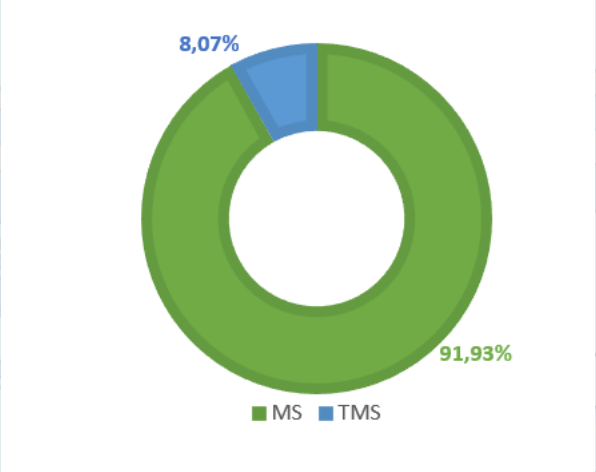

Gambar 16. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat pada Sampel Targeted

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 adalah 91,93%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 669 sampel targeted obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 615 sampel MS (memenuhi syarat), 54 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian tidak memenuhi syarat hasil uji 29 sampel, tidak memenuhi ketentuan penandaan 21 sampel dan tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 4 sampel).

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2024 tidak mencapai target yaitu 96,96 % dengan kategori Cukup.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Terdapat kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding 2020, namun terjadi penurunan di tahun 2022, sedangkan capaian terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Namun terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 yang cukup signifikan yaitu dari realisasi 86,02% di tahun 2022 menjadi 94,81% di tahun 2023. Berdasarkan realisasi 2023 tersebut, maka target 2024 dinaikkan menjadi 94,81 % dari target awal renstra yaitu 92,3 %

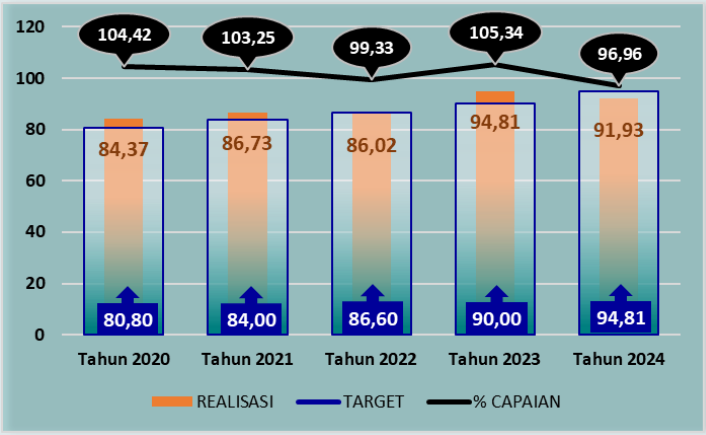

Gambar 18. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Untuk Realisasi Persentase Obat Yang aman dan bermutu pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu dari 94,81% menjadi 91,93% sehingga Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tidak memenuhi target tahun 2024 yaitu dengan capaian 96,96% dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

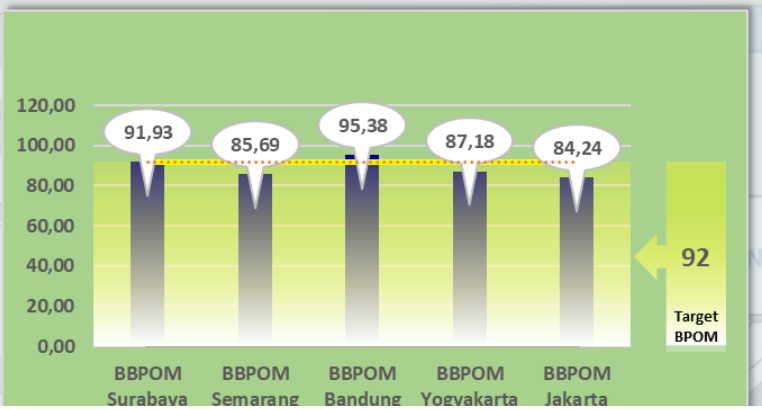

Gambar 19. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung (di atas target nasional) dan

yang terendah adalah BBPOM di Jakarta dan secara keseluruhan realisasi IKU pada 4 (empat) Balai termasuk BBPOM di Surabaya di bawah target Nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 tidak mencapai target dengan kategori Cukup. Dari 669 sampel obat targeted yang disampling terdapat 29 sampel Tidak Memenuhi Syarat Uji (Obat Tradisonal 18 sampel; kosmetik 8 sampel; obat 2 sampel dan rokok 1 sampel), 21 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan (kosmetik 15 sampel; obat tradisonal 6 sampel) dan 4 sampel Tidak Memenuhi Syarat Uji dan Tidak memenuhi Ketentuan Penandaan yaitu obat tradisional.

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Surabaya, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

Dari target 665 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 669 (100,60%) sampel yang disampling dan diuji, realisasi lebih besar dari target disebabkan pemenuhan sampel untuk verifikasi dan ruang lingkup pengujian pada sampel obat.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 15. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	267.718.836	256.962.771	95,98	96,96	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme

revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 16. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (targeted)	118.359.885	36	kali/trip	36	Perjalanan sampel di lapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (targeted)	143.827.545	1	Paket Lelang	1	

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang aman dan bermutu antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan. Dapat

mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2024, target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai, terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel obat tradisional dan penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik. TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu.

Pada tahun 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 17. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,30	87,89	103,04		Sangat Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

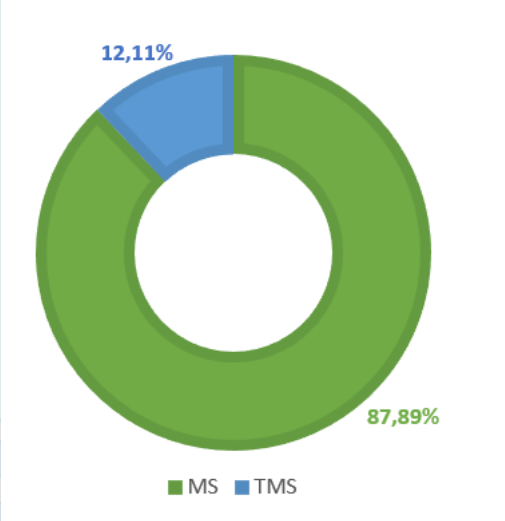

Gambar 20. persentase makanan yang aman dan bermutu

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 190 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 167 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 23 TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di tahun 2024 telah mencapai target yaitu 103,04 % dengan kategori "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

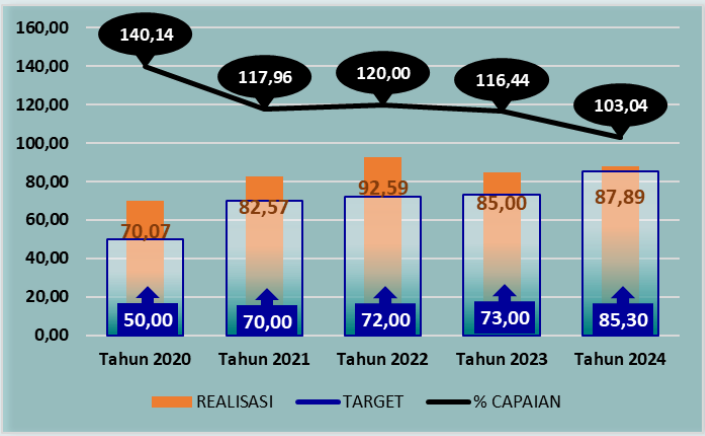

Gambar 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat perbedaan target Renstra dari 75% menjadi 85,30% pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi mencapai 85% dari target 73% sehingga dijadikan baseline di tahun 2024.

Indikator Persentase Makanan Yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan target tahun 2024 mengalami kenaikan meskipun target juga dinaikkan sehingga mencapai target dengan capaian sebesar 103,04% dan kategoti "**Sangat Baik**".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

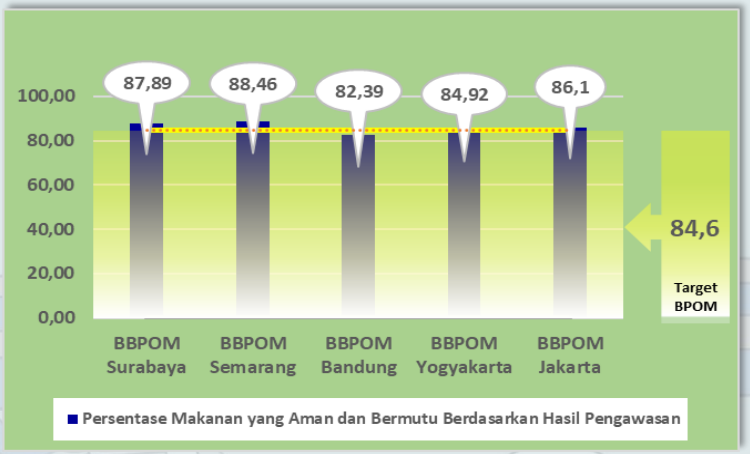

Gambar 22. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Realisasi BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta telah melebihi target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga tahun 2024 telah mencapai target yaitu 103,04% dengan kategori **Sangat**

Baik. Dari pemeriksaan 190 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 167 sampel MS (memenuhi syarat) dan 23 sampel tidak memenuhi syarat hasil uji.

Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdapat pada:

- 4 sampel UMKM (TMS Mikrobiologi E Coli dan ALT)
- 5 sampel PJAS TMS Mikrobiologi Angka E. Colli
- 4 Air Baku/AMIU TMS Mikrobiologi Angka E coli, dan koliform
- 2 sampel terdeteksi DNA Babi
- 2 sampel kasus TMS mengandung Formalin pada ikan teri dan cumi
- 6 sampel local spesifik TMS mengandung pengawet yang melebihi batas, boraks dan HMF, Enzim Diastase

Sampel PJAS merupakan sampel yang disampling di sekolah yang sudah diintervensi oleh BBPOM di Surabaya di Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Nganjuk sehingga masih perlu dilakukan pendampingan kepada sekolah-sekolah tersebut agar PJAS yang dikonsumsi anak sekolah seluruhnya aman.

Upaya lain yang telah dilakukan adalah bahwa BBPOM di Surabaya tetap konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108.760.995	107.663.393	98,99	103,04	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada

tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium, sehingga penyerapan anggaran maksimal Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 19. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	83.068.790	1	Paket Lelang	1	
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (Targeted)	25.692.205	12	kali/trip	12	Perjalanan sampel di lapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus

Kegiatan yang menunjang IKU Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah Pengujian laboratorium sampel makanan targeted dan Pengadaan sampel makanan targeted, selain itu melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB. Target pengadaan sampel makanan targeted adalah 190 sampel, dengan realisasi sampling adalah 190 sampel atau 100,00%. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Surabaya, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BPOM di Kupang, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak sampel yang harus diuji BBPOM di Surabaya sedangkan sarana prasarana sangat terbatas

g. Upaya peningkatan kinerja.

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu tercapai

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III dan IV tahun 2024, target IKU Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil Pengawasan telah tercapai. Pada tahun 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPPOB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 21. Realisasi Persentase Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,00	105,88		Sangat Baik

Persentase Pangan Fortifikasi diperoleh dengan rumus :

% Makanan MS = (Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS dibagi Total Sampel Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji) x 100%

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai Besar POM di Surabaya. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

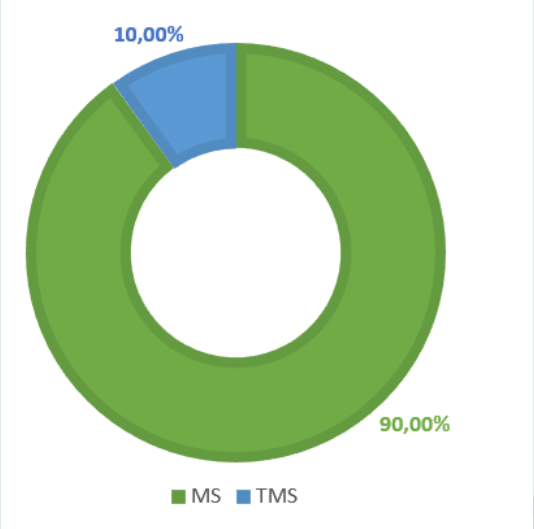

Gambar 23. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat

Realisasi persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2024 sebesar 90,00%. Persentase tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan 110 sampel yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 99 sampel MS (memenuhi syarat), 11 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 Tidak Mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 105,88% dan kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

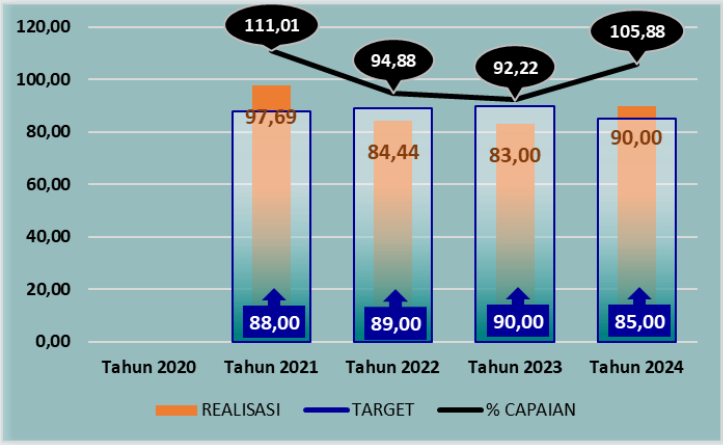

Gambar 24. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat perubahan target dari target Renstra 90% menjadi 85% dikarenakan selama tahun 2022 dan 2023 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tidak tercapai sehingga diusulkan penurunan target

Terdapat penurunan realisasi di tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan 2021, begitu juga dengan capaiannya. Penurunan capaian persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 dan 2023 disebabkan adanya penambahan parameter uji di Pedoman Sampling tahun 2022 dan 2023 dibandingkan dengan Pedoman Sampling di tahun 2021. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu dari 83,0% menjadi 90% sehingga Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat memenuhi target tahun 2024 dengan capaian sebesar 105,88% dan kategori **Sangat Baik.**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Namun Realisasi dari ke 5 UPT BBPOM memenuhi target BPOM/target nasional).

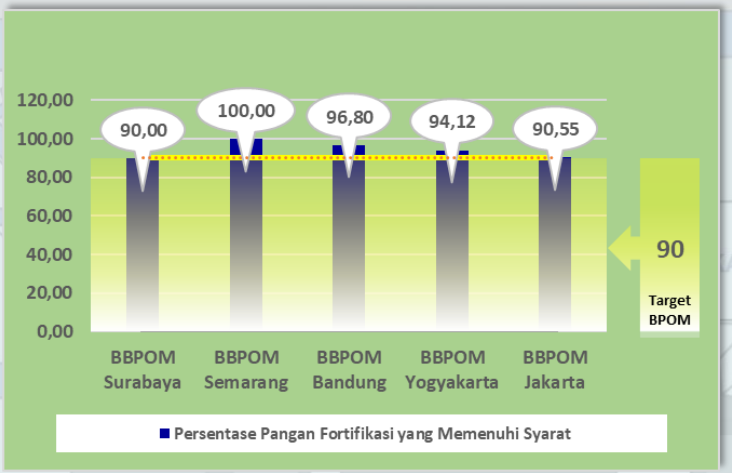

Gambar 25. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun tahun 2024 telah mencapai target dengan kritera **Sangat Baik**. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah sampel pangan fortifikasi yang masuk ke Fungsi Pengujian sebanyak 110 terdiri 55 sampel Garam, 10 sampel Tepung Terigu dan 45 sampel Minyak Goreng Sawit (MGS). Dari 110 sampel yang selesai diuji terdapat 99 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 11 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel TMS tersebut terdiri atas:

- Lima sampel garam beryodium dengan tidak memenuhi standar kadar KIO3,
- Enam sampel Minyak Goreng Sawit (TMS Asam Lemak Bebas dan TMS karena tidak mengandung Vitamin A).

Hasil Uji yang TMS pada Minyak Goreng Sawit disebabkan antara lain :

1. Sarana Pengemas MGS membeli bahan baku MGS tanpa fortifikan Vitamin A dengan alasan tidak bisa bersaing dengan pabrik MGS bila membeli bahan baku MGS yang sudah ada penambahan Vitamin A dikarenakan harganya lebih mahal.
2. Tidak mempunyai fasilitas peralatan produksi Mixing untuk melakukan penambahan vitamin A, sehingga Kadar Vitamin A dalam produk kurang dari kadar yang dipersyaratkan.
3. Sarana penyimpanan Vitamin A tidak sesuai yang dipersyaratkan.
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha Pengemas terkait peraturan yang ditetapkan.

Hal yang mempengaruhi kurangnya kadar Iodium terutama dikarenakan :

1. proses penambahan fortifikan yang kurang tepat dan tidak merata saat pencampuran sehingga kadar KIO3 yang terdapat pada sampel kurang dari persyaratan. Pelaku usaha UMKM biasanya penambahan Iodium masih menggunakan cara manual sehingga homogenitasnya kurang merata.
2. Dikarenakan sampling garam konsumsi beryodium di lakukan di sarana peredaran termasuk pasar-pasar tradisonal, penyimpanan produk yang tidak sesuai juga dapat menyebabkan kadar KIO3 menurun.

Kegiatan sampling pangan fortifikasi sesuai Pedoman sampling di tahun 2024 dilakukan di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Lamongan.

Perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi khususnya produsen pangan fortifikasi garam dan minyak goreng sawit terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai ketentuan SNI

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	73.227.000	48.165.696	65,78	105,88	90 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran. Terdapat pergeseran anggaran perlengkapan sampling untuk dialihkan ke belanja perlengkapan penunjang sampling. Indikator ini merupakan indikator yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKU.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 23. Rencana Aksi pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.008.051	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi	73.227.000	6	kali/trip	6	

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kegiatan yang menunjang IKU persentase pangan fortigfikasi yang memenuhi syarat adalah Pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Tahun 2024 telah dilakukan sampling Pangan Fortifikasi sebanyak 110 sampel dan seluruhnya telah selesai diperiksa dan diuji.

g. Upaya peningkatan kinerja.

BBPOM Surabaya selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui Bimtek yang diadakan oleh BPOM, pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha garam (UMKM) dan pengemas minyak goreng kelapa sawit agar menggunakan fortifikan sesuai standar. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat tercapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, target tahun 2024 telah tercapai. Lokasi sampling adalah wilayah tinggi *stunting* dan rendah *stunting* sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goreng sawit.

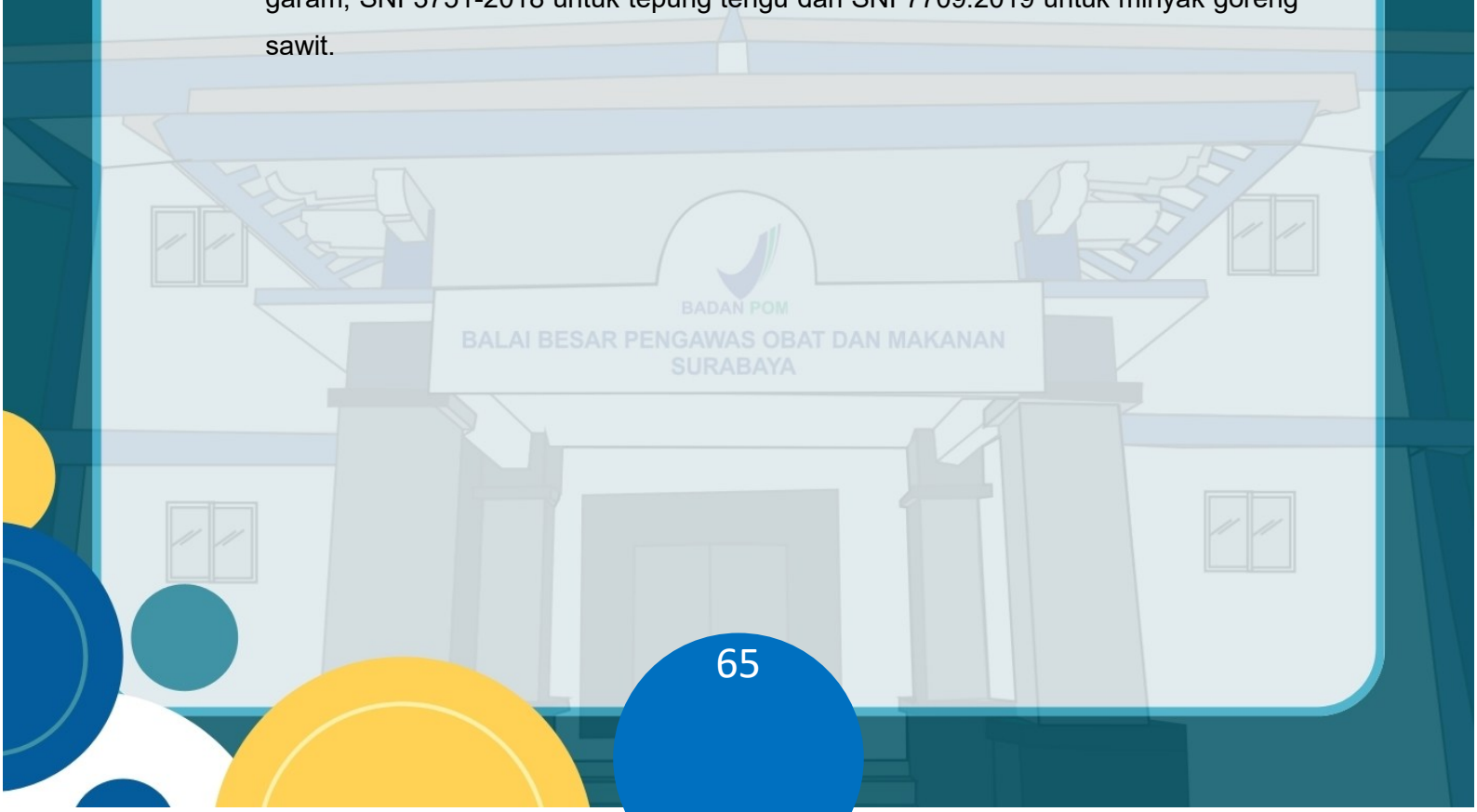

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS 106,88% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 25. Realisasi Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,50	90,31	106,88		Sangat Baik

Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

Ra adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (*Knowledege)* bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada akhir tahun 2024 **telah diperoleh hasil** pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (***awareness index***) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yaitu 90,31 terhadap target 84,50 atau dengan capaian 106,88% dan kategori **Sangat Baik.**

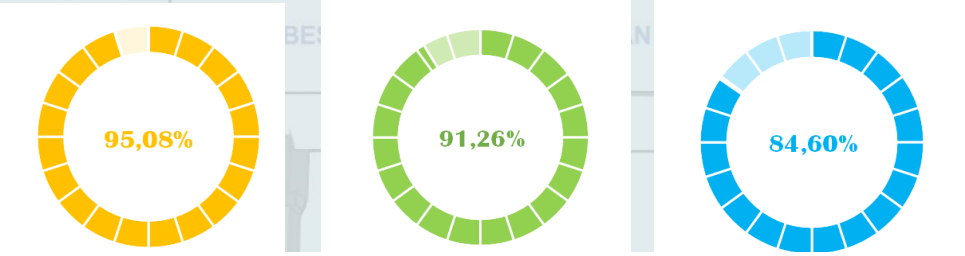

Gambar 26. Nilai Komponen Pendukung Indeks Kesadaran Masyarakat

Indeks kesadaran Masyarakat terdiri dari tiga komponen pendukung yaitu nilai pengetahuan, sikap dan perilaku. Capaian untuk wilayah kerja BBPOM Surabaya (27 Kabupaten/Kota) di Propinsi Jawa Timur untuk tiga nilai tersebut adalah: nilai pengetahuan 95,08; nilai sikap 91,26 dan nilai perilaku 84,60. Dari data tersebut nampak bahwa nilai perilaku adalah yang paling rendah, artinya meskipun masyarakat telah mengetahui dan memahami tentang keamanan dan mutu obat dan makanan namun belum tentu merubah perilakunya. Survey pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kesadaran (*awareness index)* Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

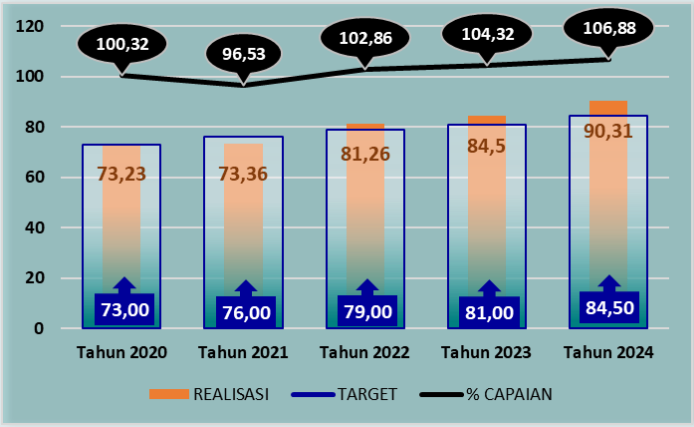

Gambar 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran (awareness index) Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun, terdapat sedikit penurunan capaian di tahun 2021 dibanding tahun 2020, dan meningkat lagi secara signifikan di tahun 2022, kemudian meningkat lagi di tahun 2023 dan 2024. Penurunan indeks kesadaran Masyarakat pada tahun 2021 merupakan akibat dari pandemi covid dimana Masyarakat tidak mendapatkan layanan secara langsung. Terbukti bahwa Masyarakat masih membutuhkan layanan secara langsung dan layanan *nir kontak* meskipun telah difasilitasi dengan berbagai sarana tidak dapat menggantikan layanan secara langsung. Oleh karena itu kemudian BBPOM di Surabaya berupaya untuk memberikan layanan publik yang hampir menyerupai layanan secara langsung misalnya KIE bersama tokoh masyarakat, *Live Chat*, Cangkrukan, Anda Menanyakan Kami Menjawab, Klinik POM, dll yang memungkinkan masyarakat melakukan

konsultasi secara langsung meskipun dengan perantaraan teknologi informasi. Layanan secara langsung melalui ruang layanan ULPK juga semakin ditingkatkan dengan meningkatkan sarana prasarana di ruang layanan yang memberikan rasa nyaman kepada konsumen yang datang langsung ke kantor, misalnya fasilitas computer dan printer yang digunakan oleh pelanggan, pojok *refreshment* yang menyediakan kopi, teh, jamu, air minum dan kue kue yang dapat dinikmati oleh konsumen. Jam layanan juga semakin ditingkatkan dengan tetap memberikan layanan selama jam istirahat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Selain itu BBPOM Surabaya juga memberikan fasilitas yang memadai bagi pelanggan yang termasuk katagori kelompok rentan misalnya ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini untuk memastikan bahwa BBPOM Surabaya melayani semua golongan Masyarakat dan tidak ada yang ditinggalkan (*no one left behind).*

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

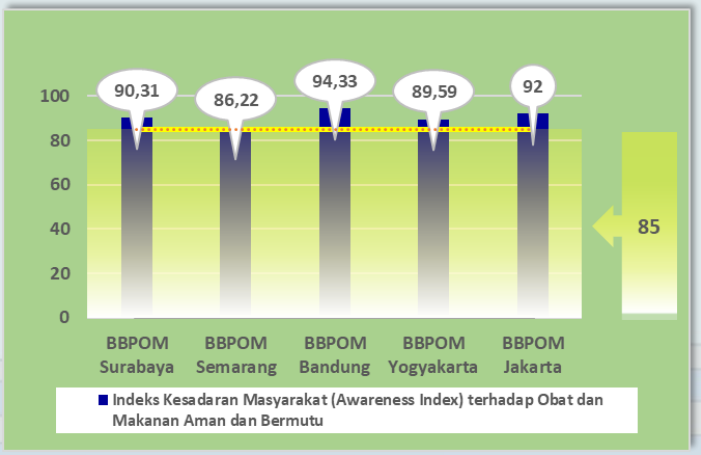

Gambar 28. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan Grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat secara nasional adalah 88,09. BBPOM Bandung, BBPOM Surabaya, BBPOM Jakarta, BBPOM Yogyakarta telah melampaui realisasi nasional dan hanya BBPOM di Semarang yang berada di bawah realisasi nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2024 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat di wilayah kerja BBPOM Surabaya (27 Kabupaten/Kota di Jawa Timur) adalah 95,08; nilai sikap masyarakat adalah 91,26 dan nilai perilaku masyarakat adalah 84,60.

Dari hasil survey diketahui bahwa komponen perilaku memperoleh nilai paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan.

Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut: obat 90,44 (Baik); Obat Tradisional 86,80 (Baik); Suplemen Kesehatan 86,04 (Baik); Kosmetik 87,29 (Baik); Pangan Olahan 88,59 (Baik). Semua indeks komoditi menunjukkan peningkatan dari tahun 2023.

Sedangkan di wilayah kerja BBPOM Surabaya (27 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur), Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu per komoditi adalah sebagai berikut: Obat 94,43 (Baik); Obat Tradisional 89,38 (Baik); Suplemen Kesehatan 88,29 (Baik); Kosmetik 87,55 (Baik) dan Pangan Olahan 90,15 (Baik).

Jika dibandingkan antara capaian indeks komoditi Tingkat nasional dan Propinsi Jawa Timur (wilayah kerja BBPOM Surabaya) maka diperoleh hasil indeks semua komoditi di Jawa Timur lebih tinggi dari indeks Tingkat Nasional.

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait *variable* kadaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang terdapat pada produk. Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua *variable*, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian-kejadian lain yang terjadi di masyarakat misalnya kasus Sirup

yang tercemar EG DEG, kosmetik illegal dan mengandung bahan berbahaya, obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat, produk kadaluwarsa dll.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang: petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal yang lain ditanyakan antara lain adalah: pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar.

Metode dan materi penyuluhan/KIE kepada masyarakat harus didesain secara menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dikemas dengan bahasa yang sederhana dengan memanfaatkan keragaman budaya di Jawa Timur serta dengan memanfaatkan pengaruh tokoh masyarakat, pemuka agama, dan komunitas komunitas masyarakat yang telah terbentuk. Iklan televisi masih merupakan media yang paling sering disebutkan oleh masyarakat sebagai sumber pengetahuan tentang BPOM. Dari survey juga diketahui bahwa usia merupakan variabel yang penting dalam menentukan media yang dipilih Masyarakat sebagai sumber mencari informasi.

Kesadaran terhadap produk obat paling tinggi (94,43) disusul pangan olahan (90,15), Obat Tradisional (89,38), Suplemen Kesehatan (88,29) dan terakhir kosmetik (87,55).

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	420.739.000	420.738.912	100,00	106,88	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, anggaran Penyebaran Informasi melalui Media sangat terbatas, namun demikian, dilakukan upaya penyebaran informasi yang lebih efisien melalui *sms blast*, dengan biaya murah namun jangkauan informasi lebih luas, sehingga target *output* dapat tercapai bahkan melebihi target. Dari target 110 kali publikasi dapat terealisasi 117 kali.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 27. Rencana Aksi pada Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Infokom	BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A	Penyebaran Informasi Melalui Media	420.739.000	110	Paket	117	

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator selama tahun 2024 yang telah dilakukan BBPOM Surabaya antara lain pembuatan vidio; iklan layanan Masyarakat di Youtube ads, Videotron di sekitar Kebun Binatang Surabaya dan Kota Madiun, Koran online Radar Surabaya (Gerbangkertasusila), Baliho di Gresik, Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Mojokerto, Jombang, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Malang, Batu, Pacitan, Tuban, Pamekasan, Sumenep, Kab Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, sms *blast* di (Magetan, Sumenep, Batu, Sidoarjo, Pasuruan, Bangkalan, Bojonegoro, Sampang, Pamekasan, Lamongan, Probolinggo, Ponorogo, Mojokerto, Madiun, Gresik, Jombang, Pasuruan, Pacitan, Nganjuk, Ngawi, Tuban), Google

Display Network, Transportasi (Trans Jatim rute Sidoarjo-Mojokerto, Wira wiri Surabaya), ILM di TV One, Radio (Suara Surabaya, Suara Giri FM, Karimata Pamekasan), Bioskop XXI Royal Plasa, dengan materi antara lain Cek KLIK, Maklumat Pelayanan, SKM, alur informasi dan pengaduan, Konsultasi pendaftaran ulang pangan olahan, alur informasi dan pengaduan, BPOM Mobile, Cegah stunting dengan pangan aman dan bergizi seimbang, Merdeka dari *stunting* dengan pangan aman dan CEK KLIK, Cegah Stunting dengan Pangan Aman, Tips OT aman, Pangan aman cegah *stunting*, Hati-hati OT BKO, Jenis layanan BBPOM di Surabaya, Gunakan BPOM *Mobile*, Baca Informasi Nilai Gizi, Waspada penyalahgunaan Boraks, Penggunaan antibiotik yang tepat untuk cegah AMR, Keamanan kosmetik, Cek KLIK Kosmetik, dll. Penyebaran informasi ini dilakukan selain menggunakan anggaran dari DIPA BBPOM Surabaya juga dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah daerah dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah misalnya Videotron, kendaraan transportasi, dll.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Struktur demografi dan kewilayahan Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam latar belakang sosial budaya latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi, agama, adat istiadat dan lain lain merupakan tantangan tersendiri bagi BBPOM Surabaya khususnya fungsi Informasi dan komunikasi untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan akhirnya merubah perilaku yang selama ini dianggap ”benar” namun ternyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan maupun *best practices* yang benar sesuai ilmu pengetahuan terkini. Masyarakat yang merasa sudah benar saat membeli obat obat keras yang dijual rentengan (setelan) dengan sumber yang tidak jelas serta dijual oleh pihak pihak yang tidak mempunyai hak dan kewenangan sesuai perundang undangan hanya karena setelah minum obat obat tersebut merasa masalah kesehatannya hilang. Atau masyarakat yang selama ini sudah “terbiasa” mengkonsumsi pangan mengandung bahan berbahaya, boraks misalnya, hanya karena nenek moyang mereka telah mengkonsumsi produk pangan tersebut sejak dahulu kala dan tidak ada gangguan Kesehatan yang berarti.

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 95,08 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 84,60. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Surabaya dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Surabaya tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Jawa Timur sebagai juru tutur atau penyambung lidah BBPOM Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan.

Setelah masa pandemi berakhir, BBPOM di Surabaya harus menyesuaikan strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media sosial menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Masa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media sosial antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Masyarakat selalu mencari media sosial jika ingin mengetahui seluk beluk suatu organisasi termasuk BPOM. Namun demikian tetap diupayakan agar Masyarakat yang awam terhadap media sosial mempunyai alternatif untuk layanan tatap muka selain datang ke kantor yaitu melalui zoom meeting atau video call.

Selama tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 2.051 layanan tatap muka langsung, melalui WhatsApp, telepon, email dan google review. Selain itu BBPOM di Surabaya menambahkan layanan konsultasi melalui zoom meeting bagi konsumen yang menghubungi nomor WhatsApp BBPOM di Surabaya menggunakan platform kegiatan Cangkrukan dengan tagline “Anda Menanyakan Kami Menjawab”. Selama tahun 2023, BBPOM di Surabaya telah melaksanakan kegiatan Cangkrukan sebanyak 18 kali yang diikuti oleh 593 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk

Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan SPA CPKB, Pendaftraran Pangan, Label, ING, Cegah Stunting, AMR, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM).

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial secara maksimal karena telah terbiasa menggunakan layanan melalui media sosial selama masa pandemi Covid-19 dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat meskipun masa pandemi sudah semakin mereda dan berubah menjadi endemi. Media sosial lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, dan Facebook. Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah menayangkan 942 layanan informasi melalui 3 media sosial tersebut dengan topik antara lain: Jangan asal beli kosmetik, Jenis plastic untuk kemasan pangan, Tips membekukan makanan, Wapada Jamu Berbahaya, Tips Mengolah Daging Kurban, Stop Gratifikasi, Alur Layanan Informasi & Pengaduan, Perangi Penyalahgunaan Obat, Bimtek Kader Keamanan Pangan, Penyalahgunaan Obat Obat Tertentu, Bahaya Obat Setelan, Kenali Logo Pada Kemasan Obat, Buang sampah obat dengan aman, Cara buang sampah obat dengan perhatian khusus, Pengobatan tepat, hidup jadi lebih sehat, Kelola Obat-obat tertentu, Cegah Penyalahgunaan obat penurun badan, Penggunaan Off-Label pada obat, Keamanan Pemanis Buatan Aspartam, Cara Baca Tanggal Kedaluarsa pada kemasan obat, Kenali ciri-ciri obat ilegal dan palsu, Cek Obat Asli atau Palsu dengan BPOM Mobile, Waspada Klaim Berlebihan pada Suplemen Kesehatan, Waspada Jamu Berbahaya, Berbahayakah Bahan Kimia Obat, Pastikan Produk Jamu memiliki Izin Edar, Apakah Jamu Gendong perlu ijin edar BPOM, Mitos/Fakta Jamu dapat mengatasi segala penyakit, Tips Memilih Jamu yang Aman, Jamu itu Sehat, Jauhi yang berefek instan, Ciri-ciri jamu illegal, Yang sering ditambahkan dalam OT, Bahaya Jamu Kedaluarsa, Hati-hati jamu oplosan, Mitos/Fakta Jamu dapat dikonsumsi tanpa Batasan, Waspada Kontaminan pada OT, Tips Memilih Bahan Baku Jamu, Waspada Klaim Suplemen Kesehatan, Cara aman konsumsi Suplemen Kesehatan, 3 Jenis Klaim Manfaat Suplemen Kesehatan, Ayo Cek Klik sebelum konsumsi suplemen Kesehatan, Tips Aman sebelum belanja online Suplemen Kesehatan, Apakah semua vitamin merupakan suplemen Kesehatan, Konsumsi Vitamin C, Patroli Siber, Underweight, Stunting, Wasting, Pastikan Suplemen Kesehatan memiliki izin edar, Yang harus dicantumkan pada Suplemen Kesehatan, Kenali Suplemen Probiotik,

Tahukan kamu? Suplemen Selenium, Vitamin D Supelemen Kesehatan, Cek Legalitas Produk Supelemen Kesehatan, Fakta/Mitos tentang vit B12, Waspada Klaim Vit C injeksi, dan Waspada Klaim Berlebihan Suplemen Kesehatan, Keuntungan memiliki Nomor Izin Edar, Kolaborasi Kampanye Keamanan Pangan; PPID. Selain itu BBPOM Surabaya juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor serta hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya. Pada akhir tahun 2024, BBPOM Surabaya melaksanakan pertemuan monitoring dan evaluasi pengawasan obat dan makanan selama tahun 2024 yang mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama tahun 2024, BBPOM Surabaya juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dengan memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya.

Pada tahun 2024, BBPOM Surabaya telah memberikan informasi secara langsung melalui berbagai kegiatan pada saat menjadi narasumber berbagai kegiatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor misalnya pada kegiatan Sosialisasi distribusi bahan berbahaya, Pelatihan Keamanan Pangan, Pelatihan penjamah dan pengelola makanan, Kuliah Profesi Apoteker Universitas Airlangga, Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pelatihan Hygiene dan Sanitasi Makanan, Pembinaan Desa/IKM berorientasi Ekspor di Jawa Timur, Pembinaan Keamanan Pangan Segar pada Konsumen, Sosialisasi Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir B2 Maupun Produsen B2, Pelatihan Pengolahan Hasil Ubi Kayu dan Ubi Jalar dengan Metode Blended Learning, Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Hygiene dan Sanitasi bagi Pengelola Makanan dan Penjamah Makanan, Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perijinan Bagi Pelaku Usaha Mikro Terutama Mengenai Pengurusan Sertifikasi BPOM Kegiatan Social and Learning Activity with Morality for Nation (SALMON) 2024, FGD Penguatan Kerjasama Penelitian dengan Mitra Lembaga Riset, Surabaya Halal Festival, Bimtek CPPB PIRT Bagi Pelaku Usaha IRTP di Kabupaten Sidoarjo, Bimtek Perawatan, Kesehatan ,Rehabilitasi dan Pelayanan Tahanan pada Lapas dan Rutan di Jawa Timur, Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal untuk Penanggulangan Rawan Pangan, Sosialisasi Penerapan Mutu Pangan dan SNI, Talkshow goes to School,

Pelatihan Pelaku Usaha Kegiatan Operasional Registrasi, Sertifikasi, dan Mutu Pangan Segar, kegiatan Talkshow Goes To School dengan tema " Generasi Sehat, Generasi Herbal, Saatnya Gen-Z Mengenal Herbal ", Pelatihan Pengolahan Produk Hortikultura, Peningkatan kapasitas penjamah dan pengelola makanan tentang pengawetan dan BTP, dll.

Pada tahun 2024, BBPOM Surabaya menyelenggarakan beberapa kegiatan yang melibatkan generasi z misalnya Cangkrukan Goes To Campuss yang menargetkan mahasiswa fresh graduated yang ingin bergabung dengan Badan POM. Selain itu BBPOM Surabaya juga mengusung tema khusus stunting yaitu "Ciptakan Generasi Emas: Cegah Stunting dengan Pangan Aman Bergizi Seimbang". Meskipun BBPOM Surabaya telah mengupayakan agar kegiatan pemberian informasi dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah kerja BBPOM Surabaya namun masih ada kelompok Masyarakat di beberapa wilayah yang belum menjadi target KIE BBPOM Surabaya. Ke depan, BBPOM Surabaya harus memperbanyak frekwensi KIE ke seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur secara merata. BBPOM Surabaya juga harus memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh lintas sektor agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan secara masif ke seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah memiliki sarana dan fasilitas untuk melakukan publikasi untuk Badan POM misalnya Videotron, Baliho, transportasi umum, media sosial, radio, TV lokal, koran lokal, dll.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 106,88%. Namun nilai perilaku masih rendah yaitu 84,60 (meskipun sudah termasuk katagori BAIK) sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pemberian informasi yang semakin intensif dan pemilihan media yang tepat untuk melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Selain itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2024 diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan POM yang pada akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku Masyarakat terkait *awareness* Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kerjasama dengan Penerintah Daerah harus semakin dieratkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pemerntah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan penguasa wilayah yang memahami dengan baik kondisi di daerah masing masing.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkup BBPOM di Surabaya

2. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 29. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,14	86,56	108,01		Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat Dan Makanan diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut:

$$Indeks\ Nasional = \sum \left[\sum (\bar{R}_a \times b) \times c \right]$$

Keterangan:

Ra adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misalnya operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa; (2) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di Masyarakat; (3) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misalnya dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan; (4) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misalnya dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

Pada akhir tahun 2024 **telah diperoleh hasil** pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yaitu 86,56 terhadap target 80,14 atau dengan capaian 108,01% dan katagori **Sangat Baik.** Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ats Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang bekerjasama dengan BPS.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

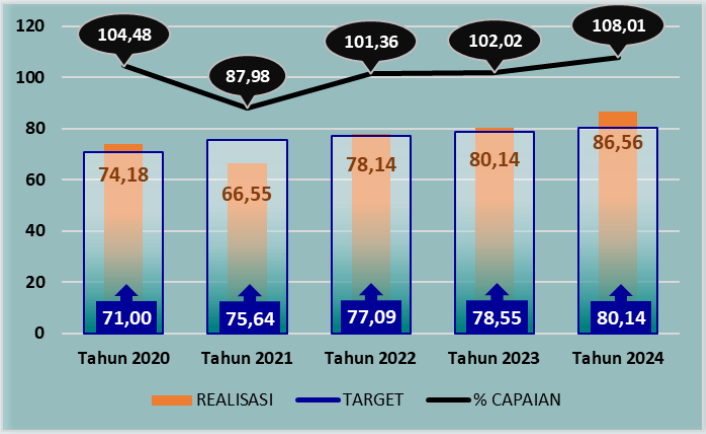

Gambar 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Target pada tahun 2024 lebih tinggi dari hasil review Renstra karena pada tahun 2023 target tersebut telah tercapai.

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2021, namun kembali terjadi peningkatan di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

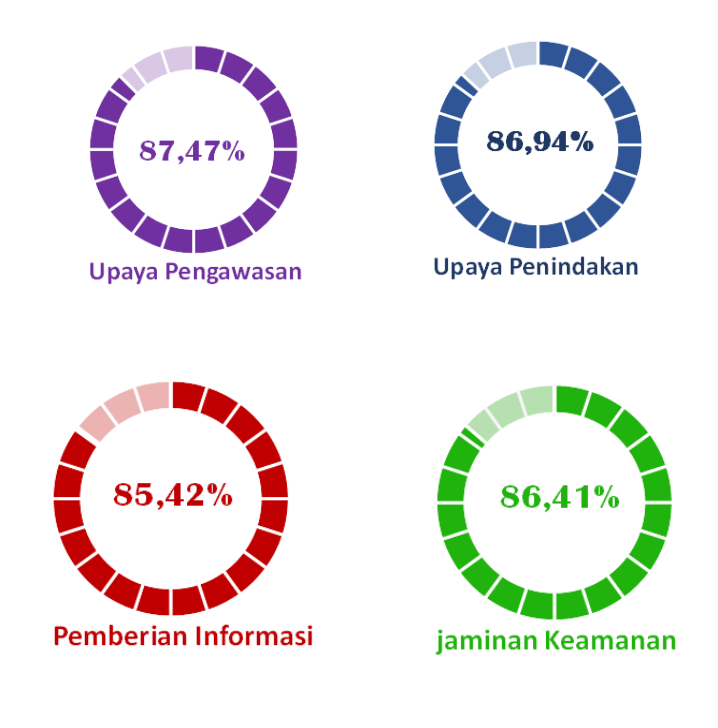

Gambar 30. Variabel Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut: upaya pengawasan 87,47; upaya penindakan

86,94; pemberian informasi 85,42 dan jaminan keamanan produk 86,41. Hasil ini mengalami peningkatan di semua aspek dari hasil tahun 2023 dan lebih tinggi dari hasil survey nasional. Survey juga melakukan pengukuran Indeks Kepuasan atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan komoditi dengan rincian sebagai berikut: obat 88,81; obat tradisional 84,87; suplemen Kesehatan 85,02; kosmetik 85,04 dan pangan olahan 87,62. Hasil ini juga di atas rata rata nasional.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

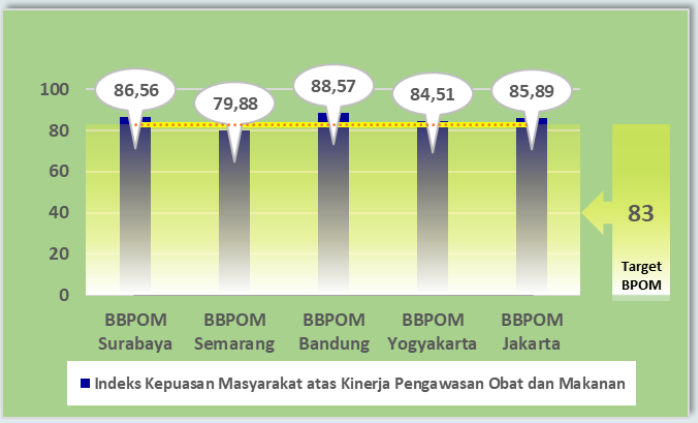

Gambar 31. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Semua BBPOM telah melampaui target nasional, hanya BBPOM di Semarang yang berada di bawah target nasional. Realisasi nasional adalah 83,97 dan empat BBPOM juga telah melampaui realisasi nasional kecuali BBPOM Semarang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk Propinsi Jawa Timur 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Gambar 32. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Jawa Timur Tahun 2020 s.d 2024

Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat yang sangat signifikan.

Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*), penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya informasi yang disampaikan secara tatap muka menjadi kegiatan online pada saat pandemi. Selain itu upaya pengawasan dan penindakan juga dilakukan sangat terbatas pada saat pandemi covid 19, sedangkan jaminan keamanan dilakukan melalui berbagai upaya yang mengurangi kemungkinan tatap muka langsung dengan pelaku usaha.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan pemberian informasi dan memberikan layanan informasi yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur, BBPOM di Surabaya melakukan beberapa inovasi yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkannya. Inovasi layanan informasi yang sudah mulai dikenal masyarakat adalah Cangkru'an (Bincang dengan Kru Layanan). Cangkru'an adalah terminology yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan di lingkungan Arek pada umumnya (Surabaya dan Malang Raya) sebagai kegiatan bersosialisasi dalam forum yang sangat informal dan sangat cair. BBPOM di Surabaya mengadop konsep Cangkru'an menjadi layanan informasi interaktif antara BBPOM di Surabaya dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dan sekaligus kesempatan untuk konsultasi terkait berbagai ketentuan dan peraturan perundang undangan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan Cangkru'an ini juga memberikan layanan konsultasi informasi secara langsung yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan melalui zoom meeting dalam format AMKM "Anda Menanyakan Kami Menjawab" dimana setiap pelanggan dilayani oleh seorang pemberi layanan informasi melalui zoom meeting secara personal.

Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah melaksanakan Cangkrukan sebanyak 18 kali yang diikuti oleh 593 peserta terdiri dari beberapa kelompok masyarakat antara lain mahasiswa, UMKM Pangan Olahan, Industri Pangan, UMKM kosmetika, calon pelaku usaha kosmetika, lintas sektor, dll. Topik yang disampaikan dalam Cangkrukan antara lain : Standar Pelayanan Publik untuk Rekomendasi Pemohon Notifikasi dan Pengaduan Masyarakat & Informasi Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk SKI/ SKE, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di PBF, Konsultasi dan Pendampingan Pendaftaran Obat dan Makanan, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan Permohonan IP CPPOB, Standar Pelayanan Publik untuk Pengajuan

Permohonan SPA CPKB, Pendaftraran Pangan, Label, ING, Cegah Stunting, AMR, dan konsultasi Anda Menanyakan Kami Menjawab (AMKM).

Selain Cangkru'an atas usul salah satu kepala daerah telah dikembangkan inovasi Jatim Truly (*Jawa Timur Trusted Culinary*) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan, dilanjutkan dengan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya. Pada tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Madiun yang diikuti oleh 120 PKL dan di Surabaya yang diikuti oleh 110 PKL. Kegiatan dilakukan melalui bimbingan teknis kepada PKL, sampling dan pengujian pangan terhadap bahan berbahaya, stikerisasi bagi yang telah lulus bimbingan teknis dan produk pangannya dinyatakan bebas bahan berbahaya. Kegiatan ini disambut baik oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarka Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah seringkali BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang

terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Peningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat mengantisipasi semua tahap dan perilaku usaha di bidang Obat dan Makanan agar bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkannya. Tindakan bersama sama yang dilakukan semua pihak baik BPOM, Pelaku Usaha, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentinngan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan iklim usaha yang sehat. Tenaga Kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan juga aware dan waspada dengan informasi up-date yang disampaikan oleh BPOM.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	551.168.000	530.739.204	96,29	108,01	100 % (Efisien)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, anggaran Penyebaran Informasi sangat terbatas, namun demikian, dilakukan upaya simplifikasi penyebaran informasi melalui sms blast, dengan biaya murah namun jangkauan informasi lebih luas, sehingga target output

dapat tercapai bahkan melebihi target. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan terus ditingkatkan sehingga Masyarakat lebih banyak yang mendapatkan informasi terkait Obat dan Makanan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 31. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Infokom	BDC.001.051	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Webinar Keamanan Obat dan Makanan	3.600.000	0	kali/trip	0	Revisi Penggantian Kegiatan
					B	Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling	26.580.000	8	kali/trip	8	
					C	Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran	58.995.000	2	kali/trip	2	
					D	Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	28.065.000	0	kali/trip	0	Revisi Kegiatan
					O	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	5.360.000	1	kali/trip	1	
					P	Koordinasi Teknis Antar Instansi	18.800.000	20	kali	20	
					Q	Pemantauan Toksikovigilan	69.600.000	3	kali/4 bulan	3	
					R	Sosialisasi Pelaporan Data Keracunan	2.000.000	0	kali/tahun	0	Revisi Kegiatan

Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi, Sosialisasi Melalui Media, koordinasi lintas sektor, serta Peningkatan Kompetensi petugas layanan publik.

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM di Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama tahun 2024 BBPOM di Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 3.499 melalui berbagai media antara lain secara langsung, melalui *WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast,* radio, televisi, *webinar* (Cangkruan) dan pameran. Selain itu BBPOM Surabaya juga menjadi narasumber dan memberikan berbagai materi informasi sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

Selama tahun 2024, BBPOM Surabaya telah memenuhi permintaan narasumber sebanyak 92 kegiatan pemberian informasi/sosialisasi/bimbingan teknis dll dengan peserta sebanyak 7.269 orang. Topik yang disampaikan antara lain Bimbingan Teknis

Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro, Kegiatan peningkatan kesadaran akan keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Kuliah Profesi Apoteker FFUA angkatan 119 dan 120, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP, Pelatihan Lanjutan "Advance Training" Packing dan Perijinan, dll. Beberapa topik kegiatan dilaksanakan lebih dari satu kali dengan peserta yang berbeda.

Namun demikian, masyarakat masih mengeluhkan aplikasi yang sering eror dan timeline pelayanan yang sering tidak dipenuhi. BBPOM Surabaya harus lebih jujur kepada masyarakat sehingga tidak ada kerugian di pihak pelanggan. Yang diperlukan pelanggan adalah kepastian layanan sehingga mereka dapat melakukan perencanaan selanjutnya.

4. **Upaya peningkatan kinerja.**

Badan POM sebagai organisasi pelaksana layanan publik yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan Quality Management System berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun berbagai aplikasi menggunakan system informasi sehingga layanan dapat diberikan secara transparan, akuntabel, menghindarkan dari KKN, meningkatkan kecepatan, efektifitas dan efisiensi serta dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan. Namun demikian ternyata tidak semua masyarakat menyukai layanan yang *nir kontak* ini. Ada sebagian masyarakat terutama yang *literacy* digitalnya tidak memadai lebih menyukai layanan tatap muka dengan membawa berbagai dokumen. Kelemahan aplikasi digital juga sangat tergantung pada jaringan internet serta rawan di hack oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini banyak dikeluhkan oleh penerima layanan publik BPOM dan menurunkan kepuasan pelanggan. Sebagai alternatif solusi jika dimungkinkan BBPOM Surabaya membuka layanan pendampingan kepada penerima layanan dengan jaringan internet yang aman dan memadai. Selain itu BPOM harus membangun aplikasi yang andal dan *robust*.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja BBPOM Surabaya, telah dilakukan berbagai upaya. BBPOM Surabaya baru baru ini juga melahirkan program inovasi baru yaitu Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary) yang merupakan program pendampingan dan bimbingan teknis serta stikerisasi untuk para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang biasanya berlokasi di daerah daerah wisata. Program ini dimulai

di kota yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur yaitu Kota Batu. Pada tahun 2024 kegiatan Jatim Truly dilaksanakan di Kabupaten Madiun dengan jumlah PKL 120 orang dan di Kota Surabaya dengan jumlah 110 PKL. Para pedagang kreatif lapangan tersebut telah mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan terutama tentang hygiene dan sanitasi serta penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan. Setelah mendapatkan pengetahuan dan informasi, para PKL mendapatkan praktek langsung bagaimana menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan pada gerobak mereka (street food booth/stall). BBPOM Surabaya juga melakukan pengujian pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan menyampaikan hasilnya langsung kepada para PKL. Setelah memenuhi semua persyaratan, para PKL akan mendapatkan stiker keamanan pangan dari BBPOM Surabaya. Pemerintah Daerah Kota Surabaya telah menyatakan komitmen akan melanjutkan program ini di seluruh Sentra Wisata Kuliner (SWK) sejumlah 50 SWK yang ada di Kota Surabaya.

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Fitur FAQ telah ditambahkan pada website BBPOM Surabaya sehingga masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi. Selain website BBPOM di Surabaya, media sosial resmi BBPOM di Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya sebagai sumber informasi. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/HOAKS yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu KATA BPOM untuk menangkal berbagai isu negatif dan Hoax yang beredar di masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. *Agent of Change* BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar mampu membuat desain dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik, informatif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. BBPOM di Surabaya juga

membentuk kader dan duta untuk menjadi Agent of Change BBPOM di Surabaya untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di lingkungan terdekatnya.

5. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2024 telah tercapai dan target periode akhir renstra telah tercapai. Untuk terus meningkatkan upaya *branding* Balai Besar POM di Surabaya, telah dikembangkan inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan program inovasi Jatim Truly di Kota Batu, pada tahap berikutnya dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan target para PKL yang berdagang di alun alun Kota Pasuruan. Pada tahun 2024 target pembinaan PKL melalui inovasi Jatim truly adalah Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya.

Meskipun target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui namun BBPOM Surabaya tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Surabaya. Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalami transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang memadai. Untuk itu BBPOM Surabaya tetap diharapkan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para UMKM sebagai kekuatan nyata dan penyokong ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 32. Realisasi Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,50	93,04	100,58		Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat *seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.*

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Target Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Surabaya untuk tahun 2024 adalah 92,50.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 untuk 9 (sembilan) jenis layanan yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 33. Jumlah Responden Per-Jenis Layanan tahun 2024

No	Jenis Layanan	Responden
1	Penertbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	72
2	Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	15
3	Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)	14
4	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)	8

No	Jenis Layanan	Responden
5	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)Pengujian Obat dan Makanan	10
6	Penerbitan Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	13
7	Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	96
8	Pengujian Obat dan Makanan	2
9	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	234
Total		**464**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya (berdasarkan hasil SKM) tahun 2024 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah **93,04** dengan rincian sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		Tahun 2024
U1	Persyaratan	90,88
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	91,02
U3	Waktu Penyelesaian	92,34
U4	Biaya/Tarif	92,49
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	93,07
U6	Kompetensi Pelaksana	94,76
U7	Perilaku Pelaksana	95,91
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	93,97
U9	Sarana dan Prasarana	92,92
	Total	**93,04** **A (Sangat Baik)**

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang diperoleh BBPOM di Surabaya adalah 93,04 menunjukkan realisasi telah melampaui target tahun 2024 dengan capaian 100,58%, kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

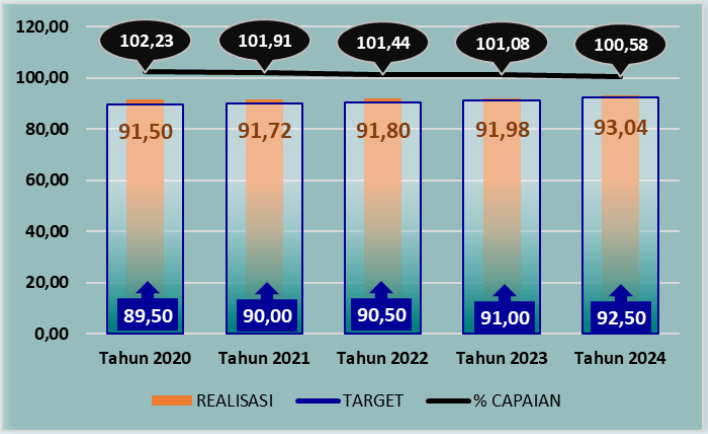

Gambar 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Berdasarkan tren analisis yang dilakukan BBPOM Surabaya target 92,50 masih memungkinkan untuk dicapai oleh BBPOM Surabaya dengan mempertimbangkan juga capaian pada tahun 2023. Berdasarkan data grafik, dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan target mengalami peningkatan, dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan di masing-masing tahun tersebut. Walaupun secara persentase capaian di tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun upaya petugas layanan untuk konsisten memberikan layanan publik yang semakin baik termasuk melengkapi sarana prasarana untuk kelompok rentan. Hal ini seiring sejalan dengan respon yang diberikan pelanggan melalui survey menunjukkan pelanggan memberikan apresiasi yang baik kepada BBPOM di Surabaya, meskipun masih ada juga yang belum puas dengan layanan publik BBPOM Surabaya dengan memberikan kritik dan masukan yang kami jadikan pedoman untuk semakin meningkatkan kualitas layanan publik.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.**

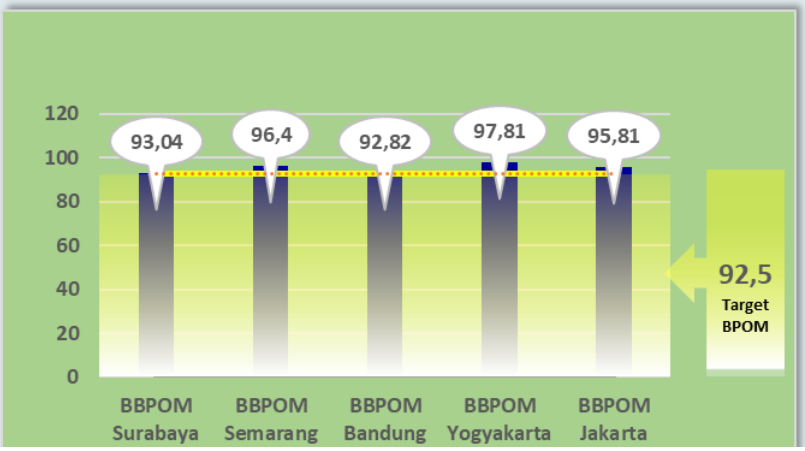

Gambar 34. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan data pada grafik, realisasi tertinggi di tingkat UPT diperoleh BBPOM di Yogyakarta dan di tempat kedua adalah BBPOM di Semarang, dan terendah adalah BBPOM di Bandung. Namun jika dibandingkan dengan target Badan POM, kelima UPT termasuk BBPOM di Surabaya melampaui target Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan publik BBPOM di Surabaya sebagai salah satu penyedia layanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur penilaian (sesuai pedoman PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017) yang diukur pada SKM.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya antara lain:

- Melakukan reviu secara berkala Standar Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya yang memuat unsur-unsur pelayanan publik, yang mana dalam penyusunannya dilakukan melalui tahapan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari pengguna layanan.
- Melengkapi Standar Pelayanan Publik terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan publik, BBPOM Surabaya harus memfasilitasi semua kepentingan dan kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali mereka yang termasuk dalam katagori kelompok rentan yaitu disabilitas, wanita hamil, ibu menyusui, anak-anak, lansia, dan korban bencana sosial serta korban bencana

alam. Tujuan dari revisi Standar Pelayanan Publik ini adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan.

- Menindaklanjuti hasil SKM yang telah dilakukan secara berkala dengan menyusun rencana tindak lanjut yang dititikberatkan terhadap 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah dan masukan/saran dari pelanggan yang perlu ditindaklanjuti.
- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memudahkan layanan publik, antara lain dengan variasi/ragam pemberian sosialisasi kepada pelanggan.
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan *soft skill* pelayan publik. Kemampuan berkomunikasi dan menangani keluhan pelanggan adalah kompetensi penting dan utama sebagai pemberi layanan publik.
- Kegiatan *briefing* "*morning breeze*" untuk petugas pelayanan publik yang bertujuan untuk menyamakan persepsi petugas pelayanan dalam menghadapi kendala di lapangan dan update regulasi/kebijakan terkini yang berkaitan dengan layanan publik.
- Kolaborasi eksternal untuk mengatasi tantangan SDM, yaitu dengan membentuk fasilitator mahasiswa magang yang dapat membantu pelanggan seperti membantu pelanggan ketika mengalami kendala di aplikasi layanan publik.
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan, terutama untuk kelompok rentan. Sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat. Hampir semua fasilitas tersebut telah berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya kecuali lift khusus karena di BBPOM Surabaya tidak tersedia lift karena Gedung layanan publik hanya 2 lantai dan ruang layanan publik ada di lantai 1.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.

- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Meningkatkan kompetensi, memberikan reward dan punishment, untuk petugas layanan, serta penerapan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.
- Memberikan solusi dan kompensai kepada pelanggan apabila mengalami kendala dalam menerima pelayanan dari BBPOM di Surabaya.

e. **Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	71.312.000	43.115.308	60,46	100,58	90 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran dalam mencapai target indikator kinerja. Yang dilakukan adalah melakukan reviu efisiensi penggunaan anggaran agar lebih efektif seperti mengoptimalkan pendampingan kepada pelaku usaha serta peningkatan kompetensi petugas layanan publik.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Tabel 35. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	27.700.000	1	kegiatan	0	
					E	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	18.600.000	40	kali/trip	34	
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	21.816.000	1	kali/trip	1	

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan di lingkungan BBPOM

Surabaya untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya.

Kegiatan yang menunjang di sepanjang tahun 2024 antara lain kegiatan pemeriksaan terhadap sarana importir/eksportir dalam rangka pemenuhan pemberian sertifikat SKI/SKE serta kegiatan peningkatan kompetensi untuk petugas layanan publik dilakukan melalui diseminasi melalui kegiatan internal substansi/*morning breeze*.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab), Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja), dan Jatim Truly (Jawa Timur *Trusted Culinary*). Selain inovasi yang membantu pelaku usaha, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung back office dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme dan fairness, serta akuntabilitas.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Surabaya merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, yang mana proses separuhnya lagi ada di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan BBPOM di Surabaya mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat.

Untuk itu, BBPOM di Surabaya agar beradaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha. Kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dijalin misalnya layanan jemput bola pendampingan kepada UMKM dalam rangka penerbitan nomor izin edar. Layanan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu di masing masing Kabupaten/Kota sehingga pendampingan oleh BBPOM Surabaya lebih efektif.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 sampai tahun 2024 telah tercapai. BBPOM di Surabaya harus terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll agar dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk dan layanan publik lainnya.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Lingkup Balai Besar POM di Surabaya

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Surabaya dengan Nilai NSS 101,21% dengan kategori **Sangat Baik**.

Pencapaian tersebut didukung oleh 8 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan**
   b. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.**

Tabel 37. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	98,25	100,97		Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT =

   Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

   Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT x 100%

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 710 keputusan/rekomendasi dari 721 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 100,97% dan mendapat kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar xx

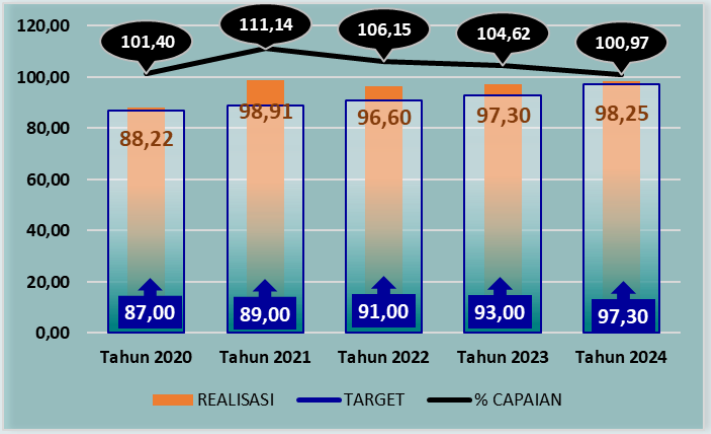

Gambar 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat perbedaan target tahun 2024 dengan Target Reviu Renstra dikarenakan realisasi 2023 telah melampaui target RKT 2024 sehingga target perlu disesuaikan dengan realisasi 2023.

Berdasarkan grafik disamping, pada tahun 2021 terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dari tahun 2020. Tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 dikarenakan target meningkat ditahun 2022. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi dan penurunan capaian dari tahun 2023, namun target tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

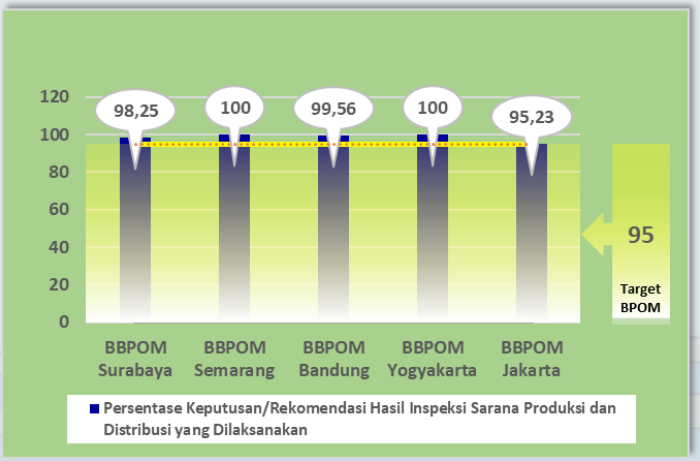

Gambar 36. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 pada BBPOM di Semarang 100,00 dan BBPOM di Bandung sama, yaitu 99,56 dari ketiganya yang terendah adalah BBPOM di Surabaya dengan realisasi 98,25. Namun demikian ketiga balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Indikator Persentase Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung berdasarkan persentase:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain
4. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pada tahun 2024, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 98,94%, karena terdapat 7 (tujuh) surat tindak lanjut yang belum diselesaikan oleh petugas dan sudah diberikan teguran secara lisan kepada petugas yang belum menyelesaikan surat tindak lanjut yang menjadi tanggung jawabnya. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 90,24 %, karena terdapat 4 (empat) surat dari Pusat yang masuk diakhir Desember 2024 dan akan ditindaklanjuti di tahun 2024. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat, masing-masing memperoleh hasil 100,0 % karena semua surat rekomendasi sudah ditindaklanjuti.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	52.100.000	51.280.000	98,43	100,97	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran dalam mencapai target indikator kinerja. Yang dilakukan adalah melakukan reviu efisiensi penggunaan anggaran agar lebih efektif seperti mengoptimalkan pendampingan kepada pelaku usaha serta peningkatan kompetensi petugas layanan publik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 39. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	11.220.000	6	kali/trip	6	
		Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	32.620.000	16	kali/trip	16	

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2024 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 685 sarana, penelusuran kasus terhadap 23 sarana dan dalam rangka pengaduan konsumen sebanyak 13 kasus, yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Surabaya.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

g. Upaya peningkatan kinerja.

Upaya untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 adalah

- Tetap melakukan menitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang sudah dilakukan
- Tetap memberikan teguran secara lisan atau tertulis pada petugas yang lalai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 41. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,42	94,43	105,60		Sangat Baik

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

A= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B= Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat

berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 575 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 511 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 105,60 % dengan kkategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

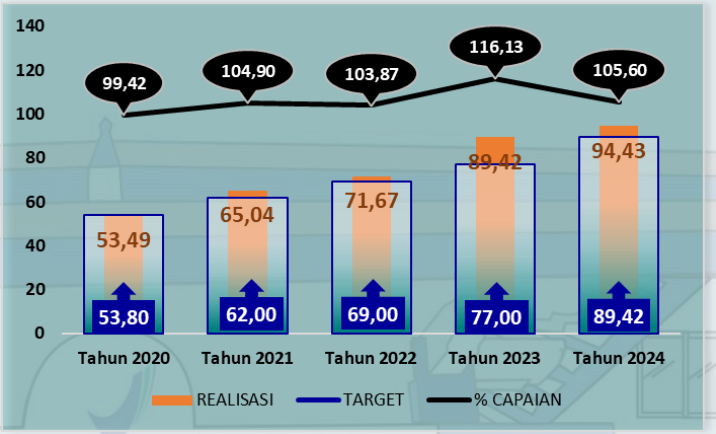

Gambar 37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Target tahun 2024 yang berbeda dengan target reviu renstra dikarenakan target di tahun n tidak boleh lebih rendah dari realisasi n-1, sehingga dilakukan penyesuaian pada target 2024. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan realisasi dan capaian. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dari tahun 2020. Pada tahun 2022 juga terdapat peningkatan realisasi namun terdapat penurunan capaian dibandingkan tahun 2021 dikarenakan kenaikan target di tahun 2022 dan terdapat peningkatan lagi pada realisasi dan capaian di tahun 2023 di tahun 2024 terjadi penurunan capaian akan tetapi realisasi tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena

komitmen bersama dan pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga hampir semua tindak lanjut telah dilaksanakan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Kelima balai yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

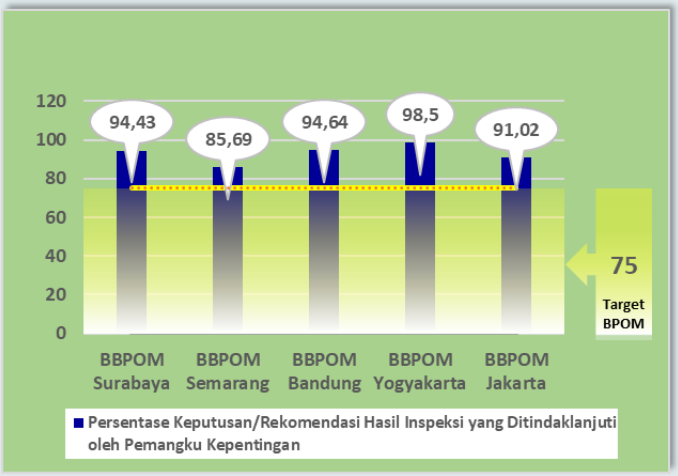

Gambar 38. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 94,43% karena tetap selalu dilakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan melalui telepon maupun whatsApp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BBPOM Surabaya serta telah dilaksanakan Desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,0% karena telah dilaksanakannya Bimtek Pengawasan Post Market IRTP dan Desk Penilaian Mandiri oleh pusat untuk kab/kota di wilayah Jawa Timur dimana salah satu komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai Besar POM dan feedbacknya sehingga Dinas Kesehatan memberikan feedback terhadap semua surat tindak lanjut yang telah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Surabaya . Dari hasil tersebut diatas, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	520.494.000	489.776.835	94,10	105,60	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 43. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection	77.290.000	14	kali/trip	14	
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B	Koordinasi Lintas Sektor	39.200.000	20	kali/trip	20	
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A	Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan	295.900.000	58	kali	58	
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	E	Koordinasi lintas sektor	3.060.000	5	kali	5	

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah:

- Koordinasi bersama lintas sektor meliputi bupati/walikota, dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perindustrian dan perdagangan, dan lain-lain.

- Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha melalui telepon, whatsApp setelah pemeriksaan agar memberikan *feedback* atas hasil pemeriksaan sarana namun hasil yang diharapkan belum maksimal.

Penggunaan aplikasi *Smart* POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sektor (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Upaya yang harus tetap dilakukan untuk pencapaian target 2024 antara lain:

- Mengadakan pertemuan secara rutin dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring agar pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif
- Melakukan kegiatan Desk CAPA secara rutin untuk meningkatkan feedback dari pelaku usaha.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2025, maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat karena untuk percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Hingga kemudian meningkat menjadi 89,32% di akhir tahun 2024. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 45. Realisasi Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	93,63	97,53		Cukup

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu :

$$\frac{keputusan\ penilaian\ sertifikasi\ \ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ permohonan\ penilaian\ sertifikasi} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
2. Hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang;
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang;
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan);

7. Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran;
8. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;
9. Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
10. Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;
11. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; dan
12. Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.)

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 diperoleh dari 21.751 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 23.232 sehingga capaian tahun 2024 yaitu 97,53% diperoleh dari realisasi 93,63% dibandingkan target setahun 96,00%, yang masuk dalam kategori **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

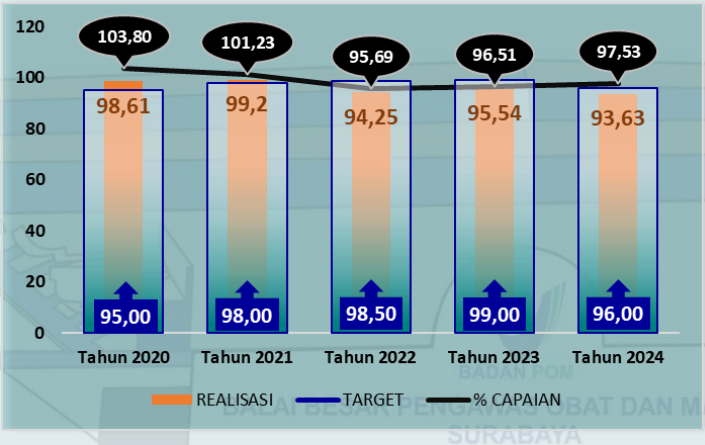

Gambar 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Sejak tahun 2020 hingga 2023 terdapat peningkatan target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, sedangkan realisasi capaian kinerja menurun dari tahun ke tahun sehingga persentase capaian kinerja tidak sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2022 - 2023. Berdasarkan tren capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di

Surabaya mengajukan usulan perubahan target Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2024 dari 99,5 menjadi 96, telah direviu dan disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.

Namun demikian, capaian tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah permohonan sertifikasi yang harus diselesaikan dari tahun ke tahun. Permohonan sertifikasi tahun 2024 meningkat 19,66% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 19.415 permohonan di tahun 2023 menjadi 23.232 di tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional.

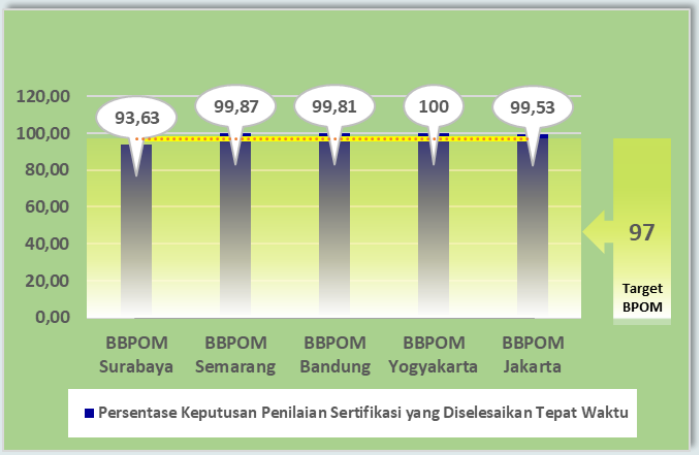

Gambar 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Pada tahun 2024, target nasional untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 97%. Dari 5 (lima) Balai yang sejenis / setara dengan Balai Besar POM di Surabaya, persentase capaian yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Yogyakarta, disusul oleh Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Jakarta, lalu Balai Besar POM di Surabaya. Dari 5 UPT tersebut, hanya Balai Besar POM di Surabaya yang belum memenuhi target nasional. Persentase capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis permohonan sertifikasi yang harus diselesaikan serta ketersediaan personil yang mengevaluasi permohonan tersebut.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Tindak lanjut pemeriksaan sarana dalam rangka Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap, Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, dan Sertifikasi CDOB pada tahun 2024 seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pemahaman petugas terkait

timeline penerbitan surat tindak lanjut melalui kegiatan diseminasi SOP Mikro terkait pemeriksaan sarana.

Pelaksanaan audit sarana dilakukan terhadap industri pangan skala menengah dan besar dalam rangka penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (IP CPPOB). Sedangkan untuk pelaku usaha pangan skala mikro dan kecil, IP CPPOB diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi dokumen persyaratan penerapan CPPOB yang diunggah melalui sistem e-sertifikasi. Pelaksanaan audit sarana bagi usaha mikro kecil dalam rangka verifikasi penerapan CPPOB dilakukan setelah sertifikat diterbitkan, yaitu paling lambat 12 bulan setelah Izin Penerapan IP CPPOB terbit.

Salah satu penyumbang terbesar tidak tercapainya persentase capaian penyelesaian tepat waktu tahun 2024 adalah penerbitan Izin Penerapan CPPOB usaha mikro kecil yang diajukan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id yaitu sebesar 84,57%. Hal ini disebabkan tingginya jumlah permohonan yang masuk, yaitu 895 permohonan dan jumlah evaluator yang sangat terbatas. Beban kerja yang tinggi menyebabkan petugas harus melakukan memprioritaskan kegiatan sertifikasi dengan *timeline* lebih pendek dan melakukan evaluasi di luar jam kerja.

Penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai *timeline.* Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat meskipun terjadi peningkatan jumlah sampel dari tahun sebelumnya.

Persentase capaian dengan kriteria cukup terutama disebabkan oleh pemenuhan penyelesaian SKI/SKE yang melebihi *timeline*, mengingat jumlah permohonan penerbitan SKI/SKE merupakan komponen terbesar dalam keputusan penilaian sertifikasi. Kendala dalam pemenuhan *timeline* tersebut, antara lain:

- Importir / eksportir mengunggah dokumen yang tidak lengkap dan tidak benar sehingga dari hasil evaluasi petugas, permohonan dinyatakan tidak lengkap dan membutuhkan tambahan data sehingga menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi *timeline* yang ditetapkan.
- Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan lagi oleh petugas.

- Terdapat unggahan dokumen dari importir / eksportir yang membutuhkan klarifikasi secara langsung (tatap muka) dengan petugas sehingga waktu penyelesaian lebih lama dan berdampak pada survei kepuasan pelanggan.
- Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
- Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama.
- Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami permintaan tambahan data dari hasil evaluasi sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus dilakukan diprioritaskan untuk dievaluasi kembali setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12.00 WIB akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
- Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
- Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi berdasarkan urutan waktu pengajuan dengan mengutamakan evaluasi terhadap SKI tambahan data daripada pengajuan SKI baru.
- Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan *timeline* 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai *timeline* disebabkan oleh kondisi tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya gangguan sistem pada e-bpom dan/atau gangguan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- Sejak tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat

Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem *online* dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE.

Terkait kendala-kendala tersebut, petugas Sertifikasi melakukan mitigasi, yaitu:

- Secara intens melakukan komunikasi dengan tim Pusdatin dan masing-masing kedeputian di pusat agar dapat segera memberikan informasi serta tindak lanjut secara cepat dan tepat kepada penerima layanan.
- Memberikan respon cepat melalui WA layanan Sertifikasi dan email Sertifikasi apabila pemohon membutuhkan keterangan lebih detail.
- Pemberian layanan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dengan penerima layanan, seperti konsultasi denah, konsultasi terkait CAPA, serta kegiatan sertifikasi lainnya dilakukan setelah jam evaluasi penerbitan SKI/SKE berakhir. Namun untuk jadwal evaluasi penerbitan SKI/SKE yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan sarana, petugas tetap tidak dapat melakukan evaluasi secara maksimal.
- Mengupayakan pengaturan jadwal pemeriksaan sarana dan kegiatan lainnya tidak bersamaan dengan evaluasi penerbitan SKI/SKE.
- Melakukan peningkatan kompetensi melalui bimtek yang melibatkan narasumber dari masing-masing kedeputian maupun sharing session terkait best practice kegiatan sertifikasi

Sesuai Peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia serta Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, petugas juga melakukan evaluasi terhadap realisasi impor *post border* untuk mendata importir yang tidak memiliki SKI melebihi batas waktu yang ditetapkan sesuai. Komoditi yang termasuk *post border* adalah bahan baku kosmetik serta bahan dan produk pangan. Kendala terbesar dalam melakukan evaluasi realisasi impor tersebut adalah jumlah data impor dengan notifikasi merah (belum memiliki SKI) cukup banyak, yaitu 500-100 data per bulan sedangkan evaluasi masih dilakukan secara manual. Di sisi lain,

keterbatasan personil menyebabkan tidak tersedianya petugas khusus untuk melakukan evaluasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, surat peringatan diberikan terhadap importir yang terbukti melanggar ketentuan impor *post border*. Petugas meminta klarifikasi kepada importir terkait hasil evaluasi realisasi impor, salah satunya melalui kegiatan desk realisasi impor yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2024. Apabila pelanggaran dilakukan berulang, maka sanksi lebih berat dapat diberikan, antara lain penutupan sementara akses impor di sistem e-bpom atau INSW.

Dalam rangka pengawasan pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan untuk kepentingan sendiri/pribadi, petugas Sertifikasi Balai Besar POM juga melakukan evaluasi terhadap permohonan penerbitan rekomendasi pemasukan barang yang diajukan oleh pemohon perorangan. Koordinasi dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak terus dilakukan agar pengawasan pemasukan barang dapat terlaksana dengan efektif dan sesuai ketentuan. Penerbitan rekomendasi mengacu pada Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia yang sejak Desember 2023 berlaku Peraturan Badan POM nomor 28 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia. Namun demikian, justifikasi khusus dapat diberikan pada kondisi tertentu seperti pemasukan obat-obatan *life saving* atau tidak tersedia stok di dalam negeri.

Diterapkan sejak akhir Februari 2023, pada tahun 2024 terdapat 120 permohonan rekomendasi pemasukan barang kiriman dan barang tentengan komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Terhadap permohonan tersebut, dapat diberikan tindak lanjut berupa penegahan penuh apabila pemasukan barang tidak sesuai dengan peraturan atau berisiko terjadi penyalahgunaan/penggunaan yang salah. Sosialisasi terkait pemasukan barang kiriman dan barang tentengan untuk keperluan sendiri/pribadi kepada masyarakat perlu dilakukan sehingga dapat meminimalkan penegahan dan mengurangi kerugian dari pemohon yang terlanjur melakukan pembelian barang tersebut dari luar negeri.

Forum Komunikasi SKI/SKE merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Balai Besar POM di Surabaya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persamaan

persepsi dengan pelaku usaha terkait kegiatan ekspor/impor. Tahun 2024, kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 21 Oktober 2024 yang diikuti sekitar 100 eksportir/importir. Penyampaian materi terkait kegiatan ekspor impor disampaikan oleh narasumber dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Juanda dan Tanjung Perak dan tim sertifikasi Balai Besar POM di Surabaya. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha ekspor/impor lebih memahami persyaratan yang harus dipenuhi sehingga mengurangi permintaan tambahan data yang dapat memperpanjang *timeline* penerbitan SKI/SKE

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	606.643.000	605.767.082	99,86	97,53	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Tidak Efisien** karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU, telah dilakukan revisi anggaran yaitu penyesuaian kebutuhan perjalanan dinas untuk dalam rangka sertifikasi dan registrasi Obat dan Makanan serta peningkatan kompetensi petugas melalui kegiatan pelatihan teknis.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 47. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D	Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi	676.694.000	286	kali/trip	291	

Pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB masih memenuhi *timeline* meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, Balai Besar POM di Surabaya melakukan upaya antara lain dengan memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta layanan konsultasi sebelum dan/atau pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Selain itu, pelaksanaan Desk CAPA berupa kegiatan konsultasi antara petugas dengan pelaku usaha terkait hasil tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan ketidaksesuaian saat pemeriksaan sarana, diharapkan menjadi langkah percepatan dalam rangka pemenuhan ketentuan Cara Produksi/Distribusi yang Baik.

Realisasi pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi yang melebihi target disebabkan tingginya jumlah permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka registrasi/sertifikasi serta kegiatan sertifikasi lainnya, seperti verifikasi sarana yang harus dilakukan terhadap UMK pangan olahan yang telah memperoleh sertifikat Izin Penerapan CPPOB.

Selain kegiatan tersebut, petugas Sertifikasi juga aktif mengikuti kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi terkait ekspor/impor yang diadakan oleh internal Badan POM maupun lintas sektor. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan petugas dan persamaan persepsi antar petugas.

f. Upaya peningkatan kinerja.

Pada tahun 2024, Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu masuk dalam kategori Akan Tercapai. Untuk meningkatkan capaian di tahun 2025, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas

sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

3. Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui Pelatihan/Bimtek.
4. Melaksanakan *desk CAPA* untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.
5. Evaluasi SKI/SKE dengan *service level arrangement (SLA)* maksimal 6 jam untuk SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa mengerjakan tugas yang lain.
6. Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan.
7. Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE.
8. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
9. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi *timeline*.
10. Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE selesai.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2024, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai. Penyumbang terbesar dari rendahnya capaian kinerja dibandingkan dengan target adalah penerbitan SKI/SKE yang tidak memenuhi *timeline*. Telah dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan selama tahun berjalan namun capaian kinerja tahun 2024 masih belum mencapai target sehingga akan diusulkan penurunan target IKU tahun 2025.

4. **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.**

Tabel 48. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,98	102,83		Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan :
Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Selama tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 443 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 316 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 123 sarana masih belum memenuhi ketentuan dan 4 sarana tutup sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2024 adalah sebesar 71,98%. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 102,83% dan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

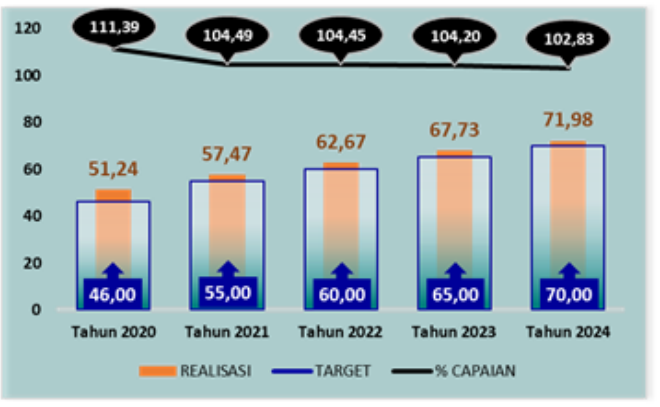

Gambar 41. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2024.

Dari garfik disamping dapat dilihat bahwa Terdapat kenaikan realisasi tiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 begitupun dengan target yg ditetapkan, adapun Target IKU yg ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar 70 % dengan realisasi terhadap indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 adalah sebesar 71, 98 % dengan capaian sebesar 102,83 %.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

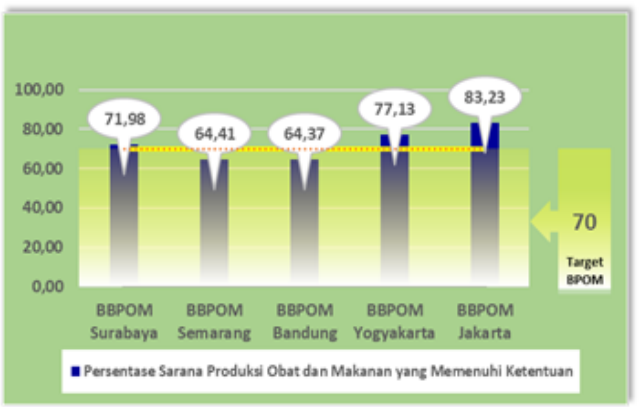

Gambar 42. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan tabel samping bahwa Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 **telah tercapai** target Tahun 2024 dengan kategori **Melampaui.**

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah 71,98 % telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “Melampaui”. Pada tahun 2024, pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan

rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa, pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan sarana UMKM pangan olahan yang mendapatkan izin edar melalui OSS RBA yang ternyata banyak sarana UMKM tersebut tidak menerapkan CPPOB dengan konsisten. Kemudahan izin berusaha melalaui OSS RBA dimana BBPOM di Surabaya memberikan contoh dokumen Standar Operasional Presedur (SOP) untuk diadaptasi oleh UMKM pada saat pengajuan Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) ternyata tidak diiringi dengan implementasi yang konsisten paska izin diterbitkan. Hal ini sempat menurunkan capaian indikator kinerja pada triwulan I.

Kegiatan kompetensi bagi petugas inspeksi selama tahun 2024 yaitu Bimtek CPOB Topik Khusus, Better Process Control School (BPCS), Bimtek Pangan Fortifikasi bagi pada bulan Februari. OJT AMDK bagi Inspektur Pangan dan Pelatihan CPOTB Junior pada bulan Maret. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior pada bulan Mei. Workshop Produk Biologi, Pelatihan PKP dan Pelatihan Inspektur CDOB Senior pada bulan Juli. Pelatihan Inspektur OBASK Junior pada bulan Agustus. Bimtek Kosmetik, Pelatihan *API Asessesment* dan Pelatihan Farmakovigilans pada bulan September. PMDA GMP *Training* pada bulan Oktober dan Workshop ATMP pada bulan November.

Pada tahun 2024 jumlah sarana produksi yang diperiksa sebanyak 443 sarana, dengan hasil 316 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), 123 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 4 sarana tutup. Sarana yang diperiksa terdiri atas 24 sarana Industri Farmasi Obat Jadi (41,67% TMK), 2 sarana Industri Bahan Baku Obat (0% TMK), 1 sarana Unit Pelayanan Darah (0% TMK), 7 sarana Industri Obat Tradisional (12,5% TMK), 1 sarana Industri Ekstrak Bahan Alam (0% TMK), 25 Usaha Kecil Obat Tradisional (32% TMK), 9 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (33,33% TMK), 9 sarana Industri Farmasi yang memproduksi Suplemen Kesehatan (22,22% TMK), 3 sarana produksi pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan dengan hasil 1 sarana tutup dan 1 sarana TMK, 52 sarana Industri Kosmetik (28,85% TMK), 293 sarana Produksi Pangan MD (27,24% TMK dan 3 sarana tutup), 16 sarana Industri Rumah Tangga Pangan (25,00% TMK).

Pada tahun 2024, sarana produksi pangan MD menjadi penyumbang terbesar TMK. Selain itu Industri Farmasi dari 24 sarana yang diperiksa 10 diantaranya TMK. Selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan Industri Farmasi mandiri sebanyak 8 sarana dengan hasil 50% TMK, 2 sarana untuk verifikasi perbaikan temuan kritis dan 8 pemeriksaan bersama dengan pusat dalam rangka pemeriksaan rutin, sertifikasi CPOB dan asistensi regulatori bagi calon industri farmasi bahan baku baru dengan

hasil 3 TMK (37,50%). Hal ini menunjukkan industri farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya masih belum mencapai level maturitas yang diharapkan.

Sarana produksi pangan yang memiliki porsi terbesar pada target pengawasan produksi secara keseluruhan menyumbang 67,47% TMK atau setara dengan 18,91% terhadap total sarana yang diperiksa. Sarana produksi obat tradisional secara total diperiksa 31 sarana selama tahun 2024 dan 12 sarana TMK, dari 12 sarana TMK ini 8 diantaranya adalah dari UMKM (UKOT/UMOT).

Pada triwulan III dilaksanakan 3 kegiatan untuk pelaku usaha yaitu Bimtek Persyaratan Teknis Mutu Produk Obat dan Makanan bagi Pelaku Usaha, Desk CAPA Inspeksi Sarana Produksi dan Desk CAPA Inspeksi Sarana Pelayanan Kefarmasian. Bimtek Persyaratan Teknis Mutu Produk Obat dan Makanan bagi Pelaku Usaha ditujukan bagi pelaku usaha obat tradisional karena banyaknya produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat untuk parameter uji mikrobiologi. Desk CAPA Inspeksi Sarana Produksi dilaksanakan untuk mempercepat penyelesaian CAPA dari Industri Farmasi sedangkan Desk CAPA Inspeksi Sarana Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan untuk sarana pelayanan kefarmasian yang mendapatkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan agar dapat menyusun CAPA yang efektif dan pelanggaran serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. Desk CAPA juga kembali dilakukan di bulan Desember untuk sarana-sarana yang mendapatkan sanksi Penghentian Sementara pada triwulan IV agar dapat segera *closed* CAPA dan dapat diaktifkan kembali kegiatannya.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 49. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	488.916.000	479.965.126	98,17	102,83	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran adalah **efisien** karena % realisasi anggaran lebih rendah daripada capaian indikator. Selama tahun 2024 terdapat revisi anggaran setiap triwulannya untuk mata anggaran produksi antara lain pengurangan pada komponen biaya penginapan untuk menambah jumlah uang transpor, pengurangan perjadin dalam kota untuk dialihkan ke perjadin luar kota karena sarana yang menjadi target pengawasan lebih banyak di luar kota Surabaya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 50. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	333,261,000	140	kali/trip	119	
					B	Pemeriksaan CPOB	104,400,000	9	kali/trip	7	
					C	Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB)	38,920,000	7	Kali/trip	6	
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C	Training GMP Topik Khusus Bagi Inspektur CPOTB	4,240,000	1	kali/trip	1	
					D	Peningkatan Kapasitas UPT melalui Forum Koordinasi dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB berdasarkan beberapa kriteria	6,020,000	0	kali/trip	0	Revisi Kegiatan
					E	Workshop Monitoring Dan Evaluasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan	6,020,000	1	kali/trip	0	
					N	Supervisi Desk CAPA Tindak Lanjut Inspeksi CPKB	12,040,000	0	kali/trip	0	Revisi Kegiatan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah pemeriksaan sarana produksi OMKA, pemeriksaan CPOB, dan inspeksi bersama sarana produksi. Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri Farmasi, Industri Bahan Baku Obat, Unit Pelayanan Darah) sebanyak 27 sarana, dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 52 sarana, dengan hasil 37 sarana memenuhi ketentuan dan 15 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional IOT/IEBA sebanyak 9 sarana dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan, sarana produksi suplemen kesehatan sebanyak 12 sarana dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan, 3 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tutup; sarana produksi UKOT sebanyak 25 sarana dengan hasil 17 sarana memenuhi ketentuan dan 8 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi UMOT sebanyak 9 sarana dengan hasil 7 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 293 sarana dengan hasil 211 sarana memenuhi ketentuan, 79 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 3 sarana tutup, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 16 sarana dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi petugas pengawas di tahun 2024 turut mendukung keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja BBPOM di Surabaya. Kegiatan pengembangan komptensi ini diselenggarakan oleh berbagai pihak, ada yang diselenggarakan oleh Badan POM baik oleh unit pengampu maupun oleh PPSDM, Pemerintah Negara lain yang bekerja sama dengan Badan POM seperti PMDA Jepang dengan GMP *Training* for *API Manufacturing*. Program pengembangan kompetensi selama tahun 2024 sudah mencakup pengembangan kompetensi untuk inspektur pangan, kosmetik, obat tradisional dan obat.

g. Upaya Peningkatan Kinerja.

Evaluasi dari unit pengampu di pusat yang dilakukan periodik setiap tahun di awal tahun menjadi masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun 2024. Penguatan secara internal melalui monitoring dan evaluasi bulanan serta intensifikasi komunikasi internal atas isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja misal personel yang purna tugas dan penambahan personel baru yang masih membutuhkan pembekalan kompetensi sebelum dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dilakukan agar kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu.

Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut terbaru.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, maka dipandang perlu untuk meningkatkan dan kompetensi petugas pengawas serta melakukan diseminasi hasil pelatihan/sosialisasi peraturan terbaru terkait pemeriksaan sarana produksi untuk menyamakan persepsi petugas.

Pembinaan pelaku usaha obat tradisional masih perlu dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 51. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	66,75	94,21		Cukup

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan:

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Keputusan Kepala Badan POM nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus

Lainnya; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.R-PW.01.10.3.34.02.22.95 tanggal 15 Februari 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Target Pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian Tahun 2022. Keputusan Kepala BPOM Nomor 295 tahun 2022 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat. Per BPOM NO. 9 tahun 2024 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 766 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 510 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 254 sarana masih belum memenuhi ketentuan dan 2 sarana tutup, sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2024 adalah sebesar 66,75%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,21% dengan kriteria **Cukup.**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

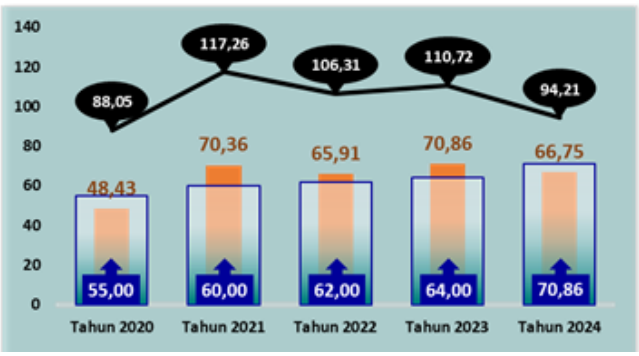

Gambar 43. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024

Terdapat perubahan target kinerja untuk IKU Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di triwulan II sebagai hasil riviu dari Biro Perencanaan terhadap capaian IKU BBPOM di Surabaya tahun sebelumnya. Oleh karena itu, target IKU dirubah yang semua 66% menjadi 70,86%. Apabila

dibandingkan dengan target renstra awal, maka capaian dari tahun 2024 adalah 101,14%, namun apabila dibandingkan dengan target hasil revisi maka capaiannya adalah menjadi 94,21%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

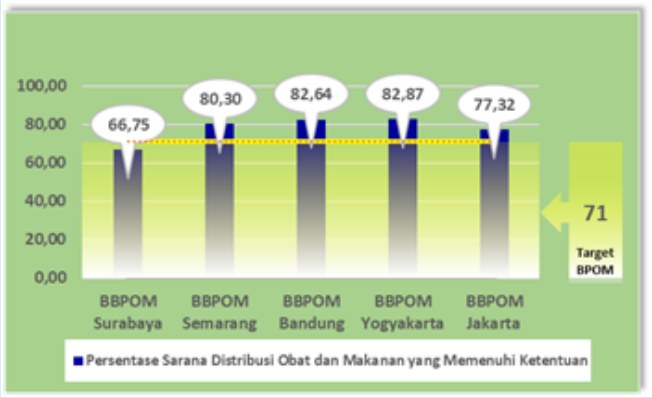

Gambar 44. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Berdasarkan grafik disamping bahwa Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 **belum mencapai** target Tahun 2024 dengan kategori **Akan Tercapai.**

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024, pemeriksaan sarana distribusi dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, pangan, kosmetika, penotifikasi kosmetika, sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian antara lain pelaksanaan intensifikasi pengawasan depot jamu, penelusuran penyaluran Obat-oabt Tertentu yang sering disalahgunakan. penelusuran Ozempic diduga palsu dan diversi obat keras ke perdagangan daring serta adanya temuan obat palsu di saryanfar yaitu Anti Tetanus Serum. Pada tahun 2023, inspeksi dalam rangka sertifikasi masih dihitung sebagai capaian dari fungsi inspeksi untuk IKU persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sehingga menyebabkan capaian IKU menjadi tinggi (70,86%) bila dibandingkan dengan target renstra (64%). Pada tahun 2024, fungsi inspeksi tidak lagi melakukan inspeksi sertifikasi CDOB yang menggunakan anggaran dari inspeksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, inspeksi sertifikasi CDOB dilakukan menggunakan anggaran dari fungsi sertifikasi sedangkan untuk personel menggunakan personel gabungan antara personel fungsi sertifikasi dan inspeksi dikarenakan keterbatasan personel dari fungsi sertifikasi. Sehingga, capaian untuk

sarana distribusi untuk tahun 2024 adalah murni dari pemeriksaan dalam rangka pengawasan rutin dan intensifikasi.

Sarana Distribusi Obat menyumbang 49,21% TMK secara keseluruhan, diikuti oleh Sarana Distribusi Obat Tradisional sejumlah 23,62% dan Distribusi Kosmetik sebesar 18,11%. Kegiatan intensifikasi pengawasan depot jamu pada bulan Agustus menunjukkan masih banyak pelanggaran pada depot jamu terutama terkait menjual obat tradisional tanpa ijin edar. Hasil instensifikasi pengawasan obat juga menghasilkan beberapa sarana mendapatkan sanksi Penghentian Sementara Kegiatan karena ditemukan temuan kritis terkait penyaluran obat.

Balai Besar POM di Surabaya dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian terkait apa legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan grup *whatsapp* yang berisi Dinas Kesehatan se Jawa Timur dan Balai Besar POM di Surabaya untuk koordinasi dan diskusi dapat dilakukan agar tidak tergantung dengan pertemuan luring.
Balai Besar POM di Surabaya juga bekerja sama dengan Universitas Surabaya untuk memberikan pembekalan terkait CDOB kepada peserta program profesi Apoteker di Universitas Surabaya.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 52. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	772.851.000	699.185.182	90,47	94,21	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena % realisasi anggaran hampir sama dengan capaian indikator. Pada tahun 2024 terdapat revisi anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Saryanfar dengan Lintas Sektor, penambahan trip Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat sarana Distribusi, pengurangan trip kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK non Fisik POM, menambah trip Koordinasi/Konsultasi/Joint Inspection/Pengembangan Kompetensi Dalam Kota, penambahan trip Inspeksi Bersama CPOB Luar Kota dan Dalam Kota.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 53. Rencana Aksi Pada Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Inspeksi Bersama	25,020,000	8	kali/trip	5	
					B	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sarfanyar, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat Dan Makanan Ilegal	677,073,000	310	kali/trip	299	
					C	Pengawasan Kasus Khusus/Food Security	22,640,000	8	kali/trip	4	
					D	Pengawasan Periklanan	40,120,000	24	kali/trip	18	

Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALI SASI	Keterangan
				F	Pengawasan Penerapan Farmakovigilans	11,070,000	0	kali/trip	0	Revisi Kegiatan
	Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F	Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	9,060,000	1	kali/trip	0	
				G	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik	5,190,000	0	kali/trip	0	Revisi Kegiatan
				H	Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan ONPP	6,020,000	1	kali/trip	1	
				I	Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia (Acara back to back meeting dengan kegiatan Tim Kerja Pengawasan Mutu ONPP dan Tim Kerja Pengawasan Informasi ONPP	4,360,000	1	kali/trip	1	Revisi Anggaran
				J	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM	4,560,000	0	kali/trip	0	Revisi Anggaran
				K	WORKSHOP PENGUATAN PENGAWASAN POST MARKET IKLAN DAN PENANDAAN OBAT UNTUK UPT DI SELURUH INDONESIA	5,732,000	1	kali/trip	1	
				L	Sosialisasi Regulasi di Bidang Obat	2,520,000	0	kali/trip	0	Revisi Anggaran
				M	Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika	11,464,000	0	kali/trip	0	Revisi Anggaran
				O	Advokasi Ke Pemda Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi dan Wilayah Prioritas Percepatan Penurunan Stunting terkait Pengawasan Pangan Fortifkasi	8,850,000	0	kali/trip	0	Revisi Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU antara lain: inspeksi bersama, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarfanyar, pangan/ penerapan CDOB/ audit komprehensif/ aksi penertiban obat dan makanan ilegal, pengawasan kasus khusus/food security, pengawasan periklanan. Pada triwulan III terdapat

kegiatan Pelatihan CDOB Senior, Pelatihan Inspektur OBASK Juniorserta Forum Komunikasi Peredaran Obat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi petugas dan membahas isu-isu terkait pengawasan obat dan obat alam dan suplemen kesehatan.

Pada tahun 2024 jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa sebanyak 295 sarana meliputi 91 sarana PBF dengan hasil 48 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), 41 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan 2 sarana tutup, 46 sarana Apotek dengan hasil 16 sarana MK dan 30 sarana TMK, 9 sarana Toko Obat dengan hasil 4 sarana MK dan 5 sarana TMK, 28 sarana Instansi Farmasi Pemerintah dengan hasil 18 sarana MK dan 10 sarana TMK, 45 sarana Rumah Sakit dengan hasil 31 sarana MK dan 14 sarana TMK, 36 sarana Puskesmas dengan hasil 33 sarana MK dan 3 sarana TMK, 40 sarana Klinik dengan hasil 18 sarana MK dan 22 sarana TMK.

Untuk sarana distribusi kosmetik selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 184 sarana yang meliputi 141 sarana distribusi kosmetik dan 43 sarana klinik kecantikan. Klinik kecantikan yang diperiksa meliputi klinik penotifikasi dan juga importir. Distribusi kosmetik yang diperiksa Klinik Kecantikan yang diperiksa sejumlah 43 sarana dengan hasil 35 sarana MK dan 8 sarana TMK. Untuk sarana distribusi obat tradisional selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 141 sarana dengan hasil 81 sarana MK dan 60 sarana TMK. Sedangkan untuk distribusi pangan, pengawasan diintesifikasikan pada saat menjelang lebaran dan nataru. Selain pengawasan rutin menggunakan form 33, pada saat instensifikasi pangan menjelang lebaran dan nataru juga berfokus pada produk TIE, rusak dan kadaluarsa. Selama tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 59 sarana distribusi pangan dengan hasil 38 sarana MK dan 21 sarana TMK.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Penguatan secara internal melalui monitoring dan evaluasi bulanan serta intensifikasi komunikasi internal atas isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja misal personel yang purna tugas dan penambahan personel baru yang masih membutuhkan pembekalan kompetensi sebelum dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dilakukan agar kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu.

Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan

kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut terbaru. Pada triwulan II dibuat rekomendasi mengenai pembinaan pelaku usaha dalam penyampaian CAPA dan dilaksanakan pada triwulan III untuk PBF berupa kegiatan Desk CAPA sertifikasi bekerjasama dengan fungsi sertifikasi.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kembali Cangkrukan dengan target peserta penanggung jawab sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, pertemuan rutin dengan Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi, dimana selain dilakukan sosialisasi peraturan serta diskusi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat. Selain itu perlu kembali diaktifkan Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.

6. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 54. Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,95	5,00	101,01		Sangat Baik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2024 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Badan POM, dan BBPOM di Surabaya memperoleh Indeks Pelayanan Publik dengan nilai 5,0 dengan kategori Pelayanan Prima. BBPOM Surabaya mendapatkan nilai sempurna untuk semua aspek yang dinilai.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

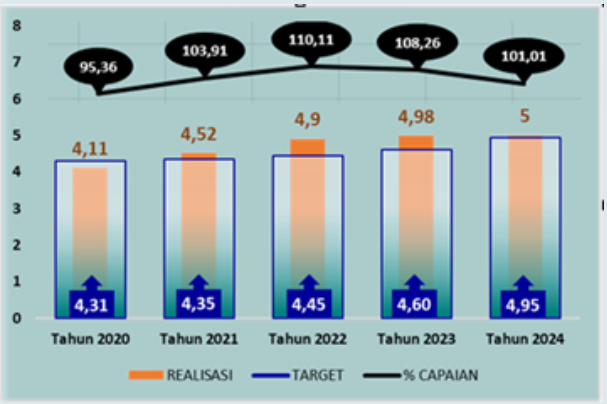

Gambar 46. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya

Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa Target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi daripada target review Renstra karena pada tahun 2023 target telah tercapai melebihi target tahun 2024 jadi tidak mungkin menetapkan target tahun 2024 lebih rendah dari capaian tahun 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

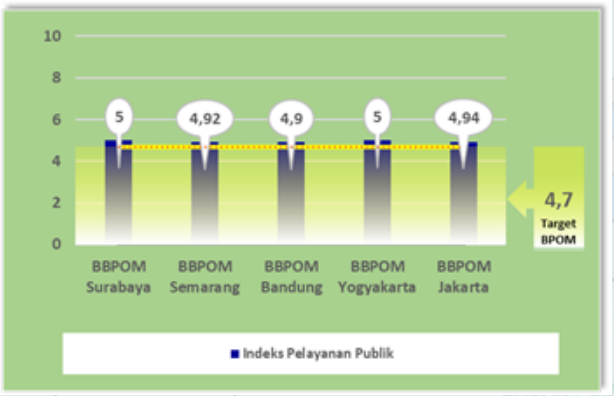

Gambar 47. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Dari grafik di samping diketahui bahwa Indeks Pelayanan Publik tertinggi dicapai oleh BBPOM Surabaya dan BBPOM Yogyakarta dengan nilai sempurna 5, disusul berturut turut oleh BBPOM Jakarta, BBPOM Semarang dan BBPOM Bandung. Semua BBPOM telah melampaui target nasional BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan BBPOM di Surabaya untuk mendapat kategori penilaian "Pelayanan Prima", yaitu pemenuhan persyaratan/klausul penilaian secara maksimal untuk seluruh 6 (enam) aspek penilaian. Berdasarkan penilaian/evaluasi mandiri, seluruh aspek mendapatkan nilai maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

- Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala setiap tahun, dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
- Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik di mata pelanggan.
- Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
- Upaya menunjukkan profesionalisme SDM yaitu adanya SK pelaksanaan tugas Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional, pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja, dll
- Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinu dilakukan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, *capacity building* dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima. Secara rutin dijadwalkan sharing session dalam format *morning breeze* sebagai media untuk berbagi pengetahun dan ketrampilan diantara para pemberi layanan publik sehingga penerima layanan mendapatkan layanan yang sama.
- Pemberian reward dan punishment untuk petugas pelayanan publik
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan. Fasilitas yang disiapkan sesuai dengan SE Menteri PANRB No. 66/2020 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ada 14 fasilitas yang harus disediakan bagi kelompok rentan. Keempat belas sarana prasarana tersebut meliputi kursi roda/tongkat/krek; pintu masuk yang mudah diakses; jalan landai dan pegangan rambat; lift khusus kelompok rentan disertai huruf braille; selasar yang menghubungkan semua ruang; toilet

khusus; loket khusus; ruang tunggu khusus; serta guiding block dan parkir khusus. Kemudian, alat bantu tunanetra dan tunarungu; arena bermain anak; ruang laktasi/menyusui; serta fasilitas lain pendukung layanan seperti petugas pemandu ataupun petugas yang mampu berbahasa isyarat.

- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti perubahan dekorasi, penambahan fasilitas *coffee corner*, penyediaan minuman dan kue tradisional, secara gratis dll.
- Memastikan sistem antrian di ruang layanan publik berfungsi dengan baik.
- Melakukan pemuktahiran system informasi pelayanan publik yang dilakukan setiap hari, mengoptimalkan sistem informasi yang terhubung ke SIPPN, dll.
- Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai *timeline*, mengoptimalkan penggunaan kanal pengaduan nasional SP4N Lapor, penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala, dll.
- Pengembangan inovasi yang berkelanjutan dengan dukungan SDM, Sarana dan Prasarana, serta anggaran.
- Melaksanakan pelatihan Bahasa isyarat bagi pemberi pelayanan publik.
- Melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan tema "Konsumen Cerdas Memilih Obat dan Makanan Aman" kepada para penyandang disabilitas yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2024 yang diikuti oleh 50 orang anak dan remaja berkebutuhan khusus.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 55. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Pelayanan Publik	71.312.000	43.115.308	60,46	101,01	90 % (Efisien)

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Efisiensi anggaran tahun 2024 adalah 92% (efisien) karena target tercapai dengan anggaran yang lebih kecil dari yang direncanakan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 56. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
15	Indeks Pelayanan Publik	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	27,700,000	1	kegiatan	0	
					E	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	18,600,000	40	kali/trip	26	
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	21,816,000	1	kali/trip	1	

Selama tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pelayanan publik sbb :

- Telah diterbitkan Surat Keterangan Impor (SKI) sebanyak 11.209 dari 11.209 permohonan (100%).
- Telah diterbitkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) sebanyak 10.700 dari 10.700 permohonan (100%).
- Rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik sebanyak 36 rekomendasi dari 36 permohonan (100%).
- Rekomendasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebanyak 37 rekomendasi dari 37 permohonan (100%)
- Rekomendasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk industri menengah dan besar sebanyak 133 rekomendasi dari 134 permohonan (99,2%)
- Rekomendasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk UMK pangan sebanyak 862 rekomendasi dari 862 permohonan (100%)
- Rekomendasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sebanyak 10 rekomendasi dari 11 permohonan (90,9%)
- Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sebanyak 87 rekomendasi dari 105 permohonan (82,8%)
- Sertifika hasil pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 26 sertifikat dari 26 permohonan uji.

- Layanan pengaduan masyarakat dan informasi diberikan 2.051 layanan informasi dan 33 pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan yang menunjang layanan publik lainnya adalah konsistensi dan pengembangan inovasi layanan publik yang dimiliki, yaitu Cangkrukan (Bincang dengan Kru Layanan), AMKM (Anda Menanyakan Kami Menjawab), Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing), dan Sketsa (Surat Keterangan Ekspor Terbit Satu Hari Saja).

Inovasi terbaru yang dikembangkan oleh BBPOM Surabaya adalah Jatim Truly (Jawa Timur Trusted Culinary). Inovasi ini merupakan bagian dari Program Keamanan Pangan Terpadu yang bertujuan memberikan pemahaman kepada para PKL (Pedagang Kreatif Lapangan) yang biasanya berjualan di sentra sentra wisata atau kuliner agar menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan. Inovasi Jatim Truly mendapatkan sambutan yang sangat baik dari Pemerintah Daerah yang ingin agar pangan di wilayahnya mempunyai nilai lebih dan menjadi tujuan wisata dan industri kreatif. PKL yang telah mendapatkan pembinaan dari BBPOM Surabaya akan diberikan stiker yang menyatakan bahwa pangan yang dijual aman. Program inovasi Jatim Truly telah dilaksanakan di Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya masing masing sebanyak 120 PKL di Kabupaten Madiun dan 110 PKL di Kota Surabaya.

Selain inovasi yang mendukug pelayanan publik, BBPOM Surabaya juga mengembangkan inovasi untuk mendukung *back office* dan mempercepat pelayanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Inovasi yang bersifat internal ini dikembangkan untuk mendukung kinerja pelayanan publik, menjaga integritas pegawai dan organisasi, menjamin profesionalisme, *fairness*, dan akuntabilitas serta mendukung penerapan *Good Governance and Clean Government*.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Surabaya merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, dimana tidak sepenuhnya merupakan kewenangan BBPOM Surabaya namun kewenangan Badan POM di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan BBPOM di Surabaya mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat.

Untuk itu, BBPOM di Surabaya agar beradaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha. Kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dijalin misalnya layanan jemput bola pendampingan kepada UMKM dalam rangka penerbitan nomor izin edar. Layanan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di masing masing Kabupaten/Kota sehingga pendampingan oleh BBPOM Surabaya lebih efektif.

BBPOM Surabaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masukan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha terhadap semua aspek standar pelayanan publik sehingga standar yang ditetapkan merupakan titik tengah antara kepentingan BPOM sebagai regulator dan pelaku usaha.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2024, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 5,0 melebihi target tahun 2024 dan target akhir periode renstra. Meskipun telah mendapatkan hasil yang maksimal namun perbaikan aspek pelayanan publik dilakukan secara berkesinambungan dengan menerapkan aspek aspek pelayanan prima sehingga BBPOM di Surabaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya dan mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Masukan dan pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Masukan dari evaluator juga akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 57. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,00	100,00	103,09		Sangat Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

A = Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar/ Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

B = Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar/ Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

C = Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar/ Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan x 100%

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B dan Pemohon Notifikasi Kosmetik..

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis

Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2024. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2024.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada tahun 2024 sebesar 100,00 dengan capaian sebesar 103,09% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

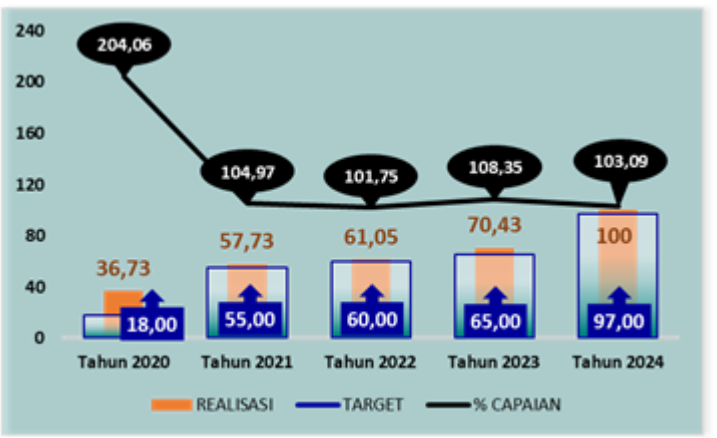

Gambar 48. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Perbedaan target tahun 2024 dengan target reviu renstra karena hasil reviu oleh unit pengampu. Sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, terdapat peningkatan target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Sejak tahun 2021, persentase capaian indikator tersebut masuk dalam kategori Sangat Baik. Hal ini dikarenakan upaya pendampingan terus

menerus dilakukan dengan upaya percepatan melalui kegiatan inovasi Gempur Jatim, Jatim Glowing, dan Sippotra.

Dibandingkan tahun 2023, persentase capaian tahun 2024 mengalami penurunan, namun realisasi tahun 2024 (100%) meningkat dari tahun 2023 (70,43%), serta persentase capaian masih dalam kategori Sangat Baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

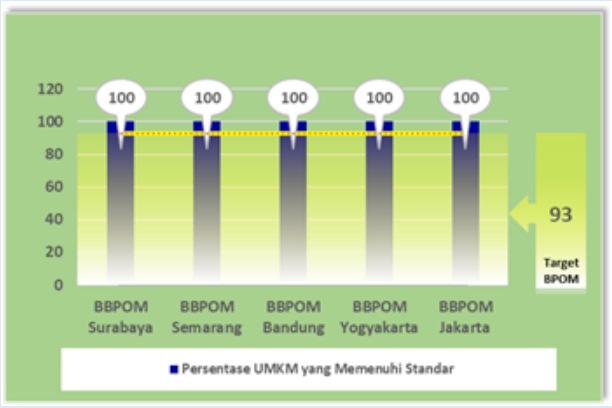

Gambar 49. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Pada tahun 2024, target nasional untuk indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 93%. Dari 5 (lima) Balai yang sejenis / setara dengan Balai Besar POM di Surabaya, seluruhnya tercapai realisasi 100% dan memenuhi target nasional. Untuk Balai Bersar POM di Surabaya, tercapainya realisasi tersebut karena adanya peningkatan komitmen dan pemahaman pelaku usaha UMKM pangan, OT, maupun kosmetik yang mengikuti kegiatan pendampingan dalam memenuhi cara produksi dan/atau cara pembuatan yang baik.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan hasil capaian tahun 2024, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 103,09%. Hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan, asrot untuk obat tradisional, dan notifkos untuk kosmetik.

Dengan dilaksanakannya bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh. Meskipun Bimbingan Teknis secara khusus dilaksanakan hanya

setahun sekali, pelaku UMKM yang baru bergabung tetap memperoleh materi Bimbingan Teknis seperti yang pernah disampaikan, meskipun tidak terdapat penilaian *pre-test* dan *post-test*. Selain itu, pelaku UMKM tetap didampingi secara penuh.

Dari ketiga program inovasi pendampingan UMKM Balai Besar POM di Surabaya, pendampingan UMK pangan olahan adalah yang paling banyak. Namun, adanya kriteria tahapan yang harus diikuti oleh UMK pangan olahan yang didampingi, menyebabkan tidak semua yang telah didampingi dapat dihitung sebagai kegiatan pendampingan. Salah satu tahapan tersebut adalah pelaku UMK pangan olahan harus mengikuti Bimtek sesuai mekanisme dan melaksanakan *pre-test* dan *post-test*. Penilaian seringkali tidak dilakukan oleh petugas saat melakukan bimtek di luar jadwal yang telah ditetapkan karena keterbatasan waktu. Desk konsultasi dan pendampingan penerbitan Izin Penerapan (IP) CPPOB lebih dibutuhkan oleh pelaku UMK pangan olahan, sehingga tidak dapat melakukan *pre-test* dan *post-test.* Untuk mengatasi hal tersebut, selanjutnya akan dilakukan *pre-test* dan *post-test* agar data pendampingan UMK pangan olahan yang dilaporkan sesuai dengan yang telah dilakukan.

Seluruh UMK pangan olahan yang akan mendaftarkan produk di Badan POM, harus memiliki sertifikat IP CPPOB. Terdapat peningkatan signifikan permohonan sertifikat IP CPPOB UMK Pangan Olahan, dari tahun 2023 sejumlah 545 menjadi 895 pengajuan di tahun 2024. Hal ini di antaranya disebabkan karena semakin banyaknya minat UMKM yang bergerak di bidang produksi pangan olahan, kemudahan proses penerbitan sertifikat IP CPPOB untuk UMK, serta tingginya inovasi produk di bidang pangan olahn .

Banyaknya IP CPPOB yang diajukan, menunjukkan bahwa sangat banyak UMK pangan olahan yang akan mendaftarkan produknya di Badan POM. Namun sayangnya, tidak semua pelaku UMK memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tahap pertama tersebut. Hal ini di antaranya disebabkan oleh pelaku UMK tidak memahami kekurangan data yang diminta, tidak berkonsultasi kepada petugas pendamping, serta tidak tersedia fasilitator di wilayahnya yang dapat memberikan informasi yang tepat terkait pengajuan tersebut.

Pada saat kegiatan Klinik POM yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota, terdapat kecenderungan bahwa pelaku UMK tidak melanjutkan progres pengajuan registrasi produknya apabila tidak didampingi secara langsung dan intensif, sementara sumber daya Balai Besar POM di Surabaya untuk melakukan pendampingan Klinik POM secara langsung/ *onsite* sangat terbatas. Hal ini juga berlaku untuk pelaku UMKM OT dan kosmetik. Pelaku UMKM juga lebih paham bila didampingi secara langsung, bukan melalui daring.

Keterbatasan sumber daya sangat berpengaruh terhadap intensifikasi pendampingan. Petugas tidak dapat secara terus menerus dan secepatnya merespon pertanyaan maupun tindak lanjut dari pelaku UMKM. Melalui Grup *whatsapp* SIPPOTra, Jatim Glowing, dan Gempur Jatim, diharapkan sesama pelaku usaha dapat saling membantu bila ada yang bertanya. Selain itu, kolaborasi dengan lintas sektor di kabupaten/kota yang juga memiliki program pendampingan sangat perlu ditingkatkan, agar dapat melakukan pendampingan bila petugas Balai Besar POM di Surabaya tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pendampingan secara langsung di wilayah tersebut. Penyampaian contoh dokumen juga tetap akan dilakukan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 58. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	420.728.000	321.304.321	76,37	103,09	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target IKU tidak dilakukan revisi anggaran karena anggaran masih cukup memadai dan target indikator telah tercapai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 59. Rencana Aksi pada Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuata	Sertifikasi	QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A	GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) JATIM	298,248,000	73	kali/trip	64	

Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
n OT dan Kosmetik yang baik										
				B	SiPPOTra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional)	75,820,000	20	kali/trip	8	
				C	Jatim Glowing	46,660,000	10	kali/trip	13	

Target pendampingan UMKM sesuai DIPA 2024 adalah 131 UMKM yang terdiri dari 100 UMK Pangan Olahan, 18 UMKM Obat Bahan Alam, dan 13 UMKM Kosmetik. Pada saat pelaksanaan rekruitmen pendampingan UMKM terdapat 135 UMKM yang mendaftar. Balai Besar POM di Surabaya membuka pendaftaran pendampingan melalui media sosial dan jejaring lintas sektor sehingga banyak pelaku usaha mendaftar secara mandiri maupun diusulkan oleh lintas sektor. Balai Besar POM di Surabaya juga tidak menutup pendaftaran tersebut sepanjang tahun 2024, sehingga dimungkinkan ada penambahan jumlah UMKM yang didampingi hingga akhir tahun 2024.

Dalam rangka pendampingan UMKM, BBPOM di Surabaya memiliki inovasi Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), SiPPOTra (Sinergitas Pengawasan dan Pembinaan Obat Tradisional), dan Jatim Glowing (Jawa Timur Global Cosmetic World Marketing) untuk mempermudah UMKM dalam mendapatkan ijin edar produknya. Pada tahun 2022, inovasi Gempur Jatim berhasil meraih Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Hal ini menjadikan Gempur Jatim semakin dikenal baik di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur, sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang tertarik dan meminta untuk dilaksanakan Gempur Jatim di wilayahnya masing masing.

Penetapan target dan Bimbingan Teknis telah dilaksanakan di triwulan I. Selain itu, terdapat pula program Badan POM yaitu NUANSA untuk UMKM Obat Bahan Alam yang naik tahap CPOTB dan AKSELERASI Maturity untuk UMKM kosmetik yang berproses Sertifikasi CPKB. Kegiatan tersebut bersinergi dengan inovasi Balai Besar POM di Surabaya yaitu Sippotra dan Jatim Glowing.

Permasalahan administratif maupun teknis banyak dialami oleh pelaku usaha. Beberapa permasalahan tersebut meliputi tidak memahami proses penerbitan atau pembaruan NIB menjadi versi RBA, tidak memahami proses penambahan dan/atau perbaikan KBLI, tidak

memiliki NPWP atau NPWP berstatus KSWP tidak valid, kesulitan memiliki penanggung jawab teknis yang sesuai, tidak memahami teknologi proses produksi yang tepat. Terkait permasalahan tersebut, Balai Besar POM di Surabaya bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota untuk memudahkan pelaku usaha dalam proses terkait NIB, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten/Kota terkait pembuatan NPWP dan/atau pembaruan status NPWP, serta asosiasi profesi terkait penanggung jawab teknis.

Selain permasalahan di atas, banyak pula pelaku UMKM yang tidak memiliki fasilitas perangkat teknologi seperti komputer atau laptop. Sayangnya tidak semua lintas sektor di daerah dapat menyediakan fasilitas tersebut sehingga pembuatan dokumen menjadi terhambat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang berkomitmen tinggi sehingga dapat melakukan pemenuhan dokumen meskipun tidak memiliki fasilitas perangkat tersebut.

Selama tahun 2024 juga dilaksanakan pendampingan UMK pangan olahan bersama mahasiswa magang. UMK yang menjadi sasaran pendampingan adalah yang belum memiliki Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Keterlibatan mahasiswa sangat membantu dalam pemenuhan dokumen sebagai persyaratan penerbitan PB UMKU IP CPPOB. Setelah memperoleh dokumen IP CPPOB, pelaku usaha juga didampingi dalam pendaftaran akun perusahaan dan pendaftaran produk pangan melalui ereg-rba.pom.go.id, termasuk dalam mempersiapkan dokumen persyaratan. Namun masih terdapat pelaku usaha yang tidak aktif sehingga menyulitkan untuk diminta keterangan terkait produk yang diproduksi.

Pendampingan oleh mahasiswa diutamakan untuk komoditi pangan dikarenakan tidak ada proses pemeriksaan sarana sebagai persyaratan penerbitan IP CPPOB untuk UMK. Untuk komoditi OT dan kosmetik, tahapan penerbitan PB UMKU sertifikat CPOTB Bertahap dan sertifikat SPA CPKB tetap memerlukan pemeriksaan sarana dan evaluasi CAPA sehingga dilakukan sendiri oleh petugas Sertifikasi.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Meskipun persentase UMKM Memenuhi Standar telah mencapai target pada tahun 2024, namun tetap harus terus dilakukan pendampingan kepada UMKM.

Pelaku UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik perlu didampingi agar dapat memenuhi standar cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

Untuk meningkatkan capaian pendampingan dan meningkatkan konsistensi enerapan standar, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.

b. Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus.

c. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam pendampingan UMKM terkait sarana prasarana saat desk konsultasi untuk menunjang pemenuhan dokumen persyaratan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik serta penerapan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

d. Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.

e. Melaksanakan bimbingan teknis secara efektif terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik, termasuk melakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test.

f. Melakukan pendampingan secara intensif, efektif, dan sistematis sehingga UMKM dapat menerapkan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

g. Menambahkan materi terkait pemasaran untuk meningkatkan semangat pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

h. Berkolaborasi dengan lintas sektor dan memberdayakan mahasiswa magang dalam melakukan pendampingan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 sudah tercapai sehingga tidak dilakukan usulan perubahan target. Namun tetap diperlukan upaya peningkatan di tahun 2024 ini. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:

- Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg.
- Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 60. Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,18	104,40		Sangat Baik

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 diperoleh dari penilaian terhadap Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota. Persentase realiasi 99,18 % diperoleh dari hasil kumulatif penilaian aspek TKPPOM sebesar 29,18%; aspek TPPS sebesar 10% dan aspek DAK sebesar 60%.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Batas Bawah
Tahun 2024	95	99.18	104.40	0

Capaian kinerja Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebesar 104.40% telah melebihi target yang telah ditetapkan dan hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator baru.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

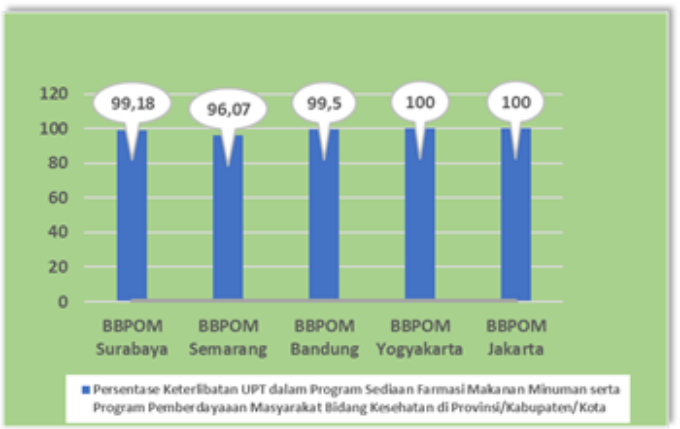

Gambar 50. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Realisasi Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga TW 4 mencapai 99,18 % dari target 95 % (% capaian 104,40%) .

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang tertinggi di antara satuan kerja yang setara dengan BBPOM di Surabaya adalah BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta yang terendah adalah BBPOM di Semarang. BBPOM di Surabaya berada pada posisi keempat dengan nilai evaluasi sebesar 99,18% di atas BBPOM di Semarang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Pada tahun 2024 Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota telah menjadi sasaran srategis indikator kinerja utama sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target 2024 yang sudah ditetapkan, antara lain:

- Mengawal dan melakukan verifikasi usulan DAK tahun N+1 dari Dinas Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya.
- Sebagai narasumber terkait pengawasan dan perizinan obat dan makanan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK BOK NF tahun 2024 melalui aplikasi smartpom secara berkala setiap bulan.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota baik melalui WAG maupun koordinasi secara langsung.
- Melakukan Desk Monev realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK secara daring.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 62. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	9.604.000	9.603.440	99,99	104,40	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran 2024.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 63. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	L	Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK NF POM UPT	4,630,000	1	kali	0	
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	19,040,000	0	kali	0	Revisi Anggaran & Kegiatan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain melakukan koordinasi dan advokasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan pemangku kepentingan terkait, Balai Besar POM di Surabaya sebagai narasumber terkait pengawasan obat dan makanan mengawal pelaksanaan DAK mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang telah dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota melalui smartpom secara berkala.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Sebagai upaya peningkatan nilai Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu

1. Meningkatkan koordinasi dan advokasi terkait pengawasan obat dan makanan serta stunting dengan pemangku kepentingan terkait.
2. Mendorong Kabupaten/Kota dalam rangka pembentukan tim TKPPOMN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan sampai dengan pelaksanaan DAK BOK NF POM terhadap Kabupaten/ Kota penerima DAK.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kabupaten/ Kota secara luring maupun daring.
6. Meningkatkan komptensi petugas Balai Besar POM di Surabaya untuk mendukung proses pelaksanaan DAK BOK NF POM lebih baik lagi.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan koordinasi dan advokasi untuk mendorong pembentukan tim TKPPOMN sebagai wujud komitmen dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan obat dan makanan.

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Surabaya telah berhasil mewujudkan Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan NSS sebesar **100,59%** dan Kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut di dukung oleh 4 Indikator sebagai berikut:

1. **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**
   b. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.**

Tabel 64. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,20	97,43	102,34		Sangat Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) *Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;*

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). BBPOM di Surabaya memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial.

BBPOM di Surabaya melaksanakan Survei Efektifitas KIE hingga triwulan III tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 382 dari target 380 orang. Survei dilaksanakan terhadap responden yang telah mengikuti kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dari BBPOM di Surabaya dalam berbagai metode mulai dari KIE secara tatap muka langsung bersama Tokoh Masyarakat, melalui webinar atau Zoom Meeting misalnya kegiatan Cangkru'an, sosialisasi kepada mahasiswa dan komunitas ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya,

Capaian Tingkat efektifitas KIE BBPOM Surabaya pada tahun 2024 adalah 97,43 dari target 95,20 atau dengan capaian 102,34% yang artinya sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik**, dengan rincian masing masing komponen sebagai berikut :

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE : 97,42
b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima : 97,7
c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE : 97,51
d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan : 96,79

c. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

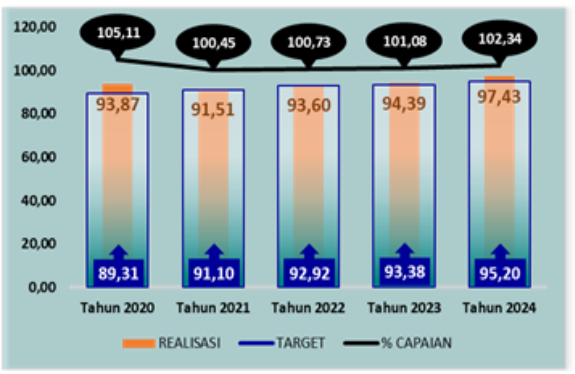

Gambar 51. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Tahun - sebelumnya.

berdasarkan grafik disamping, Pada tahun 2023 capaian efektifitas KIE telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024, jadi tidak mungkin menetapkan target tahun 2024 lebih rendah daripada capaian tahun 2023 dan berdasarkan Analisa tren target terasebut cukup rasional sehingga BBPOM Surabaya cukup optimis menetapkan target tersebut.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

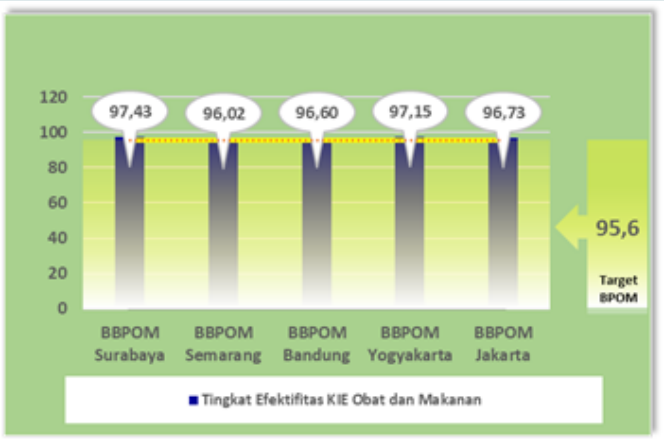

Gambar 52. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Dari grafik di atas nampak BBPOM Surabaya mendapatkan Tingkat Efektifitas KIE tertinggi diikuti BBPOM Yogyakarta, BBPOM Jakarta, BBPOM Bandung dan terakhir BBPOM Semarang. Semua UPT BBPOM telah melampaui target yang ditetapkan BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Berdasarkan hasil survey Tingkat efektifitas KIE tahun 2024, capaian yang diperoleh sesuai dengan target. Hal-hal yang mempengaruhi capaian target:

- Konsistensi dalam merencanakan konsep, ragam, konten/materi kegiatan KIE/sosialisasi/penyebaran informasi yang terstruktur, sistematis, dan menarik. Perencanaan yang dimaksud termasuk pemilihan media yang diminati dan sesuai untuk kelompok yang disasar (seperti usia, domisili perkotaan/pedesaan, tren terkini, dll), baik menggunakan media langsung. media non elektronik, maupun media elektronik.
- Melakukan telaah dan pembaruan secara kontinu dengan melakukan pengamatan minat masyarakat terkini sebagai bahan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan agar lebih efektif dalam pemberian informasi
- Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (target peserta yang besar), seperti penyesuaian dengan kearifan lokal, senam Cek Klik, dll.
- Perencanaan kegiatan yang mencakup frekuensi, perluasan, dan pemerataan target KIE/sosialisasi/penyebaran informasi ke seluruh daerah. Perencanaan yang dilakukan tidak hanya dilakukan di satu daerah, tetapi dilakukan pemerataan ke seluruh wilayah dengan berbagai ragam media KIE yang digunakan.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 65. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	12.279.392.000	12.261.356.897	99,85	102,34	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator dapat direalisasikan dengan menggunakan sumber daya/anggaran yang tersedia. Pada tahun 2024 seluruh kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat telah dilaksanakan.dengan realisasi anggaran 99,85% dan Tingkat efisiensi 100% (efisien).

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 66. Rencana Aksi pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	BDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	E	Penyuluhan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	1,578,970,000	20	kali	20	
					F	Sosialisasi Keamanan dan Penandaan Obat dan Makanan	1,184,220,000	15	kali	15	
					G	KIE Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Label Obat Tradisional	1,184,220,000	15	kali	15	
					H	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional	1,184,220,000	15	kali	15	

Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
				I	KIE Informasi Obat dan Makanan Melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile	1,184,220,000	15	kali	15	
				J	Pemberdayaan Masyarakat tentang Keamanan, Mutu, dan Penandaan Obat	1,184,220,000	15	kali	15	
				K	Sosialisasi Konsumen Cerdas Tolak Penyalahgunaan Obat	1,184,220,000	15	kali	15	
				L	KIE Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman dan Bermanfaat	1,184,220,000	15	kali	13	
				M	Edukasi Konsumen tentang Bahan Berbahaya pada Pangan dan Kemasan Pangan	1,184,220,000	15	kali	10	
				N	KIE Pengawasan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik	1,184,220,000	16	kali	16	

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan KIE Bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI dimana pada tahun 2024 terlaksana sebanyak 162 titik yang tersebar di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Bojonegoro, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Kediri, Gresik dengan total peserta sebanyak 40.500 orang yang terdiri dari Masyarakat Umum (PKK, Dharmawanita, Organisasi Kemasyarakatan, Karang Taruna), Produsen/ IRTP/ UMKM termasuk pedagang kaki lima, ritel, Lintas sektor (Petugas Kelurahan, Kecamatan, OPD, dan DPRD).

Selain itu BBPOM di Surabaya juga melaksanakan berbagai bentuk kegiatan KIE antara lain kegiatan Cangkru'an yaitu kegiatan Webinar interaktif antara pemberi informasi dan penerima informasi menggunakan platform Zoom Meeting dan sosialisasi Klinik POM.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Berdasarkan hasil survey tahun 2024 ini, yang meningkat jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2023 meskipun tidak terlalu signifikan, harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Surabaya untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga harus menjadi pertimbangan, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai serta bagaimana mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik. Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yang telah mencapai target yang ditetapkan, BBPOM Surabaya harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih *friendly* dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang akrab dengan gawai mungkin lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan pendidikan rendah dan pekerjaan di sektor pertanian mungkin lebih akrab dengan media radio dan televisi. Hal ini harus menjadi pertimbangan BBPOM Surabaya dalam memberikan informasi kepada seluruh masyarakat. Media sosial tetap menjadi pilihan namun tidak mengenyampingkan media yang lain. Dengan demikian hasil penilaian efektifitas KIE tetap dapat dipertahankan di masa masa mendatang.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 97,43 dari target 95,20 sehingga capaiannya 102,34%. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target adalah dengan penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan pengurangan jumlah peserta tiap titik dari 500 orang per titik di tahun 2023 menjadi 250 orang per titik di tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan perencanaan dan penataan KIE baik secara tatap muka langsung ataupun melalui media. Jika dilihat dari 4 komponen penyusun Tingkat efektifitas KIE yaitu ragam kegiatan, minat, pemahaman, dan manfaat mendapatkan nilai yang kurang lebih sama. Pemilihan materi KIE dan media yang tepat merupakan strategi yang harus mendapat perhatian khusus. Pendekatan menggunakan adat atau kebiasaan wilayah tertentu juga patut mendapat pertimbangan sehingga kegiatan KIE menjadi lebih hidup dan dinamis.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 67. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00		Baik

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajanan Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Target tahun 2024 adalah 26 sekolah baru dan 112 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 serta 96 sekolah perluasan cakupan.

Hingga akhir triwulan IV tahun 2024, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Hasil sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman dari 26 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang. Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah tercapai yaitu 100% atau 138 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan Terdapat kenaikan realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sedangkan capaian tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu 100%. Target inidikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024. Tahun 2024, UPT BPOM Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember mendapatkan target intervensi program PJAS masing-masing sebanyak 6 sekolah , sehingga target UPT BBPOM di Surabaya menjadi 26 dan kumulatif target renstra menjadai 138.

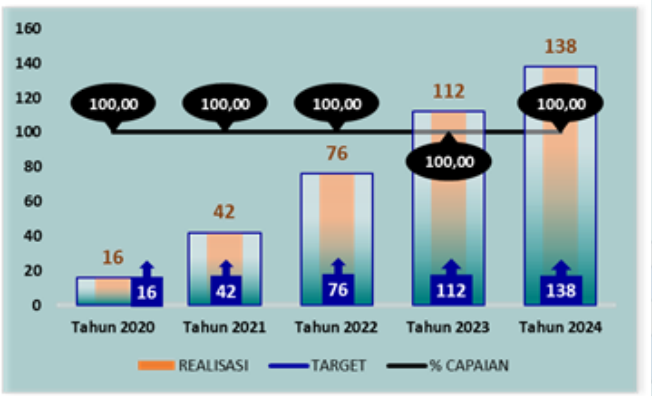

Gambar 53. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2020 hingga tahun 2024

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

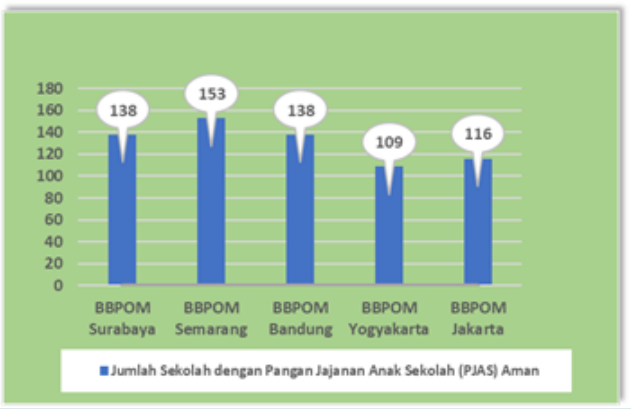

Gambar 54. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping , dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, karang taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes

kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajajan Anak Usia Sekolah (PJAS), dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 26 sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Surabaya. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Pada tahun 2024 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS. BBPOM di Surabaya sangat bersyukur dengan inovasi inovasi yang dilakukan oleh sekolah dalam melanjutkan program PJAS meskipun sudah tidak difasilitasi oleh BBPOM Surabaya serta menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 68. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	633.934.000	497.780.522	78,52	100,00	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran sebagai berikut :

- Pengurangan anggaran paket edukasi keamanan PJAS untuk anggaran narasumber kegiatan pengawalan sekolah yg sudah diintervensi PJAS.
- Pengurangan anggaran transpor DK dan penginapan petugas 3165.QDB.001.051.A untuk menambah uang harian DK 051.A dan transpor petugas pendamping D.K 052.B.
- Penambahan anggaran UH DK dari 12 OH menjadi 50 OH, diambil dari anggaran perjadin biasa dan paket meeting LK pada QDB.001.051.A.
- Penambahan anggaran paket fullday dari anggaran transpor dan penginapan pada QDB.001.052.A.
- Pengurangan anggaran UH operator mobil labkel untuk menambah anggaran penginapan operator mobil labkel dan penginapan petugas pada QDB.001.052.B.
- Pengurangan anggaran perjadin kegiatan 3165.QDB.001.051.A dan 052.B untuk ditambahkan ke anggaran 3165.QDB.001.052.C.
- Revisi akun perlengkapan uji labkel kegiatan 3165.QDB.001.052.B dari akun 521811 ke 521211.
- Pengurangan anggaran paket fullday untuk dialihkan ke anggaran transpor DK peserta dan penginapan pada 3165.QDB.001.052.A.
- Penambahan anggaran perjadin biasa dan DK sumber dana PNP pada 3165.QDB.001.051.A dari anggaran perjadin 052.A.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Penambahan anggaran kegiatan 3165.QDB.001.052.B dari anggaran 052.C.
- Revisi akun item Paket KIE obat dan makanan dari 521811 ke 521211 pada 3165.QDB.002.051.A.
- Penambahan anggaran test kit kimia dari anggaran test kit mikrobiologi 3165.QDB.001.052.B.
- Pengurangan anggaran perjadin koordinasi, perjadin pemeriksaan keamanan PJAS, perjadin pengawalan sekolah, serta belanja test kit mikrobiologi untuk dialihkan ke anggaran Koordinasi dan Rekrutmen Anggota SAKA POM (QDB.001.052.E)

Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 69. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	QDB.001.051	Koordinasi lintas sektor	A	Koordinasi ke Kab/Kota Dalam Rangka Keamanan Pangan	161,480,000	20	kali/trip	12	
		Infokom	QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	A	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	267,464,000	4	Kegiatan	4	
					B	Pemeriksaan Keamanan PJAS	166,760,000	6	kali/trip	6	
					C	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	28,480,000	6	kali/trip	6	
					D	Pengawalan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)	250,690,000	1	Kegiatan	1	

Program Pengawasan Pangan Jajanan yang Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 yang dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

Komunitas sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, orang tua siswa, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah. Untuk keberhasilan program PJAS ini dalam jangka panjang diperlukan Kerjasama dan kolaborasi semua pihak termasuk para PKL di sekitar sekolah. Mereka harus diberikan pemahanan sehingga hanya akan menjual pangan yang aman.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Tabel 70. Upaya Peningkatan Kinerja Pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kendala. Tahapan kegiatan masih dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Status	Close	CLOSE	CLOSE

Keterangan : Tidak ada kendala karena kegiatan sudah selesai pada pertengahan triwulan IV

Pelaksanaan Program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2024 akan dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya Komunitas sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, orang tua siswa, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah.

Agar tahapan kegiatan PJAS dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga semua tahapan dapat terlaksana dengan baik , tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah di tetapkan, dan mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap berbagai kendala dan menetapkan rencana aksi untuk mengatasi kendala tersebut .

Selain itu ditetapkan beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah
- Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus kegiatan yang dapat dijadikan *role model* dan menetapkan dalam Surat Keputusan (SK) kepala daerah
- Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan
- Mendorong pemda untuk meningkatkan dalam mengawal kegiatan Meningkatkan keterlibatan Dinas Pendidikan dalam kegiatan
- Mendorong pemda dan sekolah yang telah diintervensi untuk melakukan replikasi kegiatan
- Mendorong Pemda untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan
- Mengusulkan agar keamanan pangan dimasukan dalam kurikulum pembelajaran - Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di sekolah
- Meningkatkan keterlibatan orang tua siswa dalam kegiatan keamanan pangan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sekolah dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan di sekolah
- Melakukan komunikasi aktif dan motivasi terhadap tim keamanan pangan sekolah dalam upaya mewujudkan keamanan pangan di sekolah

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan

pangan serta menyebar ke sekolah lain di wilayah kabupaten tersebut secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 71. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Jumlah desa pangan aman	45	45	100,00		Baik

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan aksi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Pelaksanaan Desa Pangan Aman perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program perecepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Program Desa Pangan Aman ini dapat mendukung pemulihan ekonomi di desa melalui pencapaian target-target pembangunan keberlanjutan di desa.

Intervensi keamanan pangan dalam program Desa Pangan Aman meliputi tahapan : advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan, pengadaan paket informasi, monitoring dan evaluasi serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi mempunyai kriteria antara lain: desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Tahun 2024 jumlah desa pangan naman yang diintervensi telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 45 desa dengan capaian 100% dan kategori **baik**.

Seluruh tahapan Program Desa Pangan Aman dapat terlaksana dengan baik, sebagai berikut :

- Audiensi dan advokasi terhadap 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan
- Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa terhadap 8 desa target intervensi dari 4 kabupaten tersebut
- Pengadaan paket informasi Bimtek komunitas desa
- Fasilitasi keamanan pangan terhadap komunitas dan intensifikasi keamanan pangan di 8 (delapan) desa/ yaitu Desa Rejomulyo Kabupaten Magetan, Desa Mojopurno Kabupaten Magetan, Desa Nitikan Kabupaten Magetan, Desa Sumberdem Kabupaten Malang, Desa Jabung Kabupaten Malang, Kelurahan Candirenggo Kabupaten Malang, Desa Rek Kerrek Kabupaten Pamekasan dan Desa Tanah Merah Kabupaten Sumenep.
- Pengawalan terhadap desa yang diintervensi tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah desa pangan aman Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Terdapat kenaikan realisasi jumlah desa pangan aman dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sedangkan capaian tetap dari tahun 2020 hingga tahun 2024 yaitu 100%. Target inidikator jumlah desa pangan aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

Tahun 2024, UPT BPOM Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember mendapatkan target intervensi program PJAS masing-masing sebanyak 2 desa , sehingga target UPT BBPOM di Surabaya menjadi 8 dan kumulatif target renstra menjadai 45.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

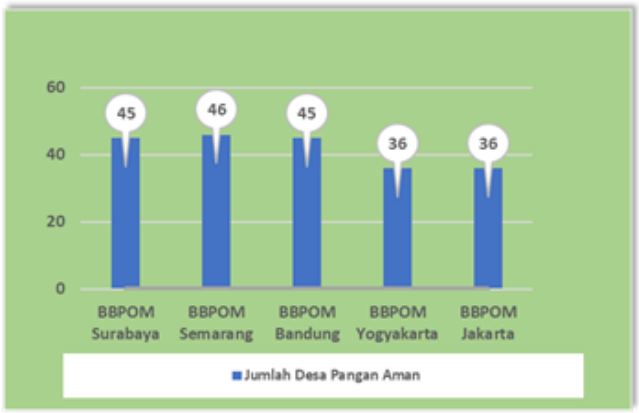

Gambar 56. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang sesuai target yang ditetapkan di Renstra masing-masing Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan audiensi/advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll.

Pada saat advokasi ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 72. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah desa pangan aman	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51	100,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran sebagai berikut :

- Pengurangan anggaran transpor bimtek komunitas desa untuk anggaran UH fullboard kegiatan Pelatihan Fasilitator UPT BPOM Penyuluh Keamanan Pangan Dalam Rangka Pendampingan Penerapan CPPOB/HACCP di UMKM.
- Pergeseran anggaran perjadin sebesar 6.450.000 dari akun 524111 ke 524113 untuk Verifikasi Dalam Rangka Lomba ke Kab/Kota pada 3165.QDB.002.054.A.
- Penambahan anggaran Paket Pelatihan sebesar 16,5 juta yang diperoleh dari pengurangan anggaran QDB.002.051.A, 052.A, B, C.
- Pengurangan anggaran 3165.QDB.002.051.A untuk ditambahkan ke anggaran 3165.QDB.002.052.B.
- Pengurangan anggaran perjadin paket meeting luar kota sumber dana PNP kegiatan 3165.QDB.002.052.A untuk dialihkan ke kegiatan 052.C.
- Pengurangan anggaran antara lain: transpor peserta kab/kota 3165.QDB.002.051.A, perjadin biasa 052.B, perjadin paket meeting dalam kota 052.C, perjadin biasa 053.A, perjadin biasa dan dalam kota 054.A. Anggaran ini digunakan untuk menambah anggaran antara lain: transpor lokal 052.B, Paket Informasi dan Edukasi Pengawalan Desa Diintervensi dan paket meeting dalam kota 054.B.
- Penambahan anggaran perjadin biasa sumber dana PNP dari anggaran kota uang harian fullday peserta perjadin paket meeting luar kota kegiatan 3165.QDB.002.052.C.
- Penambahan anggaran perjadin paket meeting dalam kota QDB.002.054.B dari pengurangan anggaran 052.B dan C.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 73. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keter angan
20	Jumlah desa pangan aman	Infokom	QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A	Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar	206,237,000	4	Kegiatan	4	
		Infokom	QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	A	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	426,520,000	4	Kegiatan	4	
					B	Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	325,450,000	8	Kali	8	
					C	Gerakan Pangan Aman Pedagang Kreatif Lapangan	94,760,000	2	Kegiatan	2	

Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keter angan
	Infokom	QDB.002.053	Pengawasan keamanan pangan desa	A	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling	88,320,000	16	Kali	16	
	Infokom	QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A	Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman	100,530,000	16	Desa	16	
				B	Pengawalan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya	64,690,000	1	Kegiatan	1	
				C	PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	7,340,000	1	Kali	1	

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll

g. Upaya peningkatan kinerja

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan

intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas desa yang diintervensi yaitu IRTP, pelaku usaha ritel, pelaku usaha warung siap saji, PKK/keluarga, sekolah dan Karang Taruna/remaja.

Agar tahapan kegiatan Desa Pangan Aman dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga semua tahapan dapat terlaksana dengan baik , tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah di tetapkan, dan mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap berbagai kendala dan menetapkan rencana aksi untuk mengatasi kendala tersebut .

Selain itu ditetapkan beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

Koordinasi lebih awal dan intensif dengan pemerintah daerah

- Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus kegiatan yang dapat dijadikan *role model* dan menetapkannya dalam Surat Keputusan (SK) bupati
- Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan
- Mendorong agar pemerintah daerah memasukan kegiatan keamanan pangan dalam perencanaan anggaran desa dan melakukan replikasi kegiatan - Mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memasukan kegiatan keamanan pangan dalam kegiatan lain yang telah dilaksanakan desa (sinergitas kegiatan keamanan pangan dengan kegiatan lain)
- Mendorong pemda untuk meningkatkan dalam mengawal kegiatan
- Mendorong Dinas Kesehatan agar lebih intensif melaksanakan pengawalan keamanan pangan di desa
- Membuat kegiatan-kegiatan yang dapat memotivasi kader dan masyarakat agar melaksanakan kegiatan keamanan pangan serta melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan olahan desa
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan terhadap semua komunitas desa
- Melakukan komunikasi aktif dan motivasi terhadap tim keamanan pangan desa dalam upaya mewujudkan keamanan pangan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa- desa sekitar

sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 74. Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100,00		Baik

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas dan Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplay dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui

berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%, dengan kategori **Baik**

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

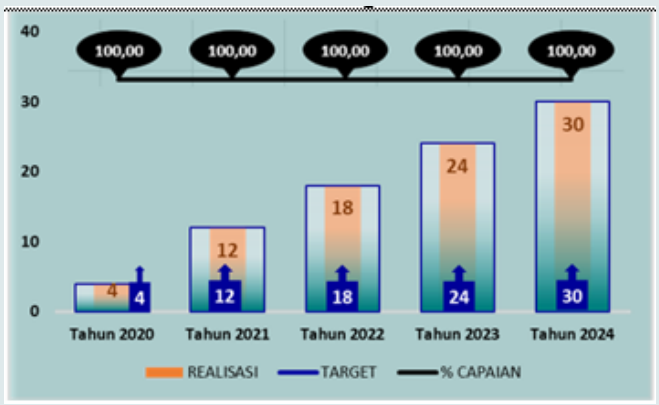

Gambar 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi jumlah pasar pangan aman mulai tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan target secara kumulatif hingga tahun 2024. Tahun 2024, UPT BPOM Provinsi Jawa Timur yang berada di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember mendapatkan target intervensi program pasar pangan aman masing-masing sebanyak 1 pasar , sehingga target UPT BBPOM di Surabaya menjadi 30dan target kumulatif renstra menjadi 30.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

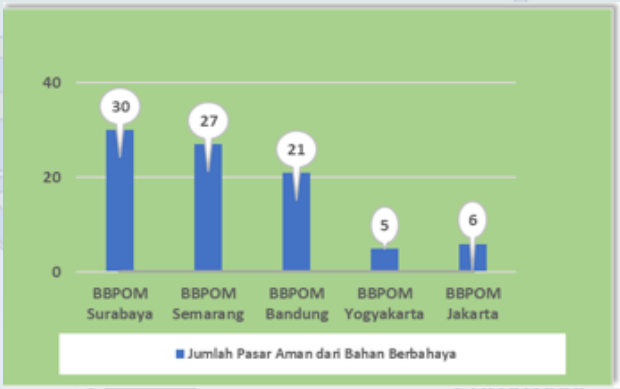

Gambar 58. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2024 yang tertinggi pada BBPOM di Surabaya sesuai target masing-masing Balai dan yang terendah adalah BBPOM di Yogyakarta. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, capaiannya sebesar 100%. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya dengan tahapan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, survei pasar, Bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, program pasar pangan aman berbasis komunitas dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 75. **Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	512.560.000	506.977.425	98,91	100,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran adalah **efisien** dengan tingkat efisiensi 100% dan capaian indikator 100%. Capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024 .Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran sebagai berikut :

- Penambahan anggaran biaya penginapan 524111 untuk pendampingan di pasar intervensi baru dan intervensi sebelumnya,
- penambahan anggaran perjadin 524113 untuk pendampingan di pasar intervensi sebelumnya.

- Anggaran didapat dari penghapusan perjadin Verifikasi Pasar Dalam Rangka Lomba Pasar Aman Ke Kab/Kota dari akun 524111, sisa anggaran dialihkan ke perjadin Verifikasi Pasar Dalam Rangka Lomba Pasar Aman Ke Kab/Kota di akun 524113 pada 3165.QDB.003.054.A
- Penambahan belanja sampel pasar aman intervensi sebelumnya dari 50 sampel menjadi 60 sampel, diambil dari anggaran penggandaan penjilidan dan pelaporan.
- Pengurangan anggaran 3165.QDB.003.052.A, 053.A, C dan 054.A untuk ditambahkan ke anggaran 3165.QDB.003.053.B.
- Pengurangan anggaran pengadaan test kit pasar intervensi sebelumnya kegiatan 3165.QDB.003.052.A, transpor DK kegiatan 053.A, transpor peserta kegiatan 053.C. Anggaran ini digunakan untuk menambah anggaran Paket informasi dan edukasi Fasilitator Pasar kegiatan 053.E.
- Pengurangan anggaran antara lain: penggadaan test kit mikro 3165.QDB.003.052.A, honor dan transpor narsum serta perjadin paket meeting luar kota 053.B, perjadin biasa 053.D, serta perjadin biasa dan dalam kota 054.A. Anggaran yang ada dialihkan ke kegiatan 053.E untuk belanja paket informasi dan edukasi Fasilitator Pasar, honor narsum, dan perjadin paket meeting dalam kota.
- Penambahan anggaran Paket informasi dan edukasi Fasilitator Pasar, uang harian, uang harian fullday, transpor luar kota, transpor dalam kota panitia narasumber dari anggaran paket fullday, uang harian fullday panitia, dan penginapan QDB.003.053.E.
- Pengurangan anggaran kegiatan 3165.QDB.003.053.B, D, dan E, untuk ditambahkan ke anggaran kegiatan 054.A.
- Penambahan anggaran penggandaan dan transpor peserta kegiatan 3165.QDB.003.053.E yang diambil dari pengurangan anggaran sampel pasar aman dan biaya penginapan intervensi baru kegiatan 054.A.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 76. Rencana Aksi pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Infokom	QDB.003.052	Pengadaan peralatan pendukung	A	TEST KIT PASAR	181,980,000	6	Paket	6	

Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
	Infokom	QDB.003.053	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	A	Survey Pasar	28,800,000	6	Kali	6	
				B	Penyuluhan Pedagang Pasar	91,330,000	6	Kegiatan	6	
				C	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya	56,260,000	6	Kegiatan	6	
				D	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	35,830,000	6	Kegiatan	6	
				E	Pelatihan Fasilitator Pasar	84,880,000	1	Kali	1	
	Infokom	QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A	Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	113,680,000	12	Pasar	12	

Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini menargetkan 6 pasar, 8 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 4 kabupaten tersebut di atas. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya.

Kegiatan yang menunjang meliputi pengadaan test kit, survey pasar, penyuluhan pedagang pasar, bimtek petugas pennelola pasar dalam rangka pengawasan bahan berbahaya, kampanye keamanan pangan di pasar, pelatihan fasilitator pasar, serta sampling dan pengujian sampel di pasar. Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100%, yang artinya target 30 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di triwulan IV 2024 bahkan sebelum triwulan IV berakhir, artinya lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga program PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas

sector yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada umumnya masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal

g. Upaya peningkatan kinerja.

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kendala. Tahapan kegiatan masih dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Status	Close	CLOSE	CLOSE

Keterangan : Tidak ada kendala karena kegiatan sudah selesai pada awal Triwulan IV

Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu tahun 2024 dilaksanakan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya Komunitas sekolah antara lain adalah murid/siswa, guru, orang tua siswa, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah.

Agar tahapan kegiatan PJAS dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan maka diperlukan upaya dan strategi sehingga semua tahapan dapat terlaksana dengan baik , tepat sasaran dan sesuai dengan target dan batas waktu yang telah di tetapkan, sehingga mempercepat terwujudnya pencapaian kinerja. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring terhadap berbagai kendala dan menetapkan rencana aksi untuk mengatasi kendala tersebut .

Selain itu ditetapkan beberapa rekomendasi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya perbaikan kegiatan adalah sebagai berikut :

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

- Koordinasi lebih awal dan intensif dengan pemerintah daerah
- Mendorong pemerintah daerah untuk menentukan lokus kegiatan yang dapat dijadikan *role model*
- Melakukan survey untuk penetapan lokus kegiatan
- Mendorong pemda untuk meningkatkan dalam mengawal kegiatan
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelola dan petugas pasar dalam pelaksanaan kegiatan keamanan pangan di pasar tersebut
- Melakukan komunikasi aktif dan motivasi terhadap petugas/kader dan fasilitator keamanan pangan pasar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan Rapid Test Kit dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan Rapid Test Kit secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama hygiene dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Surabaya telah berhasil mewujudkan Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT dengan NSS sebesar **120 %** dan Kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut di dukung oleh 2 Indikator sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 77. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI %	CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00		Sangat Baik

Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

A= Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar Jumlah target sampel Obat x 100%

B= Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment* area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari Balai Besar POM di Surabaya maupun UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Balai yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Khusus untuk indikator ini, jika realisasi

sebesar 100% maka capaiannya adalah 120%. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Dari 2451 sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 2459 sampel yang masuk ke laboratorium seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan Capaian Sebesar 120 % pada kategori Sangat Baik. Indikator persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang dikonversi menjadi 120% bila capaian realisasi mencapai 100%, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 Perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

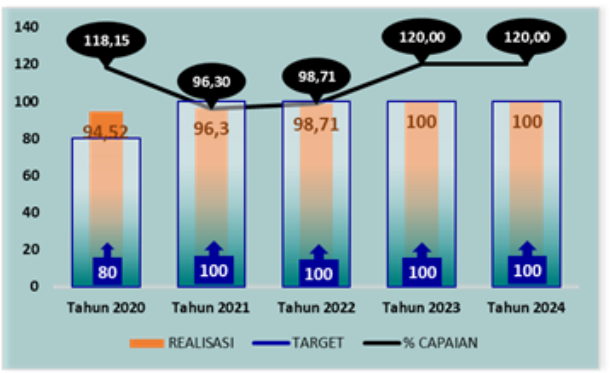

Gambar 60. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun terdapat penurunan capaian setelah target direviu sesuai permintaan Bappenas, sehingga capaian di tahun 2021 turun dan naik kembali di tahun 2022 hingga 2024. Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode pengujian.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

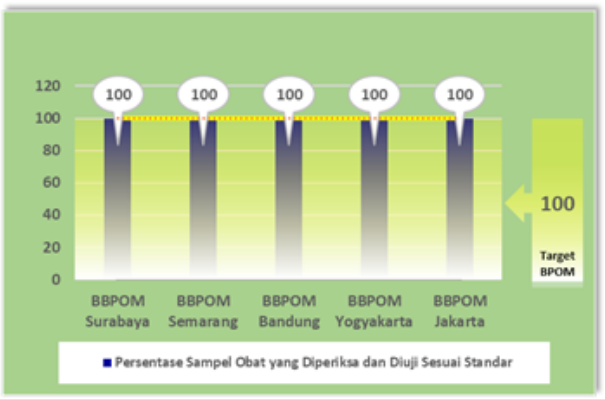

Gambar 61. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, BBPOM Bandung, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Jakarta sudah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran tahun 2024 berhasil mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2024 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter dan pedoman sampling dan memenuhi waktu timeline.

Capaian presentase realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 120%. Capaian presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **memenuhi target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik**. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai Besar POM di Surabaya sama sesuai dengan jumlah sampel yang masuk di laboratorium.

Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila terdapat kendala dalam pemenuhan timeline antara lain kendala terkait alat, regaen, baku pembanding, dan metode. Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya :

1. Terdapat pendukung instrument yang mengalami kerusakan yaitu UPS untuk microwave dan AAS di ruang instrument.
2. Pengadaan beberapa reagen mengalami keterlambatan karena memerlukan waktu untuk pemesanan dari produsen
3. Jumlah alat gelas yang dimiliki laboratorium mikrobiologi tidak sebanding dengan jumlah sampel yang diuji sehingga menghambat pengujian sampel karena dalam sebelum alat gelas dilaboratorium mikrobiologi digunakan harus melalui serangkaian perlakuan seperti destruksi ataupun sterilisasi.

4. Terdapat antrian penggunaan instrumen KLT densitometer, karena instrumen yang dimiliki hanya satu, namun parameter yang harus diuji dengan semakin meningkat. BBPOM di Surabaya hanya memiliki satu alat KLT Densitometri System, bila alat tersebut rusak atau terdapat sampel kasus maka pengujian sampel obat tradisional, suplemen kesehatan dan kuasi rutin akan terhenti karena menunggu perbaikan atau mengutamakan sampel kasus. Penambahan alat KLT Densitometri System untuk memperpendek antrian penggunaan alat sangat dibutuhkan.
5. Jumlah SDM di laboratorium semakin berkurang, pada tahun 2024 terdapat 4 orang yang memasuki masa purnabakti, 4 orang yang mutasi ke fungsi lain, dan 1 orang yang diredistribusi ke Balai lain. Sedangkan jumlah staff tugas belajar sebanyak 3 orang baru dapat aktif kembali pada triwulan IV tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut diatas diharapkan terdapat penambahan SDM di laboratorium Balai Besar POM di Surabaya mengingat Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Regional yang mana beban pengujian bertambah namun jumlah pengujinya berkurang.
6. Terdapat antrian penggunaan alat GCMS yang dimiliki Balai Besar POM di Surabaya hanya satu untuk pengujian seluruh laboratorium. Pada akhir TW 4 pengadaan GCMS telah terlaksana sehingga di tahun 2025 sudah memiliki 2 alat GCMS.

Kurang lebih 20% instrument di laboratorium BBPOM di Surabaya sudah berusia lebih dari 10 tahun bahkan ada yang berusia 20 tahun sehingga sering mengalami kerusakan. Realisasi anggaran pemeliharaan alat di BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 anggaran pemeliharaan alat sebesar Rp. 362.404.000,00; tahun 2022 sebesar Rp. 452.205.000,00 dan pada tahun 2023 realisasi anggaran pemeliharaan alat meningkat menjadi Rp. 674.627.000,00. Perlu dilakukan peremajaan dengan pengadaan alat baru dan penambahan anggaran pemeilharaan alat. Pada tahun 2024, anggaran yang diperoleh telah dimaksimalkan dengan pembelian alat GCMS sehingga dengan penambahan alat baru tersebut pengujian regional maupun pengujian rutin obat dapat lebih cepat.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 78. . Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	985.710.000	946.107.404	95,98	100,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sebesar 95,98% lebih rendah dari capaian indikator realisasi anggaran 2024. Hal ini disebabkan karena adanya proses pengadaan beberapa reagen terlambat sehingga proses pengadaan tidak cepat selesai.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 79. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket.
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (acak)	435,787,500	20	kali/trip	19	
		Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	529,556,500	1	Paket Lelang	0	

Kegiatan yang dilakukan di tahun 2024 adalah pengadaan sampling obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan kosmetik serta proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi melalui e-catalog.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional dengan anggota antara lain: BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang, Kediri, Jember dan Loka Buleleng, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Pemilihan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan. Sistem Regionalisasi laboratorium baru telah dilaunching pada bulan Juli 2023. Regionalisasi laboratorium baru diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan beraneka ragam parameter uji yang dibutuhkan untuk pengawasan obat dan makanan.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan antara lain dengan meningkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain. Pemenuhan kebutuhan reagen, media, baku pembanding yang cito dapat diatasi dengan sharing dengan UPT lain. Begitu juga dengan kendala terkait alat, apabila ada alat yang rusak dapat berkomunikasi dengan UPT lain untuk memohon bantuan pengujian selama masa perbaikan alat. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti reagen, media, baku pembanding, serta pemenuhan peralatan dan perawatan alat. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan akan reagen dengan kemurnian tinggi, baku pembanding yang bervariasi serta biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan IV diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat

laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Pada kegiatan monev regionalisasi TW IV 2024 telah disampaikan mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan regionalisasi dan pencapaian kinerja.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024.

Tabel 80. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00		Sangat Baik

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

A= Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standarJumlah target sampel Makanan x 100%

B= Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standarJumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Untuk Balai Jember dan Balai Kediri belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). **Khusus untuk indikator ini, jika realisasi sebesar 100% maka capaiannya adalah 120%.**

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga triwulan IV tahun 2024 adalah 100 %. Dari 1057 sampel yang disampling BBPOM di Surabaya sebanyak 1361 sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 120,00 %. dengan kriteria **Sangat Baik**.

Capaian indikator persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk salah satu indikator yang dikonversi menjadi 120 % bila capaian realisasi menjadi 100 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya.

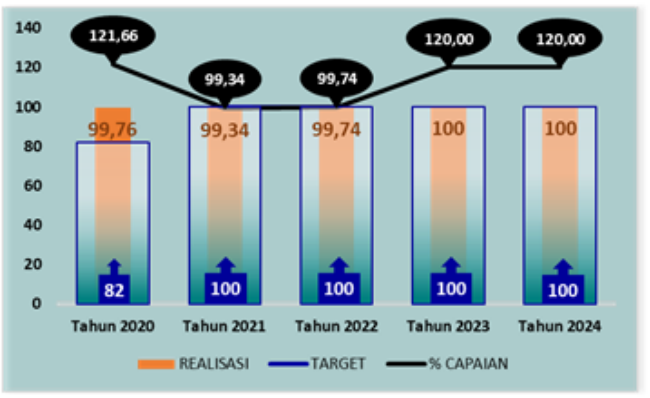

Gambar 62. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Pada tahun 2021 realisasi dan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sedikit menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020, kemudian naik kembali di tahun 2022 dan 2023. Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding, dan metode.

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024, baik target pada Renstra Awal maupun target setelah direviu oleh Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu. Tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar realisasi dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 yang telah tercapai dapat dipertahankan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2024 pada BBPOM di Surabaya,

Gambar 63. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, dan BBPOM di Jakarta telah mencapai target yang ditetapkan dan sudah mencapai target nasional

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran hingga triwulan IV tahun 2024 mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2024 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter dan pedoman sampling dan memenuhi waktu timeline. Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila terdapat kendala dalam pemenuhan timeline antara lain kendala terkait alat, reagen, baku pembanding, dan metode. Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya :

1. Baku Gelatin tidak bisa dibeli untuk uji DNA Porcine secara LC-MS/MS (Lab Regional terjadwal bulan Juni) karena anggaran sudah habis.
2. Terjadi kerusakan pada microwave pangan dengan merk Anton Paar, namun *sparepart* sudah tidak dijual lagi, sehingga diputuskan untuk mengembalikan alat ke Bagian Tata Usaha agar dimusnahkan.
3. Deep Frezer di laboratorium mikrobiologi suhunya tidak bisa tercapai dan terdapat rembesan pada alat.
4. Saluran pembuangan air di Ruang cuci Lab Mikrobiologi kembali tersumbat (sudah 2 kali tersumbat di tahun 2023) sehingga perlu dilakukan pengecekan menyeluruh terkait saluran ini. Telah diajukan RAB untuk pembuatan saluran IPAL tetapi karena adanya efisiensi anggaran maka perbaikan ditunda

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Tabel 81. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Dalam Mencapai Kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	548.190.500	542.658.233	98,99	100,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran reagen untuk dialihkan ke anggaran Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Sertifikasi CRMO.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 82. Rencana Aksi pada Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	418,693,500	1	Paket Lelang	0	
		Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	129,497,000	10	kali/trip	9	

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan, selain itu juga sedang dilaksanakan proses pengadaan reagensia dan media mikrobiologi secara e-catalog. Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BBPOM di Surabaya ditunjuk sebagai Laboratorium Regional dengan anggota antara lain: BB/Balai POM di Denpasar, Mataram, Kupang dan Loka Buleleng, Kediri, Jember, Bima, Manggarai Barat dan Ende. Pemilihan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional didasarkan kepada luas bangunan, ketersediaan

instrumen, SDM, jumlah industri baik industri farmasi, obat tradisional, kosmetik maupun pangan, jumlah kasus dan masih banyak lagi pertimbangan.

g. Upaya peningkatan kinerja.

Upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk penyempurnaan kinerja ke depan antara lain dengan meingkatkan koordinasi antara UPT dalam satu regional maupun dengan regional lain. Pemenuhan kebutuhan reagen, media, baku pembanding yang cito dapat diatasi dengan sharing dengan UPT lain. Begitu juga dengan kendala terkait alat, apabila ada alat yang rusak dapat berkomunikasi dengan UPT lain untuk memohon bantuan pengujian selama masa perbaikan alat. Selain itu, peningkatan anggaran juga diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian seperti reagen, media, baku pembanding, serta pemenuhan peralatan dan perawatan alat. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan akan reagen dengan kemurnian tinggi, baku pembanding yang bervariasi serta biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan IV diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana labratorium.

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat Dan Makanan Di Lingkup Bbpom Di Surabaya

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di willayah kerja BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 118,59% pada kategori **Sangat Baik.**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**
   a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024**

Pengukuran capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 83. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	83,01	118,59		**Sangat Baik**

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 83,01 dari target 70. Capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 118,59% dengan kategori Sangat Baik.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Rincian pencapaian target dan realiasasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara di BBPOM di Surabaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	2		1,0000		0,15	15,00%
Tahap I	0		0,7778	0,3077	0,4	33,20%
P21	2		0,7778	0,3077	0,3	24,90%
Tahap II	5	4	0,5556	0,3077	0,15	9,90%
Realisasi Tahun Berjalan	9					83,01%
Realisasi Carry Over		4				

Uraian	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Total Realisasi Perkara	Total Target	Capaian Perkara	Nilai Kinerja
Realisasi Perkara	9	4	13	13	100,00%	83,01%
Target Perkara	9					

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

Pada tahun 2024, jumlah kasus yang ditindaklanjuti Pro Justitia oleh PPNS BBPOM di Surabaya sebanyak 9 perkara atau 100% dari target 9 perkara serta 4 perkara carry over tahun 2023 yang tahapan penyelesaiannya berproses yaitu tahap 2 di tahun 2024. Dari 9 perkara yang ditangani di tahun 2024, 2 perkara dalam tahap SPDP (masih dalam proses pemeriksaan tersangka), 2 perkara sudah P21 dan 5 perkara sudah tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum).

Rincian 9 perkara yang ditindaklanjuti Pro Justitia di tahun 2024 adalah 7 (tujuh) perkara mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), 1 (satu) perkara mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau Mengandung Bahan Dilarang dan 1 (satu) perkara mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) serta Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE).

b. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya**

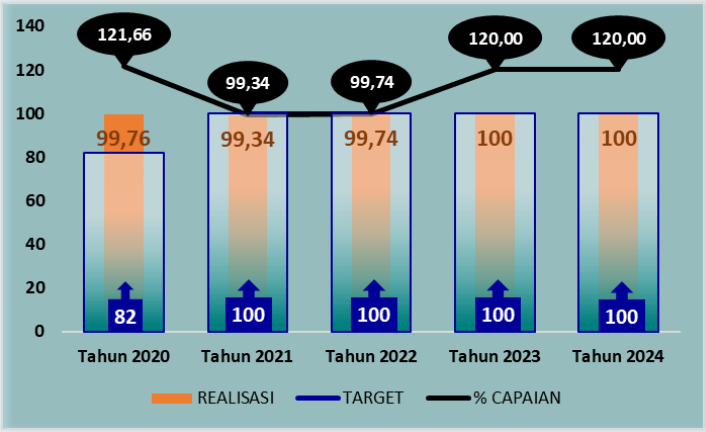

Gambar 64. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan terlihat sedikit fluktuatif, yaitu terdapat sedikit penurunan realisasi pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 dan realisasi tahun 2023 belum mencapai target yaitu 71,17 dari target 72. Sedangkan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan menunjukkan trend yang terus menurun dari tahun 2020 hingga tahun 2023, antara lain disebabkan kompleksitas penanganan perkara yang belum menjadi pertimbangan dalam penyesuaian target tahun berjalan.

Pada tahun 2023 dilakukan usulan perubahan target persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dari target sesuai reviu renstra sebesar 75 menjadi 70 dan telah disetujui oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai surat No. B-PR.06.01.21.211.08.23.208 tanggal 22 Agustus 2023 hal Tanggapan Atas Rancangan RKT dan Usulan Perubahan Target Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 83,01 dari target 70 dengan capaian sebesar 118,59%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

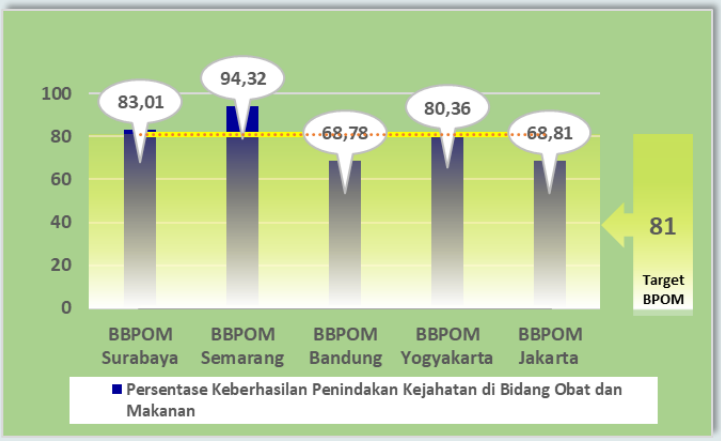

Gambar 65. Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Semarang yaitu 94,32% kemudian BBPOM di Surabaya yaitu 83,01% dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung yaitu 68,78%. Dari kelima Balai Besar POM yang diperbandingkan, BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Semarang dapat mencapai target nasional.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan onsite. Berdasarkan hasil pendalaman informasi tersebut maka pada Tahun 2024 telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 9 perkara, dengan tahapan sebagai berikut:

- SPDP sebanyak 2 perkara (mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE 1 perkara, Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE dan Kosmetik TIE 1 perkara)
- P21 sebanyak 2 perkara (mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE 1 perkara, Kosmetik TIE 1 perkara)

- Tahap 2 sebanyak 5 perkara (mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE)
- SP3 sebanyak 3 perkara (produksi dan distribusi Kosmetik TIE 1 perkara, mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE 1 perkara, mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE dan pangan TIE 1 perkara)

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada terlapor dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur.
- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan dan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti oleh penyidik.
- Melakukan pemanggilan saksi/tersangka, pemeriksaan saksi/tersangka dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang disita.
- Telah dilakukan gelar perkara dalam rangka penetapan tersangka untuk 9 perkara yaitu 7 perkara mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE, 1 perkara mengedarkan Kosmetik TIE, 1 perkara mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE dan Kosmetik TIE. Gelar perkara tersebut dihadiri oleh Korwas PPNS Polda Jawa Timur untuk memberikan arahan upaya tindak lanjut yang harus dilakukan oleh penyidik dan rekomendasi hasil gelar. Dari hasil gelar tersebut telah dilakukan penetapan tersangka untuk 9 perkara yang ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan penetapan tersangka kepada yang bersangkutan dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas PPNS Polda Jawa Timur. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara selanjutnya dilakukan pemanggilan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.
- Telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 3 perkara karena tidak cukup alat bukti, yaitu perkara tahun 2018 sebanyak 1 perkara (mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE dan pangan TIE 1 perkara) dan perkara tahun 2022 sebanyak 2 perkara (produksi dan distribusi Kosmetik TIE 1 perkara, mengedarkan Obat Tradisional/Obat Bahan Alam TIE 1 perkara).
- Selama tahun 2024 diterbitkan penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap 3 orang tersangka oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur sebagai tindak lanjut permohonan DPO penyidik BBPOM di Surabaya karena tersangka melarikan diri dan tidak kooperatif, sesuai surat penetapan DPO No. B/3502/IV/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 April 2024 atas nama tersangka AHF (tersangka melarikan diri sehingga tidak dapat dilakukan tahap 2), No. B/3502/IV/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus tanggal 22 April 2024 atas nama tersangka BS (tersangka melarikan diri sehingga tidak dapat dilakukan tahap 2) dan No. B/5694/VI/RES.10.2/2024/Ditreskrimsus tanggal 28 Juni 2024 atas nama tersangka CMETL (tersangka melarikan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka).

- Melakukan pemusnahan barang bukti yang telah inkracht (memiliki kekuatan hukum tetap) bekerjasama dengan pihak ke-3.
- Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Polresta Sidoarjo, Polresta Banyuwangi, Rupbasan Sidoarjo, Loka POM di Kabupaten Banyumas, Ahli Pidana Universitas Airlangga, Ahli Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Kab. Malang, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi.
- Melakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi tautan yang direkomendasikan untuk dilakukan take down. Selama tahun 2024 telah dilakukan patroli siber terhadap 1324 tautan dan profiling untuk dilaporkan ke Direktorat Siber Obat dan Makanan.
- Melakukan update peta rawan kasus setiap bulan berdasarkan data penyidikan, pengawasan/pemeriksaan, intelijen, pengujian sampel/laboratorium, pengaduan masyarakat, keterangan ahli dan data patroli siber. BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 memetakan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di 27 Kab/Kota di Jawa Timur sebanyak 780 data.
- Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan penggalangan dengan stake holder dilakukan kegiatan antara lain pemberian keterangan ahli kepada Penyidik Polri, selama tahun 2024 telah dilakukan pemberian keterangan ahli untuk 70 perkara Polri sebagai tindak lanjut permohonan keterangan ahli antara lain Polda Sulawesi Tengah, Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, Polres Batu, Polres Kota Madiun, Polres Kab. Madiun, Polres Kota Malang, Polres Pacitan dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Menghadiri pemusnahan barang bukti dan barang rampasan di Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur dan Lanudal Juanda. Penggalangan kolaborasi Direktorat Cegah Tangkal dan BBPOM di Surabaya dengan Lintas Sektor dihadiri Akademisi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Gabungan Pengusaha Farmasi (GPFI) Provinsi Jawa Timur, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jawa Timur terkait upaya pencegahan kejahatan peredaran obat setelan di wilayah Jawa Timur.
- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi Penyidik:
  1. In House Training “Pelatihan Psikologi Penyidikan” bagi personel Penindakan di Bandung.
  2. Forum Komunikasi Peningkatan Kinerja, Profesionalisme dan Koordinasi PPNS dengan tema “Sinergitas Penegakan Hukum antara PPNS BPOM dan stakeholder untuk menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat dan bermutu” di Yogyakarta.
  3. Advokasi Penyidikan Obat dan Makanan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dan Kejaksaan Agung.

4. Supervisi kegiatan Cegah Tangkal oleh Direktorat Cegah Tangkal.
5. Audiensi perkara Obat dan Makanan yang dihadiri oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, Direktur Penyidikan Obat dan Makanan BPOM, Korwas PPNS Polda Jawa Timur dan PPNS BBPOM di Surabaya di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
6. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Bukti.
7. Coaching Clinic Fungsi Siber dan Intelijen di Banjarmasin dan Surabaya.
8. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi (PMO) Penyidikan di Kota Batu.
9. Workshop Intelijen Strategis di Bandung.
10. Pelatihan Teknis PPNS di Jakarta.
11. Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) di Depok.
12. Forum Koordinasi Intelijen di Lombok.

e. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 84. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.510.697.000	1.418.165.897	93,87	118,59	95 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran **Efisien,** karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % capaian anggaran. Dapat disimpulkan anggaran yang dialokasikan tahun 2024 telah digunakan secara efisien dalam mendukung pencapaian indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 85. Rencana Aksi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket.
7	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	AEA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	A	Perencanaan Penyusunan Analisis	720.000	1	kali	1	
						B	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	11.673.000	2	kali	2	
						C	FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	1.780.000	0	kali	0	direvisi untuk biaya pemusnahan
			Penindakan	AEA.001.053	Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A	Rapat Perencanaan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	720.000	1	kali	1	
						B	Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	2.600.000	12	kali	12	
						C	Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	20.260.000	3	kali	3	
						D	Evaluasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	720.000	0	kali	0	direvisi untuk biaya pemusnahan
						E	Penyusunan Laporan Penjejakan Digital	720.000	0	kali	0	direvisi untuk biaya

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket.
							Kejahatan Obat dan Makanan					pemusnahan
			Penindakan	AEA.001.054	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	A	Koordinasi Lintas Sektor Penindakan Obat dan Makanan	31.360.000	2	kali	2	
						B	Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	5.760.000	0	kali	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						C	Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5.760.000	0	kali	0	
						D	Pertemuan Koordinas Lintas Sektor Untuk Penguatan Intelijen di Daerah	10.310.000	1	kali	1	
						E	Forum Koordinasi Intelijen	7.160.000	1	kali	1	
						F	Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI	11.520.000	1	kali	1	
						G	Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	5.760.000	0	kali	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						H	Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM	5.760.000	0	kali	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						I	Workshop Intelijen Strategis	8.310.000	0	kali	0	Revisi untuk Automatic Adjustment
						J	Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan	5.760.000	1	kali	1	
						K	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan	5.760.000	1	kali	1	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket.
							PPNS Badan POM					
						L	Diseminasi terhadap Analisa Hasil Kajian Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring	6.260.000	0	kali	0	Revisi untuk Automatic Adjustment
						M	Sosialisasi dan Bimtek ISO 27037-2012 tentang Digital Evidence Handling dan Updating Pedoman Siber	6.260.000	1	kali	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						N	Sosialisasi Fungsi dan Layanan BPOM Digital Investigation Center	6.300.000	0	kali	0	Revisi untuk Automatic Adjustment
						O	Penanganan Kasus Dengan Mekanisme Ultimum Remidium	8.320.000	0	kali	0	
						P	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Yang Diserahkan/Barang Rusak	25.000.000	1	kali	1	
						Q	Sewa Gudang Untuk Barang Bukti	200.000.000	1	kali	1	
	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	QCD.U09.051	Operasi Intelijen	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	6.030.000	1	kali	1	direvisi untuk biaya pemusnahan
						B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	236.196.000	9	kali	9	
						C	Evaluasi Operasi Intelijen	4.824.000	1	kali	1	direvisi untuk biaya pemusnahan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket.
							Bidang Obat dan Makanan					
			Penindakan	QCD.U09.052	Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	6.030.000	9	kali	9	
			Penindakan	QCD.U09.053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	6.030.000	1	kali	1	direvisi untuk biaya pemusnahan
			Penindakan	QCD.U09.054	Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	223.380.000	9	kali	9	
						B	Penangkapan dan Penahanan	71.820.000	0	kali	0	direvisi untuk biaya sewa R4
			Penindakan	QCD.U09.055	Pemberkasan	A	Pemberkasan	241.272.000	9	kali	9	
						B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	22.824.000	9	kali	9	
						C	Gelar Perkara	7.812.000	9	kali	9	
						D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	18.000.000	9	kali	9	
						E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	73.260.000	5	kali	5	
			Penindakan	QCD.U09.056	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A	Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	9.792.000	0	kali	0	direvisi untuk biaya pemusnahan
						B	Pelaksanaan Wasmatlitrik	188.874.000	1	kali	1	direvisi untuk operasi intelijen

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan antara lain kegiatan penindakan dengan realisasi 9 perkara atau 100% dari target 9 perkara serta 4 perkara carry over tahun 2023 yang tahapan penyelesaiannya berproses yaitu tahap 2 di tahun 2024.

Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU antara lain:

Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan, patroli siber dan profiling kejahatan Obat dan Makanan, Kegiatan/operasi intelijen, gelar kasus, rapat pembahasan rencana penyidikan, skenario penindakan dan olah TKP, operasi penindakan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti. Selain itu dilakukan koordinasi dengan Criminal Justice System dan lintas sektor antara lain Korwas Polda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Polresta Sidoarjo, Polresta Banyuwangi, Rupbasan Sidoarjo, Loka POM di Kabupaten Banyumas, Ahli Pidana Universitas Airlangga, Ahli Pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Kab. Malang, Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda dalam rangka pengumpulan bahan keterangan dan informasi.

g. Upaya peningkatan kinerja

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target, diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

1. Memantapkan koordinasi lintas sektor di wilayah kerja BBPOM di Surabaya (Kepolisian Daerah/Resor, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Kanwil DJBC Jatim/Bea Cukai Juanda, BNN, BIN Daerah Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota) dan membangun jejaring dengan Asperindo dan Organda.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS secara kontinyu dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital.
3. Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan penyidikan.
4. Membangun inovasi untuk memonitor progres tahapan penyidikan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi bahwa meskipun penanganan perkara memiliki kendala relatif kompleks, Penyidik BBPOM di Surabaya telah menyelesaikan pemberkasan dengan kualitas yang baik sehingga capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup BBPOM di Surabaya yang Optimal

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan Nilai NSS 100,15% pada kategori **Sangat Baik** Pencapaian tersebut didukung oleh 3 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 86. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Indeks RB BBPOM di Surabaya	95,23	93,98	98,69		**Cukup**

Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 93,98 dari target 95,23. Capaian nilai Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 98,69% dengan kategori **Cukup.**

Persentase Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan

kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM sebesar 60% antara lain: Manajemen Perubahan (bobot 8%), Penataan Tatalaksana (bobot 7%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 10%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%).

Sedangkan rincian bobot komponen Hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM sebesar 40% antara lain :

- Birokrasi Bersih dan Akuntabel (bobot 22,50%) terdiri Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) (bobot 17,50%) dan Capaian Kinerja lebih baik (bobot 5,00%)
- Pelayanan Publik yang Prima (bobot 17,50%) berupa Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

c. -Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun -sebelumnya

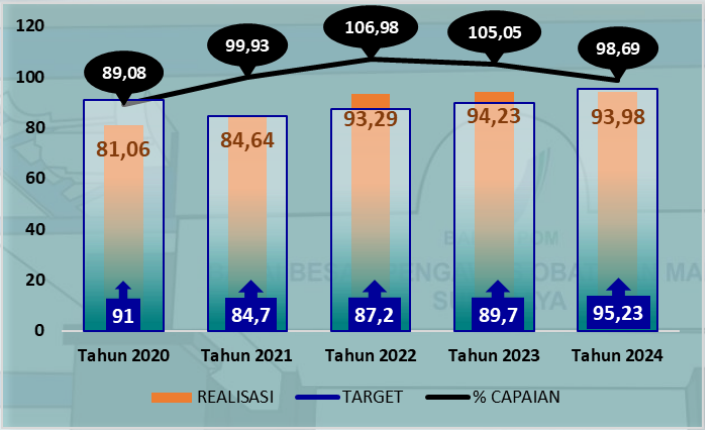

Gambar 66. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Realisasi dan capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya tahun 2024 mengalami penurunan dari realisasi dan capaian tahun 2023. Pada tahun tahun 2024 capaian indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya yaitu sebesar 98,69% dengan kriteria **Cukup**. Terdapat perubahan

target tahun 2024 pada Reviu Renstra dibandingkan target setelah direviu oleh unit pengampu. Target pada Reviu Renstra adalah 92,2 dan target setelah reviu oleh Unit Pengampu menjadi 95,23. Perbedaan target ini mengacu pada Nota Dinas Inspektorat Utama Badan POM nomor PR.04.01.7.72.10.23.677 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penyampaian Target Indikator Unit Organisasi di Lingkungan Badan POM Tahun 2024. Pada Nota Dinas tersebut disebutkan bahwa BBPOM di Surabaya masuk *cluster* IV sebagai Unit Kerja yang sudah mendapatkan predikat WBBM dengan target 2024 sebesar 95,23% (Justifikasi Nilai 2023 telah diatas 90, sehingga target dinaikkan 1 poin). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 pada Reviu Renstra, realisasi BBPOM di Surabaya telah mencapai target dengan capaian 101,93%, namun belum mencapai target jika dibandingkan dengan target tahun 2024 setelah direviu oleh Unit Pengampu.

d. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional**

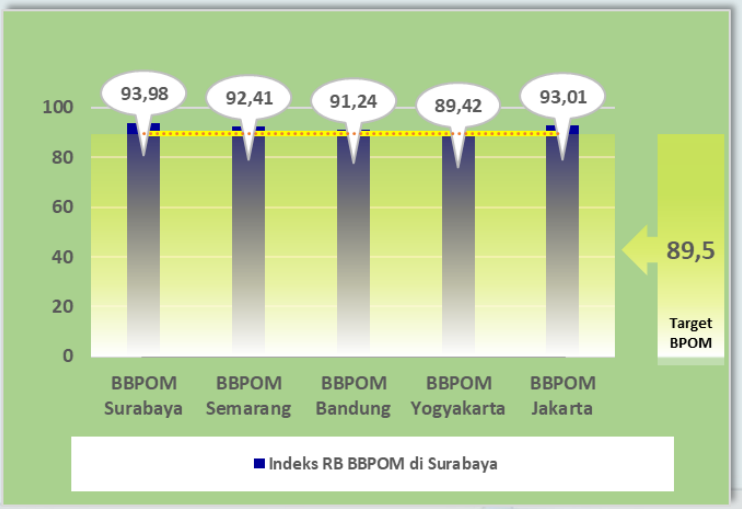

Gambar 67. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB BBPOM di Surabaya Tahun 2020 hingga Tahun 2024

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi dan capaian Indeks RB yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya, dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. Namun demikian, kelima Balai Besar POM yang diperbandingkan telah mencapai target nasional.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

Pada tahun 2021, BBPOM di Surabaya telah berhasil memperoleh predikat WBBM. Namun demikian, tetap harus dilakukan perbaikan berkelanjutan sebagai upaya mempertahankan predikat WBBM dan upaya mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Pada triwulan II tahun 2024 BBPOM di Surabaya sebagai perwakilan UPT Badan POM RI, sebagai peserta penilaian UPP yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB. BBPOM di Surabaya berkomitmen untuk menciptakan dan mengembangkan berbagai

inovasi khususnya inovasi layanan publik dengan tujuan untuk memudahkan pelanggan/Masyarakat. Balai Besar POM di Surabaya pada triwulan III mendapatkan kesempatan mewakili UPT Badan POM dalam kompetisi pelayanan publik, yaitu kategori Pelayanan Publik Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

Beberapa hal terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut :

1. Telah melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan pimpinan, namun dokumen monitoring dan evaluasi belum disajikan dengan lengkap termasuk atas kendala yang tindak lanjutnya akan dilakukan di periode selanjutnya, tidak terlihat progres atas kendala tersebut.
2. Pada area penataan tatalaksana telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi pada administrasi pemerintahan dan telah terdapat Rencana Tindak Lanjut, namun belum terdapat bukti telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
3. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, namun belum menjelaskan telaah dan kendala yang ditemukan dalam proses penanganan pengaduan.
4. Belum seluruh inovasi telah dianalisis dampak kemanfaatannya dalam peningkatan kinerja Unit Kerja sebelum dan setelah implementasi inovasi. Selain itu secara umum penjelasan inovasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) masih belum menjelaskan detail bentuk kegiatan.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 87. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks RB BBPOM di Surabaya	28.734.704.456	28.547.035.059	99,35	98,69	**75 % (Tidak Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran **Tidak Efisien,** karena adanya efisiensi anggaran (Pengurangan anggaran jasa kebersihan dan keamanan kantor serta jasa pengemudi untuk anggaran jasa pemelihara sarana/prasarana dan resepsionis. Penyesuaian kembali honorarium KPA, PPK Fungsional, Pengelola SAI (UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPB-W).

Pengurangan anggaran operasional perkantoran digunakan untuk anggaran pengadaan keperluan sehari-hari) sehingga BBPOM di Surabaya hanya mencapai target 98,69% capaian indikator kinerja dari target realisasi anggaran 99,35%. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 88. Rencana Aksi pada Indikator Indeks RB BBPOM di Surabaya

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
8	25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A	Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM	153.040.000	4	kali	2	
						C	Pemeliharaan dan Peningkatan QMS	46.706.000	1	kali	1	Revisi Target
						K	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM	8.352.000	1	Kali/Trip	1	
			Tata Usaha	CBV.001.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A	Renovasi Instalasi Pembuangan AirLimbah (IPAL)	56.943.000	1	Paket	1	
			Tata Usaha	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	23.518.841.000	12	Kali	12	
			Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Kebersihan dan Keamanan Kantor	1.940.944.000	12	Kali	12	
						B	Pemeliharaan Gedung Kantor	561.363.000	12	Kali	12	
						D	Pengadaan Keperluan Sehari-Hari	739.692.000	12	Kali	12	
						E	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	168.000.000	12	Kali	12	
						F	Terselenggaraya Operasional Perkantoran	922.429.360	12	Kali	12	
						G	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	4.000.000	12	Kali	12	
						H	Pemeliharaan Sarana Gedung	163.180.000	12	Kali	12	
						I	Kesehatan Pegawai	514.080.000	12	Kali	12	
						J	Langganan, Listrik, Air dan Telepon	1.530.000.000	12	Kali	12	
			Tata Usaha	CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	467.646.000	14	unit	14	

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Indeks RB BBPOM di Surabaya antara lain:

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Indeks RB adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua

komponen penilaian indeks RB serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Selama triwulan III tahun 2024, BBPOM di Surabaya banyak dikunjungi UPT dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di UPT tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Surabaya. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, bahkan terdapat beberapa tambahan tambahan inovasi yang tidak direncanakan sebelumnya. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan hingga triwulan III tahun 2024 antara lain Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Peningkatan Kompetensi Agent of Change, Pelatihan Lead Auditor, Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM, Workshop Penyelenggaraan Kearsipan, dan semua kegiatan operasional perkantoran serta belanja pegawai.

h. Upaya peningkatan kinerja

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan WBBM, konsistensi dan keberlangsungan program, kegiatan, dan inovasi yang dimiliki yang bedampak internal dan eksternal, adalah dengan melakukan evaluasi berkala yang menunjukkan upaya keberlangsungan pembangunan RB, pembaruan data dukung, melakukan penyempurnaan inovasi yang dimiliiki dan menggali ide pengembangan inovasi baru yang dibutuhkan untuk internal maupun eksternal.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI, dalam rangka upaya perbaikan untuk capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas dengan menambahkan rencana aksi tindak lanjut atas kendala dan menceritakan progres tindak lanjutnya pada pelaporan monitoring dan evaluasi periode selanjutnya
2. Mendokumentasikan seluruh tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi pada administrasi pemerintahan
3. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan optimal melalui laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang didalamnya menjelaskan telaah dan kendala yang ditemukan dalam proses penanganan pengaduan
4. Melakukan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi terhadap peningkatan kinerja Unit Kerja pada seluruh inovasi yang dibangun dan

memberikan penjelasannya secara detail termasuk bentuk inovasi pada LKE untuk penilaian tahun berikutnya

5. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

Selain itu melakukan penajaman beberapa inovasi unggulan yang berdampak eksternal (seperti Gempur Jatim, SiPPOTra, Jatim Glowing, dan Jatim Truly), dan selanjutnya dapat diikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Penajaman ini perlu dilakukan sehingga terlihat inovasi tersebut semikin tinggi efektifitas dan efisiensinya, serta membawa dampak yang semakin nyata kepada masyarakat.

Penambahan anggota AoC untuk penyegaran ide, kreatifitas, dan pemantauan khususnya terhadap inovasi-inovasi yang dimiliki. Anggota AoC ini juga menjadi penggerak/mengawal perwujudan WBBM.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah melakukan pembangunan ZI dan telah mendapat predikat WBBM dari Kementerian PANRB tahun 2021. Pada tahun 2024 mampu mempertahankan predikat WBBM secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pegawai.

Implementasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, pimpinan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemenuhan penilaian akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara memadai, mulai dari proses perencanaan kinerja sampai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas. Selain itu capaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian *reward and punishment*.

Telah terdapat inovasi pada Area Penguatan Pengawasan untuk membangun lingkungan pengendalian di BBPOM Surabaya, antara lain SIGAP (Survei Integritas Pegawai Lapangan) dan WBS-SiPONI (Si Pelapor Pemberani).

BBPOM di Surabaya memiliki inovasi unggulan berupa Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), dan sejalan dengan *continous improvement* yang dilakukan, pada Oktober 2024, inovasi tersebut berhasil meraih Top 5 Inovasi Berkelanjutan dari Kementerian PANRB.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,64 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,83 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dan 2023, diperoleh informasi bahwa target tahun 2022 dan 2023 sudah tercapai, namun dengan target tahun 2024 belum tercapai.

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 89. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,25	85,37	100,14		**Sangat Baik**

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 90. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 memperoleh nilai AKIP sebesar 85,37 dengan kategori **Memuaskan** dan mendapat peringkat pertama Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia di Lingkungan Badan POM. Dengan realisasi tersebut BBPOM di Surabaya mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,14% pada kategori **Sangat Baik**.

b. **Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun - sebelumnya**

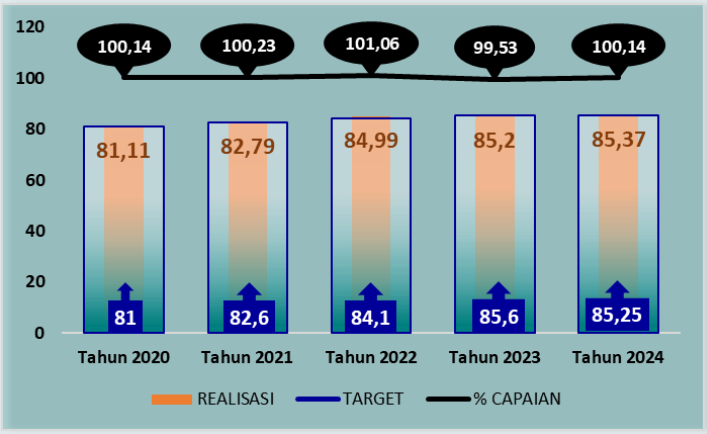

Gambar 68. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024

Berdasarkan grafik disamping, terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Namun demikian capaian tahun 2022 sampai dengan 2024 fluktuatif, dikarenakan adanya kenaikan target dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari 84,10 menjadi 85,6. Pada Tahun 2024 target Nilai AKIP BBPOM di Surabaya dilakukan penyesuaian sesuai dengan reviu dari unit pengampu berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama Nomor PI.04.7.72.12.23.247 pada tanggal 8 Desember 2023 sehingga target reviu renstra disesuaikan dari 87,1 menjadi 85,25. BBPOM di Surabaya berupaya untuk selalu menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP dari APIP, agar penilaian bisa meningkat setiap tahunnya.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional**

Gambar xx.

Berdasarkan grafik perbandingan di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP pada tahun 2024 yang tertinggi diraih oleh BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Dari kelima balai yang diperbandingkan, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Semarang belum berhasil mencapai target nasional, sedangkan BBPOM di Surabaya, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Bandung telah berhasil mencapai target nasional. Pada tahun 2024 BBPOM di

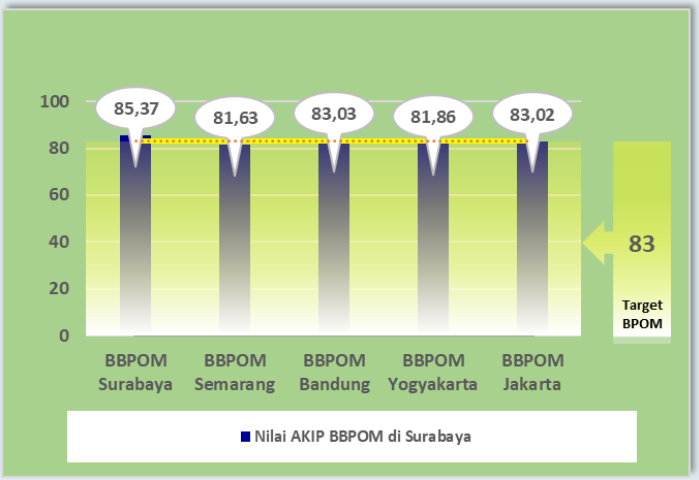

Gambar 69. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional

Surabaya kembali mendapat Nilai AKIP tertinggi dibandingkan semua UPT di seluruh Indonesia di Lingkungan Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 85,37 (A). Nilai AKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai tertinggi diantara seluruh UPT di lingkungan BPOM. Selama Tahun 2024 telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 91. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP BBPOM di Surabaya Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan	Monitoring Progress
1	**Perencanaan**	-	-	-	
2	**Pengukuran Kinerja**				
a.	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, RHPK, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan.	Dalam rangka memastikan keselarasan data-data yang disajikan, dilakukan langkah-langkah: 1. Membatasi akses pengisian/perubahan data pada personil hanya pada PJ Data masing-masing fungsi. 2. Dilakukan verifikasi Data oleh PJ Data Satker 3. Melakukan validasi	Triwulan II	Link data dukung: https://drive.google.com/file/d/14PStYVPNI4OLJpglLRMUTEoCTinSeGMT/view?usp=drive_link	Selesai

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan	Monitoring Progress
		data pada saat rapat evaluasi internal Perbaikan mekanisme tersebut dituangkan pada revisi SOP Monitoring dan Evaluasi			
3	**Pelaporan Kinerja**				
a.	Memastikan keselarasan penyajian data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan	Dalam rangka memastikan keselarasan data-data yang disajikan, dilakukan langkah-langkah: 1. Membatasi akses pengisian/perubahan data pada personil hanya pada PJ Data masing-masing fungsi. 2. Dilakukan verifikasi Data oleh PJ Data Satker 3. Melakukan validasi data pada saat rapat evaluasi internal Perbaikan mekanisme tersebut dituangkan pada revisi SOP Monitoring dan Evaluasi	Triwulan II	Link data dukung: https://drive.google.com/file/d/14PStYVPNI4OLJpglLRMUTEoCTinSeGMT/view?usp=drive_link	selesai
b.	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan mencantumkan mekanisme yang memadai dan komprehensif jika terjadi kesalahan/perubahan data	Melakukan penyempurnaan mekanisme pengumpulan data dan langkah-langkah apabila terjadi kesalahan/perubahan data yang ada pada SOP Monitoring dan Evaluasi			selesai
c.	Menyusun Laporan Kinerja dengan	1. Menyajikan perbandingan data	Triwulan II		selesai

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan	Monitoring Progress
	menyajikan penjelasan terkait pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator/target/definisi operasional/kegiatan.	laporan kinerja dari 2020 - 2023 dalam bentuk grafik beserta penjelasannnya.			
		2. Menyampaikan Laporan Hasil Kinerja kepada Stakeholder terkait	Triwulan II		selesai
		3. Memberikan reward dan punishment terhadap stakeholder diberikan pada saat kegiatan BOK atau kegiatan lain yang melibatkan stakeholder	Triwulan IV		selesai
		4. Insight yang semula hanya ditayangkan di Manajemen File dan hanya bisa diakses oleh internal selanjutnya akan ditayangkan di web balai sehingga bisa diakses secara umum	Triwulan II		selesai
4	**Evaluasi Internal**				
a.	Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi baik dari hasil evaluasi SAKIP maupun hasil evaluasi internal.	Melakukan pengembangan pada inovasi insight dengan menambahkan fitur Monev Kesenjangan Kinerja terhadap Capaian IKU Organisasi dengan memanfaatkan data dari Kemajuan Capaian pada aplikasi Simakin. Terhadap pegawai yang belum mencapai 100% akan dilakukan intervensi untuk mengawal Capaian IKU Organisasi.	Triwulan I	Link data dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1T49Hne8yL_B54dDouTrTjlU7kFgSf0Pr?usp=drive_link	selesai
5	**Capaian Kinerja**				

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi/Tindak Lanjut	Timeline	Keterangan	Monitoring Progress
a.	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Evaluasi internal sebagai early warning system dicantumkan dalam Lapkin Interim	Triwulan II	Link data dukung: https://drive.google.com/drive/folders/1x75DML0ql779TmDfa6pkn51MssaOwp8C?usp=drive_link	Selesai

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen disajikan pada tabel berikut.

Tabel 92. Hasil Penilaian AKIP BBPOM di Surabaya per Komponen

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	24,00	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,76	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	11,04
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,56	17,21
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	85,20	85,37
Predikat			**A**	**A**

Dari tabel Hasil Penilaian AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2023 dan 2024 tersebut diketahui bahwa dari 5 (lima) komponen penilaian terdapat 3 (tiga) komponen penilaian yang mengalami kenaikan, yaitu:

- Pengukuran Kinerja, dari 17,76 menjadi 20,16
- Pelaporan kinerja, dari 10,08 menjadi 11,04
- Capaian Kinerja, dari 16,56 menjadi 17,21.

Satu komponen nilainya tetap jika dibandingkan dengan nilai tahun 2023, yaitu komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Sedangkan 1 (satu) komponen lagi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu komponen Perencanaan Kinerja, dari 24 menjadi 20,16. . Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelemahan yaitu SK Penetapan Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan pada subsite Balai Besar POM di Surabaya; Kertas Kerja Reviu Target indikator kinerja belum menyajikan penetapan target final/akhir (sesuai dokumen PK yang disahkan) dan belum disertai dengan dokumentasi justifikasi/informasi terkait hal tersebut; Perbedaan total anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dan DIPA/POK, yaitu pada DIPA/POK per tanggal 2 Juli 2023 pagu sebesar Rp58.638.001.000 sedangkan pada RAPK yang disusun pada tangal 8 Agustus 2023 masih mencantumkan pagu sebelum revisi, yaitu sebesar Rp69.048.715.000 .

e. Analisi Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 93. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	1.934.913.000	1.930.992.120	99,80	100,14	**100% (Efisien)**

Pada tahun 2024 telah dialokasikan anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini diantaranya alokasi anggaran untuk kegiatan Forum Komunikasi Perencana, Rapat Evaluasi Nasional BPOM, Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM), Evaluasi Sakip Regional, dan Asistensi Penyusunan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM. Dalam perjalanannya dilakukan beberapa penyesuaian untuk pemenuhan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan yang mendukung tercapainya target pada indikator Nilai AKIP ini sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan optimal. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bila anggaran yang dialokasikan telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 94. Rencana Aksi pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Ket
26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001 .051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D	Forum Komunikasi Perencana BPOM	9.060.000	2	Kali	2	
					E	Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024	2.000.000.000	1	Paket	1	
					F	Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)	8.052.000	1	Kali	1	
					H	Perencanaan dan Evaluasi	3.012.000	1	Paket	1	
		Tata Usaha	BKB.001 .052	Pelaksanaan koordinasi	D	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja, SAKIP dan Monev Online	9.360.000	1	Kali	1	

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tim sakip mengikuti bimtek SAKIP dan monev online, dan penyelenggaraan rapat kerja nasinal badan pengawas obat dan makanan, mengikuti Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM). Dengan selalu ditingkatkannya kompetensi tim sakip setiap tahun, diharapkan perbaikan dapat selalu dilakukan untuk pelaksanaan sistem akip yang lebih baik secara menyeluruh.

g. Upaya peningkatan kinerja

Adapun Rekomendasi perbaikan kinerja berdasarkan hasil evaluasi sakip tahun 2024 antara lain:

1) Perencanaan Kinerja

- Mempublikasikan seluruh dokumen SAKIP pada subsite Satuan Kerja;
- Menyusun kertas kerja reviu target indikator kinerja dengan menyajikan target final/akhir (sesuai dokumen PK yang disahkan) dan disertai dokumentasi justifikasi/informasi yang jelas;
- Memastikan kesesuaian penyajian total anggaran pada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

2) Pengukuran Kinerja

- Mendokumentasikan secara tertib dokumen monev yang berisi rincian data yang menghasilkan angka pembilang dan penyebut pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK);
- Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SKP Pimpinan, aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja.
- Menyusun identifikasi kendala pada aplikasi SIMETRIS secara memadai.

3) Pelaporan Kinerja

- Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan: Timeline pelaksanaan rencana aksi pada tabel monitoring tindak lanjut rekomendasi; dan Penjelasan perhitungan capaian indikator kinerja sesuai dengan manual IKU.
- Memastikan kesesuaian penyajian pagu dan realisasi anggaran pada Laporan Kinerja dengan Laporan Realisasi Kinerja aplikasi SAKTI.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan: a) Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) secara lengkap terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan; b) Monitoring tindak lanjut atas seluruh rekomendasi periode sebelumnya

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, indikator Nilai AKIP tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2024 dilakukan pengawalan yang lebih intensif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai AKIP agar dapat mencapai target 2024. Sehingga pada tahun 2024 target yang ditetapkan berhasil dicapai dengan baik. BBPOM di Surabaya terus berupaya memberikan kinerja terbaik untuk peningkatan implementasi SAKIP.

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 95. Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,50	98,06	101,62		**Sangat Baik**

Pada awal tahun 2024, BBPOM di Surabaya menetapkan target untuk nilai pengelolaan kearsipan sebesar 96,50. Target ini ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan kearasipan tahun sebelumnya serta penyesuaian dengan kebijakan nasional terkait standar kearsipan.

Nilai hasil pengelolaan kearsipan BBPOM di Surabaya merupakan nilai hasil dari penilaian/evaluasi gabungan antara pengawasan kearsipan internal yang dilakukan oleh Biro Umum BPOM dengan bobot penilaian 40% dan pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan bobot penilaian 60%. Nilai hasil pengawasan kearsipan BBPOM di Surabaya berdasarkan kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 96. Kategori Penilaian Pengelolaan Kearsipan

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Pada tahun 2024, Nilai hasil pengelolaan kearsipan yang diperoleh BBPOM di Surabaya yaitu 98,06. Capaian Nilai hasil pengelolaan kearsipan BBPOM Surabaya pada tahun 2024 adalah **98,06** dari target 96,50 atau dengan capaian melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,56 poin atau **101,62%** dari target. Dengan nilai hasil pengelolaan kearsipan tersebut, BBPOM di Surabaya sudah mencapai target yang

ditetapkan serta masuk dalam kategori **"AA" (Sangat Memuaskan/Sangat Baik)**, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel Kategori Penilaian Pengelolaan Kearsipan.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Tabel 97. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tahun 2024	96,5	98,06	101,62

Pada tahun 2024, BBPOM Surabaya berhasil mencapai nilai pengelolaan kearsipan sebesar 98,06, melebihi target yang ditetapkan sebesar 96,50. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM Surabaya telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan optimalisasi dalam pengelolaan kearsipan. Pencapaian ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang dan berkelanjutan, termasuk evaluasi berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip.

c. **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional**

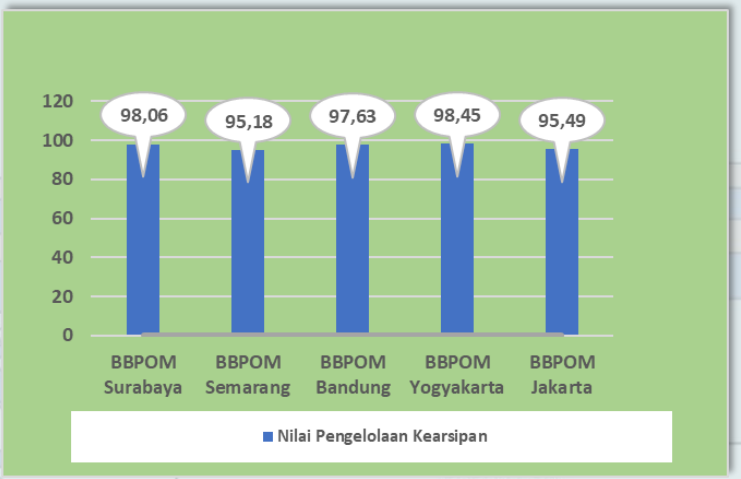

Gambar 70. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional

Dalam skala nasional, BBPOM di Surabaya memiliki posisi yang kompetitif dibandingkan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lainnya di berbagai daerah. Tabel di atas adalah perbandingan nilai pengelolaan kearsipan dengan beberapa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lainnya.

Dari tabel di atas, BBPOM di Surabaya memperoleh nilai pengelolaan kearsipan 98,06 dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan beberapa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan lainnya namun masih di bawah BBPOM di Yogyakarta. Dari hasil nilai pengelolaan kearsipan yang telah dilakukan di tahun 2024, BBPOM di Surabaya memperoleh peringkat kedua.

.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023, BBPOM di Surabaya belum ada penilaian terhadap indikator pengelolaan kearsipan, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan nilai terbaik sesuai target antara lain:

- Memastikan kesesuaian dokumen dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung pengelolaan kearsipan untuk pengawasan atau audit kearsipan.
- Pembuatan naskah keluar diregistrasi oleh masing-masing unit pengolah dan dilakukan autentikasi dengan verifikasi naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah Dinas di Srikandi oleh Arsiparis sehingga mengurangi risiko kesalahan.
- Memastikan penyajian arsip menjadi informasi dengan pembuatan daftar informasi arsip aktif dan daftar informasi arsip Inaktif dilakukan dengan baik dan teratur.
- Menindaklanjuti rekomendasi atau rencana aksi baik dari hasil pengawasan kearsipan internal maupun hasil pengawasan kearsipan eksternal.
- Memanfaatkan secara optimal pengawasan kearsipan internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

e. Analisi Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 98. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Pengelolaan Kearsipan	8.493.500	8.493.430	100,00	101,62	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator dapat direalisasikan dengan menggunakan sumber daya/anggaran yang tersedia. Pada triwulan III capaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya

mencapai 101,62 % .dengan realisasi anggaran 65,52% dan tingkat efisiensi 100% (efisien).

Dari segi efisiensi anggaran, BBPOM Surabaya berhasil mencapai 100% efisiensi dengan realisasi anggaran sebesar 8.493.430 dari total anggaran yang disediakan sebesar 8.493.500. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target kinerja. Anggaran yang tersedia digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan pengelolaan kearsipan, termasuk pelatihan staf, pengadaan peralatan, dan kegiatan pemusnahan arsip.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel xx Rencana Aksi pada Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	I	Pemusnahan	10.950.000	2	Kali	2	

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Surabaya antara lain:.

1. Monitoring dan Evaluasi.

   Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kearsipan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan kearsipan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pemusnahan Arsip.

   Kegiatan pemusnahan arsip yang telah mencapai masa retensinya. Pemusnahan dilakukan secara teratur dan memastikan bahwa hanya arsip yang masih relevan yang disimpan.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

g. **Upaya peningkatan kinerja**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa mendatang, BBPOM di Surabaya akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam mengelola arsip sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

   Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi kearsipan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan arsip. Sistem digital akan digunakan untuk memudahkan pencarian, penyimpanan, dan pemusnahan arsip.

3. Peningkatan Koordinasi Antarunit.

   Memperkuat koordinasi antara fungsi kerja yang terlibat dalam pengelolaan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsi memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengelolaan kearsipan yang efektif.

4. Evaluasi Berkala.

   Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan kearsipan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menyusun rencana perbaikan yang lebih terarah.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan program kerja BBPOM di Surabaya untuk tahun-tahun berikutnya. Laporan ini juga akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk ANRI dan Biro Umum BPOM, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kearsipan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami capaian yang telah diraih, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya belum berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal dengan Nilai NPS 95,06% dengan kriteria **Cukup**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

b. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 99. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	90,86	86,37	95,06		**Cukup**

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2024 tanggal 22 Mei 2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a) Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b) Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c) Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian

lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya di peroleh dari aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari:

a) Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
b) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;
c) Dimensi Kompetensi mengambil data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM);
d) Dimensi Disiplin mengambil data dari Aplikasi SIAP yang diambil dari data aplikasi SIMOD.

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya sesuai aplikasi IP ASN BPOM sebesar 86.37. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya belum berhasil mencapai target yaitu 95.06 dengan kriteria Cukup.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

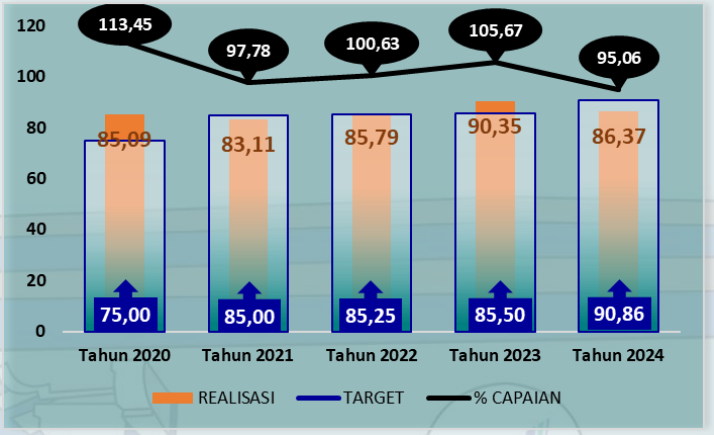

Gambar 71. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2020 hingga tahun 2024

Target IP ASN Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan target renstra karena realisasi IP ASN Tahun 2023 yang tinggi yaitu 90.35, sedangkan target tahun berjalan tidak boleh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sehingga unit pengampu menaikkan target IP ASN Tahun 2024 menjadi 90.86.

Dari grafik diatas diketahui bahwa terdapat penurunan realisasi pada tahun 2021, selanjutnya meningkat di tahun 2022 dan 2023 lalu menurun lagi di tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan instrumen pengukuran IP ASN.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

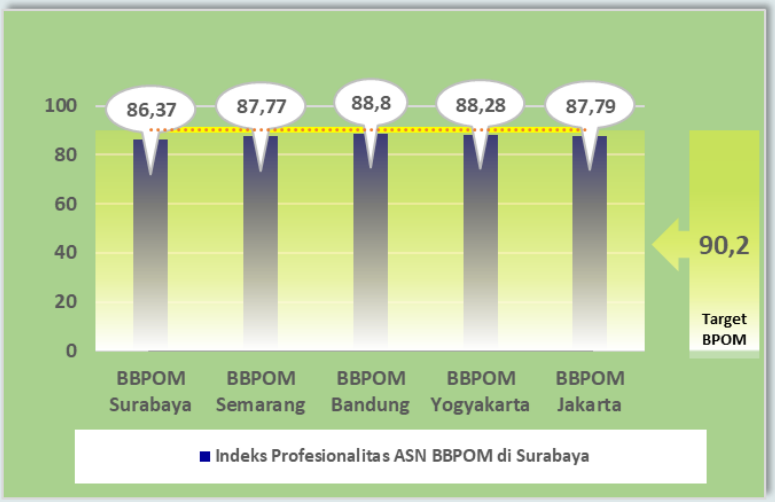

Gambar 72. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Bandung dan BBPOM di Yogyakarta, sedangkan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Penurunan realisasi IP ASN Tahun 2024 dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat pegawai dengan nilai predikat kinerja tahun 2023 kurang dari baik, yaitu 1 orang butuh perbaikan, 1 (satu) orang kurang dan 2 (dua) orang sangat kurang, rencana aksi yang telah dilakukan yaitu telah di lakukan pembinaan oleh ketua tim untuk pegawai tersebut sehingga terjadi peningkatan kinerja;
2. Terdapat Pejabat Fungsional Tertentu Non PFM yang belum mengikuti pelatihan fungsional dari instansi Pembina yaitu : 1 (satu) orang Arsiparis Mahir, dan 3 (tiga) orang Perencana Ahli Pertama yang baru diangkat terhitung mulai tanggal 1 September 2024;
3. Selain itu juga di sebabkan karena per tanggal 20 Juni 2024 Plt. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 Tentang pengukuran IP ASN Tahun 2023, Dimana disampaikan bahwa terdapat perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang

tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Menindaklanjuti surat tersebut Biro Sumber Daya Manusia sebagai unit pengampu membuat Nota Dinas Kepala Biro SDM Nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Usulan Penyesuaian/Perubahan Target IP ASN Tahun 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan, terhadap surat usulan tersebut Biro Perencanaan membuat Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024, dimana dalam nota dinas tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a) Target IP ASN BPOM Tahun 2024 sebesar 90,2 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPOM yang diturunkan pada PK seluruh Unit Organisasi/Satker. Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, disebutkan bahwa PK dapat direvisi dalam hal terjadi: (1) pergantian/mutasi pejabat; (2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; serta (3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Namun terdapat mekanisme pelaporan kinerja yang menjadi ruang bagi Unit Organisasi/Satker untuk mendeskripsikan keberhasilan pencapaian kinerja;
b) IP ASN merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di BPOM, sehingga apabila dilakukan penyesuaian target, maka seluruh unit kerja harus melakukan revisi PK Tahun 2024 yang memakan waktu cukup Panjang karena memerlukan proses pemutakhiran anggaran melalui aplikasi SIMETRIS serta pengesahan hingga level Kepala BPOM. Sementara itu, pengukuran kinerja harus dilakukan pada akhir Desember 2024 (B12), sehingga waktu yang ada terlalu singkat untuk melakukan perubahan target kinerja;
c) Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka revisi target IP ASN pada PK 2024 dirasa belum perlu untuk dilakukan. Adapun realisasi kinerja IP ASN akan tetap dilaporkan pada Laporan Kinerja BPOM dan Unit Organisasi/Satker dengan menambahkan justifikasi terkait perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indicator tersebut. Selanjutnya, terkait Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

(di *exclude*) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil pengukuran NPSS tersebut.

f. Analisa Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 100. Efiensi Anggaran pada Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks Profesionalitas ASN	370.911.000	334.139.234	90,09	95,06	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN pada BBPOM di Surabaya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 101. Rencana Aksi pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
9	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	M	Pelatihan Fungsional Non PFM	6.160.000	1	Kali/Trip	0	Revisi Target & Anggaran
			Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	B	Diklat untuk Pegawai Teladan	11.240.000	1	Kali/Trip	1	
						C	Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Perkuatan SDM Unggul	7.001.000	1	Kali/Trip	1	
						F	Pelatihan Dasar dan Rekruitmen CPNS dan CP3K	125.570.000	2	Kali	2	
						G	Peningkatan Kompetensi Pegawai	95.381.000	11	Kali	6	Revisi Target & Anggaran
						K	Awareness Documenting ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Suap)	75.000.000	1	Kali	1	

Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya antara lain sebagai berikut :

1) Peningkatan Kompetensi Pegawai sebanyak minimal 20 JP, baik secara mandiri ataupun menggunakan aplikasi IDEAS;
2) Untuk Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang berstatus sebagai PNS maupun PPPK dengan mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan fungsional maupun penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional PFM di lingkungan Badan POM yang belum pernah mengikuti pelatihan fungsional PFM diwajibkan mengikuti program pelatihan fungsional PFM yang tersedia pada aplikasi IDEAS;
3) Untuk Pejabat Fungsional Non-Pengawas Farmasi dan Makanan (Non- PFM) di lingkungan Badan POM yang belum pernah mengikuti pelatihan fungsional dengan jabatan fungsional sebagai berikut : Analis SDM Aparatur dan Penata Laksana Barang diwajibkan mengikuti pembekalan dari instansi Pembina masing – masing yang akan diselenggarakan oleh PPSDM POM pada bulan desember tahun 2024, pembekalan tersebut mendapatkan poin diklat fungsional pada pengukuran IP ASN.
4) Diklat untuk Pegawai Teladan/ Pemenang Lomba Inovasi/Arsiparis Teladan;
5) Pencantuman gelar untuk perolehan ijazah lebih tinggi;

Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

h. Upaya peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan capaian nilai Indeks Profesional ASN 2024, akan di lakukan beberapa upaya perbaikan yaitu melalui :

a) Dimensi kualifikasi (pendidikan), dengan mengusulkan pencatuman gelar untukagi pegawai yang telah selesai TUBEL; dan pencatuman gelar untuk perolehan ijazah lebih tinggi bagi pegawai yang memperoleh kualifikasi pendidikan lebih tinggi tetapi tidak memiliki ijin TUBEL/IBEL tetapi telah mendapat ijin pemutihan dari Sekretaris Utama Badan POM;
b) Dimensi kinerja, dengan secara rutin dilakukan dialog kinerja antara ketua tim dan anggota tim untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;

c) Dimensi kompetensi, dengan berkomunikasi/bersurat ke PPSDM pejabat fungsional yang belum diklat fungsional dapat segera diikutkan diklat di instansi pembina untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;

d) Dimensi disiplin, dengan melakukan sosialisasi peraturan disiplin saat apel manis dan memberlakukan *reward and punishment* melalui *Employee Of The Month*, Penghargaan Pegawai Berprestasi, dan penayangan video PINSIL.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan Nilai NSS 110,28% dengan kategori SANGAT BAIK.

Pencapaian tersebut didukung oleh 2 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 102. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,74	89,23	100,55		Sangat Baik

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya lLaboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk :

a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan;
b. menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan; dan
c. monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada tahun 2024 telah dilakukan penilaian terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) BBPOM di Surabaya dengan hasil nilai 89,23%. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100,55% dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

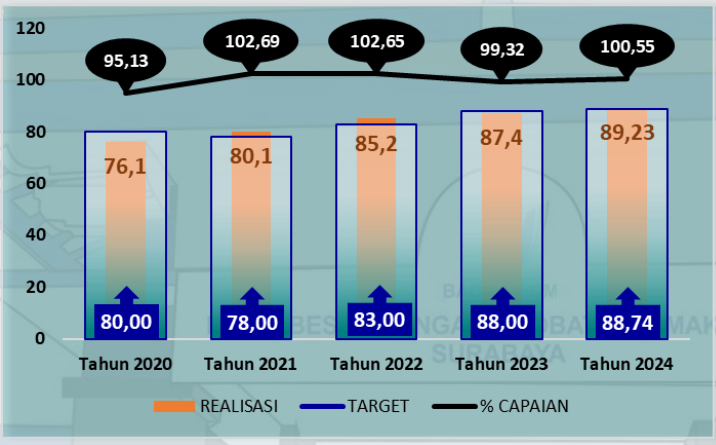

Gambar 73. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2020 hingga Tahun 2023

Terdapat peningkatan realisasi dan persentase capaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Hal ini sebagai upaya BBPOM di Surabaya yang melakukan monev secara rutin terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan

Standar Alat Laboratorium. Pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian karena adanya perubahan *tools* penilaian SKL pada triwulan IV tahun 2023, yaitu adanya penambahan standar baru terutama bagi balai Regional sehingga mengalami kendala dalam pemenuhan terhadap target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, persentase capaian pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat kembali meningkat. Secara keseluruhan capaian tahun 2020 hingga tahun 2024 masih cukup baik dimana capaian dari tahun ke tahun berada pada angga 90 - 110 %.

Perubahan tools penilaian Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM dan BPOM serta penunjukkan BBPOM di Surabaya sebagai Balai Regional, menyebabkan adanya perubahan Standar Ruang Lingkup yang harus dipenuhi. Beberapa parameter yang sudah dipenuhi di triwulan sebelumnya tidak dapat dihitung sebagai capaian karena adanya perubahan penugasan, sehingga beberapa Balai Regional Badan POM kesulitan untuk mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan target pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yang ditetapkan melalui reviu renstra dengan target tahun 2024. Target reviu renstra untuk tahun 2024 adalah 93 sedangkan target tahun 2024 adalah 88,74.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

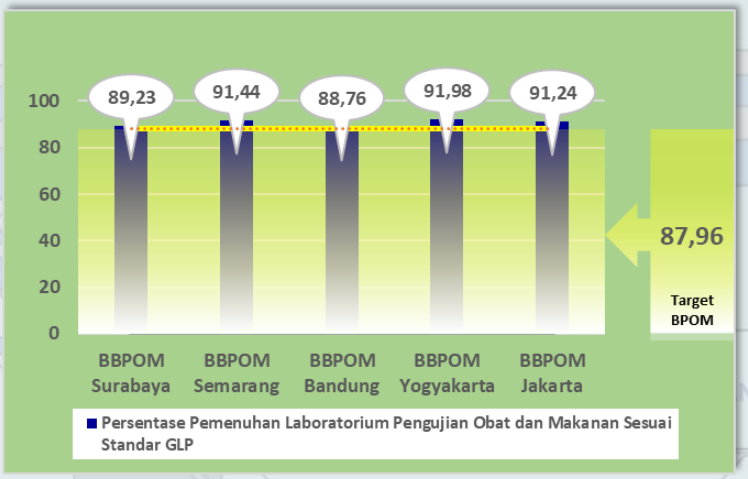

Gambar 74. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Balai Lain yang Sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dan yang terendah adalah

BBPOM di Bandung. Dari ketiga balai yang diperbandingkan, ketiganya telah memenuhi target tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2024 Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya berusaha memenuhi target baru yang telah disesuaikan dan juga meningkatkan capaian yang menurun pada tahun 2023.

Kendala pemenuhan Standar Ruang Lingkup :

1. Terdapat parameter uji atau ruang lingkup yang sulit dipenuhi dikarenakan harus menunggu pengadaan baku pembanding, suku cadang dan reagensia
2. Terdapat parameter uji atau ruang lingkup di laboratorium obat yang tidak masuk dalam prioritas sampling tahun 2024 tetapi masih ada dalam tools monev ruang lingkup sehingga sampel tidak tersampling dan teruji. Hal tersebut mempengaruhi penilaian ruang lingkup
3. Rencana pemenuhan ruang lingkup terkendala karena optimasi kondisi pengujian (terutama yang menggunakan instrumen HPLC dan AAS) sulit dicapai akibat penggunaan air yang dihasilkan water purifier belum memenuhi spesifikasi air untuk standar instrument tersebut
4. Regionalisasi laboratorium menyebabkan laboratorium hanya mengerjakan kelas terapi sesuai kesepakatan dan tidak melakukan pengujian untuk kelas terapi lainnya sehingga pemenuhan ruang lingkup di laboratorium obat belum cukup maksimal
5. Beberapa parameter uji atau ruang lingkup pengujian laboratorium pangan cukup kompleks sehingga membutuhkan persiapan yang lebih khusus dan spesifik

Kendala pemenuhan kompetensi personel :

1. Pada tahun 2024 laboratorium pengujian Balai Besar POM di Surabaya mengalami pengurangan personel yang cukup banyak, yaitu 4 orang mutasi, 3 orang memasuki masa pensiun, 1 orang sakit, 1 orang redistribusi dan 1 orang tubel. Staf-staf tersebut memiliki kompetensi yang tinggi sehingga hal ini berpengaruh terhadap penilaian kompetensi
2. Pemenuhan SKL kompetensi PFM Ahli Madya terkait melakukan pengujian sampel unknown dan pengujian sampel tingkat kesulitan V belum dapat dilakukan
3. Pemenuhan SKL kompetensi PFM Ahli Madya terkait pengujian spesifik menggunakan KG-MS/MS tidak dapat dilakukan karena laboratorium BBPOM di

Surabaya belum memiliki instrumen tersebut. Selain itu belum ada metode analisa yang menggunakan instrument KG-MS/MS

4. Berdasarkan hasil evaluasi kompetensi personel terdapat beberapa personel yang nilai kompetensinya masih di bawah 70. Personel kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personel tersebut tidak melaksanakan pengujian yang terkait dengan kompetensi yang diwajibkan

Kendala pemenuhan peralatan :

1. Menjelang akhir tahun beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan berat, sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan dengan segera karena terkendala anggaran dan proses pembayaran
2. Pengurangan nilai peralatan disebabkan alat rusak dan usang. Lebih dari 20% instrument Balai Besar POM di Surabaya berusia lebih dari 10 tahun. Suku cadang dari beberapa alat yang usianya lebih dari 10 tahun sudah diskontinyu sehingga perlu dilakukan refreshment peralatan untuk mendukung proses pengujian yang memerlukan teknologi modern
3. Beberapa peralatan masih membutuhkan penambahan karena sudah over kapasitas ataupun usia peralatan yang sudah lebih dari 10 tahun tetapi belum dapat dipenuhi karena belum tersedianya anggaran, misalnya GC MS/MS dan TLC System (Automatic TLC System, Automatic Developing Chamber/ADC, Visualizer, TLC Documentation System)
4. Peralatan yang belum dapat dipenuhi karena masih belum tersedianya anggaran ataupun persetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan antara lain yaitu conductivitymeter, dehumidifier, UPS dan UHPLC
5. Di laboratorium mikrobiologi suhu ruangan dan alat (deep freezer, kulkas, dan inkubator) seringkali tidak memenuhi persyaratan serta suhu dan kecepatan putaran hotplate tidak stabil
6. Proses pembersihan secara menyeluruh secara fumigasi setelah instalasi isolator pada laboratorium mikrobiologi belum dilakukan karena keterbatasan anggaran
7. Beberapa UPS alat di laboratorium tidak berfungsi dan membutuhkan penggantian

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 103. Efiesiensi atas Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	16.233.794.000	15.071.747.199	92,84	100,55	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena persentase realisasi anggaran lebih kecil dari capaian indikator. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 104. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
10	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian	PDD.001.051	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A	Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium Balai Besar/Balai/Loka	10.110.000	0	Kali/Trip	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						B	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai /Balai Besar POM Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	10.110.000	1	Kali/Trip	1	
						C	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik	10.110.000	1	Kali/Trip	1	
						D	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	10.110.000	1	Kali/Trip	1	
						E	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian Mikrobiologi	10.110.000	1	Kali/Trip	0	
						F	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Kimia Pangan Olahan Dan Air tahap 1	10.110.000	1	Kali/Trip	1	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
						G	Bimbingan Teknis Pengujian	238.200.000	5	Kali	6	
						H	Pelatihan K3	42.510.000	1	Kali	1	
						I	Pelatihan Sistem Mutu	36.090.000	1	Kali	1	
						J	Peningkatan Kompetensi Pegawai	122.160.000	5	Kali	6	
						K	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian Biologi Molekuler (DNA Spesifik Spesies)	10.110.000	1	Kali/Trip	2	
						L	Bimbingan Teknis LRPPI bahan kontak pangan olahan dan Cemaran Logam Mikotoksin Pangan olahan	20.220.000	2	Kali/Trip	2	
						M	Workshop AFRL	10.110.000	1	Kali/Trip	1	
			Pengujian	PDD.001.052	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A	Operasional Laboratorium	982.200.000	12	Kali	12	
						B	Pengadaan Suku Cadang dan Glassware	2.931.290.000	6	Paket	7	
			Pengujian	PDD.001.054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A	Rekalibrasi Peralatan Laboratorium	37.790.000	1	Kali	1	
						B	Kalibrasi Eksternal Peralatan Laboratorium	305.000.000	1	Paket	4	
						C	Konsultasi Sistem Mutu	30.950.000	1	Kali/trip	1	
						D	Surveilan Laboratorium Pengujian oleh KAN BSN	89.790.000	1	Kali	2	
						E	Pertemuan Teknis KAN	12.380.000	1	Kali	1	
						F	Monitoring Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Sistem Regionalisasi Laboratorium	6.350.000	1	Kali	0	Revisi Anggaran
						G	Verifikasi Metode Analisis	50.000.000	5	Paket	5	
						H	Uji Profisiensi/Uji Banding	80.000.000	5	Paket	6	
						I	Uji Kolaborasi Metode Analisa	50.000.000	5	Paket	5	
			Pengujian	PDD.001.056	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	A	Forum Diseminasi hasil riset dan kajian Obat dan Makanan	11.680.000	1	kali/trip	1	
						B	Reassesmen dan Sosialisasi GLP	5.980.000	1	kali	0	
						C	Koordinasi dan Konsultasi	52.550.000	10	kali/trip	6	
						D	Kegiatan Monev dan Produktivitas Kinerja	213.684.000				
			Pengujian	RAB.001.051	Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	A	Pengadaan Alat Laboratorium	11.347.774.000	1	paket	1	

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tahun 2024 dilakukan untuk memenuhi capaian kinerja antara lain peningkatan kompetensi petugas pengujian melalui pelatihan, bimtek internal dan pendampingan, verifikasi metoda analisa, uji profisiensi/uji banding, kolaborasi metode analisa, reasesment GLP, pengadaan suku cadang, renovasi laboratorium, kalibrasi peralatan laboratorium, dan pengadaan unit alat laboratorium.

g. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja dalam pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat dilakukan dengan cara :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup

   Upaya peningkatan pemenuhan SRL dilakukan dengan perencanaan pengujian SRL baru serta pemenuhan sarana prasarana seperti reagen, media, baku pembanding, alat serta kompetensi untuk pemenuhan SRL secara bertahap. Koordinasi dengan fungsi inspeksi juga dilakukan untuk merencanakan sampling sesuai dengan parameter uji dan ketersediaan sampel di pasaran. Beberapa SRL sulit untuk dipenuhi sehingga dilakukan komunikasi dengan PPPOMN untuk mengusulkan review standar pemenuhan ruang lingkup agar lebih relevan, terutama untuk komoditi obat karena tidak semua ruang lingkup dapat terpenuhi karena ketidaktersediaan sampel di peredaran.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Personel

   Upaya peningkatan pemenuhan standar kompetensi dilakukan dengan berkomunikasi dengan PPPOMN terkait tools monev SKL yang sesuai terutama terkait monev personel. Dengan jumlah penguji yang berkurang karena purnabakti dan mutasi, cukup sulit untuk dapat melakukan pemenuhan standar kompetensi. Upaya memetakan kompetensi penguji dan kebutuhan kompetensi penguji untuk dilakukan peningkatan kompetensi dengan melaksanakan bimtek yang sesuai, TOT, terutama untuk penguji baru yang masih memerlukan pemenuhan kompetensi. Selain itu evaluasi penempatan personel di laboratorium juga perlu dilakukan sehingga kompetensi personel dapat bertambah.

3. Pemenuhan Standar Peralatan

   Peralatan bagi laboratorium regional merupakan hal yang vital. Pemenuhan standar peralatan melalui pengadaan tahun 2025 telah dilakukan dengan pengusulan kepada PPPOMN dan Roren. Pengadaan alat diprioritaskan terhadap alat yang diperlukan untuk pemenuhan pengujian sebagai laboratorium regional dengan memperhatikan pemenuhan standar GLP. Selain melalui pengadaan, perawatan alat merupakan kegiatan yang mutlak untuk mempertahankan performa alat. Upaya lainnya yang dilakukan dalam menjaga pemenuhan standar peralatan adalah melalui kalibrasi, baik internal ataupun eksternal, serta cek antara melalui verifikasi kinerja alat yang dilakukan oleh penguji secara berkala.. Diperlukan peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka mempertahankan kondisi peralatan, terutama perbaikan

infrastruktur laboratorium seperti suhu dan kelembaban dan instalasi listrik. Sebagai laboratorium regional yang menguji seluruh parameter uji spesifik menggunakan instrumen dengan teknologi tinggi serta metode analisis yang kompleks, tentunya kebutuhan biaya perawatan instrumen berteknologi tinggi akan meningkat.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi adanya kekurangan biaya pemeliharaan alat laboratorium. Hal ini sebagai dampak dari regionalisasi, sehingga jumlah sampel yang diuji lebih banyak dari tahun - tahun sebelumnya dan mengakibatkan alat laboratorium mudah rusak. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuat usulan permintaan tambahan anggaran kepada Sestama dengan tembusan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta PPPOMN. Setelah surat usulan disetujui, maka dilakukan revisi penambahan belanja operasional untuk pemeliharaan alat laboratorium.

Laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024 juga menyebutkan adanya kesulitan dalam pemenuhan standar kompetensi personel. Oleh karena itu laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya melakukan rotasi penguji sehingga nilai kompetensi penguji dapat meningkat dan standar kompetensi personel dapat dipenuhi. Selain itu untuk dapat mempertahankan nilai kompetensi agar tidak menurun akibat pegawai yang purna tugas maupun pegawai yang rotasi, maka dilakukan pemberian pelatihan keterampilan dasar oleh penyelia kepada penguji baru. Melalui kegiatan tersebut diharapkan penguji baru memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan dapat menambah nilai standar kompetensi personel laboratorium.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 105. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3,00	3,00	120,00		**Sangat Baik**

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:
2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracuanan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: *email*, *sharing folder*, *dashboard* BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 120%, sudah **mencapai target** yang telah ditetapkan dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

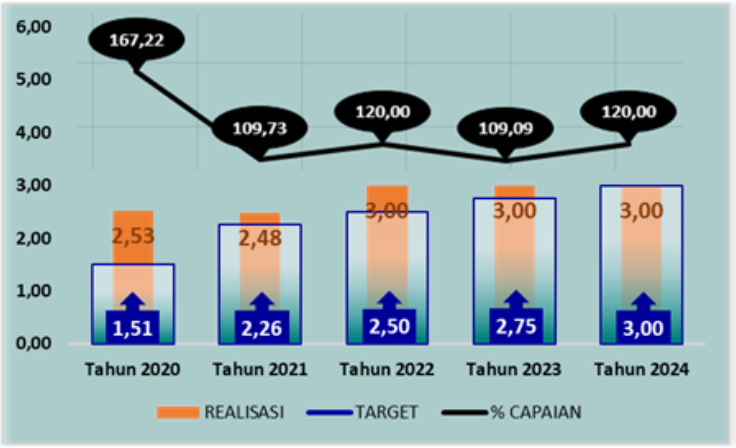

Gambar 75. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal tahun 2020 hingga tahun 2024

Realisasi tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020, namun kembali naik di tahun 2022. Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 realisasi Indeks pengelolaan data dan Informasi pada BBPOM di Surabaya adalah 3. Namun demikian capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena nilai indeks yang diperoleh yaitu 3 yang merupakan nilai indeks optimal tertinggi yang dapat dicapai dan berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.43 tanggal 15 Januari 2025 perihal Ketentuan Pengukuran Kinerja Tahun 2024, terdapat konversi persentase capaian pada Indeks pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, yaitu bagi UPT yang telah mencapai target Maksimal realisasi maka capaiannya adalah 120%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

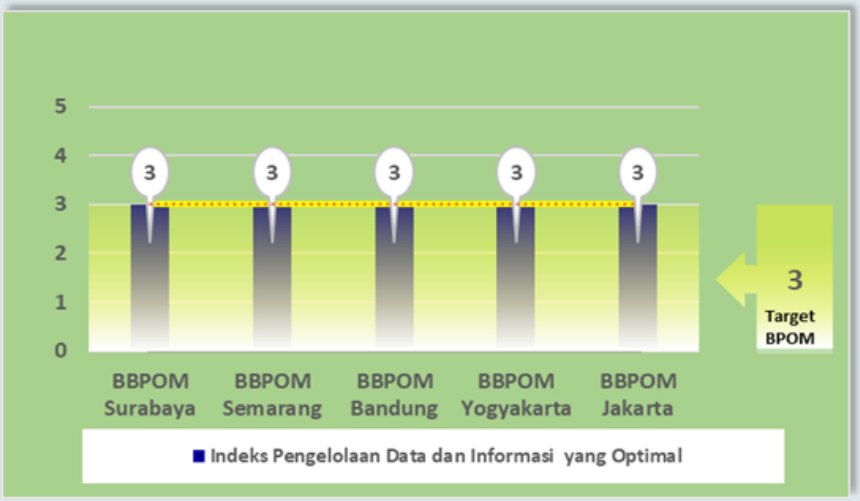

Gambar 76. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Surabaya dengan Balai Lain yang Sejenis/setara dengan target nasional

Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal tahun 2024 pada semua Balai dibandingkan dengan target nasional telah memenuhi nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi indikator tahun 2024 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 106. Realisasi indikator tahun 2024 dari Pusat Data dan Informasi

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	3	3

Dari semua komponen diketahui bahwa telah mencapai nilai maksimal, yaitu 3 (tiga). Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Faktor Keberhasilan capaian indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2024 antara lain : Monitoring dan Evaluasi pada Pemanfaatan Email, Pemutakhiran SPIMKER, Pemutakhiran SIPT dan Pemanfaatan Berita Aktual yang dilakukan sebelum akhir bulan.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 107. Efiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN AWAL	TARGET ANGGARAN REVISI	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	264.781.000	264.681.528	99,96	100,00	264.781.000	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal. Tidak terdapat revisi penambahan anggaran untuk pencapaian indikator ini, anggaran yang tersedia sejumlah 264.781.000 telah dioptimalkan untuk melakukan pengadaan Alat Pengolah Data berupa Lapop, PC Unit, Printer Portable dan Scanner Dokumen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 108. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	36.600.000	12	kali	12	
		Tata Usaha	CAN.001.051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	210.000.000	16	unit	16	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapain target indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal adalah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pemeliharaan Peralatan Kantor. Pada tahun 2024 telah diadakan pengadaan Laptop, PC Unit, Printer Portable dan Scanner dengan total sebanyak 16 unit. Serta dilakukan Pemeliharaan Infrastruktur dan

Jaringan Internet. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

g. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Melakukan monev *input* SIPT setiap bulan.
- Memutakhirkan SPIMKER tepat waktu
- meningkatkan akses *email* pegawai dengan mentautkan Absensi *Apel Online* dengan halaman *login email* pom.go.id, serta mengirim *email* pemberitahuan terkait kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui *email* pom.go.id dengan permintaan untuk *reply*.
- Meningkatkan viewer berita aktual dari internal Balai dengan menautkan absen apel online dengan berita aktual terbaru yang telah diupload tim media sosial & berita aktual.

Sepanjang tahun 2024 ditemukan beberapa kendala pemanfaatan SIPT, namun target masih bisa tercapai. Perlu tetap dilakukan monev secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan 2024 diperoleh informasi bahwa pencapain target pemanfaatan SIPT terutama pada SIPT Pengujian masih belum maksimal karena masih terdapat kendala pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan diskusi secara intensif baik melalui personal maupun menggunakan aplikasi pengaduan itsm.pom.go.id supaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.

SASARAN 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil Mengelola Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel dengan Nilai NSS 109,18%. Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 109. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	90,31	93,51	103,54		Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau yang saat ini disebut dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) atau yang saat ini disebut dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/EKA dihitung berdasarkan aspek Efektifitas (CRO) dengan bobot sebesar 75%, aspek Penggunaan SBK dengan bobot sebesar 10% dan aspek Efisiensi SBK dengan bobot sebesar 15%. Sedangkan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA diperoleh dari penilaian terhadap 8 (delapan) indikator yang mencerminkan aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Delapan (8) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA dengan bobot 10%, Deviasi Halaman III DIPA dengan bobot 15%, Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%, Belanja Kontraktual dengan bobot 10%, Penyelesaian Tagihan dengan bobot 10%, Pengelolaan UP dan TUP dengan bobot 10%, Capaian Output dengan bobot 25%,

serta Dispensasi SPM yang merupakan nilai pengurang dalam Penilaian IKPA ini. Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OM SPAN dan dapat dimonitor setiap bulannya, sedangkan Nilai EKA diperoleh dari aplikasi SMART dan baru terbit setelah Tahun Anggaran berakhir.

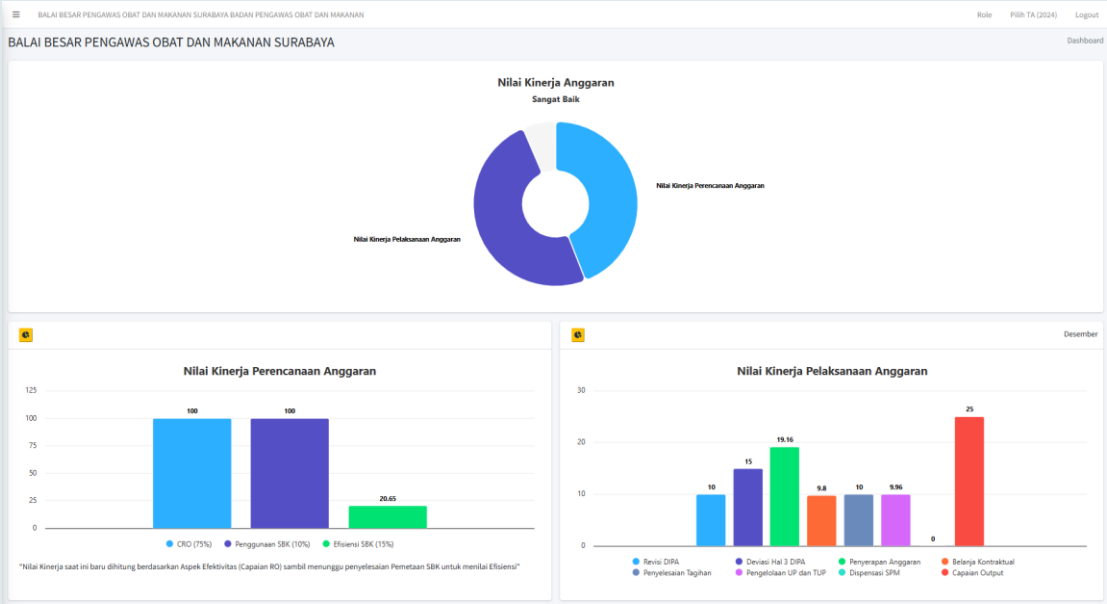

Gambar 77. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 93,51, diperoleh dari nilai EKA sebesar 88,10 dan nilai IKPA sebesar 98,92. Capaian NKA pada BBPOM di Surabaya tahun 2024 **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 103,54% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

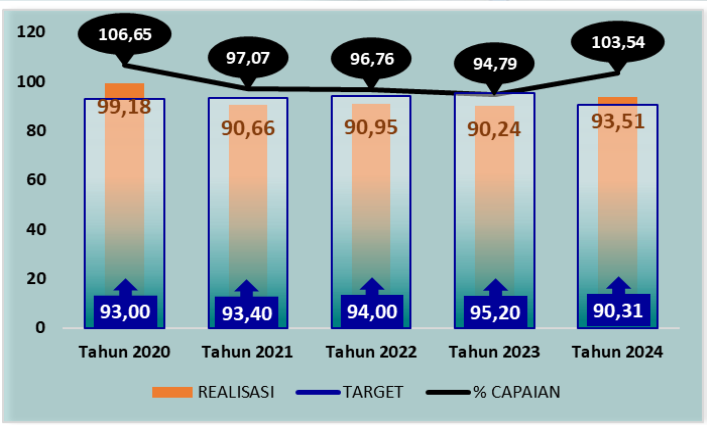

Gambar 78. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 hingga tahun 2024

Berdasarkan grafik perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2024 dengan realisasi nilai NKA pada 4 (empat) tahun sebelumnya, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2024 terjadi kenaikan capaian dibandingkan tahun 2021, 2022 dan 2023, namun masih belum melebihi

capaian pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penyerapan anggaran sangat tinggi hingga 99,95%, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan NKA. Pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi NKA namun belum dapat mencapai target tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi lagi dan target belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan oleh penurunan Nilai IKPA pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan penyerapan anggaran relatif tinggi hingga 99,83%, akibatnya nilai efisiensi sangat kecil, sehingga menurunkan NKA.

Pada tahun 2024 ini realisasi NKA mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2023, yaitu dari 90,23 menjadi 93,51 dan telah melebihi target tahun 2024 dengan capaian sebesar 103,54%. Ini merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan semua pihak terkait dalam mengawal semua indikator pada IKPA dan EKA.

Target NKA pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Selain itu target pada tahun 2024 juga berbeda dengan target NKA pada reviu Renstra Paruh Waktu. Perubahan target tersebut sesuai dengan hasil reviu Unit Pengampu setelah adanya perubahan formula perhitungan NKA yang semula dihitung dari 60% EKA dan 40% IKPA berubah menjadi 50% EKA dan 50% IKPA serta mempertimbangkan capaian NKA pada tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

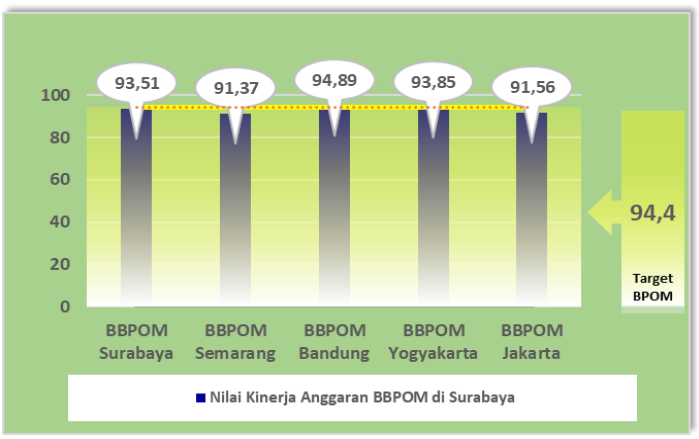

Gambar 79. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

Berdasarkan grafik di perbandingan realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 pada BBPOM di Surabaya dengan BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 yang tertinggi adalah pada BBPOM di Bandung dan yang terendah adalah pada BBPOM di Semarang. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada BBPOM di Surabaya berada pada urutan ketiga dari kelima balai yang diperbandingkan. Namun demikian, dari kelima balai yang diperbandingkan tersebut

hanya BBPOM di Bandung yang realisasinya melebihi target nasional BPOM, sedangkan realisasi keempat balai lainnya masih di bawah target nasional BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 telah mencapai target tahun 2024. Pada komponen nilai EKA, aspek efektifitas (Capaian RO) dan penggunaan SBK telah dikawal hingga mencapai nilai maksimal (100), namun pada aspek efisiensi SBK hanya mendapat nilai sebesar 20,65. Hal ini dikarenakan efisiensi anggaran pada RO SBK tidak bisa mendekati 20%, sedangkan upaya efisiensi dari aspek penambahan realisasi output juga tidak memungkinkan karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan waktu untuk penyelesaian perkara carry over tahun-tahun sebelumnya.

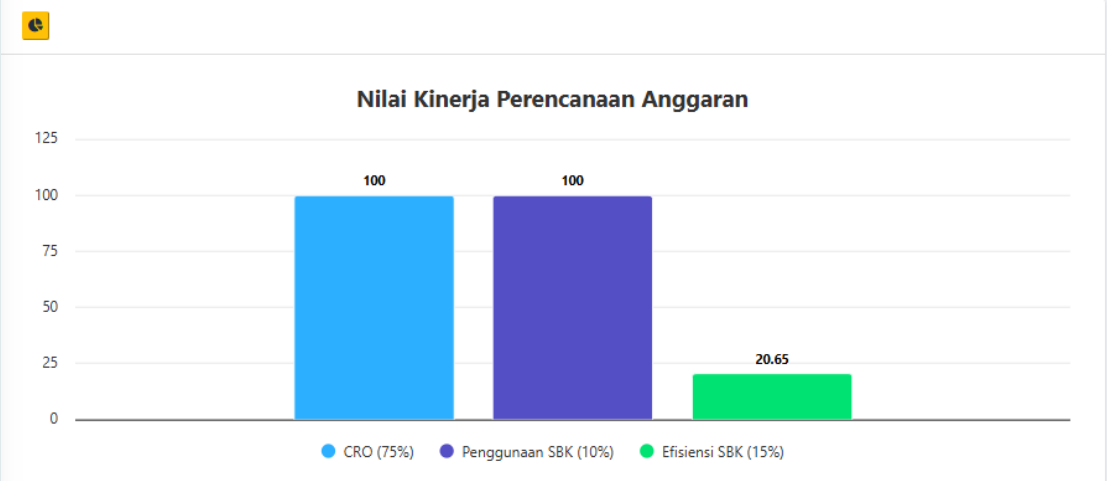

Gambar 81. Realisasi Masing-masing Komponen pada Nilai EKA

Pada komponen nilai IKPA, dari 8 (delapan) indikator pada penilaian IKPA, terdapat 4 (empat) indikator yang mendapat nilai 100 yaitu indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyelesaian Tagihan, dan Capaian Output. Dan 3 (tiga) indikator yang tidak mendapat nilai 100, yaitu Indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Pengelolaan UP dan TUP. Sedangkan indikator Dispensasi SPM yang merupakan nilai pengurang pada perhitungan nilai IKPA mendapatkan nilai maksimal, yaitu pengurang sebesar 0 (nol). Tiga indikator IKPA yang tidak mendapat nilai 100 sebagaimana penjelasan berikut:

- Indikator Penyerapan Anggaran

  Indikator Penyerapan Anggaran mulai mendapatkan nilai kurang dari 100 sejak triwulan kedua. Hal ini dikarenakan pada triwulan kedua realisasi belanja modal hanya 17,05% (target 40%), pada triwulan ketiga realisasi belanja modal hanya

35,46% (target 70), hal ini menyebabkan nilai pada indikator ini pada akhir tahun tidak bisa mencapai nilai maksimal walaupun realisasi semua jenis belanja telah mencapai target triwulan keempat (target belanja pegawai 95%, belanja barang 90% dan belanja modal 90%). Hal ini dikarenakan karena nilai akhir indikator ini dihitung dari nilai rata-rata per triwulannya.

- Indikator Belanja Kontraktual

  Nilai pada inidkator belanja kontraktual mulai mendapatkan nilai kurang dari 100 pada bulan ke-8. Hal ini dikarenakan ada beberapa kontrak belanja modal dengan nilai kurang dari 200 juta baru selesai pada triwulan ke-3 sehingga nilai pada komponen kontrak akselerasi belanja 53 tidak maksimal. Hal ini dikarenakan barang pada kontrak tersebut merupakan barang indent sehingga penyelesaian kontraknya membutuhkan waktu yang lama.

- Indikator Pengelolaan UP – TUP

  Tidak tercapainya nilai 100 pada indikator Pengelolaan UP dan TUP dikarenakan:

  1. total *revolving* pengelolaan UP dalam sebulan tidak mencapai pagu UP Balai Besar POM di Surabaya
  2. Komponen setoran GUP bulan Januari s.d November 2024 mendapatkan nilai 100, namun pada bulan Desember 2024 mengalami penurunan menjadi 98,02 dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun sehingga menyebabkan adanya pengembalian kelebihan uang TUP.

Tabel 110. Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	135	063	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	100.00	95.82	98.00	100.00	99.57	100.00	98.92	100%	0.00	98.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.16	9.80	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.35				100.00				

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 111. Efiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	86.240.000	80.555.335	93,41	103,54	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Meski demikian, anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian indikator relatif kecil.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 112. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	Target 1 Tahun		Total Realisasi	Ket
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B	Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara	98.694.000	12	kali	12	
					J	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	5.926.000	1	kali	1	

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian indikator antara lain Pengelolaan Keuangan; Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara; Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM; Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan; Bimbingan Teknis SAI dan Laporan Keuangan di UPT POM.

Kegiatan lain yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran adalah dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas realisasi output, realisasi anggaran dan capaian IKU serta kendala dan solusi untuk mengatasi semua kendala. Selain itu juga telah dilakukan revisi halaman III DIPA tepat waktu dan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI sebelum tanggal 5 setiap bulan. Selain itu juga mengupayakan pengembalian dana UP/TUP seminimal mungkin atau habis. Setiap bulan juga telah dibahas berbagai cara konkrit untuk menaikkan realisasi RO (rincian output) supaya bisa melebihi target tanpa membutuhkan banyak biaya.

g. **Upaya peningkatan kinerja**

Sebagai upaya untuk mengawal agar Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2024 dapat mencapai target yaitu:

1. Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian EKA dan IKPA
2. Dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Surabaya II dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, didapat informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Penyerapan anggaran dan Belanja Kontraktual tidak akan dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan realisasi belanja modal tidak mencapai target pada triwulan II dan III dan penyelesaian belanja kontraktual untuk belanja modal masih ada yang selesainya melebihi triwulan I. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.

2. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 113. Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,43	90,00	93,33		Cukup

Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional. Pengadaan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas pencapaian kinerja program pemerintah.

Badan POM dalam upaya mewujudkan tujuan, Visi dan Misi, memiliki Program pengawas obat dan makanan baik pre market maupun post market. Untuk melaksanakan Program tersebut, BBPOM Surabaya mendapat alokasi anggaran untuk belanja pengadaan, seperti untuk pengadaan alat laboratorium, suku cadang, reagen, media mikro, alat tulis kantor dan sebagainya serta prasarana kantor berupa IPAL untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengadaan barang/jasa di BBPOM Surabaya dilakukan dengan cara Swakelola dan melalui Penyedia. Untuk pengadaan barang/jasa melalui penyedia, metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan adalah melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukkan langsung, seleksi, tender cepat dan tender.

Sesuai Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) . maka seluruh paket-paket pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui penyedia di Satuan Kerja BBPOM Surabaya yang menggunakan metode pemilihan tender/seleksi/tender cepat.

Berdasarkan Tabel 125 tentang Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaaan Barang dan Jasa 2024 Balai Besar POM di Surabaya dapat disimpulkan bahwa Pengelolaaan Barang dan Jasa 2024 di Balai Besar POM di Surabaya tidak mencapai target dimana targetnya 96,43 % dengan realisasi 90,00 % dan Capaian 93.33 % dengan kategori Cukup

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 114. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tahun 2024	96,43	90	93,33

Berdasarkan grafik disamping, diperoleh informasi bahwa Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM Surabaya tahun 2024 tidak tercapai dari target yg di tetapkan oleh Biro Umum dimana Target tahun 2024 96,43 % dengan realisasi sebesar 90 % dan Capainya 93,33 %.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

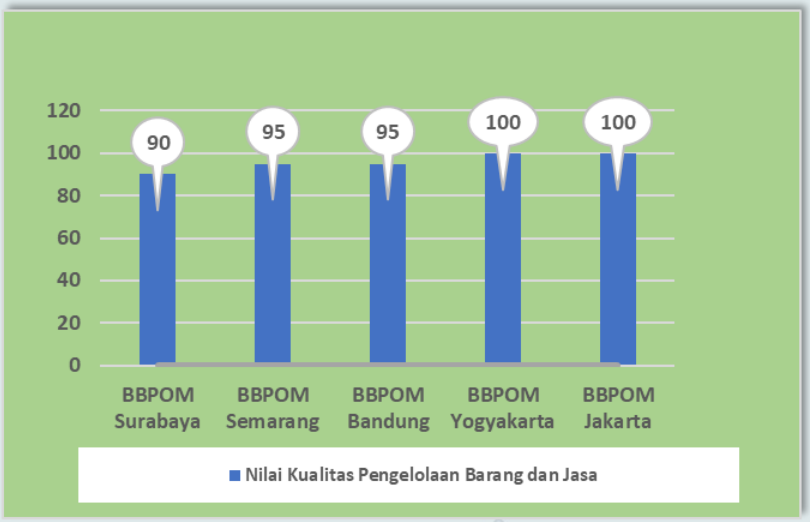

Gambar 82. Perbandingan Realisasi Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa Nilai Kualitas Pengelolaaan Barang dan Jasa tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Jogyakarta dan Jakarta dengan realisasi 100 % dan yang terendah adalah BBPOM di Surabaya. Realisasi dari keempat balai yang diperbandingkan berada dibawah target nasional BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM Surabaya tahun 2024 tidak tercapai dari target yg di tetapkan oleh Biro Umum dimana Target tahun 2024 96,43 % dengan realisasi sebesar 90 % dan Capainya 93,33 % untuk tahun 2025 perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan nilai terbaik sesuai dengan target antara lain:

- Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan
- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pejabat pengadaan sehingga pengadaan tidak sampai terlambat atau bisa tepat waktu
- Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 115. Efiensi Anggaran pada Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Surabaya

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	118.225.900	103.600.579	87,63	93,33	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk Nilai Kualitias Pengelolaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM di Surabaya dengan target anggaran Rp 118.225.900 dengan realisasi anggaran Rp 103.600.579 atau sebesar 87,63 persen dan Capaian Indikator sebesar 93.33 persen serta tingkat efisiensi 100 persen dengan kategori Efisien.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 116. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	G	Peningkatan Kompetensi Pegawai	51.359.000	6	kali	3	Revisi Kegiatan & Anggaran
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	57.105.600	12	Kali	12	

Beberapa upaya yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai PBJ antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai PBJ antarai lain :

- Segera melakukan realisasi pengadaan baik melalui e-purchasing maupun pengadaan langsung
- Menyisir Anggaran yang masih ada sisa untuk segera di revisi agar tercapai target Nilai PBJ nya

g. Upaya peningkatan kinerja

Sebagai upaya perbaikan atas tidak tercapainya target dari Nilai Kualitias Pengelolaan Barang dan Jasa di Balai Besar POM di Surabaya adalah sebagai berikut ;

a. Selalu Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan
b. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan segera melakukan realisasi pengadaan di Triwulan pertama terutama untuk belanja Modal
c. Menyisir Anggaran yang masih ada sisa untuk segera di revisi agar tercapai target Nilai PBJ nya

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, bahwa penilaian terhadap indikator PBJ baru di tetapkan sebesar 96.43 % dimana Balai Besar POM di Surabaya tahun 2024 untuk Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tidak tercapai dengan Nilai 90,00%, diharapkan tahun 2025 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dapat tercapai dengan maksimal.

3. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Penyusunan Laporan Pengelolaan BMN Tingkat Satker BBPOM di Surabaya mencakup seluruh Barang Milik Negara yang dikelola oleh Satker dibawah lingkup UAPPB-E1 Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan BMN ini dihasilkan melalui integrasi aplikasi SIMAN dan aplikasi Sistem Akutansi Keuangan Instansi (SAKTI) yakni sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk menyusun neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya. Aplikasi SAKTI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Monitoring Sistem Akutansi Keuangan Instansi (MONSAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 117. Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90,00	98,44	109,38		Sangat Baik

Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Surabaya adalah nilai Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Biro Umum Badan POM atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Biro Umum adalah terhadap satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan parameter sebagai berikut.
  a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN.
  b. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN.
  c. Jumlah PSP BMN dibandingkan total aset.
  d. Jumlah Penghapusan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Aset Rusak Berat.
  e. Jumlah Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Persediaan Usang/Rusak.
- Bahwa penilaian yang dilakukan telah merujuk kepada data ataupun laporan yang disampaikan oleh satker kepada Biro Umum serta sesuai data yang ada pada Aplikasi SIMAN.
- Bahwa penilaian oleh Biro Umum ini dilakukan secara berkala (Tahunan). Pada periode Tahunan tahun 2024, telah diperoleh penilaian pengelolaan BMN dari Biro Umum Badan POM sebesar 98,44.

Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada BBPOM di Surabaya tahun 2024 adalah 98,44, dengan target 90,00 sehingga **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 109,38% 103,54% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 118. Perbandingan realisasi dan capaian Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Surabaya tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tahun 2024	90	98,44	109,38

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa realisasi penilaian pengelolaan BMN sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan totak capaian sebesar 109,28% dari target awal. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah dijalankan dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Selain itu capaian ini dapat diperoleh dikarenakan petugas terkait telah memahami parameter penilaian yang ada sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang dapat mengancam realisasi penilaian pengelolaan BMN. Harapannya nilai evaluasi tiap tahun ini dapat semakin bertambah tinggi dan kualitas pengelolaan BMN pada satuan kerja BBPOM di Surabaya meningkat secara keseluruhan, serta dapat mengoptimalkan pengelolaan BMN pada satuan kerja di bawah lingkungan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Surabaya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

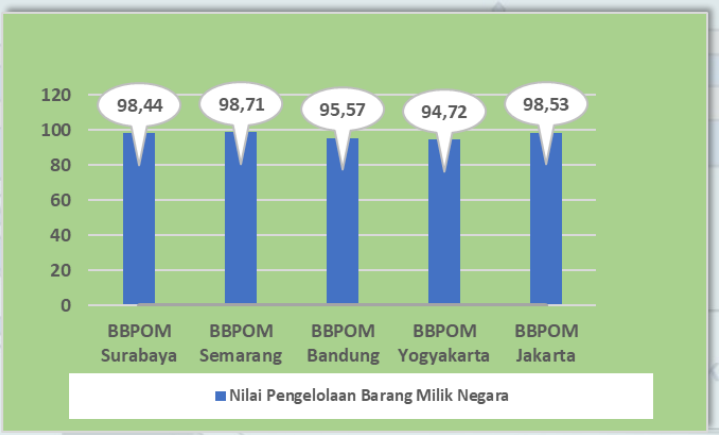

Gambar 83. Perbandingan Realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai hasil evaluasi pengelolaan BMN tahun 2024 yang tertinggi di antara satuan kerja yang setara dengan BBPOM di Surabaya adalah BBPOM di Semarang dan yang terendah adalah BBPOM di Bandung. BBPOM di Surabaya berada pada

posisi ketiga dengan nilai evaluasi sebesar 98,44 di bawah BBPOM di Semarang dan BBPOM di Jakarta.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2023, Nilai Pengelolaan BMN belum menjadi sasaran strategis indikator kinerja utama tetapi pada tahun 2024 nilai pengelolaan BMN sudah termasuk dalam indikator kinerja utama. Seperti keterangan sebelumnya, nilai pengelolaan BMN telah melampaui target. Hal ini dikarenakan adanya upaya-upaya untuk mencapai target 2024, antara lain:

- Motivasi dan dukungan penuh yang diberikan oleh pimpinan.
- Memperhatikan ketepatan waktu utamanya dalam pengumpulan Laporan BMN dan RKBMN sesuai dengan surat edaran dari Biro Umum BPOM Pusat.
- Memperhatikan BMN yang belum diusulkan PSP dan menyusun Permohonan PSP BMN. Kemudian memastikan telah terbit SK persetujuannya sehingga nilai perbandingan seluruh BMN dan BMN yang belum disetujui PSP-nya menjadi lebih baik.
- Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pendataan secara periodik atas aset yang ada serta mengajukan permohonan persetujuan Pemindahtanganan BMN Rusak Berat kepada pengelola/pengguna, lalu melakukan proses tindak lanjut pemindahtanganan BMN – lelang. Setelah proses lelang selesai, dilakukan update pada aplikasi dan dibuat laporan penghapusan sehingga Aset Rusak Berat telah selesai ditindaklanjuti.
- Melakukan monitoring dan evaluasi, serta pendataan secara periodik atas persediaan yang ada serta mengajukan permohonan persetujuan Pemusnahan Persediaan usang/rusak kepada pengelola/pengguna, lalu melakukan proses tindak lanjut pemusnahan Persediaan Usang kepada pihak ke-3. Setelah proses pemusnahan selesai, dilakukan update pada aplikasi dan disusun laporan pemusnahan sehingga Persediaan Usang/Rusak telah selesai ditindaklanjuti.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

NDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	19.455.144	19.442.963	99,94	109,38	**100% (Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran 2024. Meski demikian, anggaran yang dipergunakan untuk pencapaian indikator yang efisien ini masih relatif kecil.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	I	Pemusnahan	10.950.000	3	Kali	3	
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	13.606.040	12	Kali	12	

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai: Pengelolaan BMN antara lain dengan melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Tim BMN meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti bimtek BMN yang diadakan oleh pusat, maupun bimtek dan sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Keuangan.melakukan kegiatan pemutakhiran data BMN pada satuan wilayah Surabaya periode Semesteran dan Tahunan terhadap satker di bawah koordinasi wilayah BBPOM Surabaya, dilanjutkan kegiatan pemutakhiran BMN serta konsolidasi keuangan dengan eselon 1 pusat dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan satker dan Tingkat Wilayah. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN di lingkungan Korwil Surabaya, BBPOM di Surabaya, selaku Korwil, melaksanakan sesi sharing bersama satker-satker di bawah lingkungan korwil Surabaya agar semakin menguatkan kompetensi antar pengelola BMN. Selain itu, koordinasi dan komunikasi dengan Biro Umum terkait BMN dan KPKNL setempat rutin dilaksanakan untuk mencegah timbulnya permasalahan.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

g. Upaya peningkatan kinerja

Sebagai upaya peningkatan nilai Pengelolaan Barang Milik Negara untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai pengelolaan BMN yaitu:

1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan dengan Ketua Tim BMN dengan membahas kendala ataupun agenda yang akan dilakukan.
2. Meningkatkan kompetensi petugas pengelola BMN dengan cara mengikuti bimbingan teknis baik daring maupun luring yang diadakan oleh BPOM pusat maupun langsung dari Kementerian Keuangan. Selain itu juga dapat mengikuti e-learning dalam portal yang sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan.
3. Meningkatkan kekompakan tim pengelola BMN dengan bertugas dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati. Dilakukan sharing pendapat dan ilmu antar petugas pengelola BMN.
4. Memperhatikan indikator penilaian pengelolaan BMN yang sudah ditetapkan oleh pusat, kemudian memberikan fokus lebih kepada indikator-indikator tersebut agar tidak terjadi penurunan nilai.
5. Jika terdapat kendala, berkomunikasi dengan tim pendamping biro umum pusat serta Kementerian Keuangan melalui tiket HALO DJKN atau HAI DJPB.
6. Menjaga dan membangun komunikasi yang baik dengan bagian yang terkait dengan tim BMN, seperti bagian Pengadaan, Keuangan, Pengujian, dan lain-lain.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Informasi pengungkapan nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Laporan ini digunakan utamanya agar satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagai pengingat agar dapat terus melakukan perbaikan untuk mencapai pengelolaan BMN yang akuntabel. Selain itu juga sebagai media untuk memudahkan penyampaian informasi kepada semua stakeholder terkait nilai pengelolaan BMN, antara lain seperti BPOM Pusat, Pengawas, Kementerian Keuangan, masyarakat, dan lain-lain.

4. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

Memperhatikan tujuan pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu dilakukan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui optimalisasi penggunaan PDN sebagai upaya mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan adanya Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi penggunaan produk dalam negeri di Satuan Kerja Badan POM.

Maka dari itu mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

Sebagai upaya implementasi kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bagian Keempat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan bahwa "Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri."
2. Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang mengamanatkan bahwa "Penyusunan rencana kebutuhan tahunan barang/jasa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri sesuai daftar inventarisasi Produk Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian."
3. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres PBJP) yang mengamanatkan bahwa "Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen) yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.".

4. Berdasarkan Surat Kepala Biro SDM Nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 Hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, maka direktif Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri diukur berdasarkan :
   a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan (bobot 70%).
   b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP (bobot 30%).

Tabel 120. Komponen Penilaian PDN

No.	Formula	Keterangan
1.	Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP	Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut **(70%)** $= \frac{\text{Nilai paket pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP}}{\text{Nilai pengadaan barang jasa melalui penyedia yang diumumkan}} \times 100\%$
2.	Realisasi Pemilihan Belanja PDN	Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP pada Satker tersebut **(30%)** $= \frac{\text{Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan}}{\text{Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan}} \times 100\%$
3.	Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%	70% (Perencanaan Belanja PDN) + 30% (Realisasi Pemilihan Belanja PDN)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Tabel 121. Realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri BBPOM di Surabaya tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI	
Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	78,29	130,48		Sangat Baik

Target Presentase realisasi Penggunaan Dalam Negeri berada pada akhir tahun yaitu sebesar 60%. Dan pada Tahun 2024 ini BBPOM di Surabaya telah melampau target nasional yang ditentukan karena Realisasi Penggunaan Dalam Negeri sebesar 78,29%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 122. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2020 hingga tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tahun 2020	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
Tahun 2021	*Tidak ada*	*Tidak ada*	*Tidak ada*
Tahun 2022	*Tidak ada*	38,40	*Tidak ada*
Tahun 2023	*Tidak ada*	40,05	*Tidak ada*
Tahun 2024	60	78,29	120,00

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri BBPOM di Surabaya dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 38.40%, pada tahun 2023 mengalami kenaikan 40,05% dan pada tahun 2024 Presentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 78,29%. Namun berdasarkan Surat Kepala Biro SDM Nomor B-KP.09.01.24.01.24.40 tanggal 22 Januari 2024 Hal Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian, bahwa untuk indikator Presentase realisasi Penggunaan Dalam Negeri baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional

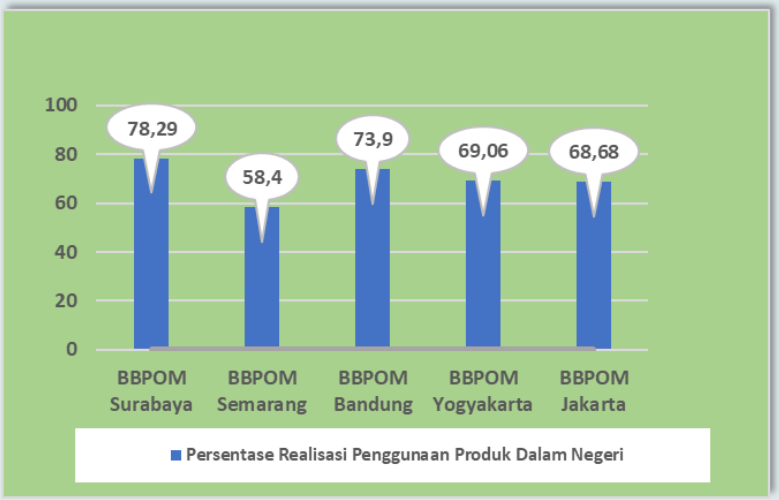

Gambar 84. Perbandingan Realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Surabaya dan yang terendah adalah BBPOM di Semarang. Dari kelima balai yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Semarang yang tidak mencapai target nasional, namun untuk keempat balai lain sudah mencapai target dan nilai presentase yang tertinggi dicapai oleh BBPOM di Surabaya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Pada tahun 2024, BBPOM di Surabaya telah berhasil mendapatkan presentase nilai penggunaan dalam negeri sebesar 78,29%, dibandingkan nilai pada tahun 2022 dan tahun 2023 telah mengalami kenaikan. Meskipun nilai tersebut sudah mencapai target yaitu 60, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut. Telah dilakukan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik sesuai target antara lain :

- Perlu dilakukan monev serta perbaikan atau revisi Metode Pengadaan pada SiRUP secara berkala
- Membuat evaluasi pelaporan secara realtime untuk realisasi pengadaan barang dan jasa
- Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Selalu Koordinasi dengan PPK dan pelaku pengadaan untuk melakukan identifikasi untuk paket antara PDN dan Impor
- Selalu dilakukan revisi paket Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan POK terakhir baik swakelola, penyedia maupun penyedia dalam swakelola.;

- Selalu cek dan identifikasi spesifikasi barang sebelum proses pengadaan, apakah termasuk kategori PDN / TKDN atau Impor
- Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal yang PDN.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Tabel 123. Efiensi Anggaran pada Indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

INDIKATOR KINERJA	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	% REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN INDIKATOR	TINGKAT EFISIENSI
Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	17.389.000	17.387.040	99,99	130,48	**95% (Efisien)**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya / anggaran telah **Efisien** karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2023.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 124. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		TOTAL REALISASI	Keterangan
34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	G	Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	4.530.000	1	Kali	1	

Tercapainya target indikator Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan hasil identifikasi terhadap semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pengadaan barang / jasa.

Beberapa upaya yang dapat yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai PDN antara lain dengan melakukan koordinasi dan evaluasi secara rutin dalam pengambilan Keputusan setiap proses pengadaan barang / jasa.

Adapun beberapa analisi yang dilakukan terhadap proses pengadaan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dilakukan untuk pencapaian target Nilai PDN yaitu dengan meningkatkan Tagging PDN pada paket penyedia dan Penyedia Dalam Swakelola antara lain :

- Paket Jasa lainnya misalnya paket pemeliharaan Gedung, pemeliharaan kendaraan, dan lain – lain
- Kegiatan Perjadin yaitu paket meeting, penginapan dan transport atau sewa kendaraan
- Paket fasilitas perkantoran yaitu pembelian AC, reagen, alat laboratorium dan lain lain
- Kegiatan perkantoran kebutuhan sehari – hari misalnya ATK, keperluan kantor, dan lain – lain
- Pengadaan Alat Laboratorium

g. **Upaya peningkatan kinerja**

Beberapa upaya yang dapat yang dilakukan untuk pencapaian target Nilai PDN antara lain dengan melaksanakan evaluasi secara rutin setiap bulan dan membahas semua capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Adapun dalam upaya peningkagtan kinerja dalam pencapaian nilai Presentase Penggunaan Produk dalam negeri maka telah dibuat Rekapitulasi Kendala Dan Rencana Aksi dalam hal pelaksanaan indikator tersebut yang digunakan sebagai bahan monev terhadap realisasi indikator tersebut, yang diuraikan pada bagian selanjutnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, bahwa penilaian terhadap indikator PDN belum dilakukan namun penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan BPOM. Sehingga untuk Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan realisasi bulan Oktober 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu apabila realisasi bulan Oktober 2023 di bawah 60, maka target 2024 ditetapkan sebesar 60 sehingga diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai dengan maksimal. Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri pada akhir tahun 2024 sebesar 78,29% dan mengalami peningkatan disbanding tahun 2022 dan 2023. Pemanfaatan laporan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dan akan diupdate jika realisasi sudah dilaksanakan.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

3.2 Evaluasi Tahun ke-5

1) Analisis Tren

Tabel 125. Tabel xx. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Trend Analysis)

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/Nt1))-1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi (Prognosis)						Perkembangan Kinerja	Kategori		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,14	80,80	91,40	91,00	88,27	91,50	89,69	92,00	92,54	92,54	87,22	baseline 2019	2019	97,14	2024	87,22	92,54	5	5	-0,01	-0,02	220,74	**Meningkat (On The Track)**	**Kelompok Analisis 1** (histori data relatif konsisten dan memiliki informasi hasil akhir yang diharapkan), Perkembangan Kinerja Indikator:	Hasil perhitungan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu **(1) menurun**, jika perkembangan kinerja **<0 persen**; **(2) stagnan**, jika perkembangan kinerja **0–15 persen**; **(3) meningkat**: **(a) moderat**, jika perkembangan kinerja **>15–<100 persen**, dan **(b) *on the track***, jika perkembangan kinerja **≥100 persen**; serta
2		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	63,70	78,00	80,10	80,00	85,14	82,00	78,78	84,00	90,62	90,62	79,36	baseline 2019	2019	63,70	2024	79,36	90,62	5	5	0,07	0,04	61,53	**Meningkat (Moderat)**		
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84	80,80	84,37	84,00	86,73	86,60	86,02	90,00	94,81	94,81	88,18	baseline 2020	2020	84,00	2024	88,18	94,81	4	4	0,03	0,01	39,75	**Meningkat (Moderat)**		
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,07	50,00	70,07	70,00	82,57	72,00	92,59	73,00	85,00	85,30	84,05	baseline 2020	2020	70,07	2024	84,05	85,30	4	4	0,05	0,05	92,32	**Meningkat (Moderat)**		
5		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	97,69			88,00	97,69	89,00	84,44	90,00	83,00	85,00	81,11	baseline 2021	2021	97,69	2024	81,11	85,00	3	3	-0,05	-0,06	132,64	**Meningkat (On The Track)**		
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	69,74	73,00	73,23	76,00	73,36	79,00	81,26	81,00	84,50	84,50	87,99	baseline 2019	2019	69,74	2024	87,99	84,50	5	5	0,04	0,05	4,76	**Stagnan**		
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinasan pengawasan Obat dan Makanan	82,60	82,00	82,60	83,60	84,50	84,70	94,20	85,70	96,40	96,40	96,20	baseline 2020	2020	82,60	2024	96,20	96,40	4	4	0,04	0,04	98,63	**Meningkat (Moderat)**		
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74,18	71,00	74,18	75,64	66,55	77,09	78,14	78,85	80,14	80,14	78,90	baseline 2020	2020	74,18	2024	78,90	80,14	4	4	0,02	0,02	79,67	**Meningkat (Moderat)**		
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,50	89,50	91,50	90,00	91,72	90,50	91,80	91,00	91,98	92,50	92,12	baseline 2020	2020	91,50	2024	92,12	92,50	4	4	0,00	0,00	62,10	**Meningkat (Moderat)**		
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,22	87,00	88,22	89,00	98,91	91,00	96,60	93,00	97,30	97,30	98,60	baseline 2020	2020	88,22	2024	98,60	97,30	4	4	0,02	0,03	113,74	**Meningkat (On The Track)**		
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53,49	53,80	53,49	62,00	65,04	69,00	71,67	77,00	89,42	89,42	90,66	baseline 2020	2020	53,49	2024	90,66	89,42	4	4	0,14	0,14	102,86	**Meningkat (On The Track)**		
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,65	95,00	98,61	98,00	99,20	98,50	94,25	99,00	95,54	96,00	93,12	baseline 2019	2019	96,65	2024	93,12	96,00	5	5	0,00	-0,01	-0,74	**Menurun**		
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,51	46,00	51,24	55,00	57,47	60,00	62,67	65,00	67,73	70,00	74,27	baseline 2019	2019	55,51	2024	74,27	70,00	5	5	0,05	0,06	126,28	**Meningkat (On The Track)**		
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	62,76	55,00	48,43	60,00	70,36	62,00	65,91	64,00	70,86	70,86	87,79	baseline 2019	2019	62,76	2024	87,79	70,86	5	5	0,02	0,07	282,53	**Meningkat (On The Track)**		
15		Indeks Pelayanan Publik	4,11	3,51	4,11	4,35	4,52	4,45	4,90	4,60	4,98	4,95	5,00	baseline 2020	2020	4,11	2024	5,00	4,95	4	4	0,05	0,05	105,54	**Meningkat (On The Track)**		
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	36,73	6,00	36,73	55,00	57,73	60,00	61,05	65,00	70,43	97,00	88,32	baseline 2020	2020	36,73	2024	88,32	97,00	4	4	0,27	0,25	89,25	**Meningkat (Moderat)**		
17		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota										95,00		**Indikator baru ada tahun 2024**	2024	99,18	2024	0,00	95,00	0	0	-	-	-	**Belum dapat disimpulkan**		

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0)^(1/N1))-1	R2 ((xt/xt0)^(1/N2))-1	PERKEMBANGAN KINERJA		Kelompok Analisis	Penjelasan kategori
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi (Prognosis)						Perkembangan Kinerja	Kategori		
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi (Prognosis)		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,87	70,00	93,87	91,10	91,51	92,92	93,60	93,38	94,39	95,20	95,00	baseline 2020	2020	93,87	2024	95,00	95,20	4	4	0,00	0,00	0,30	Stagnan		
19		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16,00	16,00	42,00	42,00	76,00	76,00	112,00	112,00	138,00	150,00	baseline 2020	2020	16,00	2024	150,00	138,00	4	4	0,71	0,75	105,06	Meningkat (On The Track)		
20		Jumlah desa pangan aman	6	6,00	6,00	19,00	19,00	28,00	28,00	37,00	37,00	45,00	47,00	baseline 2020	2020	6,00	2024	47,00	45,00	4	4	0,65	0,67	102,76	Meningkat (On The Track)		
21		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	4,00	4,00	4,00	12,00	12,00	18,00	18,00	24,00	24,00	30,00	32,00	baseline 2020	2020	4,00	2024	32,00	30,00	4	4	0,65	0,68	104,11	Meningkat (On The Track)		
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	94,52	75,00	94,52	100,00	96,30	100,00	98,71	100,00	100,00	100,00	102,80	baseline 2020	2020	94,52	2024	102,80	100,00	4	4	0,01	0,02	149,52	Meningkat (On The Track)		
23		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99,76	75,00	99,76	100,00	99,34	100,00	99,74	100,00	100,00	100,00	99,58	baseline 2020	2020	99,76	2024	99,58	100,00	4	4	0,00	0,00	-0,05	Menurun		
24	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	67	61,00	66,52	65,00	68,73	68,00	68,06	72,00	71,17	70,00	70,08	baseline 2020	2020	66,52	2024	70,08	70,00	4	4	0,01	0,01	102,25	Meningkat (On The Track)		
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	81,06	91,00	81,06	84,70	84,64	87,20	93,29	89,70	94,23	95,23	95,00	baseline 2020	2020	81,06	2024	95,00	95,23	4	4	0,04	0,04	4,05	Stagnan		
26		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78,07	81,00	81,11	82,60	82,79	84,10	84,99	85,60	85,20	85,25	88,78	baseline 2019	2019	78,07	2024	88,78	85,25	5	5	0,02	0,03	146,71	Meningkat (On The Track)		
27		Nilai Pengelolaan Kearsipan										96,50		Indikator baru ada tahun 2024	2024	98,06	2024	0,00	96,50	0	0	-	-	-	Belum dapat disimpulkan		
28	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	85,09	75,00	85,09	85,00	83,11	85,25	85,79	85,50	90,35	90,86	86,03	baseline 2020	2020	85,09	2024	86,03	90,86	4	4	0,02	0,00	16,63	Meningkat (Moderat)		
29	Mengunatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,10	80,00	76,10	78,00	80,10	83,00	85,20	88,00	87,40	88,74	88,00	baseline 2020	2020	76,10	2024	88,00	88,74	4	4	0,04	0,04	3,70	Stagnan		
30		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,53	1,51	2,53	2,26	2,48	2,50	3,00	2,75	3,00	3,00	3,00	baseline 2020	2020	2,53	2024	3,00	3,00	4	4	0,04	0,04	4,40	Stagnan		
31	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	99,18	93,00	99,18	93,40	90,66	94,00	90,95	95,20	90,24	90,31	91,00	baseline 2020	2020	99,18	2024	91,00	90,31	4	4	-0,02	-0,02	91,96	Meningkat (Moderat)		
32		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)										96,43		Indikator baru ada tahun 2024	2024	90,00	2024	0,00	96,43	0	0	-	-	-	Belum dapat disimpulkan		
33		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										90,00		Indikator baru ada tahun 2024	2024	98,44	2024	0,00	90,00	0	0	-	-	-	Belum dapat disimpulkan		
34		Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri										60,00		Indikator baru ada tahun 2024	2024	78,29	2024	0,00	60,00	0	0	-	-	-	Belum dapat disimpulkan		
35		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT		92	100	92	100							Indikator ditiadakan tahun 2024 karena sudah ada komponen efisiensi penggunaan anggaran di penyusun indikator NKA (EKA dan IKPA)												

Tahun 2024 merupakan akhir periode renstra dimana pada tahun ini dilakukan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun *baseline* hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. BerdasarkanTabel Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (*Trend Analysis*) dapat dilihat perkembangan kinerja BBPOM di Surabaya selama periode Renstra Tahun 2020 s.d 2024.

Adapun kriteria hasil perhitungan perkembangan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

*(1) **Menurun**, jika perkembangan kinerja <0 persen;*

*(2) **Stagnan**, jika perkembangan kinerja 0–15 persen;*

*(3) **Meningkat**:*

*a. **moderat**, jika perkembangan kinerja >15–<100 persen;*

*b. **on the track**, jika perkembangan kinerja ≥100 persen;*

*c. **Relatif**, jika perkembangan kinerja >0 persen*

*(4) **Belum Dapat disimpulkan**, jika perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan*

Berdasarkan hasil perhitungan analisis trend tersebut, sebanyak 13 Indikator kinerja utama BBPOM di Surabaya mencapai kategori Meningkat (On The Track) diantaranya yaitu :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat;
2. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat;
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan;
4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan;
5. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
6. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan;
7. Indeks Pelayanan Publik;
8. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman;
9. Jumlah desa pangan aman;
10. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas;
11. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar;
12. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan;
13. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya.

Selain itu, sebanyak 9 Indikator kinerja utama BBPOM di Surabaya mencapai kategori Meningkat (Moderat) diantaranya yaitu

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
3. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
5. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
8. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya
9. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

Sedangkan sebanyak 5 Indikator kinerja utama masuk kedalam kategori stagnan diantaranya yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan; Indeks RB BBPOM di Surabaya; Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP; Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal. Ini berarti perkembangan kinerja dari indikator – indikator ini tidak berubah/sedikit meningkat dari tahun baseline terhadap kondisi terkini maupun target tahun 2024.

Pada akhir periode renstra ini sebanyak 2 indikator kinerja utama cenderung mengalami penurunan yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dan terdapat 5 indikator kinerja utama yang tidak dapat disimpukan karena merupakan indikator kinerja utama yang baru diperhitungkan kinerjanya pada tahun 2024 diantaranya yaitu Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota; Nilai Pengelolaan Kearsipan; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker); Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

2) Analisis Gap

Tabel 126. Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)			Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	Kesimpulan		
Perspektif.1		*Stakeholder*																		
SS	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persen	80,80	91,40	91,00	88,27	91,50	89,69	92,00	92,54	92,54	93,07	100,57	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
			2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persen	78,00	80,10	80,00	85,14	82,00	78,78	84,00	90,62	90,62	89,83	99,13	Baik	Tidak Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
			3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	80,80	84,37	84,00	86,73	86,60	86,02	90,00	94,81	94,81	91,93	96,96	Baik	Tidak Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
			4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persen	50,00	70,07	70,00	82,57	72,00	92,59	73,00	85,00	85,30	87,89	103,04	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
			5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persen			88	98	89	84	90	83	85,00	90,00	105,88	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
SS	2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Indeks	73,00	73,23	76,00	73,36	79,00	81,26	81,00	84,50	84,50	90,31	106,88	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
SS	3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	82,00	82,60	83,60	84,50	84,70	94,20	85,70	96,40	96,40	97,26	100,89	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	71,00	74,18	75,64	66,55	77,09	78,14	78,85	80,14	80,14	86,56	108,01	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
			9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	89,50	91,50	90,00	91,72	90,50	91,80	91,00	91,98	92,50	93,04	100,58	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
Perspektif.2		Internal Process																		
SS	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persen	87,00	88,22	89,00	98,91	91,00	96,60	93,00	97,30	97,30	98,25	100,98	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persen	53,80	53,49	62,00	65,04	69,00	71,67	77,00	89,42	89,42	94,43	105,60	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persen	95,00	98,61	98,00	99,20	98,50	94,25	99,00	95,54	96,00	93,63	97,53	Baik	Tidak Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	46,00	51,24	55,00	57,47	60,00	62,67	65,00	67,73	70,00	71,98	102,83	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persen	55,00	48,43	60,00	70,36	62,00	65,91	64,00	70,86	70,86	66,75	94,20	Baik	Tidak Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,51	4,11	4,35	4,52	4,45	4,90	4,60	4,98	4,95	5,00	101,01	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Infokom	
			16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persen	6,00	36,73	55,00	57,73	60,00	61,05	65,00	70,43	97,00	100,00	103,09	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	
			17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persen									95,00	99,18	104,40	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan	

BADAN POM
BALAI BESAR MENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No. Kode (Kolom 1)		Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)			Unit Pelaksana (Kolom 10)	Keterangan (Kolom 11)
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori	Kesimpulan		
SS	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persen	70,00	93,87	91,10	91,51	92,92	93,60	93,38	94,39	95,20	97,43	102,34	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
			19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Jumlah	16,00	16,00	42,00	42,00	76,00	76,00	112,00	112,00	138,00	138,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
			20	Jumlah desa pangan aman	Jumlah	6,00	6,00	19,00	19,00	28,00	28,00	37,00	37,00	45,00	45,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
			21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Jumlah	4,00	4,00	12,00	12,00	18,00	18,00	24,00	24,00	30,00	30,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Infokom	
SS	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	75,00	94,52	100,00	96,30	100,00	98,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
			23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persen	75,00	99,76	100,00	99,34	100,00	99,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian	
SS	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persen	61,00	66,52	65,00	68,73	68,00	68,06	72,00	71,17	70,00	83,01	118,59	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Penindakan	
Perspektif.2		**Internal Process**																		
SS	9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	Indeks	91,00	81,06	84,70	84,64	87,20	93,29	89,70	94,23	95,23	93,98	98,69	Baik	Tidak Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Nilai	81,00	81,11	82,60	82,79	84,10	84,99	85,60	85,20	85,25	85,37	100,14	Sangat Baik	Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Nilai									96,50	98,06	101,62	Sangat Baik	Tercapai	Bagian Tata Usaha	
SS	9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	Indeks	75,00	85,09	85,00	83,11	85,25	85,79	85,50	90,35	90,86	86,37	95,06	Baik	Tidak Tercapai	Bagian Tata Usaha	
SS	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persen	80,00	76,10	78,00	80,10	83,00	85,20	88,00	87,40	88,74	89,23	100,55	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pengujian	
			30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks	1,51	2,53	2,26	2,48	2,50	3,00	2,75	3,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Baik	Tercapai	Fungsi Pengujian	
SS	11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Nilai	93,00	99,18	93,40	90,66	94,00	90,95	95,20	90,24	90,31	93,51	103,54	Sangat Baik	Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	Nilai									96,43	90,00	93,33	Baik	Tidak Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Nilai									90,00	98,44	109,38	Sangat Baik	Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Persen									60,00	78,29	130,48	Sangat Baik	Tercapai	Bagian Tata Usaha	
			35	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Persen	92,00	100,00	92,00	100,00											Sudah ada komponen efisiensi penggunaan anggaran di penyusun indikator NKA (EKA dan IKPA)

Analisis Gap merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Tercapai
Realisasi ≥100% target

Tidak Tercapai
Realisasi <100% target

Diperkirakan Tercapai
Perkiraan realisasi ≥100% target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)

Diperkirakan Tidak Tercapai
Perkiraan realisasi <100% target (apabila capaian masih menggunakan angka prognosis)

Tidak Dapat Disimpulkan
Tidak memiliki nilai capaian

Berdasarkan tabel analisis gap diatas, sebanyak 27 indikator kinerja utama BBPOM di Surabaya telah mencapai target akhir periode Renstra. Sedangkan terdapat 7 Indikator kinerja utama BBPOM di Surabaya tidak mencapai target akhir renstra diantaranya yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; Indeks RB BBPOM di Surabaya; Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker).

3.3. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Keberhasilan pencapaian 7 tujuan BBPOM di Surabaya diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/reviu Renstra Satker. Dari 7 tujuan yang diukur, semuanya memenuhi ekspektasi dengan nilai pencapaian berkisar antara 82.4 % hingga 116,35%. Sesuai pada tabel dibawah ini.

Tabel 127. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Strategis Tahun 2020 sampai dengan 2024

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Rata-Rata	73	73,23	100,32	76	73,36	96,53	79	81,26	102,86	81,00	84,50	104,32%	84,50	90,31	106,88	81,52	82,14	Memenuhi ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	53,8	53,49	99,42	62	65,04	104,90	69	71,67	103,86	77,00	89,42	116,13%	89,42	94,43	105,60	82,99		
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-Rata	70	93,87	134,10	91,1	91,51	100,45	92,92	93,6	100,73	93,38	94,39	101,08%	95,20	97,43	102,34	87,73		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Capaian Tahun 2022	16	16	100,00	42	42	100,00	76	76	100,00	112,00	112,00	100,00%	138	138	100,00	80,20		
	Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahun 2022	6	6	100,00	19	19	100,00	28	28	100,00	37,00	37,00	100,00%	45	45	100,00	80,20		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2021)/ Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2022-2024)	Capaian Tahun 2022	4	4	100,00	12	12	100,00	18	18	100,00	24,00	24,00	100,00%	30	30	100,00	80,20		
Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Rata-Rata	75	85,09	113,45	85	83,11	97,78	85,25	85,79	100,63	85,50	90,35	105,67%	90,86	86,37	95,06	81,60	88,54	Memenuhi ekspektasi
	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-Rata	80	76,1	95,13	78	80,1	102,69	83	85,2	102,65	88,00	87,40	99,32%	88,74	89,23	100,55	80,40		
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Rata-Rata	1,51	3	167,22	2,26	2,48	109,73	2,5	3	120,00	2,75	3,00	109,09%	3,00	3,00	120,00	103,61		

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata	82	82,6	100,73	83,6	84,5	101,08	84,7	94,2	111,22	85,70	96,40	112,49%	96,40	97,26	100,89	83,01	116,35	Memenuhi ekspektasi
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-Rata	89,5	91,5	102,23	90	91,72	101,91	90,5	91,8	101,44	91,00	91,98	101,08%	92,50	93,04	100,58	81,44		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Capaian Tahun 2022 (ada perbedaan DO)	6	36,73	612,17	55	57,73	104,96	60	61,05	101,75	65,00	70,43	108,35%	97,00	100,00	103,09	184,61		

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-Rata	80,8	91,4	113,12	91	88,27	97,00	91,5	89,69	98,02	92,00	92,54	100,59%	92,54	93,07	100,58	81,94	84,31	Memenuhi ekspektasi
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-Rata	78	80,1	102,69	80	85,14	106,43	82	78,78	96,07	84,00	90,62	107,88%	90,62	89,83	99,13	81,08		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	80,8	84,37	104,42	84	86,73	103,25	86,6	86,02	99,33	90,00	94,81	105,34%	94,81	91,93	96,96	81,00		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-Rata	50	70,07	140,14	70	82,57	117,96	72	92,59	128,60	73,00	85,00	116,44%	85,30	87,89	103,04	98,18		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-Rata				88	97,69	111,01	89	84,44	94,88	90,00	83,00	92,22%	85,00	90,00	105,88	78,17		
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-Rata	71	74,18	104,48	75,64	66,55	87,98	77,09	78,14	101,36	78,55	80,14	102,02%	80,14	86,56	108,01	80,57		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-Rata	87	88,22	101,40	89	98,91	111,13	91	96,6	106,15	93,00	97,30	104,62%	97,30	98,25	100,97	84,14		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-Rata	53,8	53,49	99,42	62	65,04	104,90	69	71,67	103,86	77,00	89,42	116,13%	89,42	94,43	105,60	82,99		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	46	51,24	111,39	55	57,47	104,49	60	62,67	104,44	65,00	67,73	104,20%	70,86	66,75	94,21	83,11		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-Rata	55	48,43	88,05	60	70,36	117,27	62	65,91	106,31	64,00	70,86	110,72%	70,86	66,75	94,21	81,39		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-Rata	75	94,52	126,03	100	96,3	96,30	100	98,71	98,71	100,00	100,00	120,00%	100,00	100,00	120,00	88,45		
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai	Rata-Rata	75	99,76	133,01	100	99,34	99,34	100	99,74	99,74	100,00	100,00	120,00%	100,00	100,00	120,00	90,66		
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-Rata													95,00	99,18	104,40	104.40	104,40	Memenuhi ekspektasi
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61	66,52	109,05	65	68,73	105,74	68	68,06	100,09	72,00	71,17	98,85%	70,00	83,01	118,59	86,89	86,89	Memenuhi ekspektasi
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-Rata	61	66,52	109,05	65	68,73	105,74	68	68,06	100,09	72,00	71,17	98,85%	70,00	83,01	118,59	86,89	86,89	Memenuhi ekspektasi

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Nilai Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Notifikasi Ketercapaian Tujuan
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-Rata	89,5	91,5	102,23	90	91,72	101,91	90,5	91,8	101,44	91,00	91,98	101,08%	92,50	93,04	100,58	81,44	92,87	Memenuhi ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-Rata	95	98,61	103,80	98	99,2	101,22	98,5	94,25	95,68	99,00	95,54	96,51%	96,00	93,63	97,53	79,84		
	Indeks Pelayanan Publik	Rata-Rata	3,51	4,11	117,09	4,35	4,52	103,91	4,45	4,9	110,11	4,60	4,98	108,26%	4,95	5,00	101,01	86,64		
	Indeks RB UPT	Rata-Rata	91	81,06	89,08	84,7	84,64	99,93	87,2	93,29	106,98	89,70	94,23	105,05%	95,23	93,98	98,69	79,15		
	Nilai AKIP UPT	Rata-Rata	81	81,11	100,14	82,6	82,79	100,23	84,1	84,99	101,06	85,60	85,20	99,53%	85,25	85,37	100,14	80,51		
	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Rata-Rata	93	99,18	106,65	93,4	90,66	97,07	94	90,95	96,76	95,20	90,24	94,79%	90,31	93,51	103,54	80,99		
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)	Rata-Rata	92	100	108,70	92	100	108,70										108,70		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	Rata-Rata													96,43	90,00	93,33	93,33		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rata-Rata													90,00	98,44	109,38	109,38		
	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Rata-Rata													60,00	78,29	120,00	120,00		
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rata-Rata													96,50	98,06	101,62	101,62		

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada semua Indikator Kinerja Utama antara lain pemetaan terhadap kondisi awal, rekomendasi perbaikan, progres rencana aksi, dan kondisi setelah rencana aksi yang dilaksanakan semua fungsi satker BBPOM di surabaya, seperti dalam matrik dibawah ini:

Tabel 128. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	Dari 1712 sampel obat acak yang disampling, baru dilakukan pengujian 1537 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya, intervensi terhadap pabrik obat tradisional yang berada di wilayah Jawa Timur	Closed	TW IV	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,04 %dari target 92.54% (capaian 100,54%)
		Dari 1775 sampel obat acak yang disampling, baru dilakukan pengujian 1685 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya, intervensi terhadap pabrik obat tradisional yang berada di wilayah Jawa Timur	Closed	TW IV	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,0 %dari target 92.54% (capaian 100,49%)
		belum semua sampel dilakukan pengujian	Semua sampel yang masuk laboratorium telah diuji	TW IV	Sampel obat acak telah dilakukan pengujian	Closed	TW IV	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,07%dari target 92.54% (capaian 100,58%)
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Dari 721 sampel pangan acak yang disampling, telah dilakukan pengujian 578 sampel, belum selesai uji 74 sampel	Percepatan pengujian sampel dan intervensi untuk sarana yang berada di wilayah Jatim	TW IV	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Open	TW IV	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,34%dari target 90.62 % (capaian 98,58%)

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dari 745 sampel pangan acak yang disampling, telah dilakukan pengujian 739 sampel, belum selesai uji 6 sampel	Percepatan pengujian sampel dan intervensi untuk sarana yang berada di wilayah Jatim	TW IV	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Open	TW IV	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,72%dari target 90.62 % (capaian 99,01%)
		belum semua sampel dilakukan pengujian	Semua sampel yang masuk laboratorium telah diuji	TW IV	Semua sampel pangan acak telah dilakukan pengujian	Closed	TW IV	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,83%dari target 90.62 % (capaian 99,13%)
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Dari 618 sampel obat targeted yang disampling, baru 543 sampel yang dilakukan pengujian , belum dilakukan pengujian sebanyak 75 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel obat di bulan berikutnya	Open	TW IV	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,48% dari target 94.81% (capaian 99,65%)
		Dari 664 sampel obat targeted yang disampling, baru 605 sampel yang dilakukan pengujian , belum dilakukan pengujian sebanyak 59 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel obat di bulan berikutnya	Closed	TW IV	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,88% dari target 94.81% (capaian 100,07%)
		dari 669 sampel yang diuji terdapat 54 sampel TMS dengan rincian 29 sampel TMS uji (OT=18; Kosmetik=8;	semua sampel telah dilakukan pengujian	TW IV	semua sampel telah dilakukan pengujian	Closed	TW IV	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,88% dari target 91,93% (capaian 96,96%)

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		obat=2; rokok 1) , 21 sampel TMK Penandaan (OT= 6; kos= 15); 4 sampel TMK Penandaan dan TMS uji (OT)						
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Dari 154 sampel pangan targeted yang disampling, telah dilakukan pengujian 101 sampel dan belum selesai uji 53 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel pangan targeted di bulan berikutnya	Closed	TW IV	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 88,12%dari target 85.30 % (capaian 103,30%)
		Dari 190 sampel pangan targeted yang disampling, telah dilakukan pengujian 160 sampel dan belum selesai uji 30 sampel	Percepatan pengujian sampel	TW IV	Percepatan pengujian sampel pangan targeted di bulan berikutnya	Closed	TW IV	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 86,25%dari target 85.30 % (capaian 101,11%)
		Belum semua sampel dilakukan pengujian	semua sampel telah dilakukan pengujian	TW IV	semua sampel telah dilakukan pengujian	Closed	TW IV	Kondisi Desember - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 87,89%dari target 85.30 % (capaian 103,04%)
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)	TW IV	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Closed	TW IV	Kondisi Oktober Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)
			Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)	TW IV	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Closed	TW IV	Kondisi Nopember Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)
			Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)	TW IV	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Closed	TW IV	Kondisi Desember Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat	Kesulitan dalam memasang baliho karena masa kampanye	melakukan koordinasi dengan pihak ketiga	TW IV	mencari tempat yang kira-kira masih memungkinkan untuk memasang baliho yang	Closed	TW IV	bisa memasang baliho di tempat yang memungkinkan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Makanan aman dan bermutu				mudah dilihat masyarakat			
		BBPOM di Surabaya belum melakukan KIE terkait stunting secara khusus	Dilakukan sosialisasi terkait stunting nulai penyebab hingga upaya pencegahannya dari para pakar	TW IV	Melakukan KIE stunting	Closed	TW IV	Dilaksanakan KIE stunting oleh BBPOM di Surabaya
		capaian kinerja BBPOM di Surabaya belum diketahui lintas sektor secara menyeluruh	Dilakukan pertemuan lintas sektor untuk menyampaiakan capaan kinerja dan menghimpun masukan untuk peningkatan kinerja	TW IV	Dilakukan Monev Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor terkait	Closed	TW IV	Lintas sektor telah mengetahui capaian kinerja dan memberikan masukan
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulanSeptember dengan nilai 97,41	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online	TW IV	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online	Closed	TW IV	Kondisi November: Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan untuk kegiatan desk IP CPPOB dan pre registrasi (klinik POM), desk CPKB dan CPOTB.
		Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan November dengan nilai 97,26	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa	TW IV	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa	Closed	TW IV	Kondisi Desember: -

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sertifikat/gimmick/ modul)		sertifikat/gimmick/ modul)			
		Cut off pengambilan data survei IKEPU pada 30 November 2024 sehingga tidak ada perubahan nilai IKEPU pada bulan Desember 2024	-	TW IV	-	Closed	TW IV	-
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	belum adanya informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat	memberikan informasi TL yang telah dilakukan oleh pemegang kewenangan pangan segar dan BPOM	TW IV	mecari informasi terkait kasus anggur muscat dan TL yang telah dilakukan	Closed	TW IV	telah ada informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat
		Banyak keluhan pelaku usaha terkait timeline layanan.	Dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bahwa beberapa layanan publik tidak sepenuhnya kewenangan BBPOM Surabaya namun kewenangan Badan POM Pusat.	TW IV	Disampaikan kepada pelaku usaha melalui media sosial.	Open	TW IV	Banyak keluhan pelaku usaha terkait timeline layanan.
		belum ada informasi terkait pelaksanaan kegiatan mengajar dalam rangka MBG	mencari informasi terkait pelaksanaan kegiatan	TW IV	melakukan koordinasi dengan Unhan	Closed	TW IV	ada informasi awal terkait pelaksanaan kegiatan mengajar dalam rangka MBG
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Belum pernah dilaksaakan KIE dengan Tema Stunting.	Dilaksanakan KIE dengan tema Stunting.	TW IV	Telah diagendakan KIE dengan Tema Stunting dengan mengundang narasumber pakar yang kompeten.	Closed	TW IV	BBPOM Surabaya telah menjadwalkan pelaksanaan KIE dengan tema Stunting.
		Banyak keluhan pelaku usaha.	Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aplikasi pendaftaran produk tergabung dalam aplikasi	TW IV	Membuat pengumuman di media sosial terkait kendala aplikasi.	Closed	TW IV	Keluhan berkurang.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OSS yang dikelola oleh BKPM untuk kemudahan ke depan.					
		Media moda transportasi belum dimanfaatkan untuk sosialisasi.	Memperbanyak frekwensi sosialisasi melalui berbagai media bekerja sama dengan penyedia jasa dan lintas sektor (Dinas Kominfo)	TW IV	Menggunakan moda transportasi yang bayak digunakan masyarakat sebagai media sosialisasi (Bus Tras Jatim).	Closed	TW IV	Moda transportasi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi.
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas	TW IV	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	Closed	TW IV	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress September : Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 99,61 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 102,38% - Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Oktober
		- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas	TW IV	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	Closed	TW IV	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress Oktober : Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 98,07 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 100.79%

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Nopember
		- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas	TW IV	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	Closed	TW IV	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress Nopember: Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 98,25 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 100.97% - Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Desember
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana	TW IV	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	Closed	TW IV	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 99,07 % dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 110,80 % Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Oktober

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan						
		- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana	TW IV	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	Closed	TW IV	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 100,99 % dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 112,94 % Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Nopember
		- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap	TW IV	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan	Closed	TW IV	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana		monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan			persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 94,43% dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 105,60% Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Desember
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah petugas sertifikasi	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan	TW IV	1. Pengaturan jadwal penugasan	Closed	TW IV	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU
		1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan	TW IV	1. Pengaturan jadwal penugasan	Closed	TW IV	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		petugas sertifikasi						sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU
		1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah petugas sertifikasi	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Mengevaluasi penerbitan SKI/SKE dan mengajukan rekomendasi SKI/SKE prioritas	TW IV	1. Pengaturan jadwal penugasan 2. Mengajukan rekomendasi SKI/SKE prioritas ke Direktorat ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan.	Closed	TW IV	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,68 % dengan capaian 102.40%	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	TW IV	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.	Closed	TW IV	Kondisi Oktober : - 1. Diharapkan IKU tetap tercapai sampai akhir tahun dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara produksi yang baik
		Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,93 % dengan capaian 102.76%	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	TW IV	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.	Closed	TW IV	Kondisi November : - 1. Diharapkan IKU tetap tercapai sampai akhir tahun dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara produksi yang baik
		Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,98 % dengan capaian 102.83%	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	TW IV	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.	Closed	TW IV	Kondisi Desember : - IKU Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								produksi yang baik
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.12 % dengan capaian 93.32%	Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	TW IV	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA 3. Telah dilaksanakan pelatihan CDOB di bulan Oktober di Surabaya oleh PPSDM	Closed	TW IV	Kondisi November : - Diharapkan terjadi peningkatan IKU dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait pengelolaan obat maupun di sarana peredaran non obat
		Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 67.07 % dengan capaian 94.66%	Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	TW IV	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA	Closed	TW IV	Kondisi Desember : - Diharapkan terjadi peningkatan IKU dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait pengelolaan obat maupun di sarana peredaran non obat
		Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.75 % dengan capaian 94.21%	1. Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan. 2. Melakukan Desk CAPA terhadap sarana PBF dan Sarana Distribusi Pangan	TW IV	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA	Closed	TW IV	Kondisi Desember : - IKU Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.75 % dengan capaian 94.21%
15	Indeks Pelayanan Publik UPT	Banyak UMKM yang kesulitan melakukan	Dilakukan pendampingan kepada UMKM setelah bekerja	TW IV	Melakukan upaya jemput bola dengan meminta data UMKM	Open	TW IV	Sebagian UMKM telah diberikan pendampingan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengurusan izin edar ke BPOM.	sama dengan Pemerintah Daerah (untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan kapasitas UMKM).		kepada Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan pendampingan.			pengurusan izinn edar di BPOM.
		Banyak keluhan pelaku usaha.	Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aplikasi pendaftaran produk tergabung dalam aplikasi OSS yang dikelola oleh BKPM untuk kemudahan ke depan.	TW IV	Membuat pengumuman di media sosial terkait kendala aplikasi.	Closed	TW IV	Keluhan berkurang.
		Media moda transportasi belum dimanfaatkan untuk sosialisasi.	Memperbanyak frekwensi sosialisasi melalui berbagai media bekerja sama dengan penyedia jasa dan lintas sektor (Dinas Kominfo)	TW IV	Menggunakan moda transportasi yang bayak digunakan masyarakat sebagai media sosialisasi (Bus Tras Jatim).	Closed	TW IV	Moda transportasi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi.
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3.	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan	TW IV	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	Open	TW IV	Kondisi November: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan Sertifikat CPKB

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi CPKB 6. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2024, Jatim Glowing 2024, dan Sippotra 2024					
		1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama	TW IV	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	Open	TW IV	Kondisi Desember: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan rekomendasi PNK

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2024, Jatim Glowing 2024, dan Sippotra 2024					
		1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan	TW IV	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	Closed	TW IV	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2024, Jatim Glowing 2024, dan Sippotra 2024					
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Monev capaian output dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan namun belum optimal	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran	TW IV	1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota terkait pelaksanaan DAK dengan melakukan Desk Monev DAK secara Daring diTW-4	Closed	TW IV	1. Peningkatan capaian output dan realisasi pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota
		1. Monev capaian output dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan namun belum optimal	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran	TW IV	1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota terkait pelaksanaan DAK dengan melakukan Desk Monev DAK secara Daring diTW-4	Closed	TW IV	1. Peningkatan capaian output dan realisasi pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota
		Hasil Monev capaian output dan realisasi anggaran belum optimal	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran	TW IV	1. Melakukan Desk Realisasi Anggaran dan Capaian Output Pelaksanaan DAK secara Daring 2. Melakukan Monev Pelaksanaan DAK 3. Melakukan Koordinasi dengan Kab/ Kota terutama untuk Kab/ Kota yang belum melakukan	Closed	TW IV	1. Peningkatan realisasi anggaran rata-rata 86.99% dan capaian output pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota rata-rata 90.73%

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pelaporan ke smartPOM			
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	beberapa kegiatan KIE non tomas	dicarikan waktu agar dapat dilakukan dg efektif dan efisien mengingat keterbatasan anggaran	TW IV	melakukan diskusi dan kesepakatan dg bagian/substansi terkait	Closed	TW IV	Kegiatan direncanakan bulan november
		Belum dilakukan pelatihan.	Melakukan peningkatan kompetensi bagi Tim Media Sosial agar mampu membuat konten yang menarik.	TW IV	Menginventarisir penyedia pelatihan yang ada.	Open	TW IV	Belum dilakukan pelatihan karena tidak tersedia anggaran.
		Belum ada perencanaan KIE untuk kelompok rentan.	Melakukan KIE kepada kelompok rentan.	TW IV	Membuat perencanaan KIE untuk kelompok rentan pada tahun 2025.	Open	TW IV	Dibuat perencanaan KIE untuk kelompok rentan (Jika tersedia anggaran).
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	-	-	-	-	Closed	-	-
		-	-	-	-	Closed	-	-
		-	-	-	-	Closed	-	-
20	Jumlah desa pangan aman	Test kit sudah dimanfaatkan dengan baik untuk pengawasan keamanan pangan desa	Koordinasi dengan tim dan kader desa untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan tahap 2	TW IV	Semua desa diberi target untuk melakukan pengawasan keamanan pangan tahap 2 sebanyak 50-60 sampel secara mandiri bersamaan dengan kegiatan fasiltasi tahap 2	Closed	TW IV	Test kit sudah dimanfaatkan dengan baik untuk pengawasan keamanan pangan desa
		-	-	-	-	Closed	-	-
		-	-	-	-	Closed	-	-
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	-	Closed	-	-
		-	-	-	-	Closed	-	-
		-	-	-	-	Closed	-	-
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Limbah sitotoksik dari lab kimia dan mikrobiologi diletakkan pada lab sitotoksik kimia 2. Belum dilakukan	1. Dialokasikan ruangan khusus yang terlindung dan aman untuk menampung sementara limbah sitotoksik 2. Pembuatan nota dinas permohonan	TW IV	1. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk informasi ketersediaan ruangan 2. Pembuatan nota dinas permohonan sampel obat	1. Open 2. Open 3. Open 4. Open 5. Open 6. Open 7. Open 8. Open 9. Open	TW IV	1. Limbah sitotoksik dari lab kimia dan mikrobiologi diletakkan pada lab sitotoksik kimia 2. Pengujian verifikasi sterilitas obat

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengujian ulang uji verifikasi sterilitas obat anti neoplastik 3. Kalibrasi diatas belum dimasukkan di perencanaan 2025 4. Limbah hasil pengujian sampel obat antineoplasti k belum memiliki tempat penyimpanan terpisah dan belum bisa dilakukan pembuangan /pemusnahan pihak ke-3 karena harus melalui vendor yang terkualifikasi bisa menangani limbah B3 5. Penggantian filter di cleanroom ruang uji sterilitas belum dapat dilakukan karena vendor yang ditunjuk (PT Mega Teknik) melakukan kesalahan dalam melihat spesifikasi filter, sehingga filter yang datang tidak dapat digunakan	sampel obat antineoplastik ke inspeksi 3. Perencanaan perawatan berkala akan dibahas dengan PPK terlebih dulu 4. Sudah berkomunikasi dengan TU, akan dicarikan vendor yang sesuai di awal tahun depan. Untuk penyimpanan limbah B3 sementara diletakkan di lab uji antineoplastik lab obat, tapi kedepannya membutuhkan tempat penyimpanan terpisah. 5. Sudah mencari vendor lain penggantinya (PT Infiltraco) mendapatkan penawaran sebesar Rp 80.586.000. Anggaran untuk tahun ini sudah tidak ada. 6. Berkomunikasi ke vendor lain (PT Infiltraco) untuk cek filter di ruang isolator tersebut atau ke PT Mega Teknik utk melakukan cek ulang spesifikasi. Anggaran sudah tidak ada. 7. Sudah berkomunikasi ke katim 8 Sudah berkomunikasi ke infokom 9 Sudah berkomunikasi ke katim, ke		antineoplastik ke inspeksi 3. Perencanaan perawatan berkala akan dibahas dengan PPK terlebih dulu 4. Sudah berkomunikasi dengan TU, akan dicarikan vendor yang sesuai di awal tahun depan. Untuk penyimpanan limbah B3 sementara diletakkan di lab uji antineoplastik lab obat, tapi kedepannya membutuhkan tempat penyimpanan terpisah. 5. Sudah mencari vendor lain penggantinya (PT Infiltraco) mendapatkan penawaran sebesar Rp 80.586.000. Anggaran untuk tahun ini sudah tidak ada. 6. Berkomunikasi ke vendor lain (PT Infiltraco) untuk cek filter di ruang isolator tersebut atau ke PT Mega Teknik utk melakukan cek ulang spesifikasi. Anggaran sudah tidak ada. 7. Sudah berkomunikasi ke katim 8 Sudah berkomunikasi ke infokom 9 Sudah berkomunikasi ke katim, ke perwakilan			antineoplastik akan dilaksanakan bulan November 3. Kalibrasi diatas belum dimasukkan di perencanaan 2025 4. Limbah hasil pengujian sampel obat antineoplastik belum memiliki tempat penyimpanan terpisah dan belum bisa dilakukan pembuangan/pem usnahan pihak ke-3 karena harus melalui vendor yang terkualifikasi bisa menangani limbah B3 5. Penggantian filter di cleanroom ruang uji sterilitas belum dapat dilakukan karena vendor yang ditunjuk (PT Mega Teknik) melakukan kesalahan dalam melihat spesifikasi filter, sehingga filter yang datang tidak dapat digunakan 6. Terdapat 1 filter yang belum dilakukan penggantian di ruang isolator karena vendor juga salah melihat spesifikasi (vendor yang sama yaitu PT Mega Teknik) sehingga mengakibatkan suhu di ruang isolator tidak memenuhi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6. Terdapat 1 filter yang belum dilakukan penggantian di ruang isolator karena vendor juga salah melihat spesifikasi (vendor yang sama yaitu PT Mega Teknik) sehingga mengakibatkan suhu di ruang isolator tidak memenuhi spesifikasi alat dan alarm alat menyala terus 7. SPU Sampel KLB dari Balai Kediri sebanyak 17 sampel hingga saat ini belum ada, padahal sampel sudah selesai uji 8. Sampel siap saji yang berasal dari infokom seringkali masuk ke lab belum dilengkapi dengan SPU dan sampel hanya dititipkan ke driver atau CS, sehingga kadang ada miss antara no sampel dan SPU yg disusulkan	perwakilan penerima pekerjaan CS di lab dan ke TU.		penerima pekerjaan CS di lab dan ke TU.			spesifikasi alat dan alarm alat menyala terus 7. SPU Sampel KLB dari Balai Kediri sebanyak 17 sampel hingga saat ini belum ada, padahal sampel sudah selesai uji 8. Sampel siap saji yang berasal dari infokom seringkali masuk ke lab belum dilengkapi dengan SPU dan sampel hanya dititipkan ke driver atau CS, sehingga kadang ada miss antara no sampel dan SPU yg disusulkan setelahnya 9. CS yang ada sekarang sering kewalahan dalam penyelesaian pencucian alat gelas, sterilisasi hingga destruksi yang mengakibatkan pekerjaan pembersihan ruangan lain (ruang staf, KM, musholla) tidak dapat dilakukan. Pembersihan alat gelas juga seringkali kurang optimal sehingga harus dilakukan pencucian ulang atau mempengaruhi hasil uji.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		setelahnya 9. CS yang ada sekarang sering kewalahan dalam penyelesaian pencucian alat gelas, sterilisasi hingga destruksi yang mengakibatkan pekerjaan pembersihan ruangan lain (ruang staf, KM, musholla) tidak dapat dilakukan. Pembersihan alat gelas juga seringkali kurang optimal sehingga harus dilakukan pencucian ulang atau mempengaruhi hasil uji.						
		1. Beberapa lampu di ruang uji potensi, ruang endotoksin, ruang inkubasi dan sterilisasi mati 2. Saluran pembuangan tempat cuci mikro yang baru sering luber ke area parkir mobil	1. Sudah melapor kepada Bagian Tata Usaha 2. Sudah melapor kepada Bagian Tata Usaha	TW IV	1. Akan dilakukan perbaikan lampu 2. Akan dilakukan perbaikan saluran oleh rekanan	1. Close 2. Open	TW IV	1. Akan dilakukan perbaikan lampu 2. Akan dilakukan perbaikan saluran oleh rekanan
		4. UPT di Region Surabaya belum tertib dalam	1. Telah dilaporkan ke PPK dan telah menghubungi penyedia,	TW IV	4. Akan membuat link rekapitulasi dengan pengamanan kuci	Closed	TW IV	-

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengisian Rekapitulasi Sampel	menunggu proses perbaikan 2. Telah dilaporkan ke PPK 3. Telah dilaporkan ke PPK dan telah menghubungi penyedia, menunggu teknisi untuk pengecekan bagian yang mengalami kerusakan 4. Tahun 2025 akan dibuat kesepakatan maksimal pengisian Link rekap regional dan setelah tanggal tersebut link akan dikuncii, bila ada perubahan harus ada justifikasi yang jelas dari Kepala Balai					
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Pengadaan alat isolator akan dimulai di awal bulan oktober, meliputi pembongkaran sebagian tembok dan bagian atap di ruang inkubasi uji sterilitas. Selama proses pengerjaan akan menimbulkan debu yang banyak selama kurang lebih 2 minggu. Sebagian sampel cemaran September akan dilakukan	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4.Uji sampel kimia pangan tetap dilaporkan sesuai perhitungan Timeline normal (hasil uji mikro pangan menyusul) 5. Melaporkan	TW IV	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4. Sampel kimia pangan dilaporkan tanpa menunggu hasil uji mikro pangan 5. Melaporkan ke Tim SIPT Pusadtin	1. Close 2. Close 3. Open 4. close 5. close	TW IV	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4. Laporan uji kimia pangan dilaporkan tanpa menunggu hasil uji mikro pangan 5. SIPT bisa digunakan kembali tanggal

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		penghentian uji sehingga akan melewati timeline normal 2. Setelah proses instalasi isolator dilakukan, laboratorium membutuhkan pembersihan menyeluruh secara fumigasi. 3. Plafon didepan ruang uji sterilitas nyaris ambrol 4. Pelaporan hasil uji kimia pangan menunggu hasil uji mikro pangan 5.Input hasil uji,verifikasi oleh penyelia dan MT tidak dapat dilakukan	kendala ke Tim Pusdatin					31 Oktober 2024 pukul 16.00
		1. Input hasil uji,verifikasi oleh penyelia dan MT tidak dapat dilakukan 2. Mekanisme pengujian mikrobiologi untuk pengujian Makanan Bergizi Gratis 2025 perlu diperjelas kembali (tempat menguji, personel menguji,	1. Melaporkan kendala ke Tim Pusdatin 2. Sudah koordinasi dengan Ketua Tim	TW IV	1. Melaporkan ke Tim SIPT Pusadtin 2. Koordinasi dengan Ketua Tim terkait tempat menguji, personel penguji, dan reagen yang diperlukan	1. close 2. Open	TW IV	SIPT bisa digunakan kembali tanggal 30 Desember 2024 pukul 20.00

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		media reagen dsb)						
		1. RAPK tidak balance/sesuai 2. Ketidakcocokan data jumlah sampel pengujian dengan Sampling/inspeksi	1. Dilakukan Konfirmasi/crosscheck data ke Balai penyampling 2. Recek jumlah sampel masuk ke Lab dengan Tim Sampling	TW IV	1. dan 2. Dilakukan crosscek data bersama(Lab,inspeksi dan balai penyampling) pada 3 januari 2025.	1. Close 2. Close	TW IV	1. Data RAPK sudah balance/sesuai 2. data sampel yang duji besrta hasilnya sudah cocok dengan sampling
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carry over sebanyak 9 perkara	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan saksi pembeli ke Surabaya dalam perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Pemeriksaan saksi - saksi perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Pengiriman berkas perkara (tahap 1) perkara mengedarkan Kosmetik TIE an. Lina Mojokerto dengan locus di Mojokerto dan	TW IV	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan saksi pembeli ke Surabaya dalam perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Pemeriksaan saksi - saksi perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Pengiriman berkas perkara (tahap 1) perkara mengedarkan Kosmetik TIE an. Lina Mojokerto dengan locus di	Closed	TW IV	Kondisi November : - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perkara OT TIE an. Sri Murniningsih Krian Mojokerto ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda jatim - Kegiatan pelatihan TPPU di Depok dan Forkom Intelijen dilaksanakan di Mataram - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Lina Mojokerto tentang mengedarkan Kosmetik TIE di Mojokerto dan atas nama Sri Murniningsih tentang mengedarkan OT TIE di Krian Sidoarjo - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang, Madiun dan Mojokerto sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT		Mojokerto dan perkara OT TIE an. Sri Murniningsih Krian Mojokerto ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda jatim - Kegiatan pelatihan TPPU di Depok dan Forkom Intelijen dilaksanakan di Mataram - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Lina Mojokerto tentang mengedarkan Kosmetik TIE di Mojokerto dan atas nama Sri Murniningsih tentang mengedarkan OT TIE di Krian Sidoarjo - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang, Madiun dan Mojokerto sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Melakukan Upaya paksa dengan membawa saksi yg bernama Lili atas perkara tindak pidana kosmetik TIE dengan Locus di Bojonegoro			perkara - Diterima surat P21 dari Kejati jatim untuk perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro an tersangka Irawati, perkara mengedarkan kosmetik TIE dengan locus di Mojokerto dan perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Krian Sidoarjo
		- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carry over sebanyak 9 perkara	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti	TW IV	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat	Closed	TW IV	Kondisi Desember : - - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT		ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim			di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro an. tersangka Irawati
		- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carry over sebanyak 8 perkara	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti	TW IV	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat	Closed	TW IV	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara		ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro an. tsk Irawaty ke Kejari Bojonegoro bersama dengan Kejati Jatim dan Korwas Polda Jatim			
25	Indeks RB UPT	-	-	TW IV	-	Closed	TW IV	-
		Capacity Building direncanakan bulan Desember	Melakukan penyelenggaraan refreshing core Value BerAkhlak untuk seluruh pegawai	TW IV	Capacity Building direncanakan bulan Desember	Closed	TW IV	Capacity Building diselenggarakan pada pertengahan Desember
		Nilai Indeks RB 93.98	melakukan Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan lebih intens	TW IV	Meningkatkan kualitas monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan ZI	Open	TW IV	-
26	Nilai AKIP UPT	4 IKU tidak tercapai	Dilakukan pengawalan secara optimal untuk dapat mencapai target IKU tersebut pada bulan-bulan berikutnya	TW IV	Dilakukan pengawalan secara optimal untuk dapat mencapai target IKU tersebut pada bulan-bulan berikutnya	Closed	TW IV	Pada bulan November 4 IKU yang belum tercapai masih belum mencapai target
		TL Evaluasi SAKIP yang direncakanan pada TW IV tidak dapat dilaksanakan	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana	TW IV	Dilakukan monitoring terhadap TL evaluasi SAKIP yang direncanakan dilaksanakan pada TV IV serta reformulasi	Closed	TW IV	Pada Bulan Desember TL Evaluasi SAKIP yang ditargetkan pada TW IV dapat terlaksana

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana			
		Rekomendasi masih belum ditindaklanjuti	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana	TW IV	Dilakukan monitoring terhadap TL evaluasi SAKIP yang direncanakan dilaksanakan pada TV IV serta reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana	Closed	TW IV	Semua rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga nilai SAKIP memenuhi target tahun 2024. (target 85,25 --> realisasi 85,37)
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	pegawai mengalami kendala mengakses SIKD	konsultasi dengan biro umum dan mengecek aplikasi SIKD secara berkala	TW IV	konsultasi dengan biro umum dan mengecek aplikasi SIKD secara berkala, koneksi internet yang stabil	Closed	TW IV	jumlah pegawai tang mengalami kendala mengakses SIKD berkurang & SIKD sudah normal kembali
		akses dua aplikasi sikd dan srikandi	Melalui akun admin, mengecek akun pengguna	TW IV	Cek akun admin dan menu pengguna, serta koordinasi dengan biro umum	Closed	TW IV	Pegawai sudah bisa menggunakan akun srikandi
		Data arsip belum dibuat	Koordinasi dengan tim arsip dan tim pengelola arsip	TW IV	Membuat daftar dan notdin laporan per semester	Closed	TW IV	Data arsip sudah dibuat
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya sebelum pegawai tersebut di non aktifkan dari perhitungan total IP ASN = 84.95	Pegawai yang baru aktif kembali dinonaktifkan dalam perhitungan IP ASN	TW IV	- Saat desk Rekonsiliasi IP ASN Badan POM, berdiskusi dengan PIC IP ASN Biro SDM mengenai penonaktifan pegawai setelah tubel di Aplikasi IP ASN agar tidak masuk kedalam penghitungan IP ASN UPT	Closed	TW IV	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya setelah pegawai tersebut di non aktifkan dari perhitungan total IP ASN = 85.06
		Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya sebelum rencana aksi = 85.06	Pegawai yang belum memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 JP dan Pejabat Fungsional yang belum diklat fungsional dapat	TW IV	- Buat Nota Dinas untuk pegawai tersebut dan di share di WAG Balai serta WAG Katim	Closed	TW IV	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya setelah rencana aksi = 86.24

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			melakukan pengembangan kompetensi tidak terjadwal di IDEAS					
		-	-	-	-	Closed	-	-
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Tindakan perbaikan baru bisa dikirimkan mendekati batas akhir timeline perbaikan (mendekati 2 bulan), sedangkan asesor memerlukan waktu untuk verifikasi tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan pertama, masih ada beberapa temuan yang belum dinyatkan status "close" oleh asesor,, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk perbaikan	Mengirimkan tindakan perbaikan yang ada sambil mengajukan permohona perpanjangan tindakan perbaikan ke KAN	TW IV	Menyusun jadwal dan tim untuk pemenuhan tindakan perbaikan dan tetap menguji sampel rutin dan sampel kasus. Menyusun peencanaan jadwal untuk kegiatan tahun depan sehingga tidak ditemukan temuan berulang. Membuat perencanaan pelatihan, terutama terkait perhitungan ketidak pastian dan jaminan utu hasil pengujian.	Closed	TW IV	Laboratorium sudah mendapatkan persetujuan perpanjangan tindakan perbaikan oleh KAN. Rencana tindakan perbaikan kedua dilakukan minggu kedua bulan November Rencana tindakan perbaikan kedua akan dikirimkan minggu kedua bulan November
		Peralatan mengalami rusak berat dan tidak bisa digunakan sehingga menghambat proses pengujian	Meminta penawaran harga untuk perbaikan kepada penyedia sebagai dasar untuk penganggaran tahun ke depan	TW IV	Melakukan monitoring verifikasi kinerja alat secara rutin dan melaporkan , serta monitoring perawatan alat dan segera melaporkan ke pejabat terkait apabila dirasa sudah mulai ada tanda - tanda kerusakan meskipun masih dalam taraf kecil	Open	TW IV	Alat laboratorium terjaga kondisi nya dan proses pengujian berjalan tanpa kendala
		Pelaporan VMA dilaksanakan mendekati	VMA dilaksanakan secara berkala sehingga proses penyusunan	TW IV	Penyusunan jadwal VMA dipantau secara rut8n dan intensif	Open	TW IV	VMA dapat dilaporkan secara bertahap, tidak hanya untuk

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		timeline, sehingga proses pelaporan tidak maksimal	laporan dapat dilakukan maksimal					pemenuhan SKP, tetapi sebagai bentuk jaminan mutu hasil pengujian
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	%Sarana : 127,02 %Sampling : 118,01 %Pengujian : 90,11	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	TW IV	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim	Closed	TW IV	Target Tercapai
		%Sarana : 125,87 %Sampling : 112,52 %Pengujian : 93,47	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	TW IV	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim	Closed	TW IV	Target Tercapai
		%Sarana : 126,42 %Sampling : 103,83 %Pengujian : 100	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	TW IV	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim	Closed	TW IV	Target Tercapai
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai IKPA Indikator belanja kontraktual mengalami penurunan pada sub indikator nilai akselerasi belanja 53.	Melakukan monev secara ketat nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual dengan mengawal semua sub indikatornya agar nilai tidak semakin turun	TW IV	Melakukan monev secara ketat nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual dengan mengawal semua sub indikatornya	Closed	TW IV	Nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual di bulan november dan Desember 2024 tidak semakin turun.
		Realisasi belanja barang sebesar 83,58%, sedangkan target TW IV sebesar 90%.	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga target tetap terlaksana dan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran non perjadin.	TW IV	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga target tetap terlaksana dan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran non perjadin.	Closed	TW IV	Realisasi belanja barang pada TW IV sebesar 97,35% berdasarkan data OMSPAN per tanggal 3 Januari 2024. (Telah mencapai target pada TW IV)
		Pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat.	Melakukan identifikasi penyebab pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat.	TW IV	Melakukan identifikasi penyebab pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat. Dari hasil identifikasi diketahui penyebabnya diantaranya: - Pada pengembalian	Closed	TW IV	Kelemahan-kelemahan pengelolaan TUP tahun 2024 telah diidentifikasi dan akan dijadikan sebagai perbaikan tahun berikutnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					belanja pegawai khusunya uang makan: banyak pegawai yang mendadak cuti dan dinas di luar renlak yang telah disampaikan ke bagian kepegawaian. - Pegawai, pejabat pengadaan dan pengelola keuangan sudah overload karena pada akhir tahun bersamaan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan nasional dan kegiatan besar yang melibatkan banyak lintas sektor			
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	komunikasi dengan BMN Biro Umum sebelum revisi akun	Revisi POK	TW IV	menunggu revisi DJA terkait belanja 51 baru bisa revisi POK	Closed	TW IV	sudah dilakukan penyesuaian akun
		Komunikasi dengan Rorenkeu dan KPPN terkait dengan penghematan	Revisi POK	TW IV	Menunggu revisi Penghematan Perjadin	Closed	TW IV	sudah dilakukan revisi Akun belanja 53
		menunggu SE dari KPPN	Semua Pembayaran Jasa masuk Rpata	TW IV	Input Pembayaran Jasa Kebersihan, Keamanan, Pengemudi, Respsionis, pemelihara Sarpras ke sistem pembayaran RPATA	Closed	TW IV	sudah diinput ke dalam pembayaran RPATA
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Aplikasi SAKTI dan Siman sering mengalami Kendala	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-persediaan dan siman ver2	TW IV	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang	Closed	TW IV	Tutup buku periode Oktober dapat dilakukan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
					Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
						Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2			
		Aplikasi SAKTI dan Siman sering mengalami Kendala	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-modul aset/persediaan dan siman ver2	TW IV	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2	Closed	TW IV	Tutup buku periode Nopember dapat dilakukan
		Aplikasi SAKTI dan Siman sering mengalami Kendala	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan KPKNL terkait kekurangan berkas serta pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-modul aset/persediaan dan siman ver2	TW IV	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2 - Melengkapi kekurangan berkas sesuai kebutuhannya	Closed	TW IV	Tutup buku periode Desember dapat dilakukan
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Saat ini tetap dilakukan proses pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	TW IV	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Open	TW IV	-
		Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	- Ada perhitungan PDN yang jelas antara paket penyedia dan swakelola - Adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN	TW IV	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Open	TW IV	-
		Melakukan pencatatan dan perhitungan	- Ada perhitungan PDN yang jelas antara paket penyedia dan	TW IV	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk	Open	TW IV	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Time line	Progres Rencana Aksi			Kondisi Setelah Rencana Aksi
						Belum		
					Rencana aksi yang sudah selesai	Rencana Aksi yang belum selesai	Time line	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	swakelola - Adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN		penilaian Pengelolaan PDN			

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dalam rangka melaksanakan *Continuous Improvement*, Balai Besar POM di Surabaya senantiasa memanfaatkan informasi-informasi hasil evaluasi kinerja maupun anggaran dari laporan sebelumnya untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kendala-kendala maupun permasalahan yang akan dihadapi. Pemanfaatan informasi tersebut meliputi:

1. Pemanfaatan informasi yang menunjukkan bahwa target IKU Obat yang memenuhi syarat tercapai yaitu 100,58 % dengan predikat “Sangat Baik”. Akan tetap dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang memenuhi syarat melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB dan pelaksanaan kegiatan Bimtek pelaku usaha dan desk CAPA di tahun 2025 dengan mengundang pelaku usaha dengan hasil pemeriksaan sarana tidak memenuhi ketentuan.
2. Pemanfaatan informasi bahwa berdasarkan laporan kinerja interim triwulan II, diperoleh informasi bahwa target triwulan II sudah tercapai. Sedangkan pada triwulan III target capaian tidak tercapai, dikarenakan penambahan sampel yang diuji dengan hasil TMS yang signifikan. Sampai dengan TW IV target belum tercapai, terdapat 77 sampel yang tidak Memenuhi Syarat dengan Nomor Izin Edar MD, ML, PIRT dan 1 (satu) dengan nomor izin edar dari Kementan. Terdapat beberapa sampel dengan Nomor Izin Edar MD yang diproduksi oleh sarana yang masuk dalam cakupan wilayah BBPOM Surabaya. Sudah dilakukan Pemeriksaan sarana terkait produk pangan olahan dengan hasil uji yang TMS, misalnya ke produsen madu di tanggal 24 November 2024. Untuk produk pangan dengan no izin PIRT telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait penerbit PIRT atau ke produsen PIRT yang berada dalam cakupan UPT BBPOM/BPOM lain.

3. Pemanfaatan informasi bahwa target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai, terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel obat tradisional dan penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik. TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu. Pada tahun 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

4. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPPOB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.
5. Target Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat telah tercapai lokasi sampling adalah wilayah tinggi stunting dan rendah stunting sehingga sangat mempengaruhi capaian IKU, maka upaya yang dilakukan BBPOM di Surabaya adalah tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi agar sarana produksi tetap konsisten menerapkan CPPOB termasuk dalam penggunaan fortifikan yang dipersyaratkan oleh SNI 3556-2016 untuk garam, SNI 3751-2018 untuk tepung terigu dan SNI 7709:2019 untuk minyak goreng sawit.
6. Dalam rangka memastikan indeks kesadaran Masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan tetap tercapai walaupun nilai perilaku masih rendah yaitu 84,60 (katagori BAIK) diperlukan upaya untuk melakukan pemberian informasi yang semakin intensif dan pemilihan media yang tepat untuk melakukan penyebaran informasi di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Selain itu jumlah KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2024 diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Surabaya dan Badan POM yang pada akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku Masyarakat terkait awareness Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kerjasama dengan Penerintah Daerah harus semakin dieratkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pemerntah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan penguasa wilayah yang memahami dengan baik kondisi di daerah masing masing.

7. Melakukan monitoring tren capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan untuk selanjutnya dijadikan dasar pengajuan usulan kenaikan target pada tahun 2025.
8. Target IKU Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 telah tercapai, untuk terus meningkatkan upaya branding Balai Besar POM di Surabaya, telah dikembangkan inovasi Jatim Truly yang merupakan upaya pembinaan dan stikerisasi pada para pedagang kreatif lapangan (PKL) di sekitar daerah wisata. Inovasi ini telah mendapat dukungan dari pemda setempat. Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Setelah dilakukan program inovasi Jatim Truly di Kota Batu, pada tahap berikutnya dilaksanakan di Kota Pasuruan dengan target para PKL yang berdagang di alun alun Kota Pasuruan. Pada tahun 2024 target pembinaan PKL melalui inovasi Jatim truly adalah Kabupaten Madiun dan Kota Surabaya. Tetap mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Surabaya. Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalami transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang memadai. Untuk itu BBPOM Surabaya tetap diharapkan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para UMKM sebagai kekuatan nyata dan penyokong ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 telah tercapai, BBPOM di Surabaya harus terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll agar dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan

lebih bebas. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk dan layanan publik lainnya.

10. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, untuk mengawal indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat tercapai, telah dilakukan percepatan capaian kinerja dengan memberikan teguran kepada petugas yang belum menindaklanjuti hasil pengawasan berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh ketua tim secara rutin setiap bulan. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II, dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari Pusat.
11. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, untuk mengawal indikator Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat tercapai maka untuk percepatan pencapaian target indikator dilaksanakan kegiatan desk CAPA Pedagang Besar Farmasi dengan Pusat dalam rangka percepatan sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB). Hingga kemudian capaian indikator meningkat menjadi 94,43% di akhir tahun 2024. Selain itu juga telah dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam hal ini dengan Dinas Kesehatan terkait tentang surat balasan/ feedback dari surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
12. Berdasarkan laporan kinerja 2024, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai. Penyumbang terbesar dari rendahnya capaian kinerja dibandingkan dengan target adalah penerbitan SKI/SKE yang tidak memenuhi timeline. Telah dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan selama tahun berjalan namun capaian kinerja tahun 2024 masih belum mencapai target sehingga akan diusulkan penurunan target IKU tahun 2025.
13. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, dalam rangka mengawal IKU Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka dipandang perlu untuk meningkatkan dan kompetensi petugas pengawas serta melakukan diseminasi hasil pelatihan/sosialisasi peraturan terbaru terkait pemeriksaan sarana produksi untuk menyamakan persepsi petugas. Pembinaan pelaku usaha obat tradisional masih perlu dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kembali Cangkrukan dengan target peserta penanggung jawab sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian, pertemuan rutin dengan Gabungan

Pengusaha (GP) Farmasi, dimana selain dilakukan sosialisasi peraturan serta diskusi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga diharapkan kepatuhan pelaku usaha dapat meningkat. Selain itu perlu kembali diaktifkan Jejaring Pengawasan Obat dan Makanan dengan Dinas Kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.

15. Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2024, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 5,0 melebihi target tahun 2024 dan target akhir periode renstra. Meskipun telah mendapatkan hasil yang maksimal namun perbaikan aspek pelayanan publik dilakukan secara berkesinambungan dengan menerapkan aspek aspek pelayanan prima sehingga BBPOM di Surabaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya dan mempertahankan prestasi yang telah diperoleh. Masukan dan pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Masukan dari evaluator juga akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.
16. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 pada IKU Persentase UMKM yang Memenuhi Standar sudah tercapai namun tetap perlu ditingkatkan. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator, di antaranya:
    - Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten/kota untuk melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg.
    - Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
17. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan diperoleh informasi bahwa untuk meningkatkan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan koordinasi dan advokasi untuk mendorong pembentukan tim TKPPOMN sebagai wujud komitmen dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan obat dan makanan.
18. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 97,43 dari target 95,20 sehingga capaiannya 102,34%. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target adalah dengan penambahan titik pelaksanaan KIE dengan tokoh masyarakat dan pengurangan jumlah peserta tiap titik dari 500 orang per titik di tahun 2023 menjadi 250 orang per titik di tahun 2024. Untuk selanjutnya perlu dilakukan perencanaan dan penataan KIE baik secara tatap

muka langsung ataupun melalui media. Jika dilihat dari 4 komponen penyusun Tingkat efektifitas KIE yaitu ragam kegiatan, minat, pemahaman, dan manfaat mendapatkan nilai yang kurang lebih sama. Pemilihan materi KIE dan media yang tepat merupakan strategi yang harus mendapat perhatian khusus. Pendekatan menggunakan adat atau kebiasaan wilayah tertentu juga patut mendapat pertimbangan sehingga kegiatan KIE menjadi lebih hidup dan dinamis.

19. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan serta menyebar ke sekolah lain di wilayah kabupaten tersebut secara mandiri oleh Pemerintah Daerah.
20. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.
21. Untuk mengawal IKU Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2024 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi . Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan Rapid Test Kit dapat dilakukan secara periodik dan pengadaan Rapid Test Kit secara mandiri menggunakan anggaran Pemerintah Daerah. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar pembinaan kepada para pedagang pasar agar tidak lagi menjual pangan mengandung bahan berbahaya. Pada saat dilakukan survei pasar, masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip keamanan pangan. Diharapkan agar Dinas terkait memperhatikan fasilitas pasar terutama hygiene dan sanitasi. Selanjutnya diharapkan Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.
22. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024 diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Pada kegiatan monev regionalisasi TW IV 2024 telah disampaikan mengenai hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan regionalisasi dan pencapaian kinerja.

23. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan IV diperoleh informasi bahwa target telah tercapai, namun dengan adanya penunjukan Balai Besar POM di Surabaya sebagai laboratorium regional dibutuhkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana seperti penambahan luasan laboratorium, renovasi ruangan, penambahan alat laboratorium, baku pembanding dan lain-lain. Target hingga tahun 2024 tetap sama 100%, sehingga perlu banyak dilakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana labratorium.
24. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi bahwa meskipun penanganan perkara memiliki kendala relatif kompleks, Penyidik BBPOM di Surabaya telah menyelesaikan pemberkasan dengan kualitas yang baik sehingga capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2024 telah mencapai dan melebihi target yang ditetapkan.
25. Telah melakukan pembangunan ZI dan telah mendapat predikat WBBM dari Kementerian PANRB tahun 2021. Pada tahun 2024 mampu mempertahankan predikat WBBM secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pegawai. Implementasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, pimpinan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemenuhan penilaian akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara memadai, mulai dari proses perencanaan kinerja sampai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas. Selain itu capaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian reward and punishment. Telah terdapat inovasi pada Area Penguatan Pengawasan untuk membangun lingkungan pengendalian di BBPOM Surabaya, antara lain SIGAP (Survei Integritas Pegawai Lapangan) dan WBS-SiPONI (Si Pelapor Pemberani). BBPOM di Surabaya memiliki inovasi unggulan berupa Gempur Jatim (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur), dan sejalan dengan continous improvement yang dilakukan, pada Oktober 2024, inovasi tersebut berhasil meraih Top 5 Inovasi Berkelanjutan dari Kementerian PANRB. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,64 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,83

(syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

26. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, indikator Nilai AKIP tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pada tahun 2024 dilakukan pengawalan yang lebih intensif dan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai AKIP agar dapat mencapai target 2024. Sehingga pada tahun 2024 target yang ditetapkan berhasil dicapai dengan baik. BBPOM di Surabaya terus berupaya memberikan kinerja terbaik untuk peningkatan implementasi SAKIP.
27. Laporan kinerja ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan program kerja BBPOM di Surabaya untuk tahun-tahun berikutnya. Laporan ini juga akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk ANRI dan Biro Umum BPOM, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kearsipan. Dengan adanya laporan ini, diharapkan semua pihak dapat memahami capaian yang telah diraih, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan kearsipan.
28. Pemantauan pengembangan kompetensi dilakukan secara rutin setiap bulan dan dilaporkan pada rapat monev bulanan bersama pimpinan, sehingga capaian JP kompetensi teknis dapat dikawal dengan ketat.
29. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, diperoleh informasi adanya kekurangan biaya pemeliharaan alat laboratorium. Hal ini sebagai dampak dari regionalisasi, sehingga jumlah sampel yang diuji lebih banyak dari tahun - tahun sebelumnya dan mengakibatkan alat laboratorium mudah rusak. Hal ini ditindaklanjuti dengan membuat usulan permintaan tambahan anggaran kepada Sestama dengan tembusan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta PPPOMN. Setelah surat usulan disetujui, maka dilakukan revisi penambahan belanja operasional untuk pemeliharaan alat laboratorium. Adanya kesulitan dalam pemenuhan standar kompetensi personel, oleh karena itu laboratorium pengujian BBPOM di Surabaya melakukan rotasi penguji sehingga nilai kompetensi penguji dapat meningkat dan standar kompetensi personel dapat dipenuhi. Selain itu untuk dapat mempertahankan nilai kompetensi agar tidak menurun akibat pegawai yang purna tugas maupun pegawai yang rotasi, maka dilakukan pemberian pelatihan keterampilan dasar oleh penyelia kepada penguji baru. Melalui kegiatan tersebut diharapkan penguji baru memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan dapat menambah nilai standar kompetensi personel laboratorium.

30. Berdasarkan laporan kinerja interim triwulanan 2024 diperoleh informasi bahwa pencapain target pemanfaatan SIPT terutama pada SIPT Pengujian masih belum maksimal karena masih terdapat kendala pada aplikasi SIPT, untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka dilakukan diskusi secara intensif baik melalui personal maupun menggunakan aplikasi pengaduan itsm.pom.go.id supaya segala permasalahan SIPT dapat teratasi dan target indikator indeks pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.
31. Berdasarkan hasil laporan kinerja interim triwulanan tahun 2024, didapat informasi bahwa Nilai IKPA pada indikator Penyerapan anggaran dan Belanja Kontraktual tidak akan dapat memperoleh nilai maksimal dikarenakan realisasi belanja modal tidak mencapai target pada triwulan II dan III dan penyelesaian belanja kontraktual untuk belanja modal masih ada yang selesainya melebihi triwulan I. Untuk itu perlu dilakukan pengawalan yang ketat pada indikator-indikator yang lain agar nilai IKPA pada akhir tahun tidak semakin turun.
32. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, bahwa penilaian terhadap indikator PBJ baru di tetapkan sebesar 96.43 % dimana Balai Besar POM di Surabaya tahun 2024 untuk Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tidak tercapai dengan Nilai 90,00%, diharapkan tahun 2025 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dapat tercapai dengan maksimal.
33. Informasi pengungkapan nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Laporan ini digunakan utamanya agar satuan kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya sebagai pengingat agar dapat terus melakukan perbaikan untuk mencapai pengelolaan BMN yang akuntabel. Selain itu juga sebagai media untuk memudahkan penyampaian informasi kepada semua stakeholder terkait nilai pengelolaan BMN, antara lain seperti BPOM Pusat, Pengawas, Kementerian Keuangan, masyarakat, dan lain-lain.
34. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, bahwa penilaian terhadap indikator PDN belum dilakukan namun penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan BPOM. Sehingga untuk Target tahun 2024 didasarkan pada tren realisasi 2022 dan realisasi bulan Oktober 2023, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu apabila realisasi bulan Oktober 2023 di bawah 60, maka target 2024 ditetapkan sebesar 60 sehingga diharapkan target tahun 2024 dapat tercapai dengan maksimal. Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri pada akhir tahun 2024 sebesar 78,29% dan mengalami peningkatan disbanding tahun 2022 dan 2023. Pemanfaatan laporan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dan akan diupdate jika realisasi sudah dilaksanakan

3.6 Realisasi Anggaran

a. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No.SP DIPA- 063.01.2.432784/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 sebesar Rp73.956.636.000,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Selama tahun 2024 terdapat beberapa kali revisi DIPA. Revisi yang menyebabkan perubahan pagu DIPA yaitu pada tanggal 16 Agustus 2024 Balai Besar POM di Surabaya mengalami penurunan pagu menjadi Rp71.756.636.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan pada tanggal 5 November 2024 dilakukan revisi kembali sehingga pagunya menjadi Rp71.617.386.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Kedua revisi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai pada Satker lain di Lingkungan Badan POM. Pergeseran atau perubahan pagu anggaran yang terjadi pada tahun 2024 terdiri atas:

1. *Selfblocking* dalam rangka *Automatic Adjustment* sebesar Rp4.280.696.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2024.
2. Pada tanggal tanggal 20 Februari 2024 - Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA.
3. Pada tanggal 29 April 2024 dilakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA.
4. Pada tanggal 31 Mei 2024 dilakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA.
5. Pada tanggal 12 Juli 2024 dilakukan revisi perpindahan Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari RAB.001 ke CAB.001, dimana CAB.001 semula Rp467.646.000,- menjadi Rp767.646.000,- dan RAB.001 semula Rp11.347.774.000,- menjadi Rp11.047.774.000,-
6. Pada tanggal 16 Agustus 2024 dilakukan revisi Realokasi Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dari 6384.EBA.994 semula Rp30.169.841.000,- menjadi Rp27.969.841.000,-
7. Pada anggal 6 September 2024 dilakukan revisi Buka blokir Automatic Adjustment (AA) sebesar Rp3.233.000.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
8. Pada tanggal 16 Oktober 2024 dilakukan revisi Pergeseran anggaran, termasuk revisi pagu minus pada tunjangan PPPK

9. Pada tanggal 5 November 2024 dilakukan revisi Transfer belanja pegawai ke Pusat sebesar Rp139.250.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
10. Pada tanggal 20 November 2024 dilakukan revisi Penghematan Perjadin 50% dengan pemblokiran sebesar Rp918.407.000,- (sembilan ratus delapan belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah)
11. Pada tanggal 28 November 2024 dilakukan revisi Pemutakhiran hal III DIPA
12. Pada tanggal 17 Desember 2024 dilakukan revisi Pergeseran anggaran, termasuk revisi uang lembur dan makan lembur PNS
13. Pada tanggal 27 Desember 2024 dilakukan revisi Pemutakhiran hal III DIPA

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

Dari total pagu anggaran sebesar Rp71.617.386.000 (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp69.473.776.680,- (enam puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan persen realisasi sebesar 97,01 %.

b. Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi kinerja pada Balai Besar POM di Surabaya tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 129. Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi Anggaran pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,54	93,07	100,58	717.991.164	689.144.633	95,98

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,62	89,83	99,13	439.429.505	434.994.840	98,99
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,81	91,93	96,96	267.718.836	256.962.771	95,98
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,30	87,89	103,04	108.760.995	107.663.393	98,99
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,00	105,88	73.227.000	48.165.696	65,78
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,50	90,31	106,88	420.739.000	420.738.912	100,00
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,40	97,26	100,89	510.624.000	455.462.168	89,20
8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,14	86,56	108,01	551.168.000	530.739.204	96,29
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,50	93,04	100,58	71.312.000	43.115.308	60,46
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	98,25	100,97	52.100.000	51.280.000	98,43
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,42	94,43	105,60	520.494.000	489.776.835	94,10

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	93,63	97,53	606.643.000	605.767.082	99,86
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,98	102,83	488.916.000	479.965.126	98,17
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	66,75	94,21	772.851.000	699.185.182	90,47
15	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,95	5,00	101,01	71.312.000	43.115.308	60,46
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,00	100,00	103,09	420.728.000	321.304.321	76,37
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,18	104,40	9.604.000	9.603.440	99,99
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,20	97,43	102,34	12.279.392.000	12.261.356.897	99,85
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00	633.934.000	497.780.522	78,52
20	Jumlah desa pangan aman	45	45	100,00	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100,00	512.560.000	506.977.425	98,91

No.	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
		T	R	%	P	R	%
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	985.710.000	946.107.404	95,98
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	120,00	548.190.500	542.658.233	98,99
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	83,01	118,59	1.510.697.000	1.418.165.897	93,87
25	Indeks RB UPT	95,23	93,98	98,69	28.734.704.456	28.547.035.059	99,35
26	Nilai AKIP UPT	85,25	85,37	100,14	1.934.913.000	1.930.992.120	99,80
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,50	98,06	101,62	8.493.500	8.493.430	100,00
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,86	86,37	95,06	370.911.000	334.139.234	90,09
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,74	89,23	100,55	16.233.794.000	15.071.747.199	92,84
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,00	120,00	264.781.000	264.681.528	99,96
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,31	93,51	103,54	86.240.000	80.555.335	93,41
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96,43	90,00	93,33	118.225.900	103.600.579	87,63
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90,00	98,44	109,38	19.455.144	19.442.963	99,94
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	78,29	120,00	17.389.000	17.387.040	99,99

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian kinerja yang terendah sebesar 93,33% yaitu pada indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan realisasi anggaran sebesar 87,63%. Sedangkan capaian kinerja tertinggi sebesar 120% terdapat pada 4

(empat) indikator antara lain indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan realisasi anggaran sebesar 95,98%, indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan realisasi anggaran sebesar 98,99%, indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan realisasi anggaran sebesar 99,96%, dan indikator Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan realisasi anggaran sebesar 99,99%.

c. Realisasi anggaran per Sasaran Strategis

Tabel 130. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Anggaran Per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	717.991.164	689.144.633	95,98
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	439.429.505	434.994.840	98,99
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	267.718.836	256.962.771	95,98
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	108.760.995	107.663.393	98,99
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	73.227.000	48.165.696	65,78
		Total		**1.607.127.500**	**1.536.931.333**	**95,63**
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	420.739.000	420.738.912	100,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	510.624.000	455.462.168	89,20
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja	551.168.000	530.739.204	96,29

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Anggaran Per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
	Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT		pengawasan Obat dan Makanan			
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	71.312.000	43.115.308	60,46
		Total		**1.133.104.000**	**1.029.316.680**	**90,84**
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	52.100.000	51.280.000	98,43
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	520.494.000	489.776.835	94,10
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	606.643.000	605.767.082	99,86
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	488.916.000	479.965.126	98,17
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	772.851.000	699.185.182	90,47
		15	Indeks Pelayanan Publik UPT	71.312.000	43.115.308	60,46
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	420.728.000	321.304.321	76,37
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	9.604.000	9.603.440	99,99
		Total		**2.942.648.000**	**2.699.997.294**	**91,75**
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	12.279.392.000	12.261.356.897	99,85
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	633.934.000	497.780.522	78,52

BADAN POM
GAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Anggaran Per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
	dan Makanan di wilayah kerja UPT	20	Jumlah desa pangan aman	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	512.560.000	506.977.425	98,91
		Total		**14.680.263.000**	**14.501.786.442**	**98,78**
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	985.710.000	946.107.404	95,98
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	548.190.500	542.658.233	98,99
		Total		**1.533.900.500**	**1.488.765.637**	**97,06**
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	1.510.697.000	1.418.165.897	93,87
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	28.734.704.456	28.547.035.059	99,35
		26	Nilai AKIP UPT	1.934.913.000	1.930.992.120	99,80
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	8.493.500	8.493.430	100,00
		Total		**30.678.110.956**	**30.486.520.609**	**99,38**
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	370.911.000	334.139.234	90,09
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	16.233.794.000	15.071.747.199	92,84
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	264.781.000	264.681.528	99,96
		Total		**16.869.486.000**	**15.670.567.961**	**92,89**
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	86.240.000	80.555.335	93,41
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	118.225.900	103.600.579	87,63
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	19.455.144	19.442.963	99,94

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Anggaran Per Sasaran Strategis		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c		d	e	i=(e/dx100)
		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	17.389.000	17.387.040	99,99
		Total		**241.310.044**	**220.985.917**	**91,58**

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran terendah pada sasaran strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT yang optimal dengan persentase realisasi anggaran sebesar 90,84%. Sedangkan realisasi anggaran tertinggi pasa sasaran strategis Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,38%.

d. Realisasi anggaran per Kegiatan

Tabel 131. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Beserta Capaiannya pada Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	394.553.000	348.165.494	88,24
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	19164	23213	100,00	1.271.106.000	1.158.671.877	91,15
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	40855	42683	100,00	12.830.560.000	12.792.096.101	99,70
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	3.043.933.000	2.936.206.757	96,46
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	110	117	100,00	420.739.000	420.738.912	100,00
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	768.466.000	768.449.750	100,00
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	16	100,00	209.180.000	209.179.500	100,00
8	Prasarana Pengawasan Obat	1	1	100,00	56.943.000	55.939.000	98,24

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
	dan Makanan di Indonesia						
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	5.186.020.000	5.005.190.351	96,51
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SURABAYA	9	9	100,00	1.116.144.000	1.070.000.403	95,87
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00	633.934.000	497.780.522	78,52
12	Desa Pangan Aman	45	45	100,00	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	30	30	100,00	512.560.000	506.977.425	98,91
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	131	131	100,00	420.728.000	321.304.321	76,37
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	942	947	100,00	1.096.381.000	1.085.316.466	98,99
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2451	2459	100,00	1.971.420.000	1.892.214.807	95,98
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	110	110	100,00	73.227.000	48.165.696	65,78
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	432	443	100,00	487.801.000	487.586.126	99,96
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	764	766	100,00	990.949.000	889.052.506	89,72
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	11.047.774.000	10.066.556.848	91,12

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No.	Program/Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
21	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	27.830.591.000	27.678.512.220	99,45

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa terdapat 3 (tiga) kegiatan yang anggarannya terealisasi 100% yaitu pada rincian output Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia (capaian realisasi volume 100%), Perangkat pengolah data dan komunikasi (capaian realisasi volume 100%), dan Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT (capaian realisasi volume 100%). Sedangkan realisasi anggaran yang terendah sebesar 65,78% yaitu pada rincian output Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (capaian realisasi volume 100%).

e. Pengukuran efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$\mathbf{IE} = \frac{\%\ \boldsymbol{CapaianOutput}}{\%\ \mathbf{RencanaCapaianinput}} \mathbf{IE} = \frac{\mathbf{100\ \%}}{\mathbf{100\%}} = \mathbf{1}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$\mathbf{TE} = \frac{\mathbf{IE} - \mathbf{SE}}{\mathbf{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 132. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TE	CAPAIAN
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	0,13	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	0,1	Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	0,01	Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0,04	Efisien
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	0	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0	Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0,02	Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,04	Efisien
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SURABAYA	0,04	Efisien
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0,27	Efisien
12	Desa Pangan Aman	0,02	Efisien
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	0,01	Efisien
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0,31	Efisien
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,01	Efisien

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TE	CAPAIAN
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	0,04	Efisien
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	0,52	Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0	Efisien
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	0,12	Efisien
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0,1	Efisien
21	Layanan Perkantoran	0,01	Efisien

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan / Program untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,52. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah tingkat efisiensinya. Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 133. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	101,12	95,63	1,06	0,06	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan	106,88	100,00	1,07	0,07	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
	dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya					
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	103,16	90,84	1,14	0,14	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	101,21	91,75	1,10	0,10	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	100,59	98,78	1,02	0,02	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	100,00	97,06	1,03	0,03	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	118,59	93,87	1,26	0,26	Efisien
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	100,15	99,38	1,01	0,01	Efisien
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	95,06	90,09	1,06	0,06	Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	100,28	92,96	1,08	0,08	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator	Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
	informasi pengawasan Obat dan Makanan					
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	109,18	91,58	1,19	0,19	Efisien

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya melaksanakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan **Efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,26. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis sudah sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran, namun untuk kedepannya masih perlu dilakukan beberapa upaya seperti menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

i. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar Rp1.536.931.333,- atau 2,21% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. Kegiatan kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas . Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target indikator (2 indikator : Persentase Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis pertama adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

ii. Pada sasaran strategis kedua yaitu “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp420.738.912,- atau 0,61% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyebaran informasi terkait obat dan makanan melalui media. Kegiatan ini berdampak terhadap peningkatan hasil survei kesadaran

masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

iii. Pada sasaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.029.316.680,- atau 1,48% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan registrasi pangan olahan, Desk CAPA Sertifikasi CDOB, penyebaran informasi dan sosialisasi melalui media, Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI, serta acara forum komunikasi penerapan dan pelayanan SKI/SKE dengan lintas sektor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak terhadap peningkatan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketiga adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan

iv. Pada sasaran strategis keempat yaitu "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp2.699.997.294,- atau 3,89% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan, pendampingan UMKM (Gempur Jatim), pendampingan UMKM obat tradisional SiPPOTra, pendampingan UMKM kosmetik (Jatim *Glowing*), peningkatan kompetensi pelayanan publik, dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai. Kegiatan kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik ditunjukkan dengan belum tercapainya semua target indikator (2 indikator : Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis

keempat adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

v. Pada sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp14.501.786.442,- atau 20,87% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan KIE kepada masyarakat dan pelaksanaan intervensi komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas KIE ditunjukkan dengan tercapainya semua target 4 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kelima adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

vi. Pada sasaran strategis keenam yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp1.488.765.637,- atau 2,14% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sampel obat dan makanan, pemeliharaan sistem mutu pengujian, pengadaan alat laboratorium, dan sarana prasarana penunjang pengujian seperti suku cadang, baku pembanding, dll. Kegiatan kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan, sehingga kedepannya perlu penambahan anggaran pengadaan alat laboratorium karena kendala terbesar saat pengujian adalah alat labratorium yang rusak sehingga terjadi antrian pemakaian alat laboratorium dan berdampak pengujian melebihi *timeline* uji. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis keenam adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

vii. Pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.418.165.897,- atau 2,04% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan investigasi, penindakan, pemberkasan, koordinasi, serta peningkatan kompetensi penyidik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat

efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis ketujuh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

viii. Pada sasaran strategis kedelapan yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp30.486.520.609,- atau 43,88% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran yang dipergunakan pada sasaran ini merupakan anggaran dengan proporsi terbesar dibandingkan anggaran pada sasaran lainnya. Anggaran ini dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, operasional perkantoran, pertemuan koordinasi/advokasi, pertemuan dalam rangka RB, penyusunan lapkin, laptah, renstra, dan rapat evaluasi. Kegiatan-kegiatan tersebut cukup efektif untuk dapat mencapai target indeks RB dan AKIP tahun 2024. Kegiatan kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas Terwujudnya tata kelola pemerintahan ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator (1 indikator : Indeks RB BBPOM di Surabaya). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedelapan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

ix. Pada sasaran strategis kesembilan yaitu "Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp334.139.234,- atau 0,48% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang berdampak pada tercapaianya target sasaran. Kegiatan tersebut belum cukup memberikan dampak terhadap peningkatan efektivitas terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal ditunjukkan dengan belum tercapainya target indikator (1 indikator : Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesembilan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

x. Pada sasaran strategis kesepuluh yaitu "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan", anggaran yang direalisasikan sebesar Rp15.336.428.727,- atau 22,08% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemenuhan sarana prasarana untuk jaminan mutu hasil

pengujian, peningkatan kompetensi penguji, koordinasi laboratorium, pemeliharaan alat pengolah data dan alat laboratorium, dan pengadaan sarana prasarana kantor. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak nyata terhadap penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi ditunjukkan dengan tercapainya target indikator. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesepuluh adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

xi. Pada sasaran strategis kesebelas yaitu “Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel”, anggaran yang direalisasikan sebesar Rp220.985.917,- atau 0,32% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. Anggaran yang dipergunakan memang sangat kecil dan belum berdampak nyata terhadap terkelolanya keuangan secara akuntabel ditunjukkan dengan adanya 1 indikator yang belum tercapai yaitu indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker). Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis kesembilan adalah **efisien** karena capaian *outcome* yang dihasilkan melebihi anggaran yang dikeluarkan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2024 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode Rencana Strategis 2021-2024. BBPOM di Surabaya mempunyai 11 sasaran strategis dengan 34 indikator. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator pada triwulan IV tahun 2024, telah dilakukan 21 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis yang dievaluasi diperoleh 10 sasaran strategis memperoleh capaian kategori **Sangat Baik** dan 1 sasaran strategis dikecualikan dalam perhitungan NPSS.
2. **Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis** adalah sebagai berikut :
   1) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 101,12% dengan kategori **Sangat Baik**.
   2) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 106,88% dengan kategori **Sangat Baik**;
   3) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 103,16% dengan kategori **Sangat Baik**;
   4) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 101,21% dengan kategori **Sangat Baik**;
   5) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 100,59% dengan kategori **Sangat Baik**;
   6) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 120,00% dengan kategori **Sangat Baik**;
   7) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya dengan NSS sebesar 118,59 % dengan kategori **Sangat Baik**;
   8) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal dengan NSS sebesar 100,15% dengan kategori **Sangat Baik**;
   9) Pada tahun 2024, sasaran strategis “Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal” dikecualikan dalam perhitungan NPSS;
   10) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NSS sebesar 110,28 % dengan kategori **Sangat Baik**;

11) Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya belum berhasil mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel dengan NSS sebesar 106,56% dengan dengan kategori **Sangat Baik**;

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2024 antara 93,33% sampai dengan 120,00%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator "Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa" belum mencapai target dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama penilian indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan terlalu tinggi. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi terdapat pada 4 indikator antara lain 1) "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" disebabkan semua sampel Obat yang masuk ke laboratorium telah berhasil dilakukan pengujian sesuai standar dan pedoman sampling serta memenuhi waktu timeline; 2) "Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar" disebabkan seluruh sampel makanan yang masuk ke laboratorium telah dilakukan pengujian sesuai parameter dan pedoman sampling serta memenuhi waktu timeline; 3) "Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal" disebabkan adanya monitoring dan evaluasi pada Pemanfaatan Email, pemutakhiran SPIMKER, pemutakhiran SIPT, dan pemanfaatan Berita Aktual yang dilakukan sebelum akhir bulan; dan 4) "Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri" disebabkan adanya koordinasi dan evaluasi secara rutin dalam pengambilan Keputusan setiap proses pengadaan barang/jasa.

Pada tahun 2024 BBPOM di Surabaya melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,00 hingga 0,52 (Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah keefisienan yang terjadi.

4.2 Saran

Dari 34 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 7 (tujuh) indikator yang belum mencapai target tahun 2024, terkait hal tersebut akan dilakukan Langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Persentase Makanan yang memenuhi syarat belum mencapai target dikarenakan masih tingginya sampel makanan dengan hasil uji TMS. Terkait hal tersebut, BBPOM Surabaya akan selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

2. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum mencapai target dikarenakan terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel obat tradisional dan penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik. TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu. Untuk itu BBPOM di Surabaya berupaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui

pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOB, CPOTB, dan CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu belum mencapai target terutama disebabkan oleh pemenuhan penyelesaian SKI/SKE yang melebihi timeline, mengingat jumlah permohonan penerbitan SKI/SKE merupakan komponen terbesar dalam keputusan penilaian sertifikasi. Kendala dalam pemenuhan timeline tersebut, antara lain:
   1) Importir / eksportir mengunggah dokumen yang tidak lengkap dan tidak benar sehingga dari hasil evaluasi petugas, permohonan dinyatakan tidak lengkap dan membutuhkan tambahan data sehingga menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi timeline yang ditetapkan.
   2) Importir / eksportir yang tidak memahami permintaan pemenuhan data oleh petugas tidak segera berkonsultasi dengan petugas, namun mengunggah dokumen yang masih tidak sesuai sehingga terjadi penolakan lagi oleh petugas.
   3) Terdapat unggahan dokumen dari importir / eksportir yang membutuhkan klarifikasi secara langsung (tatap muka) dengan petugas sehingga waktu penyelesaian lebih lama dan berdampak pada survei kepuasan pelanggan.
   4) Terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi.
   5) Terdapat evaluasi yang membutuhkan konsultasi dengan pusat sehingga membutuhkan waktu keputusan lebih lama.
   6) Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami permintaan tambahan data dari hasil evaluasi sebelumnya. Hal ini penting bagi evaluator untuk dapat membedakan pengajuan yang harus dilakukan diprioritaskan untuk dievaluasi kembali setelah dilakukan perbaikan oleh pemohon.
   7) Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12.00 WIB akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
   8) Terdapat petugas sertifikasi baru yang belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.
   9) Terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan dengan evaluasi SKI/SKE, misalnya melaksanakan audit sarana, melakukan konsultasi denah, melakukan evaluasi izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
   10) Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan melakukan prioritas evaluasi berdasarkan urutan waktu pengajuan dengan mengutamakan evaluasi terhadap SKI tambahan data daripada pengajuan SKI baru.
   11) Untuk SKE, BBPOM di Surabaya sudah menetapkan timeline 1 hari sesuai dengan inovasi SKETSA. Adanya SKE yang tidak sesuai timeline disebabkan oleh kondisi

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

tertentu yang harus dikonsultasikan lebih dulu ke Badan POM atau adanya gangguan sistem pada e-bpom dan/atau gangguan sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE).

12) Sejak tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohonan SKI/SKE.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian di tahun 2025 antara lain :

1) Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.
2) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
3) Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui Pelatihan/Bimtek.
4) Melaksanakan *desk CAPA* untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.
5) Evaluasi SKI/SKE dengan *service level arrangement (SLA)* maksimal 6 jam untuk SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa mengerjakan tugas yang lain.
6) Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan.
7) Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE.
8) Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
9) Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi *timeline*.
10) Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE selesai.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan belum mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian antara lain :
   a. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan depot jamu, penelusuran penyaluran obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Penelusuran Ozempic diduga palsu dan diversi obat keras ke perdagangan daring serta adanya temuan obat palsu di saryanfar yaitu Anti Tetanus Serum.
   b. Pada tahun 2023, inspeksi dalam rangka sertifikasi masih dihitung sebagai capaian dari IKU persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, sementara pada tahun 2024 fungsi inspeksi tidak lagi melakukan inspeksi sertifikasi CDOB yang menggunakan anggaran dari inspeksi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, inspeksi sertifikasi CDOB dilakukan menggunakan anggaran dari fungsi sertifikasi sedangkan untuk personel menggunakan personel gabungan antara personel fungsi sertifikasi dan inspeksi dikarenakan keterbatasan personel dari fungsi sertifikasi. Sehingga, capaian untuk sarana distribusi untuk tahun 2024 adalah murni dari pemeriksaan dalam rangka pengawasan rutin dan intensifikasi.

   Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian sarana distribusi antara lain Balai Besar POM di Surabaya dapat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan kepada sarana distribusi obat tradisional dan sarana pelayanan kefarmasian terkait legalitas produk yang dijual dan standar pelayanan kefarmasian melalui kegiatan pertemuan pembinaan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan. Koordinasi penguatan pengawasan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu mengidentifikasi dan merumuskan strategi pengawasan dan pembinaan bagi sarana yang dapat dilakukan bersama. Pemanfaatan grup whatsapp yang berisi Dinas Kesehatan se Jawa Timur dan Balai Besar POM di Surabaya untuk koordinasi dan diskusi dapat dilakukan agar tidak tergantung dengan pertemuan luring.

5. Indeks RB BBPOM di Surabaya belum mencapai target disebabkan beberapa hal terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut :
   a. Telah melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan pimpinan, namun dokumen monitoring dan evaluasi belum disajikan dengan lengkap termasuk atas kendala yang tindak lanjutnya akan dilakukan di periode selanjutnya, tidak terlihat progres atas kendala tersebut.
   b. Pada area penataan tatalaksana telah dilakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi pada administrasi pemerintahan dan telah terdapat Rencana Tindak Lanjut, namun belum terdapat bukti telah menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
   c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, namun belum menjelaskan telaah dan kendala yang ditemukan dalam proses penanganan pengaduan.
   d. Belum seluruh inovasi telah dianalisis dampak kemanfaatannya dalam peningkatan kinerja Unit Kerja sebelum dan setelah implementasi inovasi. Selain itu secara umum penjelasan inovasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) masih belum menjelaskan detail bentuk kegiatan.

   Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Indeks RB pada 2025 di antaranya:

1) Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas dengan menambahkan rencana aksi tindak lanjut atas kendala dan menceritakan progres tindak lanjutnya pada pelaporan monitoring dan evaluasi periode selanjutnya
2) Mendokumentasikan seluruh tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi pada administrasi pemerintahan
3) Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan optimal melalui laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang di dalamnya menjelaskan telaah dan kendala yang ditemukan dalam proses penanganan pengaduan
4) Melakukan analisis dampak sebelum dan setelah adanya inovasi terhadap peningkatan kinerja Unit Kerja pada seluruh inovasi yang dibangun dan memberikan penjelasannya secara detail termasuk bentuk inovasi pada LKE untuk penilaian tahun berikutnya
5) Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

6. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya belum mencapai target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :
   1) Terdapat pegawai dengan nilai predikat kinerja tahun 2023 kurang dari baik, yaitu 1 orang butuh perbaikan, 1 (satu) orang kurang dan 2 (dua) orang sangat kurang, rencana aksi yang telah dilakukan yaitu telah dilakukan pembinaan oleh ketua tim untuk pegawai tersebut sehingga terjadi peningkatan kinerja;
   2) Terdapat Pejabat Fungsional Tertentu Non PFM yang belum mengikuti pelatihan fungsional dari instansi Pembina yaitu : 1 (satu) orang Arsiparis Mahir, dan 3 (tiga) orang Perencana Ahli Pertama yang baru diangkat terhitung mulai tanggal 1 September 2024;
   3) Selain itu juga di sebabkan karena per tanggal 20 Juni 2024 Plt. Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan surat Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 Tentang pengukuran IP ASN Tahun 2023, dimana disampaikan bahwa terdapat perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Menindaklanjuti surat tersebut Biro Sumber Daya Manusia sebagai unit pengampu membuat Nota Dinas Kepala Biro SDM Nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Usulan Penyesuaian/Perubahan Target IP ASN Tahun 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan, terhadap surat usulan tersebut Biro Perencanaan membuat Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor KP.17.21.11.24.349 tanggal 26 November 2024 tentang Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Tahun 2024, dimana dalam nota dinas tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
      a. Target IP ASN BPOM Tahun 2024 sebesar 90,2 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BPOM yang diturunkan pada PK seluruh Unit Organisasi/Satker. Sesuai Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, disebutkan

bahwa PK dapat direvisi dalam hal terjadi: (1) pergantian/mutasi pejabat; (2) perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran; serta (3) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Namun terdapat mekanisme pelaporan kinerja yang menjadi ruang bagi Unit Organisasi/Satker untuk mendeskripsikan keberhasilan pencapaian kinerja;

b. IP ASN merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di BPOM, sehingga apabila dilakukan penyesuaian target, maka seluruh unit kerja harus melakukan revisi PK Tahun 2024 yang memakan waktu cukup panjang karena memerlukan proses pemutakhiran anggaran melalui aplikasi SIMETRIS serta pengesahan hingga level Kepala BPOM. Sementara itu, pengukuran kinerja harus dilakukan pada akhir Desember 2024 (B12), sehingga waktu yang ada terlalu singkat untuk melakukan perubahan target kinerja;

c. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka revisi target IP ASN pada PK 2024 dirasa belum perlu untuk dilakukan. Adapun realisasi kinerja IP ASN akan tetap dilaporkan pada Laporan Kinerja BPOM dan Unit Organisasi/Satker dengan menambahkan justifikasi terkait perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indicator tersebut. Selanjutnya, terkait Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil pengukuran NPSS tersebut.

Untuk meningkatkan capaian nilai Indeks Profesional ASN 2024, akan dilakukan beberapa upaya perbaikan yaitu melalui :

1) Dimensi kualifikasi (pendidikan), dengan mengusulkan pencatuman gelar bagi pegawai yang telah selesai TUBEL; dan pencatuman gelar untuk perolehan ijazah lebih tinggi bagi pegawai yang memperoleh kualifikasi pendidikan lebih tinggi tetapi tidak memiliki ijin TUBEL/IBEL tetapi telah mendapat ijin pemutihan dari Sekretaris Utama Badan POM;
2) Dimensi kinerja, dengan secara rutin dilakukan dialog kinerja antara ketua tim dan anggota tim untuk mengatasi kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja;
3) Dimensi kompetensi, dengan berkomunikasi/bersurat ke PPSDM pejabat fungsional yang belum diklat fungsional dapat segera diikutkan diklat di instansi pembina untuk mendukung peningkatan Indeks Profesionalitas ASN;
4) Dimensi disiplin, dengan melakukan sosialisasi peraturan disiplin saat apel manis dan memberlakukan *reward and punishment* melalui *Employee Of The Month*, Penghargaan Pegawai Berprestasi, dan penayangan video PINSIL.

7. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker) belum mencapai target dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun pertama penilian indikator ini sebagai Indikator Kinerja Utama dan target yang ditetapkan terlalu tinggi. Beberapa upaya perbaikan yang terus dilakukan Balai Besar POM di Surabaya agar dapat mencapai nilai yang maksimal sebagai berikut;

   a. Koordinasi dan komunikasi dengan penyedia Barang dan Jasa untuk melakukan upload dokumen pengriman di Aplikasi LPSE sehingga Pejabat Pembuat Komitmen bisa menilai dan menyelesaikan paket pengadaan;

b. Koordinasi dan Komunikasi dengan Pejabat pengadaan sehingga pengadaan tidak sampai terlambat atau bisa tepat waktu;
c. Segera melakukan Pemilihan penyedia terutama untuk belanja modal.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Surabaya	Plt. Kepala BPOM
Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.54 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.62 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.81 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.3 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.3 Persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89.42 Persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96 Persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.86 Persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.95 Indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	97 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persen
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.2 Persen
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138 Lembaga
		03 - Jumlah desa pangan aman	45 Lembaga
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30 Lembaga
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.74 Persen
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84.5 Indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.4 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.14 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.5 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Indeks RB UPT	95.23 Persen
		03 - Nilai AKIP UPT	85.25 Persen
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.5 Persen
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.86 Persen
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.31 Persen
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.43 Persen
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90 Persen
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 73,956,636,000 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	43,786,795,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	30,169,841,000

Surabaya, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Surabaya	Plt. Kepala BPOM
Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt.
Jabatan	: Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 02 January 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya	Plt. Kepala BPOM
Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt.	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.54 Persen
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.62 Persen
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.81 Persen
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85.3 Persen
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85 Persen
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.3 Persen
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89.42 Persen
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96 Persen
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 Persen
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.86 Persen
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.95 Indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	97 Persen
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persen
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.2 Persen
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138 Lembaga
		03 - Jumlah desa pangan aman	45 Lembaga
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30 Lembaga
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persen
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 Persen
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88.74 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Indeks
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84.5 Indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.4 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.14 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92.5 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Indeks RB UPT	95.23 Persen
		03 - Nilai AKIPUPT	85.25 Persen
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	96.5 Persen
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.86 Persen
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.31 Persen
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.43 Persen
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90 Persen
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persen

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 73,956,636,000 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	43,786,795,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	30,169,841,000

Surabaya, 02 January 2024

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt.

Pihak Kedua
Plt. Kepala BPOM

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	717,991,164
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	439,429,505
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	267,718,836
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	108,760,995
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	73,227,000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	43,840,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	415,450,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	676,694,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	504,901,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	833,679,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	68,116,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	0	10.8	31.1	50.8	60	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	97	420,728,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	23,670,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	12,236,950,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	5	23	43.1	50	60	68.1	75	85.8	95	138	874,874,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	10	22.5	40.63	52.5	62.5	71.25	80	85	95	45	1,313,847,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	3.3	15	41.1	52.9	66.2	72.9	82.9	100	100	30	592,760,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	985,710,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	10	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	548,190,500
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7.73	10.63	20.3	22.4	22.99	31.94	37.62	48.55	59.06	63.57	66.82	70	1,510,697,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.74	16,533,794,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	246,600,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.5	420,739,000

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.4	418,980,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.14	213,000,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.5	68,116,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.23	30,795,216,361
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.25	2,029,484,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	10,950,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.86	320,352,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	58	63	68	70	72	75	76	77	78	79	90.31	104,620,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.43	108,464,608
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	24,556,032
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	4,530,000
														Total	73,956,636,000

Surabaya, 22 December 2023

Kepala Balai Besar POM di Surabaya

Dra. Trikoranti Mustikawati, Apt.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	92.54	717,991,164
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	90.62	439,429,505
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	94.81	267,718,836
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3	108,760,995
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	73,227,000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	43,840,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	89.42	415,450,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	676,694,000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	504,901,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	70.86	833,679,000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	4.95	68,116,000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau	0	10.8	31.1	50.8	60	70.6	76.5	83.8	89.1	91.3	96	97	420,728,000
		pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik													
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	23,670,000
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	95.2	12,236,950,000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	5	23	43.1	50	60	68.1	75	85.8	95	138	874,874,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	10	22.5	40.63	52.5	62.5	71.25	80	85	95	45	1,313,847,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	3.3	15	41.1	52.9	66.2	72.9	82.9	100	100	30	592,760,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	11	20	27	35	45	55	65	75	85	95	100	985,710,000
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	10	20	30	38	45	55	65	75	85	95	100	548,190,500
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	7.73	10.63	20.3	22.4	22.99	31.94	37.62	48.55	59.06	63.57	66.82	70	1,510,697,000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.74	16,533,794,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	246,600,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.5	420,739,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.4	418,980,000
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.14	213,000,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.5	68,116,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.23	30,795,216,361
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.25	2,029,484,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	10,950,000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.86	320,352,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	58	63	68	70	72	75	76	77	78	79	90.31	104,620,000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.43	108,464,608
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	24,556,032
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	4,530,000
														Total	73,956,636,000

Surabaya, 02 January 2024

Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

BADAN POM

Buri Sri Sriyowati, S.Farm. Apt.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA
BADAN POM
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486
E-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_surabaya@pom.go.id | website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.15A.15A5.12.21. 3792 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat; persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; dan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan makanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabay dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Juli 2023
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
BADAN POM

(TRIKORANTI MUSTIKAWATI)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87,75
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86,80
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,03
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	150
		Jumlah desa pangan aman	47
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	32

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	92,20
		Nilai AKIP UPT	87,10
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	93,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	96,40

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA BADAN POM

TRIKORANTI MUSTIKAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR HK.02.02.15A.15A5.07.23.0324 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

TAHUN 2024

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Tren realisasi tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Usulan 2024
Target reviu renstra 2021	80,8	84	86,6	90	92,3	88,18
Realisasi	84,37	86,73	86,02	-	-	
Proyeksi Realisasi forecast	-	-	-	87,36	88,18	
Capaian	tercapai	tercapai	tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	

Terdapat kenaikan realisasi tahun 2021 dibanding tahun 2020, namun menurun di tahun 2022. Penurunan realisasi dan capaian dari tahun 2021 disebabkan karena adanya perbedaan kategori penandaan kosmetik 2D barcode di tahun 2021 dengan penandaan kosmetik di semester 1 dan semester 2 di tahun 2022. Dilihat dari tren realisasi IKU perbulan dari Januari hingga Juni 2023, terdapat kecenderungan penurunan realisasi IKU, hal ini disebabkan adanya kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan penandaan sebanyak 10 sampel dan obat tradisional yang tidak memenuhi syarat uji (Enterobacteriaceae, ALT) sebanyak 11 sampel. Ketentuan penandaan kosmetik yang dilanggar antara lain: alamat produsen tidak lengkap, hanya mencantumkan nama jalan tanpa nomor, tidak mencantumkan nama produsen, tidak ada nomor bets pada kemasan primer, dan tidak ada volume/berat. Jumlah sampel kosmetik hingga Juni 2023 sekitar 47 % dari sampel Obat secara keseluruhan, sehingga dengan banyaknya TMK Penandaan pada sampel kosmetik maka dimungkinkan akan terjadi penurunan IKU sampai akhir tahun, hal ini dimungkinkan karena tidak ada penilaian pre market terhadap kosmetik sebelum produk diedarkan.

b. Berdasarkan perhitungan proyeksi forecast maka diusulkan pernurun target Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun **2024** menjadi 88,18 namun penurunan target yang disetujui sebesar **91.**

2. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Tren realisasi tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Usulan 2024
Target reviu renstra 2021	-	88	89	90	90	81,11
Realisasi	-	97,69	84,44	-	-	
Proyeksi Realisasi forecast	-	-	-	88,57	81,11	
Capaian	-	tercapai	tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	proyeksi tidak tercapai	

IKU presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat muncul pada tahun 2021. Terjadi penurunan realisasi pangan fortifikasi dari tahun 2022 dibanding 2021 karena adanya perubahan lokasi sampling di daerah tinggi stunting dan adanya perubahan metode pengujian. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 dilakukan sampling di daerah stunting yaitu Kabupaten Bangkalan dan kota Surabaya, sehingga sampai dengan bulan Juni terdapat 8 sampel yang tidak memenuhi syarat uji garam 5 sampel dan 3 sampel tepung terigu (Fe). Pada semester 2 akan dilakukan sampling dan pengujian terhadap sampel minyak goreng sawit dengan fortifikasi vitamin A. Sehingga untuk tahun 2024 diusulkan untuk turun apabila penentuan lokasi telah ditentukan dengan prevalensi kasus stunting yang cukup tinggi.

b. Berdasarkan perhitungan proyeksi forecast maka diusulkan pernurun target pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun **2024** menjadi 81,11 namun penurunan target yang disetujui sebesar **87,75.**

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Berdasarkan kondisi capaian IKU BBPOM di Surabaya

Uraian	2020	2021	2022	Juni 2023	2023	2024	Usulan 2024
Target reviu renstra 2021	95	98	98,5	99	99	99,5	96
Realisasi	98,61	99,20	94,25	95,53	-	-	
Capaian	tercapai	tercapai	tidak tercapai	tidak tercapai	proycksi tidak tercapai	proycksi tidak tercapai	

Terdapat penurunan realisasi IKU mulai tahun 2022 dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Diperkirakan target tahun 2023 tidak dapat tercapai meskipun beberapa upaya sudah dilakukan. Realisasi Juni tahun 2023 hanya bisa meningkat sekitar 1% dibandingkan realisasi tahun 2022. Sehingga diusulkan target tahun 2024 juga naik 1 % dari realisasi Juni tahun 2023.

b. Permasalahan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah SDM di fungsi sertifikasi yang belum teratasi sebagai berikut : Jumlah pemohon SKI/SKE mengalami peningkatan tiap tahun sedangkan jumlah SDM yang melakukan evaluasi tetap. Jumlah pegawai sertifikasi hanya 9 orang dengan beban kerja tinggi sekitar 1500 sertifikat SKI/SKE per bulan, selain itu juga melakukan layanan publik berupa audit maupun pendampingan sekitar 50 UMKM per bulan karena adanya inovasi gempur jatim. Sehingga terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas dalam waktu bersamaan, misalnya melaksanakan audit sarana, dan evaluasi SKE/SKI, menerima konsultasi denah dan evaluasi SKE/SKI. Terdapat 1 orang pegawai sertifikasi yang akan pensiun per September tahun 2023, dan terdapat 2 orang yang sedang dalam kondisi sakit menahun. Upaya mutasi internal penambahan 1 pegawai di bulan Maret 2023 dan pemberdayaan mahasiswa magang hanya mampu menaikkan realisasi sebesar 1% di bulan Juni 2023 dibandingkan tahun 2022, karena pegawai yang baru belum memiliki kompetensi cukup untuk melakukan evaluasi SKI/SKE sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi.

c. Permasalahan sistem yang belum teratasi antara lain terdapat gangguan pada sistem e-bpom sehingga dokumen yang telah dikirim oleh pelaku usaha tidak dapat dievaluasi; Sistem e-bpom tidak dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali terlebih dahulu untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan; Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang menunjukkan kepada konsumen bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12 akan dikerjakan pada hari berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat; Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan SKI penolakan, SKI komoditi obat, kosmetik, lalu pangan; Sejak sistem e-bpom mulai migrasi dengan Pusat Data Nasional, seringkali terjadi kendala pada sistem sehingga mengganggu pemenuhan SLA yang telah ditetapkan.

d. Mulai tahun 2022, pelayanan publik terutama terkait permohonan sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Surat

Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (SPA CPKB), Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) menggunakan sistem online dimana waktu penyelesaian evaluasi dokumen yang telah diunggah juga harus sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga dengan keterbatasan petugas harus mampu membagi waktu melakukan evaluasi dokumen sertifikasi dan evaluasi permohan SKI/SKE

e. Dengan mempertimbangkan kondisi sistem/aplikasi yang tersedia, jumlah SDM dan kompetensinya, serta beban kerja, maka diusulkan penurunan target Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun **2024** menjadi **96**.

4. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Kondisi fungsi penindakan BBPOM di Surabaya dari tahun 2020 hingga 2023 sebagai berikut :

Uraian	2020	2021	2022	Juni 2023	2024	Usulan 2024
Target Reviu Renstra 2021	61	65	68	72	75	70
Realisasi IKU	66,52	68,73	68,06	38,14	-	
Proyeksi realisasi IKU menggunakan forecast	66,52	68,73	68,06	69,31	70,08	
Target Perkara	10	6	11	9	9 (diusulkan turun)	
Perkara Carry Over	17	23	15	12	perkara 2023 dan sisa carry over 2023	
Jumlah PPNS	9	9	9	8 (3 orang pensiun)	6	

Pada tahun 2023, sebanyak 3 orang PPNS di fungsi penindakan berturut-turut akan pensiun di bulan agustus, oktober, dan nopember. Pengganti hanya ada 1 orang mutasi masuk dari Balai lain yang diperkirakan kewenangan PPNSnya baru bisa dipakai tahun 2024. Sehingga PPNS yang tersedia pada tahun 2024 hanya 6 orang dengan target IKU sebesar 75. Rendahnya realisasi IKU di bulan Juni 2023 padahal target perkara sudah tercapai 8 perkara (kurang 1 perkara untuk memenuhi target output perkara 2023) menyebabkan kemungkinan target tahun 2023 tidak akan tercapai.

b. Dengan semakin kompleksnya permasalahan di Jawa Timur, maka perkara carry over juga semakin sulit untuk diselesaikan. Pada tahun 2023 terdapat 12 perkara carry over yang harus ditangani, sedangkan pada tahun 2024, diperkirakan perkara carry over jumlahnya semakin bertambah.

c. PPNS Badan POM dianggap tidak memiliki kewenangan oleh Polda Jatim dalam melakukan kegiatan penggeledahan karena kewenangan tersebut tidak tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga

PPNS BBPOM di Surabaya harus membuat surat permohonan bantuan penggeledahan ke Direktur Reskrimsus Polda Jatim saat akan melakukan kegiatan penindakan, dengan demikian diperlukan waktu lebih lama karena menunggu respon dari Polda Jatim. Dan adanya kemungkinan berkas perkara tidak dikirimkan ke Kejati Jawa Timur bila kegiatan penggeledahan dilakukan oleh PPNS BBPOM di Surabaya. Hal ini hanya terjadi di Jawa Timur.

d. Berdasarkan perhitungan forecast, berkurangnya jumlah PPNS, meningkatnya jumlah perkara carry over, dan hilangnya kewenangan penggeledahan PPNS BBPOM di Surabaya, maka diusulkan penurunan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun **2024** menjadi **70**.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI SURABAYA

(TRIKORANTI MUSTIKAWATI)

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan	Output			Input (Anggaran)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	394.553.000	348.165.494	88,24
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	19164	23213	100,00	1.271.106.000	1.158.671.877	91,15
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	40855	42683	100,00	12.830.560.000	12.792.096.101	99,70
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	3.043.933.000	2.936.206.757	96,46
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	110	117	100,00	420.739.000	420.738.912	100,00
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	768.466.000	768.449.750	100,00
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	16	100,00	209.180.000	209.179.500	100,00
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	56.943.000	55.939.000	98,24
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang	1	1	100,00	5.186.020.000	5.005.190.351	96,51

No.	Program/Kegiatan	Output			Input (Anggaran)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	sesuai Good Laboratory Practice						
10.	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	9	9	100,00	1.116.144.000	1.070.000.403	95,87
11.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00	633.934.000	497.780.522	78,52
12.	Desa Pangan Aman	45	45	100,00	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51
13.	Pasar aman dari bahan berbahaya	30	30	100,00	512.560.000	506.977.425	98,91
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	131	131	100,00	420.728.000	321.304.321	76,37
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	942	947	100,00	1.096.381.000	1.085.316.466	98,99
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2451	2459	100,00	1.971.420.000	1.892.214.807	95,98
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	110	110	100,00	73.227.000	48.165.696	65,78
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	432	443	100,00	487.801.000	487.586.126	99,96
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan	764	766	100,00	990.949.000	889.052.506	89,72

No.	Program/Kegiatan	Output			Input (Anggaran)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
	dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
20.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	11.047.774.000	10.066.556.848	91,12
21.	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	27.830.591.000	27.678.512.220	99,45

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA KEGIATAN TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI SURABAYA

No.	Program/Kegiatan	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE
1.	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	88,24	1,13	0,13	100 %
2.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	100,00	91,15	1,10	0,10	100 %
3.	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	100,00	99,70	1,00	0,00	100 %
4.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	100,00	96,46	1,04	0,04	100 %
5.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	100,00	100,00	1,00	0,00	100 %
6.	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	100,00	100,00	1,00	0,00	100 %
7.	Perangkat pengolah data dan komunikasi	100,00	100,00	1,00	0,00	100 %
8.	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	100,00	98,24	1,02	0,02	100 %

No.	Program/Kegiatan	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian TE
9.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	96,51	1,04	0,04	100 %
10.	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	100,00	95,87	1,04	0,04	100 %
11.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	78,52	1,27	0,27	95 %
12.	Desa Pangan Aman	100,00	98,51	1,02	0,02	100 %
13.	Pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	98,91	1,01	0,01	100 %
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	100,00	76,37	1,31	0,31	95 %
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	98,99	1,01	0,01	100 %
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	100,00	95,98	1,04	0,04	100 %
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	100,00	65,78	1,52	0,52	92 %
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	99,96	1,00	0,00	100 %
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	100,00	89,72	1,11	0,11	100 %
20.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	100,00	91,12	1,10	0,10	100 %
21.	Layanan Perkantoran	100,00	99,45	1,01	0,01	100 %

LAMPIRAN II

LAMPIRAN 1. DETAIL CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PER OUTPUT (TW IV)

No.	Program/Kegiatan/Output	Oktober						November						Desember					
		Volume			Anggaran			Volume			Anggaran			Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Progress Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Progress Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)	h	i	j=(i/hx100)	k	l	m=(l/kx100)	n	o	p=(o/nx100)	q	r	s=(r/qx100)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	11	78,56	394.553.000	305.069.045	77,32	14	12	85,7	394.553.000	314.801.445	79,79	14	14	100	394.553.000	348.165.494	88,24
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Dieleseikan oleh UPT	19164	19189	100	1.271.106.000	806.362.120	63,44	19164	21195	100	1.271.106.000	919.522.120	72,34	19164	23213	100	1.271.106.000	1.158.671.877	91,15
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	40855	42380	100	12.830.560.000	12.637.006.102	98,49	40855	42546	100	12.830.560.000	12.582.522.101	98,07	40855	42683	100	12.830.560.000	12.679.596.101	98,82
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	83,3	3.043.933.000	706.600.543	23,21	1	0	91,63	3.043.933.000	895.049.380	29,40	1	1	100	3.043.933.000	2.936.206.757	96,46
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	110	104	89,13	420.739.000	418.153.500	99,39	110	111	100	420.739.000	420.738.912	100,00	110	117	100	420.739.000	420.738.912	100
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100	767.646.000	763.449.750	99,45	1	1	100	768.466.000	763.449.750	99,35	1	1	100	768.466.000	768.449.750	100
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	16	100	210.000.000	209.179.500	99,61	16	16	100	209.180.000	209.179.500	100,00	16	16	100	209.180.000	209.179.500	100
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100	56.943.000	55.939.000	98,24	1	1	100	56.943.000	55.939.000	98,24	1	1	100	56.943.000	55.939.000	98,24
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	83.3	5.186.020.000	3.985.661.565	76,85	1	0	91,63	5.186.020.000	4.534.305.347	87,43	1	1	100	5.186.020.000	5.005.190.351	96,51
10	Perkara di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan di BBPOM Surabaya	9	9	100	1.116.144.000	949.394.633	85,06	9	9	100	1.116.144.000	1.007.644.633	90,28	9	9	100	1.116.144.000	1.070.000.403	95,87
11.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	0	86,15	633.934.000	424.804.862	67,01	138	138	100	633.934.000	440.212.862	69,44	138	138	100	633.934.000	497.780.522	78,52
12.	Desa Pangan Aman	45	0	85	1.254.377.000	944.111.100	75,27	45	0	95	1.254.377.000	995.388.585	79,35	45	45	100	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51
13.	Pasar aman dari bahan berbahaya	30	30	100	512.560.000	392.916.630	76,66	30	30	100	512.560.000	478.763.425	93,41	30	30	100	512.560.000	506.977.425	98,91
14.	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	131	0	91,56	420.728.000	281.354.321	66,87	131	0	96,33	420.728.000	282.624.321	67,18	131	131	100	420.728.000	321.304.321	76,37

No.	Program/Kegiatan/Output	Oktober						November						Desember					
		Volume			Anggaran			Volume			Anggaran			Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Progress Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Progress Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)	h	i	j=(i/hx100)	k	l	m=(l/kx100)	n	o	p=(o/nx100)	q	r	s=(r/qx100)
15.	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	942	875	92,89	1.096.381.000	767.157.067	69,97	942	935	99,26	1.096.381.000	855.373.977	78,02	942	947	100	1.096.381.000	1.085.316.466	98,99
16.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2451	2330	95,06	1.971.420.000	1.803.138.208	91,46	2451	2439	99,51	1.971.420.000	1.842.547.276	93,46	2451	2459	100	1.971.420.000	1.892.214.807	95,98
17.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	110	110	100	73.227.000	20.658.696	28,21	110	110	100	73.227.000	37.418.696	51,10	110	110	100	73.227.000	48.165.696	65,78
18.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	432	402	87,72	487.801.000	406.319.554	83,3	432	427	98,85	487.801.000	424.164.851	86,95	432	443	100	487.801.000	487.586.126	99,96
19.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	764	676	84,25	990.949.000	631.908.498	63,77	764	737	96,46	990.949.000	683.009.498	68,92	764	766	100	990.949.000	887.522.506	89,56
20.	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	20	11.047.774.000	1.778.763.250	16,1	1	0	65	11.047.774.000	7.119.939.250	64,45	1	1	100	11.047.774.000	10.066.556.848	91,12
21.	Layanan Perkantoran	1	0	83,3	27.969.841.000	22.540.438.758	80,59	1	0	91,63	27.830.591.000	24.615.821.822	88,45	1	1	100	27.830.591.000	27.658.428.280	99,38

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

LAMPIRAN 2. MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN IV

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (acak)	317.427.615	36	kali/trp	3	3	3	3	3	3	36	36	Pelajalanan sampel dilapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
						B	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM Dalam Manajemen Sampling Obat	6.020.000	1	kali/trp	0	0	0	1	1	0	1	1	
						C	Pertemuan Strategi dan Pemantapan Teknis Pengawasan Mutu Obat Beredar	5.732.000	1	kali/trp	0	0	0	0	1	1	1	1	
						D	Pelatihan Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.040.000	1	kali/trp	0	0	0	0	1	0	2	2	Reuasi
						E	Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan	6.020.000	1	kali/trp	0	0	0	0	1	1	1	1	
			Pengujian/Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	F	Pertemuan Regionalisasi Laboratorium dalam Rangka Sampling dan Pengujian Tahun 2024	10.920.000	1	kali/trp	0	0	0	0	1	1	1	1	
			Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	385.728.955	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	335.624.710	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
			Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	103.804.795	12	kali/trp	1	1	1	1	1	1	12	12	Pelajalanan sampel dilapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (targeted)	118.359.885	36	kali/trp	3	3	3	3	3	3	36	36	Pelajalanan sampel dilapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
			Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (targeted)	143.827.545	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	83.068.790	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
			Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (targeted)	25.692.205	12	kali/trp	1	1	1	1	1	1	12	12	Pelajalanan sampel dilapangan tidak dibedakan antara sampel acak dan target (setiap kali pengadaan dilapangan , sampel acak dan targeted diambil sekaligus
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Inspeksi	QIA.008.051	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel Pangan Fortifikasi	73.227.000	6	kali/trp	0	0	0	0	0	0	6	6	

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
2	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Infokom	BMB.001.051	Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	A	Penyebaran Informasi Melalui Media	420.739.000	110	Paket	6	6	5	7	4	6	110	117	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL TARGET	TOTAL REALISASI	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
3	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	B	Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan	155.500.000	2	kegiatan	1	1	0	0	0	0	2	2	
						C	Pelayanan Prima Pre-Audit Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	60.300.000	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	1	1	
			Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	C	Bimbingan Teknis Fasilitator Pendampingan UMKM Obat Tradisional	12.040.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	2	2	
						D	Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator	5.320.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	2	2	
						E	PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN PENERAPAN CPPOB/HACCP di UMKM	4.760.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Penggantian Kegiatan
						F	Perkuatan Lintas Sektor Dalam Pendampingan UMKM Pangan Olahan 2024	4.760.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Penggantian Kegiatan
						G	Klinik POM	171.060.000	6	kegiatan	1	2	1	1	1	1	6	6	
						H	Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan 2024	5.240.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Penggantian Kegiatan

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL TARGET	TOTAL REALISASI	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
3	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Infokom	BDC.001.051	Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh UPT	A	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Webinar Keamanan Obat dan Makanan	3.600.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Penggantian Kegiatan
						B	Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling	26.580.000	8	kali/trip	0	0	0	0	0	0	8	8	
						C	Penyebaran Informasi Keamanan Obat dan Makanan Melalui Pameran	58.995.000	2	kali/trip	1	1	0	0	0	0	2	2	
						D	Penyebaran Informasi dan Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan	28.065.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Kegiatan
						O	Pelatihan Peningkatan Kompetensi	5.360.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
						P	Koordinasi Teknis Antar Instansi	18.800.000	20	kali	2	2	1	1	1	1	20	20	
						Q	Pemantauan Toksikovigilan	69.600.000	3	kali/4 bulan	0	0	0	0	1	1	3	3	
						R	Sosialisasi Pelaporan Data Keracunan	2.000.000	0	kali/tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Kegiatan
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	27.700.000	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	1	0	
						E	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	18.600.000	40	kali/trip	4	4	4	4	0	0	40	34	
			Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	21.816.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	1	1	

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL TARGET	TOTAL REALISASI	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	D	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	11.220.000	6	kali/trip	0	0	1	1	0	0	6	6	
		Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	E	Tindak Lanjut Pengawasan Pengaduan Masyarakat	32.620.000	16	kali/trip	1	1	1	1	0	0	16	16	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	A	Koordinasi/Konsultasi/Join Inspection	77.290.000	14	kali/trip	1	1	1	1	0	0	14	14	
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	B	Koordinasi Lintas Sektor	39.200.000	20	kali/trip	2	2	2	1	0	0	20	20	
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	A	Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan Obat dan Makanan	295.900.000	58	kali	3	3	3	0	5	0	58	58	
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	E	Koordinasi lintas sektor	3.060.000	5	kali	0	0	0	0	5	3	5	5	
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	D	Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi	676.694.000	286	kali/trip	25	5	25	10	21	6	286	291	

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.001.055	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	A	Pemeriksaan Sarana Produksi OMKA	333.261.000	140	kali/trip	8	8	8	8	5	5	140	140	
					B	Pemeriksaan CPOB	104.400.000	9	kali/trip	1	1	1	1	0	0	9	9	
					C	Inspeksi Bersama Sarana Produksi (CPOB)	38.920.000	7	Kali/trip	1	1	0	0	0	0	7	7	
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	C	Training GMP Topik Khusus Bagi Inspektur CPOTB	4.240.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
					D	Peningkatan Kapasitas UPT melalui Forum Koordinasi dalam rangka percepatan/kemudahan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan mapping untuk UMKM naik tahapan CPOTB berdasarkan beberapa kriteria	6.020.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Kegiatan
					E	Workshop Monitoring Dan Evaluasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan	6.020.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	
					N	Supervisi Desk CAPA Tindak Lanjut Inspeksi CPKB	12.040.000	0	kali/trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Kegiatan

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Indikator		PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Inspeksi	QIC.004.053	Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekusor, makanan dan bahan berbahaya	A	Inspeksi Bersama	250.020.000	5	kali/thn	0	0	0	0	0	0	5	5	
					B	Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Dan Sanitasi, Pangan/ Penerapan CDOB/ Audit Komprehensif/ Aksi Penertiban Obat dan Makanan Ilegal	67.073.000	310	kali/thn	0	0	0	0	0	0	259	259	
					C	Pengawasan Kasus Khusus/Food Security	22.640.000	5	kali/thn	0	0	0	0	0	0	4	4	
					D	Pengawasan Perikanan	40.120.000	24	kali/thn	0	0	0	0	0	0	18	18	
					F	Pengawasan Penerapan Farmakovigilans	11.070.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Kegiatan
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	F	Pertemuan Koordinasi Inspektur OT dan SK dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	9.050.000	1	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	
					G	Bimbingan Teknis Inspektur Kosmetik	5.150.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Kegiatan
					H	Forum Komunikasi Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan OKPP	6.020.000	1	kali/thn	0	0	0	0	0	0	1	1	
					I	Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau untuk UPT BPOM di seluruh Indonesia (Acara back to back meeting dengan kegiatan Tim Kerja Pengawasan Mutu OKPP dan Tim Kerja Pengawasan Internal OKPP	4.350.000	1	kali/thn	0	0	0	0	0	0	1	1	Realisasi Anggaran
					J	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan Ikan dan Label Produk Tembakau bersama UPT BPOM	4.550.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran
					K	WORKSHOP PENGUATAN PENGAWASAN POST MARKET IKLAN DAN PENANDAAN OBAT UNTUK UPT DI SELURUH INDONESIA	5.732.000	1	kali/thn	0	0	0	0	0	0	1	1	
					L	Sosialisasi Regulasi di Bidang Obat	2.520.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran
					M	Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika	11.454.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran
					O	Advokasi Ke Pemda Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi dan Wilayah Prioritas Percepatan Penurunan Stunting terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi	8.250.000	0	kali/thn	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
15	Indeks Pelayanan Publik	Sertifikasi	BAH.001.051	Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	A	FORUM KOMUNIKASI PENERAPAN DAN PELAYANAN SKI/SKE DENGAN LINTAS SEKTOR	27.700.000	1	kegiatan	0	0	0	0	0	0	1	0	
					E	Pemeriksaan Sarana Dalam Rangka Permohonan SKE/SKI	18.600.000	40	kali/trip	4	5	4	5	0	4	40	40	
		Sertifikasi	BAH.001.052	Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	A	Peningkatan Kompetensi Pegawai	21.816.000	1	kali/trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Sertifikasi	QDG.001.051	Advokasi dan Pendampingan UMKM	A	GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) JATIM	298.248.000	73	kali/trip	9	9	9	0	0	0	73	73	
					B	SIPPOTra (Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional)	75.820.000	20	kali/trip	2	3	2	3	0	0	20	14	Revisi Anggaran & Kegiatan
					C	Jatim Glowing	46.660.000	10	kali/trip	1	1	1	1	1	1	10	16	
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	L	Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Laporan DAK NF POM UPT	4.630.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
		Inspeksi	QIC.004.055	Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	B	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik POM	19.040.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Anggaran & Kegiatan

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Infokom	BDC.001.051	Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	E	Penyuluhan Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan	1.578.970.000	20	kali	0	0	0	0	0	0	20	20	
					F	Sosialisasi Keamanan dan Penandaan Obat dan Makanan	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					G	KIE Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Label Obat Tradisional	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					H	Pemberdayaan Masyarakat Tentang Keamanan dan Manfaat Obat Tradisional	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					I	KIE Informasi Obat dan Makanan Melalui Website BPOM dan Aplikasi BPOM Mobile	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					J	Pemberdayaan Masyarakat tentang Keamanan, Mutu, dan Penandaan Obat	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					K	Sosialisasi Konsumen Cerdas Tolak Penyalahgunaan Obat	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	15	15	
					L	KIE Cerdas Memilih Kosmetika yang Aman dan Bermanfaat	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	13	13	
					M	Edukasi Konsumen tentang Bahan Berbahaya pada Pangan dan Kemasan Pangan	1.184.220.000	15	kali	0	0	0	0	0	0	10	10	
					N	KIE Pengawasan Bahan Berbahaya Pada Produk Kosmetik	1.184.220.000	16	kali	0	0	0	0	0	0	16	16	

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Infokom	QDB.001.051	Koordinasi lintas sektor	A	Koordinasi ke Kab/Kota Dalam Rangka Keamanan Pangan	161.480.000	20	kali/trip	0	0	0	0	0	0	12	12	
		Infokom	QDB.001.052	Intervensi keamanan PJAS	A	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	267.464.000	4	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	4	4	
					B	Pemeriksaan Keamanan PJAS	166.760.000	6	kali/trip	0	0	0	0	0	0	6	6	
					C	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	28.480.000	6	kali/trip	2	2	4	4	0	0	6	6	
					D	Pengawalan Sekolah yang Sudah Diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)	250.690.000	1	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
20	Jumlah desa pangan aman	Infokom	QDB.002.051	Perkuatan kapasitas desa	A	Advokasi Kegiatan Terpadu Program Desa, Sekolah dan Pasar	206.237.000	4	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	4	4	
		Infokom	QDB.002.052	Pemberdayaan komunitas desa	A	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	426.520.000	4	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	4	4	
					B	Bimtek Komunitas Desa dan Usaha Pangan Desa	325.450.000	8	Kali	0	0	0	0	0	0	8	8	
					C	Gerakan Pangan Aman Pedagang Kreatif Lapangan	94.760.000	2	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	2	2	
		Infokom	QDB.002.053	Pengawasan keamanan pangan desa	A	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa melalui kegiatan Mobling	88.320.000	16	Kali	4	8	0	0	0	0	16	16	
		Infokom	QDB.002.054	Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	A	Pengambilan Data/Survei Pre dan Post Intervensi Desa Pangan Aman	100.530.000	16	Desa	4	8	0	0	0	0	16	16	
					B	Pengawalan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya	64.690.000	1	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	1	1	
					C	PELATIHAN FASILITATOR UPT BPOM PENYULUH KEAMANAN PANGAN DALAM RANGKA PENDAMPINGAN	7.340.000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Infokom	QDB.003.052	Pengadaan peralatan pendukung	A	TEST KIT PASAR	181.980.000	6	Paket	0	0	0	0	0	0	6	6	
		Infokom	QDB.003.053	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis	A	Survey Pasar	28.800.000	6	Kali	0	0	0	0	0	0	6	6	
					B	Penyuluhan Pedagang Pasar	91.330.000	6	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	6	6	
					C	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dalam rangka Pengawasan Bahan Berbahaya	56.260.000	6	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	6	6	
					D	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	35.830.000	6	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	6	6	
					E	Pelatihan Fasilitator Pasar	84.880.000	1	Kali	1	0	0	1	0	0	1	1	
		Infokom	QDB.003.054	Pemantauan dan evaluasi	A	Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar	113.680.000	12	Pasar	2	6	0	0	0	0	12	12	

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
6	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Inspeksi	QIA.005.053	Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A	Pengadaan Sampel (acak)	435.787.500	20	kali/trip	0	0	1	1	0	0	20	20	
			Pengujian	QIA.005.055	Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen	A	Pengujian Laboratorium Sampel Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan (acak)	529.556.500	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
	23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Pengujian	QIA.001.053	Pengujian laboratorium sampel makanan	A	Pengujian Laboratorium Sampel Makanan (acak)	418.693.500	1	Paket Lelang	0	0	0	0	1	1	1	1	
			Inspeksi	QIA.001.055	Pengadaan sampel makanan	A	Pengadaan Sampel (acak)	129.497.000	10	kali/trip	0	0	1	1	0	0	10	10	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

Indikator		RI Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target ed. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	A.EA.001.052	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan ...	A	Perencanaan Penyusunan Analisis	720.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					B	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	11.673.000	2	kali	0	0	0	0	0	0	2	2	
					C	FGD Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	1.730.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	direalisasi untuk biaya pemusnahan
		Penindakan	A.EA.001.053	Penyidikan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	A	Rapat Perencanaan Penyidikan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	720.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					B	Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	2.800.000	12	kali	1	1	1	1	1	1	12	12	
					C	Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	20.250.000	3	kali	0	0	0	0	0	0	3	3	
					D	Eskalasi Kegiatan Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan	720.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	direalisasi untuk biaya pemusnahan
					E	Penyusunan Laporan Penyidikan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	720.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	direalisasi untuk biaya pemusnahan
		Penindakan	A.EA.001.054	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan ...	A	Koordinasi Lintas Sektor Penindakan Obat dan Makanan	31.350.000	2	kali	0	1	0	0	0	0	2	2	
					B	Pembentukan Petugas Analis Pencegahan Kejahatan	5.750.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	1	0	Realisasi Anggaran & Kegiatan
					C	Forum Komunikasi Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	5.750.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	1	0	
					D	Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Untuk Pengusian Intelijen di Daerah	10.310.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					E	Forum Koordinasi Intelijen	7.150.000	1	kali	0	1	0	0	0	0	1	1	
					F	Pendidikan, Pelatihan, dan Pembentukan PPNS Badan POM RI	11.520.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					G	Pembentukan Petugas Intelijen BPOM	5.750.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran & Kegiatan
					H	Pembentukan Petugas Intelijen Lanjutan BPOM	5.750.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi Anggaran & Kegiatan
					I	Workshop Intelijen Strategis	8.310.000	0	kali	1	0	0	0	0	0	1	0	Realisasi untuk Automatic Adjustment
					J	Pertemuan Perkusian Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan	5.750.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					K	Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan PPNS Badan POM	5.750.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					L	Diseminasi terhadap Analisa Hasil Kajian Pemantauan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal Secara Daring	6.250.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Realisasi untuk Automatic Adjustment
					M	Sosialisasi dan Bimtek ISO 27037-2012 tentang Digital Evidence Handling dan Updating Pedoman Siber	6.250.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	0	Realisasi Anggaran & Kegiatan
					N	Sosialisasi Fungsi dan Layanan BPOM Digital Investigation Center	6.300.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	1	0	Realisasi untuk Automatic Adjustment
					O	Penanganan Kasus Dengan Mekanisme Ultimum Remidium	8.310.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	1	0	
					P	Pemusnahan Barang Bukti/Barang Yang Disershkan/Barang Rusak	25.000.000	1	kali	1	0	0	0	0	0	1	1	
					Q	Sewa Gudang Untuk Barang Bukti	200.000.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penindakan	QCD.U09.051	Operasi Intelijen	A	Perencanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	6.030.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	direvisi untuk biaya pemusnahan
					B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Obat dan Makanan	236.196.000	9	kali	0	0	0	0	0	0	9	9	
					C	Evaluasi Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	4.824.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	direvisi untuk biaya pemusnahan
		Penindakan	QCD.U09.052	Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	6.030.000	9	kali	1	0	1	0	0	0	9	9	
		Penindakan	QCD.U09.053	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario	A	Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP	6.030.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	direvisi untuk biaya pemusnahan
		Penindakan	QCD.U09.054	Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	223.380.000	9	kali	1	0	0	0	0	0	9	9	
					B	Penangkapan dan Penahanan	71.820.000	0	kali	1	0	0	0	0	0	1	0	direvisi untuk biaya sewa RA
		Penindakan	QCD.U09.055	Pemberkasan	A	Pemberkasan	241.272.000	9	kali	1	2	1	0	0	0	9	9	
					B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	22.824.000	9	kali	1	2	1	0	0	0	9	9	
					C	Gelar Perkara	7.812.000	9	kali	1	4	1	0	0	0	9	9	
					D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	18.000.000	9	kali	1	2	1	2	1	0	9	9	
					E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	73.260.000	5	kali	1	2	0	1	0	0	5	5	
		Penindakan	QCD.U09.056	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A	Perencanaan dan Evaluasi Wasmatlitrik	9.792.000	0	kali	0	0	0	0	0	0	0	0	direvisi untuk biaya pemusnahan
					B	Pelaksanaan Wasmatlitrik	188.874.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	direvisi untuk operasi intelijen

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	A	Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBBM	153.040.000	4	kali	0	0	0	0	1	0	4	2	
					C	Pemeliharaan dan Peningkatan QMS	46.706.000	1	kali	0	0	0	0	0	0	1	1	Revisi Target
					K	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Badan POM	8.352.000	1	Kali/Trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
		Tata Usaha	CBV.001.051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	A	Renovasi Instalasi Pembuangan AirLimbah (IPAL)	56.943.000	1	Paket	0	0	0	0	0	0	1	0	
		Tata Usaha	EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	23.518.841.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Kebersihan dan Keamanan Kantor	1.940.944.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					B	Pemeliharaan Gedung Kantor	561.363.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					D	Pengadaan Keperluan Sehari-Hari	739.692.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					E	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	168.000.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	922.429.360	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					G	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	4.000.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					H	Pemeliharaan Sarana Gedung	163.180.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
					I	Kesehatan Pegawai	514.080.000	12	Kali	1	0	1	0	2	0	12	8	
					J	Langganan, Listrik, Air dan Telepon	1.530.000.000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
		Tata Usaha	CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A	Pengadaan Fasilitas Perkantoran	467.646.000	14	unit	0	0	0	0	0	0	14	14	

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	D	Forum Komunikasi Perencana BPOM	9.060.000	2	Kali	0	0	0	0	0	0	2	2	
					E	Rapat Evaluasi Nasional BPOM Tahun 2024	2.000.000.000	1	Paket	0	0	1	0	0	1	1	1	
					F	Rapat Kerja Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Rakernas BPOM)	8.052.000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
					H	Perencanaan dan Evaluasi	3.012.000	1	Paket	0	0	0	0	0	1	1	1	
		Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	D	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja, SAKIP dan Monev Online	9.360.000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	I	Pemusnahan	10.950.000	2	Kali	0	0	0	0	1	0	2	2	
9	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	M	Pelatihan Fungsional Non PFM	6.160.000	1	Kali/Trip	0	0	0	0	0	0	1	0	Revisi Target & Anggaran
			Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	B	Diklat untuk Pegawai Teladan	11.240.000	1	Kali/Trip	0	0	0	0	0	1	1	1	
						C	Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Perkuatan SDM Unggul	7.001.000	1	Kali/Trip	0	0	0	1	0	0	1	1	
						F	Pelatihan Dasar dan Rekruitmen CPNS dan CP3K	125.570.000	2	Kali	0	0	0	0	2	1	2	2	
						G	Peningkatan Kompetensi Pegawai	95.381.000	11	Kali	0	0	5	0	0	0	11	6	Revisi Target & Anggaran
						K	Awareness Documenting ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Suap)	75.000.000	1	Kali	0	1	0	0	0	0	1	1	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No		Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		SUB Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET / TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
											TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
10	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian	PDD 001 051	Peningkatan Kompetensi Pengujian Laboratorium	A	Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium Balai Besar/Balai Lab.	10 / 10 000	0	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
						B	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai/Balai Besar POM Kimia Obat Bahan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor Dan Zat Aktif	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						C	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						D	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Obat Tradisional Obat Kucing dan Suplemen Kesehatan	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						E	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian Mikrobiologi	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	0	0	
						F	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Kimia Pangan Obatan Dan Air tahap I	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						G	Bimbingan Teknis Pengujian	233 200 000	5	Kali	1	1	1	1	1	1	5	5	
						H	Pelatihan KI	42 510 000	1	Kali	1	1	0	0	0	0	1	1	
						I	Pelatihan Sistem Mutu	38 030 000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
						J	Peningkatan Kompetensi Pegawai	122 150 000	5	Kali	1	1	0	0	1	1	5	5	
						K	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM pengujian Mikrobiologi	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	1	1	1	1	2	2	
						L	Bimbingan teknis GSP-1 bahan kontak pangan obatan dan Cemaran Logam Mikotoksin Pewarna obatan	20 / 20 000	2	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	2	2	
						M	Workshop AFRL	10 / 10 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
			Pengujian	PDD 001 052	Pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian	A	Operasional Laboratorium	532 200 000	12	Kali	1	1	1	1	1	1	12	12	
						B	Pengadaan Suku Cadang dan Cbservasi	2 931 250 000	8	Paket	1	1	1	1	1	1	7	7	
			Pengujian	PDD 001 054	Peningkatan ruang lingkup pengujian	A	Kalibrasi Peralatan Laboratorium	37 750 000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
						B	Kalibrasi Eksternal Peralatan Laboratorium	305 000 000	1	Paket	1	1	1	1	0	0	4	4	
						C	Konsultasi Sistem Mutu	30 950 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						D	Survelan Laboratorium Pengujian oleh KAN/BSN	39 750 000	1	Kali	1	1	0	0	0	0	2	2	
						E	Pertemuan Teknis KAN	12 380 000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	
						F	Monitoring Evaluasi Efektifitas dan Efisiensi Penerapan Sistem Pengendalian Laboratorium	8 350 000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Anggaran
						G	Verifikasi Metode Analisis	50 000 000	5	Paket	0	0	0	0	0	0	5	5	
						H	Uji Profisiensi/Uji Banding	30 000 000	5	Paket	1	1	0	0	0	0	6	6	
						I	Uji Kolaborasi Metode Analisis	50 000 000	5	Paket	0	0	0	0	0	0	5	5	
			Pengujian	PDD 001 056	Pemantapan/Koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja	A	Forum Diseminasi hasil uji dan kajian Obat dan Makanan	11 820 000	1	Kali Ing	0	0	0	0	0	0	1	1	
						B	Rekonsiliasi dan Sosialisasi GLP	5 520 000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	
						C	Koordinasi dan Konsultasi	52 550 000	10	Kali Ing	1	1	1	1	1	1	6	6	
						D	Kegiatan Monev dan Produktivitas Kinerja	21 824 000			0	0	1	1	1	1			
			Pengujian	PAD 001 051	Pemenuhan/pengadaan alat laboratorium	A	Pengadaan Alat Laboratorium	11 347 774 000	1	paket	0	0	0	0	1	1	1	1	
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi B/BPOM di Surabaya yang optimal	Tata Usaha	SDA 994 002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C	Pemeliharaan Peralatan Kantor	38 800 000	12	Kali	1	0	1	0	1	0	12	9	
			Tata Usaha	CAN 001 051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	210 000 000	18	unit	0	0	0	0	0	0	18	18	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

	Indikator	PJ Kegiatan	Kode	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target s.d. TW IV	TARGET 1 TAHUN		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		TOTAL	TOTAL	Keterangan
										TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Pengujian	PDD.001.051	Peningkatan Kompetensi Penguji Laboratorium	A	Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium Balai Besar/Balai/Loka	10.110.000	0	Kali/Trip	0	0	0	0	0	0	0	0	Revisi Anggaran & Kegiatan
					B	Pengembangan Kemampuan Laboratorium Balai /Balai Besar POM Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	10.110.000	1	Kali/Trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
					C	Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik	10.110.000	1	Kali/Trip	0	0	0	0	0	0	1	1	
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	B	Penyusunan Laporan Keuangan dan Sosialisasi Peraturan Pengelolaan Keuangan bagi Bendahara	98.694.000	12	kali	1	1	1	1	1	1	12	12	
					J	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM	5.926.000	1	kali	0	0	0	1	0	0	1	1	
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	Tata Usaha	BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi	G	Peningkatan Kompetensi Pegawai	51.359.000	6	kali	0	0	0	1	0	1	0	3	Revisi Kegiatan & Anggaran
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	57.105.600	12	Kali	1	1	1	1	1	1	12	12	
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	I	Pemusnahan	10.950.000	3	Kali	0	0	0	0	1	1	3	3	
		Tata Usaha	EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	F	Terselenggaranya Operasional Perkantoran	13.606.040	12	Kali	1	1	1	1	1	1	12	12	
34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	Tata Usaha	BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	G	Sosialisasi Peraturan Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	4.530.000	1	Kali	0	0	0	0	0	0	1	1	

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

LAMPIRAN 3. REKAPITULASI KENDALA & RENCANA AKSI TRIWULAN IV

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **1. Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat**

Kegiatan : **QIA.005.053** **Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan**

QIA.005.055 **Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 93,04% dari target 92.54% (capaian 100,54%). Dari 1712 sampel yang masuk lab, 1537 sampel yang baru diuji oleh laboratorium dan yang belum diuji sebanyak 175 sampel	- Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 93,0% dari target 92.54% (capaian 100,49%). Dari 1775 sampel yang masuk lab, 1685 sampel yang baru diuji oleh laboratorium dan yang belum diuji sebanyak 90 sampel. IKU telah tercapai namun terdapat 118 sampel yang TMS dengan rincian 98 TMS Uji (OT=86, Kos= 9,obat=2 dan SK=1 sampel); 19 TMK Penandaan (OT=9 sampel,Kosmetik=5 sampel; obat=4 sampel dan SK= 1 sampel) dan 1 sampel TMK Penandaan sekaligus TMS Uji yaitu obat tradisional	- Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu dengan realisasi 93,07% dari target 92.54% (capaian 100,58%). Semua sampel yang masuk laboratorium telah dilakukan uji
Rekomendasi	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	Semua sampel yang masuk laboratorium telah diuji
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya, intervensi terhadap pabrik obat tradisional yang berada di wilayah Jawa Timur	Percepatan pengujian sampel obat acak di bulan berikutnya, intervensi terhadap pabrik obat tradisional yang berada di wilayah Jawa Timur	Sampel obat acak telah dilakukan pengujian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 1712 sampel obat acak yang disampling, baru dilakukan pengujian 1537 sampel	Dari 1775 sampel obat acak yang disampling, baru dilakukan pengujian 1685 sampel	belum semua sampel dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,04 %dari target 92.54% (capaian 100,54%)	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,0 %dari target 92.54% (capaian 100,49%)	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 93,07%dari target 92.54% (capaian 100,58%)
Status	Closed	Closed	Closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **2. Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat**

Kegiatan : **QIA.001.053** **Pengujian laboratorium sampel makanan**

QIA.001.055 **Pengadaan sampel makanan**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi indikator Presentase makanan yang memenuhi syarat terjadi penurunan dari bulan September yaitu 89,34% dari target 90.62 % (capaian 98,58%). Hal ini disebabkan dari 647 sampel yang diuji , 578 sampel Memenuhi syarat, 69 sampel sampel TMS dengan rincian 58 sampel TMS Uji, 7 sampel TMK Penandaan dan 4 sampel TMS Uji sekaligus TMK Penandaan	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi indikator Presentase makanan yang memenuhi syarat terjadi peningkatan dari bulan Oktober yaitu 89,73% dari target 90.62 % (capaian 99,01%). Hal ini disebabkan dari 739 sampel yang diuji , 663 sampel Memenuhi syarat, 76 sampel sampel TMS dengan rincian 62 sampel TMS Uji, 10 sampel TMK Penandaan dan 4 sampel TMS Uji sekaligus TMK Penandaan	- Realisasi indikator Presentase makanan yang memenuhi syarat tidak tercapai yaitu 89,83% dari target 90.62 % (capaian 99,13%). Hal ini disebabkan dari 957 sampel yang diuji , 680 sampel Memenuhi syarat, 77 sampel sampel TMS dengan rincian 62 sampel TMS Uji, 11 sampel TMK Penandaan dan 4 sampel TMS Uji sekaligus TMK Penandaan. Sebagian besar TMS uji disebabkan TMS uji mikrobiologi
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel dan intervensi untuk sarana yang berada di wilayah Jatim	Percepatan pengujian sampel dan intervensi untuk sarana yang berada di wilayah Jatim	Semua sampel yang masuk laboratorium telah diuji
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel makanan acak di bulan berikutnya	SSemua sampel pangan acak telah dilakukan pengujian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 721 sampel pangan acak yang disampling, telah dilakukan pengujian 578 sampel, belum selesai uji 74 sampel	Dari 745 sampel pangan acak yang disampling, telah dilakukan pengujian 739 sampel, belum selesai uji 6 sampel	belum semua sampel dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,34%dari target 90.62 % (capaian 98,58%)	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,72%dari target 90.62 % (capaian 99,01%)	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat 89,83%dari target 90.62 % (capaian 99,13%)
Status	open	open	Closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **3. Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu**

Kegiatan : **QIA.005.053** **Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan**

QIA.005.055 **Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai yaitu 94,48% dari target 94.81% (capaian 99,65%). namun belum semua sampel yang masuk ke laboratorium selesai di uji. Hal ini disebabkan dari 543 sampel obat yang di uji, 513 sampel memenuhi syarat, 30 sampel TMS dengan rincian 21 sampel TMS uji (OT=14; Kosmetik=6; obat=1) , 5 sampel TMK Penandaan (OT), 4 sampel TMK Penandaan dan TMS uji (OT)	- Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu 94,88% dari target 94.81% (capaian 100,07%). namun belum semua sampel yang masuk ke laboratorium selesai di uji. IKU di bulan Nopember telah tercapai namun dari 605 sampel yang diuji terdapat 31 sampel TMS dengan rincian 22 sampel TMS uji (OT=15; Kosmetik=6; obat=1) , 5 sampel TMK Penandaan (OT), 4 sampel TMK Penandaan dan TMS uji (OT)	- Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai yaitu 91,93% dari target 94.81% (capaian 96.96%). hal ini disebabkan dari 669 sampel yang diuji terdapat 54 sampel TMS dengan rincian 29 sampel TMS uji (OT=18; Kosmetik=8; obat=2; rokok 1) , 21 sampel TMK Penandaan (OT= 6; kos= 15); 4 sampel TMK Penandaan dan TMS uji (OT)
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	semua sampel telah dilakukan pengujian
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel obat di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel obat di bulan berikutnya	semua sampel telah dilakukan pengujian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 618 sampel obat targeted yang disampling, baru 543 sampel yang dilakukan pengujian , belum dilakukan pengujian sebanyak 75 sampel	Dari 664 sampel obat targeted yang disampling, baru 605 sampel yang dilakukan pengujian , belum dilakukan pengujian sebanyak 59 sampel	dari 669 sampel yang diuji terdapat 54 sampel TMS dengan rincian 29 sampel TMS uji (OT=18; Kosmetik=8; obat=2; rokok 1) , 21 sampel TMK Penandaan (OT= 6; kos= 15); 4 sampel TMK Penandaan dan TMS uji (OT)
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,48% dari target 94.81% (capaian 99,65%)	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,88% dari target 94.81% (capaian 100,07%)	Kondisi Desember - Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu 94,88% dari target 91,93% (capaian 96,96%)
Status	open	closed	closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **4. Persentase makanan yang aman dan bermutu**

Kegiatan : **QIA001.053** **Pengujian laboratorium sampel makanan**

QIA001.055 **Pengadaan sampel makanan**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi indikator Presentase pangan yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu 88,12% dari target 85.30 % (capaian 103,30%).	- Belum semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi indikator Presentase pangan yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu 86,25% dari target 85.30 % (capaian 101,11%). IKU di bulan Nopember telah tercapai namun dari 160 sampel yang di uji terdapat 22 sampel yang TMS Uji	- Semua sampel yang masuk di pengujian selesai diuji dan Realisasi indikator Presentase pangan yang aman dan bermutu telah tercapai yaitu 87,89% dari target 85.30 % (capaian 103,04%).
Rekomendasi Perbaikan	Percepatan pengujian sampel	Percepatan pengujian sampel	semua sampel telah dilakukan pengujian
Rencana Aksi	Percepatan pengujian sampel pangan targeted di bulan berikutnya	Percepatan pengujian sampel pangan targeted di bulan berikutnya	semua sampel telah dilakukan pengujian
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Dari 154 sampel pangan targeted yang disampling, telah dilakukan pengujian 101 sampel dan belum selesai uji 53 sampel	Dari 190 sampel pangan targeted yang disampling, telah dilakukan pengujian 160 sampel dan belum selesai uji 30 sampel	Belum semua sampel dilakukan pengujian
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 88,12%dari target 85.30 % (capaian 103,30%)	Kondisi Nopember - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 86,25%dari target 85.30 % (capaian 101,11%)	Kondisi Desember - Realisasi Persentase pangan aman dan bermutu 87,89%dari target 85.30 % (capaian 103,04%)
Status	closed	closed	closed

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat**

Kegiatan : **QIA.008.051** **Pengadaan sampel makanan**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%), telah dilakukan sampling pangan fortifikasi sejumlah 110 sampel (sesuai target tahun 2024) dan telah dilakukan pengujian sebanyak 110 sampel dengan TMS uji sebanyak 11 sampel (garam 5 sampel, MGS 6 sampel)	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%), telah dilakukan sampling pangan fortifikasi sejumlah 110 sampel (sesuai target tahun 2024) dan telah dilakukan pengujian sebanyak 110 sampel dengan TMS uji sebanyak 11 sampel (garam 5 sampel, MGS 6 sampel)	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat telah tercapai yaitu 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%), telah dilakukan sampling pangan fortifikasi sejumlah 110 sampel (sesuai target tahun 2024) dan telah dilakukan pengujian sebanyak 110 sampel dengan TMS uji sebanyak 11 sampel (garam 5 sampel, MGS 6 sampel)
Rekomendasi Perbaikan	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024
Rencana Aksi	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024	Semua sampel fortifikasi telah dilakukan sampling dan pengujian sejak bulan Juli 2024
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)	Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90 % dari target 85 % (capaian 105,88%)
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)	Kondisi Nopember Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)	Kondisi Desember Telah dilakukan sampling fortifikasi (garam) sebanyak 55 sampel dan 10 sampel tepung terigu dan minyak goreng 45 sampel. Semua sampel fortifikasi telah dilakukan pengujian. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 90% dari target 85 % (capaian 105,88%)
Status	Closed	Closed	Closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **6. Indeks Kesadaran masyarakat awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu**

Kegiatan : **BMB.001.051** **Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Kesulitan dalam memasang baliho karena masa kampanye	Masyarakat belum sepenuhnya terinformasi masalah stunting	Lintas sektor belum terpapar capaian Kinerja BBPOM di Surabaya sehingga belum memahami hasil yang dicapai termasuk yang telah dilaksanakan dengan lintas sektor
Rekomendasi Perbaikan	melakukan koordinasi dengan pihak ketiga	Dilakukan sosialisasi terkait stunting nulai penyebab hingga upaya pencegahannya dari para pakar	Dilakukan pertemuan lintas sektor untuk menyampaiakan capaan kinerja dan menghimpun masukan untuk peningkatan kinerja
Rencana Aksi	mencari tempat yang kira-kira masih memungkinkan untuk memasang baliho yang mudah dilihat masyarakat	Melakukan KIE stunting	Dilakukan Monev Pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor terkait
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kesulitan dalam memasang baliho karena masa kampanye	BBPOM di Surabaya elum melakukan KIE terkait stunting secara khusus	capaian kinerja BBPOM di Surabaya belum diketahui lintas sektor secara menyeluruh
Kondisi Setelah Rencana Aksi	bisa memasang baliho di tempat yang memungkinkan	Dilaksanakan KIE stunting oleh BBPOM di Surabaya	Lintas sektor telah mengetahui capaian kinerja dan memberikan masukan
Status	close	Close	close

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Kegiatan : BAH.001.051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tidak semua peserta mengisi survei kepuasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta terutama untuk kegiatan secara daring (online) dan pelaku usaha UMK	Tidak semua peserta mengisi survei kepuasan pelaku usaha sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan seluruh peserta terutama untuk kegiatan secara daring (online) dan pelaku usaha UMK	-
Rekomendasi Perbaikan	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/gimmick/modul)	-
Rencana Aksi	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online	1. Mengadakan desk konsultasi IP CPPOB, SPA CPKB, dan SPA CPOTB secara berkala 2. Mengadakan forum komunikasi terkait SKI/SKE secara berkala 3. Menyiapkan survei paperbased bagi pelaku usaha yang kesulitan mengisi survei online 4. Memberikan feedback untuk pelaku usaha yang mengisi survei (berupa sertifikat/gimmick/modul)	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulanSeptember dengan nilai 97,41	Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha untuk kegiatan bulan November dengan nilai 97,26	Cut off pengambilan data survei IKEPU pada 30 November 2024 sehingga tidak ada perubahan nilai IKEPU pada bulan Desember 2024
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: Terdapat hasil survei kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan untuk kegiatan desk IP CPPOB dan pre registrasi (klinik POM), desk CPKB dan CPOTB.	Kondisi Desember: -	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha sesuai surat Sekretaris Utama No. B-RK.02.2.12.24.940 tanggal 16 Desember 2024, Balai Besar POM di Surabaya mendapatkan capaian indeks 97.26 dari target 96.4
Status	open	open	closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **8. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan**

Kegiatan : QDC.001.051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat

QDC.001.052 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	masyarakat menanyakan kasus anggur muscat yang diduga mengandung pestisida ke BBPOM di Surabaya	Banyak keluhan pelaku usaha terkait layanan publik BBPOM Surabaya tidak jelas timelinenya.	Permintaan tim pengajar BPOM dalam rangka MBG, dengan peserta sekitar 7000 orang
Rekomendasi Perbaikan	memberikan informasi TL yang telah dilakukan oleh pemegang kewenangan pangan segar dan BPOM	Dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bahwa beberapa layanan publik tidak sepenuhnya kewenangan BBPOM Surabaya namun kewenangan Badan POM Pusat.	mencari informasi terkait pelaksanaan kegiatan
Rencana Aksi	mecari informasi terkait kasus anggur muscat dan TL yang telah dilakukan	Disampaikan kepada pelaku usaha melalui media sosial.	melakukan koordinasi dengan Unhan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	belum adanya informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat	Banyak keluhan pelaku usaha terkait timeline layanan.	belum ada informasi terkait pelaksanaan kegiatan mengajar dalam rangka MBG
Kondisi Setelah Rencana Aksi	telah ada informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat	Banyak keluhan pelaku usaha terkait timeline layanan.	ada informasi awal terkait pelaksanaan kegiatan mengajar dalam rangka MBG
Status	close	Open	close

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kegiatan : BAH.001.051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi

BAH.001.052 Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	BBPOM Surabaya belum melaksanakan KIE dengan tema khusus Stunting karena belum tersedia anggaran untuk KIE Stunting.	Pelaku usaha mengeluhkan perubahan aplikasi yang membuat layanan pendaftaran produk terhambat.	Sosialisasi tentang Pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media dirasakan masih sangat terbatas.
Rekomendasi Perbaikan	Dilaksanakan KIE dengan tema Stunting.	Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aplikasi pendaftaran produk tergabung dalam aplikasi OSS yang dikelola oleh BKPM untuk kemudahan ke depan.	Memperbanyak frekwensi sosialisasi melalui berbagai media bekerja sama dengan penyedia jasa dan lintas sektor (Dinas Kominfo)
Rencana Aksi	Telah diagendakan KIE dengan Tema Stunting dengan mengundang narasumber pakar yang kompeten.	Membuat pengumuman di media sosial terkait kendala aplikasi.	Menggunakan moda transportasi yang bayak digunakan masyarakat sebagai media sosialisasi (Bus Tras Jatim).
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Belum pernah dilaksaakan KIE dengan Tema Stunting.	Banyak keluhan pelaku usaha.	Media moda transportasi belum dimanfaatkan untuk sosialisasi.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	BBPOM Surabaya telah menjadwalkan pelaksanaan KIE dengan tema Stunting.	Keluhan berkurang.	Moda transportasi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi.
Status	Close	Close	Open.

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan

Kegiatan : QIC.001.055 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya

QIC.004.053 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	-Terdapat 1 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dibulan September untuk dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak melewati batas timeline.	-Terdapat 3 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dibulan September untuk dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak melewati batas timeline.	-Terdapat 1 rekomendasi hasil pemeriksaan sarana dibulan September untuk dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sehingga tidak melewati batas timeline.
Rekomendasi Perbaikan	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana bulan September dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Teguran secara lisan maupun tertulis tertulis kepada petugas
Rencana Aksi	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana	- Percepatan penyelesaian pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang sudah timeline - Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas	- Belum dibuatnya surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas
Kondisi Setelah Rencana Aksi	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress September : Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 99,61 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 102,38% - Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Oktober	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress Oktober : Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 98,07 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 100.79% - Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Nopember	- Belum optimal penyelesaian surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana - Progress Nopember: Realisasi persentasi keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didapatkan 98,25 % dari target 97,30% sehingga diperoleh capaian 100.97% - Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Desember
Status			

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

Kegiatan : **QIC.004.055** **Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana**

BAH.001.051 **Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi**

BKB.001.052 **Pelaksanaan koordinasi**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan - Terdapat 8 surat tindak lanjut pemeriksaan sarana belum diberikan feedback oleh sarana	- Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan - Terdapat 9 surat tindak lanjut pemeriksaan sarana belum diberikan feedback oleh sarana	- Kurangnya kesadaran dan tidak adanya peraturan atau sangsi yang mewajibkan pemangku kepentingan untuk memberikan feedback / mengirimkan CAPA/ tindakan perbaikan - Terdapat 9 surat tindak lanjut pemeriksaan sarana belum diberikan feedback oleh sarana
Rekomendasi Perbaikan	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana	- Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback / mengirimkan CAPA - Monev terhadap feedback / CAPA dari pelaku usaha dan lintas sector - Berkirim surat kembali terkait permintaan CAPA/Tindakan perbaikan ke sarana
Rencana Aksi	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	- Dilakukan sosialisasi oleh petugas pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan	pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha/ dan lintas sektor agar memberikan feedback - Meningkatkan monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sector - Konfirmasi/menanyakan secara terus menerus melalui telepon dan whatsapp ke pelaku usaha dan DinKes terkait feedback/ CAPA dari surat tindak lanjut yang sudah dikirimkan
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 99,07 % dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 110,80 % Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Oktober	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 100,99 % dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 112,94 % Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Nopember	Pelaku usaha belum optimal memberikan respon terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan petugas BBPOM Surabaya Progress Juli : Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan 94,43% dari target 89,42% , sehingga terjadi peningkatan % capaian yaitu 105,60% Diharapkan % capaian bisa ditingkatkan lagi di bulan Desember
Status			

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Kegiatan : **BAH.001.051** **Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	1. % keputusan sertifikasi di bawah target IKU	1. % keputusan sertifikasi di bawah target IKU	1. % keputusan sertifikasi di bawah target IKU
Rekomendasi Perbaikan	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan	1. Mengatur kembali jadwal penugasan sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Mengevaluasi penerbitan SKI/SKE dan mengajukan rekomendasi SKI/SKE prioritas
Rencana Aksi	1. Pengaturan jadwal penugasan	1. Pengaturan jadwal penugasan	1. Pengaturan jadwal penugasan 2. Mengajukan rekomendasi SKI/SKE prioritas ke Direktorat ke Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah petugas sertifikasi	1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah petugas sertifikasi	1. Petugas sertifikasi seringkali melakukan lebih dari satu tugas dalam waktu bersamaan 2. Keterbatasan jumlah petugas sertifikasi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU	1. Dilakukan pengaturan jadwal sehingga meminimalisir lebih dari satu tugas dikerjakan secara bersamaan 2. Terjadi tren peningkatan capaian % keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu namun masih di bawah target IKU
Status	open	open	open

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Kegiatan : **QIC.001.053** **Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana**

QIC.001.055 **Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	IKU persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yaitu realisasi 71.68%, meskipun masih terdapat beberapa sarana produksi yang diperiksa dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan 1. Terdapat 1 pemeriksaan sarana produksi obat/Industri Farmasi hasil Tidak Memenuhi Ketentuan, dikarenakan sarana tersebut mempunyai komitmen sarana terhadap ketentuan CPOB rendah 2. Terdapat beberapa sarana pangan tidak konsisten dalam menerapkan CPPOB (sanitasi higiene, dokumentasi tidak lengkap) dan ditemukan temuan kritis terkait pengendalian hama, dan 2 sarana yng tidak bisa diperiksa karena tutup dan pengajuan proses pindah alamat 3. Temuan kritis pada sarana produksi kosmetik 4. Terdapat temuan krtis pada sarana produksi UKOT dikarenakan memproduksi obat bahan alam TIE	IKU persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yaitu realisasi 71.93%, dan mengalami kenaikan dibanding bulan Oktober. Terdapat 1 pemeriksaan sarana produksi UKOT dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan, dikarenakan sarana tersebut mempunyai komitmen sarana terhadap ketentuan CPOTB rendah	IKU persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yaitu realisasi 71.98%, dan mengalami kenaikan dibanding bulan November. IKU persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan telah tercapai sampai akhir tahun. Beberapa catatan pada capaian IKU ini adalah masih tidak tercapainya untuk sarana produksi Obat, UKOT dan UMOT dikarenakan kurangnya komitmen sarana/pelaku usaha dalam penerapan CPOB dan CPOTB
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	Melakukan pembinaan ke industri untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.
Rencana Aksi	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.	Melakukan monev IKU Sarana Produksi setiap bulan agar IKU tercapai di akhir tahun.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,68 % dengan capaian 102.40%	Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,93 % dengan capaian 102.76%	Realisasi Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan 71,98 % dengan capaian 102.83%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi Oktober : - 1. Diharapkan IKU tetap tercapai sampai akhir tahun dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara produksi yang baik	Kondisi November : - 1. Diharapkan IKU tetap tercapai sampai akhir tahun dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara produksi yang baik	Kondisi Desember : - IKU Persentase Sarana Produksi Yang Memenuhi Ketentuan dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait cara produksi yang baik
Status	Close	Close	Close

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Kegiatan : QIC.004.053 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya

QIC.004.055 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	IKU persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yaitu realisasi 66.12%, meskipun meskipun mengalami kenaikan di bulan Oktober : 1. Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan total 30 sarana yang diperiksa dengan hasil 20 Memenuhi Ketentuan dan 10 Tidak Memenuhi Ketentuan. Diantaranya dikarena adanya temuan berulang di sarana Instalasi Farmasi Kab/Kota, sarama distribusi pbf tidak memenuhi ketentuan terkait aspek cdob 2. Adanya temuan produk kosmetik tie (tanpa izin edar) di sarana distibusi kosmetik	IKU persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yaitu realisasi 67.07%, meskipun mengalami kenaikan di bulan November : 1. Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dengan total 25 sarana yang diperiksa dengan hasil 14 Memenuhi Ketentuan dan 9 Tidak Memenuhi Ketentuan dan 2 tutup. Diantaranya dikarena adanya temuan berulang di sarana Instalasi Farmasi Kab/Kota, sarama distribusi pbf tidak memenuhi ketentuan terkait aspek cdob 2. Sarana Distribusi OT dari 5 yang diperiksa dengan hasil 3 TMK dan 2 MK dikarenakan adanya kegiatan Inwas (adanya temuan OT TIE)	IKU persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan belum mencapai target yaitu realisasi 66.75%, mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan November : 1.Terdapat pemeriksaan 7 sarana PBF dengan hasil 1 MK dan 6 TMK, 2. Sarana Distribusi OT dari 5 yang diperiksa dengan hasil 3 TMK dan 2 MK dikarenakan adanya kegiatan Inwas (adanya temuan OT TIE) 3. Pemeriksaan 1 sarana distribusi kosmetik dan 1 sarana Penotifikasi dengan hasil TMK dikarenakan adanya kosmetik TIE Secara umum Sarana Distribusi Obat, Saryanfar, Distribusi Obat Tradisonal dan Distribusi Pangan merupakan sarana yang menyebabkan IKU persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan tidak tercapai
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan.	1. Melakukan pembinaan ke sarana untuk segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan. 2. Melakukan Desk CAPA terhadap sarana PBF dan Sarana Distribusi Pangan
Rencana Aksi	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA 3. Telah dilaksanakan pelatihan CDOB di bulan Oktober di Surabaya oleh PPSDM	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA	1. Melakukan monev capaian IKU sarana distribusi setiap bulan 2. Melakukan pembinaan ke sarana untuk dapat segera membuat CAPA terhadap pemeriksaan yang telah dilakukan melalui desk CAPA
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.12 % dengan capaian 93.32%	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 67.07 % dengan capaian 94.66%	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.75 % dengan capaian 94.21%
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November : - Diharapkan terjadi peningkatan IKU dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait pengelolaan obat maupun di sarana peredaran	Kondisi Desember : - Diharapkan terjadi peningkatan IKU dengan adanya pemahaman pelaku usaha terkait pengelolaan obat maupun di sarana peredaran non obat	Kondisi Desember : - IKU Persentase Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan 66.75 % dengan capaian 94.21%
Status	Close	Close	Close

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 15. Indeks Pelayanan Publik

Kegiatan : BAH.001.051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi

BAH.001.052 Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Banyak UMKM yang merasa kesulitan saat mengurus izin edar di BPOM.	Pelaku usaha mengeluhkan perubahan aplikasi yang membuat layanan pendaftaran produk terhambat.	Sosialisasi tentang Pengawasan Obat dan Makanan melalui berbagai media dirasakan masih sangat terbatas.
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan pendampingan kepada UMKM setelah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan kapasitas UMKM).	Memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa aplikasi pendaftaran produk tergabung dalam aplikasi OSS yang dikelola oleh BKPM untuk kemudahan ke depan.	Memperbanyak frekwensi sosialisasi melalui berbagai media bekerja sama dengan penyedia jasa dan lintas sektor (Dinas Kominfo)
Rencana Aksi	Melakukan upaya jemput bola dengan meminta data UMKM kepada Pemerintah Daerah yang perlu dilakukan pendampingan.	Membuat pengumuman di media sosial terkait kendala aplikasi.	Menggunakan moda transportasi yang bayak digunakan masyarakat sebagai media sosialisasi (Bus Tras Jatim).
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Banyak UMKM yang kesulitan melakukan pengurusan izin edar ke BPOM.	Banyak keluhan pelaku usaha.	Media moda transportasi belum dimanfaatkan untuk sosialisasi.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Sebagian UMKM telah diberikan pendampingan pengurusan izinn edar di BPOM.	Keluhan berkurang.	Moda transportasi dimanfaatkan sebagai media sosialisasi.
Status	Open	Close	Open.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Kegiatan : **BDG.001.051** **Advokasi dan Pendampingan UMKM**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik yang mengajukan akselerasi sertifikat CPKB	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik yang mengajukan akselerasi sertifikat CPKB	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Terdapat UMKM Kosmetik peserta akselerasi CPKB yang belum dapat menyelesaikan tahapan akselerasi CPKB. 4. Persyaratan dasar seringkali tidak dimilikioleh pelaku usaha, seperti KBLI yang sesuai, NPWP yang terintegrasi dengan OSS dan/atau berstatus KSWP valid.
Rekomendasi Perbaikan	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan sertifikasi CPKB 6. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2024, Jatim Glowing 2024, dan Sippotra 2024	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2024, Jatim Glowing 2024, dan Sippotra 2024	1. Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat, serta melakukan pendampingan secara intensif 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SKPA CPOTB Bertahap dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SKPA CPOTB Bertahap, serta melakukan pendampingan secara intensif 4. Memberikan contoh dokumen untuk pemenuhan persyaratan SPA CPKB dan menginformasikan hal-hal utama terkait persyaratan SPA CPKB, serta melakukan pendampingan secara intensif 5. Responsif dalam menjawab pertanyaan di Grup Gempur Jatim 2023, Jatim Glowing 2023, dan Sippotra 2023
Rencana Aksi	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM	1. Mengadakan pendampingan kepada pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan melalui kegiatan desk konsultasi dan registrasi 2. Memberdayakan mahasiswa magang untuk membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan dokumen. 3. Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor yang memiliki perhatian lebih terhadap UMKM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)	1. Peningkatan UMK pangan olahan yang mengajukan izin edar sedangkan pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar terbatas. 2. UMKM obat tradisional kesulitan dalam proses perizinan obat tradisional, khususnya dalam tahapan sertifikasi CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM kosmetik start up termasuk industri kosmetik dan pemohon notifikasi kosmetik yang belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam pengurusan izin edar kosmetik (notifikasi)
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan Sertifikat CPKB	Kondisi Desember: 1. Peningkatan jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP CPPOB dan izin edar 2. Peningkatan jumlah UMKM Obat Tradisional yang memperoleh sertifikat CPOTB bertahap 3. Peningkatan jumlah UMKM Kosmetik yang memperoleh SPA CPKB dan rekomendasi PNK	-
Status	Open	Open	Close

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 17. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Kegiatan : QDC.001.051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	KIE Stunting, Ayo Buang sampah Obat serta sosialisasi kineja BBPOM di Surabaya belum dilaksanakan	Materi KIE melalui media sosial dirasakan belum menarik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah viewer pada media sosial BBPOM Surabaya.	KIE kepada kelompok rentan masih sangat terbatas.
Rekomendasi Perbaikan	dicarikan waktu agar dapat dilakukan dg efektif dan efisien mengingat keterbatasan anggaran	Melakukan peningkatan kompetensi bagi Tim Media Sosial agar mampu membuat konten yang menarik.	Melakukan KIE kepada kelompok rentan.
Rencana Aksi	melakukan diskusi dan kesepakatan dg bagian/substansi terkait	Menginventarisir penyedia pelatihan yang ada.	Membuat perencanaan KIE untuk kelompok rentan pada tahun 2025.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	beberapa kegiatan KIE non tomas	Belum dilakukan pelatihan.	Belum ada perencanaan KIE untuk kelompok rentan.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kegiatan direncanakan bulan november	Belum dilakukan pelatihan karena tidak tersedia anggaran.	Dibuat perencanaan KIE untuk kelompok rentan (Jika tersedia anggaran).
Status	Close	Open	Open

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Kegiatan : QDB.001.051 Koordinasi lintas sektor

QDB.001.052 Intervensi keamanan PJAS

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kendala. Tahapan kegiatan masih dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Status	Close	CLOSE	CLOSE

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 19. Jumlah desa pangan aman

Kegiatan : QDB.002.051 Perkuatan kapasitas desa

QDB.002.052 Pemberdayaan komunitas desa

QDB.002.053 Pengawasan keamanan pangan desa

QDB.002.054 Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Test kit uji bahan berbahaya belum dimanfaatkan dengan baik oleh desa	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan
Rekomendasi Perbaikan	Koordinasi dengan tim dan kader desa untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan tahap 2	-	-
Rencana Aksi	Semua desa diberi target untuk melakukan pengawasan keamanan pangan tahap 2 sebanyak 50-60 sampel secara mandiri bersamaan dengan kegiatan fasiltasi tahap 2	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Desa belum memanfaatkan test kit dengan baik	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Test kit sudah dimanfaatkan dengan baik untuk pengawasan keamanan pangan desa	-	-
Status	CLOSE	CLOSE	CLOSE

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator :	**20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**	
Kegiatan :	**QDB.003.052**	**Pengadaan peralatan pendukung**
	QDB.003.053	**Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya**
	QDB.003.054	**Pemantauan dan evaluasi**

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tidak ada kendala. Tahapan kegiatan masih dapat dilaksanakan sesuai target waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan	Tidak ada kendala, tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai batas waktu yang telah di tetapkan
Rekomendasi Perbaikan	-	-	-
Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Status	Close	CLOSE	CLOSE

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Kegiatan : QIA.005.053 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan

QIA.005.055 Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehata

Keterangan	Oktober	November	Desember
Kendala / Permasalahan	1.Dibutuhkan ruangan khusus untuk menampung limbah sisa uji sampel sitotoksik, saat ini limbah sitotoksik dikemas dalam plastik bertanda khusus dan diletakkan pada lab sitotoksik kimia sembari menunggu masa pemusnahan. Hal ini membuat laboratorium sitotoksik kimia penuh, mengganggu kas laboratorium yang ada tetapi juga jumlah limbah sitotoksik dari lab kimia dan mikrobiologi yang cukup volumenus 2.Salah satu kasus ini dari bimek uji sterilitas obat antineoplastik yang masih dipertahankan pengujian tambahan untuk kelengkapan data verifikasi sekaligus membutuhkan tambahan sampel obat antineoplastik 3.Berdasarkan tahun lalu dengan teknisi ESCO didapatkan info bahwa isolator ini membutuhkan perawatan berkala sebagai berikut : a. Kalibrasi H202 sensor (untuk memastikan sistem dekontaminasi berjalan sesuai) dilakukan setiap 6 bulan, dengan kisaran biaya +/- 16 juta b. Kalibrasi performa kinerja dilakukan setiap tahun dengan kisaran biaya 10-15 juta c. Kalibrasi full paket (semua sensor plus performa kinerja) setiap tahun dengan kisaran biaya 100 juta Kalibrasi diatas belum dimasukkan di perencanaan 2025 4.Limbah kasus pengujian sampel obat antineoplastik belum memiliki tempat penyimpanan terpisah dan belum bisa dilakukan pembuangan/pemusnahan pihak ke-3 karena harus melalui vendor yang terkait verifikasi limbah ruangan limbah B3 5.Penggantian filter di clean room ruang uji sterilitas belum dapat dilakukan karena vendor yang ditunjuk (PT Mega Teknik) melakukan kesalahan dalam melihat spesifikasi filter, sehingga filter yang datang tidak dapat digunakan 6.Terdapat 1 filter yang belum dilakukan penggantian di ruang isolator karena vendor juga salah melihat spesifikasi (pesanan yang sama yaitu PT Mega Teknik) sehingga mengakibatkan suhu di ruang isolator tidak memenuhi spesifikasi lalat dan alarm alat menyala terus 7.SPU Sampel KLB dari Balai Kediri sebanyak 17 sampel hingga saat ini belum ada, padahal sampel sudah selesai uji 8.Sampel sisa pasien yang berasal dari Inbokom seringkali masuk ke lab belum dilengkapi dengan SPU dan sampel hanya dititipkan ke driver atau CS, sehingga kadang adanya miss antara nos sampel dan SPU yg dikirimkan setelahnya 9.CS yang ada sekarang sering kewalahan dalam penyelesaian pencucian alat gelas, sterilisasi hingga destruksi yang mengakibatkan pekerjaan pembersihan ruangan lain (ruang staff, KIM, musholla) tidak dapat dilakukan. Pembersihan alat gelas juga seringkali kurang optimal sehingga harus dilakukan pencucian ulang atau mempengaruhi kasil uji.	1. Beberapa lampu di ruang uji potensiometri, ruang endotoksin, ruang laktobasilus dan sterilitas mati 2. Saluran pembuangan tempat cucian kotor yang baru sering liber ke area parkir mobil	1. HPLC titanes di lab kosmetik mengalami kerusakan 2. AAS membutuhkan pembelian sumber cadang untuk uji Hg 3. Microwave untuk persiapan AAS di lab kosmetik mengalami kerusakan 4. Data pengujian di Regional Surabaya tidak tertib dalam menginput tanggal selesai uji pada link rekap regional yang mengakibatkan terjadi kesalahan jumlah sampel selesai uji saat penginputan data untuk RHPK tiap bulannya, sehingga data RHPK selalu berubah dan mempengaruhi data Laporan Kinerja Internal
Rekomendasi Perbaikan	1.Dilokasikan ruangan khusus yang terlindung dari cuaca untuk menampung sementara limbah sitotoksik 2.Pembuatan nota dinas permohonan sampel obat antineoplastik ke Inspeksi 3.Perencanaan perawatan berkala akan dibahas dengan PPK terlebih dahulu 4.Sudah berkomunikasi dengan TU, akan dibantu vendor yang sesuai di awal tahun depan. Untuk penyimpanan limbah B3 sementara diletakkan di lab uji antineoplastik lab obat, tapi kedepannya membutuhkan tempat penyimpanan terpisah. 5.Sudah mencari vendor tanpa penggantinya (PT Infittaco) mendapatkan penawaran sebesar Rp 80.586.000. Anggaran untuk tahun ini sudah tidak ada. 6.Berkomunikasi ke vendor lain (PT Infittaco) untuk cek filter di ruang isolator tersebut atau ke PT Mega Teknik untuk melakukan cek ulang spesifikasi. Anggaran sudah tidak ada. 7.Sudah berkomunikasi ke kantim 8.Sudah berkomunikasi ke Inbokom 9.Sudah berkomunikasi ke kantim, kepewakilan penerima pekerjaan CS di lab dan ke TU.	1.Sudah melaporkepada Bagian Tata Usaha 2.Sudah melaporkepada Bagian Tata Usaha	1.Telah dilaporkan ke PPK dan telah menginformasi penyedia, menunggu proses perbaikan 2.Telah dilaporkan ke PPK 3.Telah dilaporkan ke PPK dan telah menginformasi penyedia, menunggu tekuisi untuk pengecekan bagian yang mengalami kerusakan 4.Tahun 2025 akan dibuat kesepakatan maksimal pengiriman Link rekap regional dan setelah tanggal tersebut tidak akan dikunci, bila ada perbaikan harus ada justifikasi yang jelas dari Kepala Balai
Rencana Aksi	1.Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha untuk informasi ketersediaan ruangan 2.Pembuatan nota dinas permohonan sampel obat antineoplastik ke Inspeksi 3.Perencanaan perawatan berkala akan dibahas dengan PPK terlebih dahulu 4.Sudah berkomunikasi dengan TU, akan dibantu vendor yang sesuai di awal tahun depan. Untuk penyimpanan limbah B3 sementara diletakkan di lab uji antineoplastik lab obat, tapi kedepannya membutuhkan tempat penyimpanan terpisah. 5.Sudah mencari vendor tanpa penggantinya (PT Infittaco) mendapatkan penawaran sebesar Rp 80.586.000. Anggaran untuk tahun ini sudah tidak ada. 6.Berkomunikasi ke vendor lain (PT Infittaco) untuk cek filter di ruang isolator tersebut atau ke PT Mega Teknik untuk melakukan cek ulang spesifikasi. Anggaran sudah tidak ada. 7.Sudah berkomunikasi ke kantim 8.Sudah berkomunikasi ke Inbokom 9.Sudah berkomunikasi ke kantim, kepewakilan penerima pekerjaan CS di lab dan ke TU.	1.Akan dilakukan perbaikan lampu 2.Akan dilakukan perbaikan saluran oleh rekanan	4.Akan membuat link rekapitulasi dengan pengamanan kunci
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1.Limbah sitotoksik dari lab kimia dan mikrobiologi diletakkan pada lab sitotoksik kimia 2.Belum dilakukan pengujian ulang uji verifikasi sterilitas obat antineoplastik 3.Kalibrasi diatas belum dimasukkan di perencanaan 2025 4.Limbah kasus pengujian sampel obat antineoplastik belum memiliki tempat penyimpanan terpisah dan belum bisa dilakukan pembuangan/pemusnahan pihak ke-3 karena harus melalui vendor yang terkait verifikasi limbah ruangan limbah B3 5.Penggantian filter di clean room ruang uji sterilitas belum dapat dilakukan karena vendor yang ditunjuk (PT Mega Teknik) melakukan kesalahan dalam melihat spesifikasi filter, sehingga filter yang datang tidak dapat digunakan 6.Terdapat 1 filter yang belum dilakukan penggantian di ruang isolator karena vendor juga salah melihat spesifikasi (pesanan yang sama yaitu PT Mega Teknik) sehingga mengakibatkan suhu di ruang isolator tidak memenuhi spesifikasi lalat dan alarm alat menyala terus 7.SPU Sampel KLB dari Balai Kediri sebanyak 17 sampel hingga saat ini belum ada, padahal sampel sudah selesai uji 8.Sampel sisa pasien yang berasal dari Inbokom seringkali masuk ke lab belum dilengkapi dengan SPU dan sampel hanya dititipkan ke driver atau CS, sehingga kadang adanya miss antara nos sampel dan SPU yg dikirimkan setelahnya 9.CS yang ada sekarang sering kewalahan dalam penyelesaian pencucian alat gelas, sterilisasi hingga destruksi yang mengakibatkan pekerjaan pembersihan ruangan lain (ruang staff, KIM, musholla) tidak dapat dilakukan. Pembersihan alat gelas juga seringkali kurang optimal sehingga harus dilakukan pencucian ulang atau mempengaruhi kasil uji.	1. Beberapa lampu di ruang uji potensiometri, ruang endotoksin, ruang laktobasilus dan sterilitas mati 2. Saluran pembuangan tempat cucian kotor yang baru sering liber ke area parkir mobil	4. UPT di Regional Surabaya belum tertib dalam pengisian Rekapitulasi Sampel
Kondisi Setelah Rencana Aksi	1.Limbah sitotoksik dari lab kimia dan mikrobiologi diletakkan pada lab sitotoksik kimia 2.Pengujian verifikasi sterilitas obat antineoplastik akan dilaksanakan bulan November 3.Kalibrasi diatas belum dimasukkan di perencanaan 2025 4.Limbah kasus pengujian sampel obat antineoplastik belum memiliki tempat penyimpanan terpisah dan belum bisa dilakukan pembuangan/pemusnahan pihak ke-3 karena harus melalui vendor yang terkait verifikasi limbah ruangan limbah B3 5.Penggantian filter di clean room ruang uji sterilitas belum dapat dilakukan karena vendor yang ditunjuk (PT Mega Teknik) melakukan kesalahan dalam melihat spesifikasi filter, sehingga filter yang datang tidak dapat digunakan 6.Terdapat 1 filter yang belum dilakukan penggantian di ruang isolator karena vendor juga salah melihat spesifikasi (pesanan yang sama yaitu PT Mega Teknik) sehingga mengakibatkan suhu di ruang isolator tidak memenuhi spesifikasi lalat dan alarm alat menyala terus 7.SPU Sampel KLB dari Balai Kediri sebanyak 17 sampel hingga saat ini belum ada, padahal sampel sudah selesai uji 8.Sampel sisa pasien yang berasal dari Inbokom seringkali masuk ke lab belum dilengkapi dengan SPU dan sampel hanya dititipkan ke driver atau CS, sehingga kadang adanya miss antara nos sampel dan SPU yg dikirimkan setelahnya 9.CS yang ada sekarang sering kewalahan dalam penyelesaian pencucian alat gelas, sterilisasi hingga destruksi yang mengakibatkan pekerjaan pembersihan ruangan lain (ruang staff, KIM, musholla) tidak dapat dilakukan. Pembersihan alat gelas juga seringkali kurang optimal sehingga harus dilakukan pencucian ulang atau mempengaruhi kasil uji.	1.Akan dilakukan perbaikan lampu 2.Akan dilakukan perbaikan saluran oleh rekanan	
Status	1.Open 2.Open 3.Open 4.Open 5.Open 6.Open 7.Open 8.Open 9.Open	1.Close 2.Open 3.Open	

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 22. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Kegiatan : QIA.001.053 Pengujian laboratorium sampel makanan

QIA.001.055 Pengadaan sampel makanan

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	1. Pengadaan alat isolator akan dimulai di awal bulan oktober, meliputi pembongkaran sebagian tembok dan bagian atap di ruang inkubasi uji sterilitas. Selama proses pengerjaan akan menimbulkan debu yang banyak selama kurang lebih 2 minggu. Sebagian sampel cemaran September akan dilakukan penghentian uji sehingga akan melewati timeline normal 2. Setelah proses instalasi isolator dilakukan, laboratorium membutuhkan pembersihan menyeluruh secara fumigasi. 3. Plafon didepan ruang uji sterilitas nyaris ambrol 4. Uji sampel pangan mikro dilakukan freeze terkait pemasangan iisolator sedangkan perhitungan timeline uji kimia pangan tetap berjalan normal 5. SIPT mengalami error pada akhir bulan sehingga mengganggu input hasil uji,verifikasi hasil uji baik oleh penyelia maupun MT	1. SIPT mengalami error pada akhir bulan sehingga mengganggu input hasil uji,verifikasi hasil uji baik oleh penyelia maupun MT 2. Mekanisme pengujian mikrobiologi untuk pengujian Makanan Bergizi Gratis 2025 perlu diperjelas kembali (tempat menguji, personel menguji, media reagen dsb)	1. Terdapat balai yang keliru mengisi tujuan balai penguji (misal harusnya diuji sby dan balai lain,namun di tulis SBY aja) pada link regional.Hal ini menyebabkan data RAPK tidak balance saat akhir tahun 2. Terjadi kesalahan entry jenis sampel, seharusnya fortifikasi namun masuk targeted
Rekomendasi Perbaikan	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4.Uji sampel kimia pangan tetap dilaporkan sesuai perhitungan Timeline normal (hasil uji mikro pangan menyusul) 5. Melaporkan kendala ke Tim Pusdatin	1. Melaporkan kendala ke Tim Pusdatin 2. Sudah koordinasi dengan Ketua Tim	1. Dilakukan Konfirmasi/crosscheck data ke Balai penyampling 2. Recek jumlah sampel masuk ke Lab dengan Tim Sampling
Rencana Aksi	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4. Sampel kimia pangan dilaporkan tanpa menunggu hasil uji mikro pangan 5. Melaporkan ke Tim SIPT Pusadtin	1. Melaporkan ke Tim SIPT Pusadtin2.	1. dan 2. Dilakukan crosscek data bersama(Lab,inspeksi dan balai penyampling) pada 3 januari 2025.
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Pengadaan alat isolator akan dimulai di awal bulan oktober, meliputi pembongkaran sebagian tembok dan bagian atap di ruang inkubasi uji sterilitas. Selama proses pengerjaan akan menimbulkan debu yang banyak selama kurang lebih 2 minggu. Sebagian sampel cemaran September akan dilakukan penghentian uji sehingga akan melewati timeline normal 2. Setelah proses instalasi isolator dilakukan, laboratorium membutuhkan pembersihan menyeluruh secara fumigasi. 3. Plafon didepan ruang uji sterilitas nyaris ambrol 4. Pelaporan hasil uji kimia pangan menunggu hasil uji mikro pangan 5.Input hasil uji,verifikasi oleh penyelia dan MT tidak dapat dilakukan	1. Input hasil uji,verifikasi oleh penyelia dan MT tidak dapat dilakukan 2. Mekanisme pengujian mikrobiologi untuk pengujian Makanan Bergizi Gratis 2025 perlu diperjelas kembali (tempat menguji, personel menguji, media reagen dsb)	1. RAPK tidak balance/sesuai 2. Ketidakcocokan data jumlah sampel pengujian dengan Sampling/inspeksi
Kondisi Setelah Rencana Aksi	1. Sudah lapor ke ketua tim, dapat difreeze 2 minggu dengan perencanaan kegiatan :1. Penyelesaian laporan verifikasi MA2. Penyelesaian temuan audit surveilans3. Pengujian sampel DNA kosmetik dan SK4. Verifikasi DNA kosmetik 2. Sudah berkoordinasi dengan TU 3. Sudah lapor ke TU 4. Laporan uji kimia pangan dilaporkan tanpa menunggu hasil uji mikro pangan 5. SIPT bisa digunakan kembali tanggal 31 Oktober 2024 pukul 16.00	SIPT bisa digunakan kembali tanggal 30 Desember 2024 pukul 20.00	1. Data RAPK sudah balance/sesuai 2. data sampel yang duji besrta hasilnya sudah cocok dengan sampling
Status	1. Open2. Open3. Open4. close5. close	1.2. Open	1. Close2. Close

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Kegiatan : **AEA.001.052** **Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan**

Indikator : **23. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan**

AEA.001.053 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan

QCD.U09.051 Operasi Intelijen

QCD.U09.052 Gelar Kasus dan Pelaporan

QCD.U09.053 Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP

QCD.U09.054 Operasi Penindakan

QCD.U09.055 Pemberkasan

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Telah dilakukan upaya paksa membawa saksi di Kab. Gresik, dalam perkara kosmetik tanpa ijin edar dengan locus di Kab. Bojonegoro, namun saksi tidak ditemukan karena posisi saksi sering ke luar kota, sehingga menemui RW setempat dengan membuat berita acara pencarian saksi yang mengetahui ketua RW, untuk menjadi dasar untuk membuat daftar pencarian orang, guna sebagai pemenuhan P19 dr Kejati - Perkara carryover yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 9 perkara	- Beberapa perkara tahapan untuk P21 dan penyerahan tersangka dan BB (Tahap II) tertunda masih menunggu konfirmasi dari JPU - Perkara carryover yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 9 perkara	- Beberapa perkara tahapan untuk P21 dan penyerahan tersangka dan BB (Tahap II) tertunda masih menunggu konfirmasi dari JPU - Perkara carryover yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 8 perkara
Rekomendasi Perbaikan	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan saksi pembeli ke Surabaya dalam perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Pemeriksaan saksi - saksi perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Pengiriman berkas perkara (tahap 1) perkara mengedarkan Kosmetik TIE an. Lina Mojokerto dengan locus di Mojokerto dan perkara OT TIE an. Sri Muminingsih Krian Mojokerto ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda jatim - Kegiatan pelatihan TPPU di Depok dan Forkom Intelijen dilaksanakan di Mataram - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Lina Mojokerto tentang mengedarkan Kosmetik TIE di Mojokerto dan atas nama Sri Muminingsih tentang mengedarkan OT TIE di Krian Sidoarjo - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang, Madiun dan Mojokerto sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara
Rencana Aksi	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Pemeriksaan saksi pembeli ke Surabaya dalam perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Pemeriksaan saksi - saksi perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Surabaya - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Pengiriman berkas perkara (tahap 1) perkara mengedarkan Kosmetik TIE an. Lina Mojokerto dengan locus di Mojokerto dan perkara OT TIE an. Sri Muminingsih Krian Mojokerto ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda jatim - Kegiatan pelatihan TPPU di Depok dan Forkom Intelijen dilaksanakan di Mataram - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Lina Mojokerto tentang mengedarkan Kosmetik TIE di Mojokerto dan atas nama Sri Muminingsih tentang mengedarkan OT TIE di Krian Sidoarjo - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang, Madiun dan Mojokerto sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Melakukan Upaya paksa dengan membawa saksi yg bernama Lili atas perkara tindak pidana kosmetik TIE dengan Locus di Bojonegoro	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim	- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro bersama dengan Kejati Jatim dan Korwas Polda Jatim
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carryover sebanyak 9 perkara	- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carryover sebanyak 9 perkara	- Terealisasi 9 perkara dari 9 target perkara tahun 2024 - Jumlah perkara carryover sebanyak 8 perkara
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Kondisi November : - Gelar Perkara dengan Korwas Polda Jatim dalam rangka penetapan tersangka an. Salim Fahri Abu Bakar tentang mengedarkan OT TIE dan Kosmetik TIE di Surabaya dan atas nama Siti Rokhana tentang mengedarkan OT TIE di Malang - Melakukan pemeriksaan sarana di Malang sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat/UPT - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Diterima surat P21 dari Kejati jatim untuk perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro an tersangka Irawati, perkara mengedarkan kosmetik TIE dengan locus di Mojokerto dan perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Krian Sidoarjo	Kondisi Desember : - - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan OT TIE dengan locus di Mojokerto an. tsk Rumadi, locus di Sidoarjo an. Faruk dan locus di Surabaya an. Lia ke Kejati Jatim melalui Korwas Polda Jatim - Koordinasi dengan Korwas Polda Jatim dan Kejati Jatim terkait penyelesaian perkara - Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara mengedarkan Kosmetik TIE dengan locus di Bojonegoro an. tersangka Irawati	Kondisi Januari :
Status	Close	Close	Close

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 24. Indeks RB BBPOM di Surabaya

Kegiatan :

BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi
EBA994.001	Gaji dan Tunjangan
EBA994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
EBA962.051	Layanan Umum UPT
CAB.002.051	Pengadaan kendaraan bermotor
CAB.002.053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Belum terdapat informasi mengenai Desk ZI	Belum terselenggaranya Capacity Building untuk seluruh Pegawai dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang BerAkhlak	Indeks RB Telah terbit dengan nilai 93,98 yang masih belum memcapai target
Rekomendasi Perbaikan	Komunikasi dengan Inspekorat	Melakukan penyelenggaraan refreshing core Value BerAkhlak untuk seluruh pegawai	melakukan Monitoring Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dengan lebih intens
Rencana Aksi	- Komunikasi dengan Inspektorat - Sosialisasi BerAkhlak pada Apel Manis rutin dilaksankan	Perencanaan Capacity Building	Meningkatkan kualitas monitoring dan Evaluasi atas Pembangunan ZI
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	Capacity Building direncanakan bulan Desember	Nilai Indeks RB 93.98
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	Capacity Building diselenggarakan pada pertengahan Desember	-
Status	Close	Close	Open

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 25. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

Kegiatan :

BKB.001.051	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan
BKB.001.052	Pelaksanaan koordinasi

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	NPSS telah di atas 100% namun masih terdapat 4 IKU yang tidak mencpaai target, yaitu IKU: Makanan Memenuhi Syarat, Obat Aman dan Bermutu, Sertifikasi, Sarana Distribusi	TL Evaluasi SAKIP yang direncakanan akan dilaksanakan pada TW IV terkendala karena adanya pemotongan anggaran perjadin di akhir tahun	TL Evaluasi SAKIP yang direncakanan akan dilaksanakan pada TW IV terkendala karena adanya pemotongan anggaran perjadin di akhir tahun
Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan pengawalan secara optimal untuk dapat mencapai target IKU tersebut pada bulan-bulan berikutnya	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana
Rencana Aksi	Dilakukan pengawalan secara optimal untuk dapat mencapai target IKU tersebut pada bulan-bulan berikutnya	Dilakukan monitoring terhadap TL evaluasi SAKIP yang direncanakan dilaksanakan pada TV IV serta reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana	Dilakukan monitoring terhadap TL evaluasi SAKIP yang direncanakan dilaksanakan pada TV IV serta reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga rencana Tindak lanjut dapat terlaksana
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	4 IKU tidak tercapai	TL Evaluasi SAKIP yang direncakanan pada TW IV tidak dapat dilaksanakan	Rekomendasi masih belum ditindaklanjuti
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Pada bulan November 4 IKU yang belum tercapai masih belum mencapai target	Pada Bulan Desember TL Evaluasi SAKIP yang ditargetkan pada TW IV dapat terlaksana	Semua rekomendasi telah ditindaklanjuti sehingga nilai SAKIP memenuhi target tahun 2024. (target 85,25 --> realisasi 85,37)
Status	Open	Close	Close

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 26. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Kegiatan : BKB.001.052 Pelaksanaan koordinasi

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Terdapat 2 (dua) Pegawai yang aktif kembali setelah tugas belajar selama empat tahun, tetapi ybs kesulitan jika harus mengejar pengembangan kompetensi minimal 20 JP di sisa 3 bulan terakhir, dan 3 (tiga) pegawai Tubel Lepas Jabatan yang masuk dalam perhitungan IP ASN Balai Besar POM di Surabaya	- Masuknya 10 (sepuluh) PPPK TA 2023 ke dalam perhitungan IP ASN, sedangkan pegawai tersebut belum mengikuti diklat fungsional PFM. - 5 (lima) pegawai yang belum melakukan pengembangan kompetensi minimal 20 JP	Tidak ada kendala
Rekomendasi Perbaikan	Pegawai yang baru aktif kembali dinonaktifkan dalam perhitungan IP ASN	Pegawai yang belum memenuhi pengembangan kompetensi minimal 20 JP dan Pejabat Fungsional yang belum diklat fungsional dapat melakukan pengembangan kompetensi tidak terjadwal di IDEAS	-
Rencana Aksi	- Saat desk Rekonsiliasi IP ASN Badan POM, berdiskusi dengan PIC IP ASN Biro SDM mengenai penonaktifan pegawai setelah tubel di Aplikasi IP ASN agar tidak masuk kedalam penghitungan IP ASN UPT	- Buat Nota Dinas untuk pegawai tersebut dan di share di WAG Balai serta WAG Katim	-
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya sebelum pegawai tersebut di non aktifkan dari perhitungan total IP ASN = 84.95	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya sebelum rencana aksi = 85.06	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya setelah pegawai tersebut di non aktifkan dari perhitungan total IP ASN = 85.06	Nilai IP ASN BBPOM di Surabaya setelah rencana aksi = 86.24	
Status	Closed	Closed	Closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Kegiatan : PDD.001.054 Peningkatan ruang lingkup pengujian

PDD.001.056 Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium

RAB.001.051 Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium

CBV.001.051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian Surveilen II KAN tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga diperlukan perpanjangan	Menjelang akhir tahun, beberapa alat laboratorium mengalami kerusakan berat, sehingga tidak bisa dilakukan perbaikan dengan segera karena terkendala anggaran dan proses pembayaran	Pelaksanaan verifikasi metode analisis selalu dilaksanakan mendekati akhir tahun anggaran, hanya sebagai pemenuhan SKP, padahal merupakan salah satu bentuk jaminan mutu hasil.pengujian
Rekomendasi Perbaikan	Mengirimkan tindakan perbaikan yang ada sambil mengajukan permohona perpanjangan tindakan perbaikan ke KAN	Meminta penawaran harga untuk perbaikan kepada penyedia sebagai dasar untuk penganggaran tahun ke depan	VMA dilaksanakan secara berkala sehingga proses penyusunan laporan dapat dilakukan maksimal
Rencana Aksi	Menyusun jadwal dan tim untuk pemenuhan tindakan perbaikan dan tetap menguji sampel rutin dan sampel kasus	Melakukan monitoring verifikasi kinerja alat secara rutin dan melaporkan , serta monitoring perawatan alat dan segera melaporkan ke pejabat terkait apabila dirasa sudah mulai ada tanda - tanda kerusakan meskipun masih dalam taraf kecil	Penyusunan jadwal VMA dipantau secara rut8n dan intensif
	Menyusun peencanaan jadwal untuk kegiatan tahun depan sehingga tidak ditemukan temuan berulang		
	Membuat perencanaan pelatihan , terutama terkait perhitungan ketidak pastian dan jaminan utu hasil pengujian		
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Tindakan perbaikan baru bisa dikirimkan mendekati batas akhir timeline perbaikan (mendekati 2 bulan), sedangkan asesor memerlukan waktu untuk verifikasi tindakan perbaikan	Peralatan mengalami rusak berat dan tidak bisa digunakan sehingga menghambat proses pengujian	Pelaporan VMA dilaksanakan mendekati timeline, sehingga proses pelaporan tidak maksimal
	Tindakan perbaikan pertama, masih ada beberapa temuan yang belum dinyatkan status "close" oleh asesor,, sehingga membutuhkan waktu lagi untuk perbaikan		
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Laboratorium sudah mendapatkan persetujuan perpanjangan tindakan perbaikan oleh KAN. Rencana tindakan perbaikan kedua dilakukan minggu kedua bulan November	Alat laboratorium terjaga kondisi nya dan proses pengujian berjalan tanpa kendala	VMA dapat dilaporkan secara bertahap, tidak hanya untuk pemenuhan SKP, tetapi sebagai bentuk jaminan mutu hasil pengujian
	Rencana tindakan perbaikan kedua akan dikirimkan minggu kedua bulan November		
Status	Close	open	Open
	Open		

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 28. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

Kegiatan : EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

CAN.001.051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	indeks Oktober telah mencapai nilai 3, nilai %pengujian > 80%	indeks November telah mencapai nilai 3, nilai %pengujian > 80%	indeks Desember telah mencapai nilai 3
Rekomendasi Perbaikan	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian
Rencana Aksi/Tindak Lanjut	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim	melakukan informasi update dashboard sipt kepada ketua tim
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	%Sarana : 127,02 %Sampling : 118,01 %Pengujian : 90,11	%Sarana : 125,87 %Sampling : 112,52 %Pengujian : 93,47	%Sarana : 126,42 %Sampling : 103,83 %Pengujian : 100
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Target Tercapai	Target Tercapai	Target Tercapai
Status	close	close	close

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 29. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

Kegiatan : BKB.001.051 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan

BKB.001.052 Pelaksanaan koordinasi

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Terjadi penurunan nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual yang disebabkan penyelesaian kontrak belanja 53 senilai Rp50juta s.d 200juta melebihi TWI.	Terdapat blokir belanja perjalanan dinas yang menyebabkan realisasi belanja non perjadin terhambat.	Pengelolaan TUP Akhir tahun belum akurat. Terdapat sisa pengajuan TUP sehingga ada pengembalian yang berdampak pada penurunan nilai di indikator Pengelolaan UP/TUP.
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan monev secara ketat nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual dengan mengawal semua sub indikatornya agar nilai tidak semakin turun	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga target tetap terlaksana dan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran non perjadin.	Melakukan identifikasi penyebab pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat.
Rencana Aksi	Melakukan monev secara ketat nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual dengan mengawal semua sub indikatornya	Dilakukan reformulasi pelaksanaan kegiatan sehingga target tetap terlaksana dan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran non perjadin.	Melakukan identifikasi penyebab pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat. Dari hasil identifikasi diketahui penyebabnya diantaranya: - Pada pengembalian belanja pegawai khusunya uang makan: banyak pegawai yang mendadak cuti dan dinas di luar renlak yang telah disampaikan ke bagian kepegawaian. - Pegawai, pejabat pengadaan dan pengelola keuangan sudah overload karena pada akhir tahun bersamaan dengan pelaksanaan beberapa kegiatan nasional dan kegiatan besar yang melibatkan banyak lintas sektor
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Nilai IKPA Indikator belanja kontraktual mengalami penurunan pada sub indikator nilai akselerasi belanja 53.	Realisasi belanja barang sebesar 83,58%, sedangkan target TW IV sebesar 90%.	Pengelolaan TUP akhir tahun belum akurat.
Kondisi Setelah Rencana Aksi	Nilai IKPA pada indikator belanja kontraktual di bulan november dan Desember 2024 tidak semakin turun.	Realisasi belanja barang pada TW IV sebesar 97,35% berdasarkan data OMSPAN per tanggal 3 Januari 2024. (Telah mencapai target pada TW IV)	Kelemahan-kelemahan pengelolaan TUP tahun 2024 telah diidentifikasi dan akan dijadikan sebagai perbaikan tahun berikutnya
Status Tindak Lanjut	Close	Close	Close

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 30. Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan

Kegiatan :

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK rata-rata telah mencapai lebih dari 50%, namun masih ada beberapa Kab/Kota capainnya masih kurang dari 50%, hal ini disebabkan antara lain kurang SDM, menunggu terbit SP2D, kegiatan belum dilaksanakan, kegiatan sudah dilksanakan namun belum sempat dilaporkan melalui smartpom	Realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK rata-rata telah mencapai lebih dari 50%, namun masih ada beberapa Kab/Kota capainnya masih kurang dari 50%, hal ini disebabkan antara lain kurang SDM, menunggu terbit SP2D, kegiatan belum dilaksanakan, kegiatan sudah dilksanakan namun belum sempat dilaporkan melalui smartpom	Realisasi anggaran dan capaian output pelaksanaan DAK rata-rata telah mencapai lebih dari 50%, namun masih ada beberapa Kab/Kota capainnya masih kurang dari 50%, hal ini disebabkan antara lain kurang SDM, menunggu terbit SP2D, kegiatan belum dilaksanakan, kegiatan sudah dilksanakan namun belum sempat dilaporkan melalui smartpom
Rekomendasi Perbaikan	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran	Menghimbau Kab/ Kota untuk segera melaporkan kegiatan pelaksanaan DAK ke smartpom sehingga dapat dievaluasi capaian Output dan realisasi Anggaran
Rencana Aksi	1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota terkait pelaksanaan DAK dengan melakukan Desk Monev DAK secara Daring diTW-4	1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota terkait pelaksanaan DAK dengan melakukan Desk Monev DAK secara Daring diTW-4	1. Melakukan Desk Realisasi Anggaran dan Capaian Output Pelaksanaan DAK secara Daring 2. Melakukan Monev Pelaksanaan DAK 3. Melakukan Koordinasi dengan Kab/ Kota terutama untuk Kab/ Kota yang belum melakukan pelaporan ke smartPOM
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	1. Monev capaian output dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan namun belum optimal	1. Monev capaian output dan realisasi anggaran dapat dilaksanakan namun belum optimal	Hasil Monev capaian output dan realisasi anggaran belum optimal
Kondisi Setelah Rencana Aksi	1. Peningkatan capaian output dan realisasi pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota	1. Peningkatan capaian output dan realisasi pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota	1. Peningkatan realisasi anggaran rata-rata 86.99% dan capaian output pelaksanaan DAK oleh Kab/Kota rata-rata 90.73%
Status Tindak Lanjut	1. Close	1. Close	1. Close

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 31. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Kegiatan :

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	akun pengguna SIKD masing" pegawai mengalami kendala pengginaan / akses yang berbeda	Pergantian dari sikd ke aplikasi srikandi	Volume arsip yang banyak
Rekomendasi Perbaikan	konsultasi dengan biro umum dan mengecek aplikasi SIKD secara berkala	Melalui akun admin, mengecek akun pengguna	Koordinasi dengan tim arsip dan tim pengelola arsip
Rencana Aksi	konsultasi dengan biro umum dan mengecek aplikasi SIKD secara berkala, koneksi internet yang stabil	Cek akun admin dan menu pengguna, serta koordinasi dengan biro umum	Membuat daftar dan notdin laporan per semester
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	pegawai mengalami kendala mengakses SIKD	akses dua aplikasi sikd dan srikandi	Data arsip belum dibuat
Kondisi Setelah Rencana Aksi	jumlah pegawai tang mengalami kendala mengakses SIKD berkurang & SIKD sudah normal kembali	Pegawai sudah bisa menggunakan akun srikandi	Data arsip sudah dibuat
Status Tindak Lanjut	Closed	Closed	Closed

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : 32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Kegiatan :

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Terjadi salah akun dalam penganggaran Penggadaan Jaringan IPAL	Tidak bisa melakukan revisi belanja 53 karena adanya SE Kemenkeu terkait dengan penghematan perjadin 50 %	Semua Kontrak s.d 31 Des dikategorikan pembayaran Lewat RPATA
Rekomendasi Perbaikan	Revisi POK	Revisi POK	Semua Pembayaran Jasa masuk Rpata
Rencana Aksi	menunggu revisi DJA terkait belanja 51 baru bisa revisi POK	Menunggu revisi Penghematan Perjadin	Input Pembayaran Jasa Kebersihan, Keamanan, Pengemudi, Respsionis, pemelihara Sarpras ke sistem pembayaran RPATA
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	komunikasi dengan BMN Biro Umum sebelum revisi akun	Komunikasi dengan Rorenkeu dan KPPN terkait dengan penghematan	menunggu SE dari KPPN
Kondisi Setelah Rencana Aksi	sudah dilakukan penyesuaian akun	sudah dilakukan revisi Akun belanja 53	sudah diinput ke dalam pembayaran RPATA
Status Tindak Lanjut	Close	close	close

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara**

Kegiatan :

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	Aplikasi SAKTI Modul Aset dan Persediaan sudah dapat diinput (Semua transaksi sudah bisa dilakukan) karena Periodik Penilaian BMN adalah secara tahunan (12 bulan) sampai dengan bulan Oktober masih terdapat kendala aplikasi sakti yaitu sering mengalami error/maintenance, dan terdapat peralihan menuju aplikasi siman versi2	Aplikasi SAKTI Modul Aset dan Persediaan sudah dapat diinput (Semua transaksi sudah bisa dilakukan) karena Periodik Penilaian BMN adalah secara tahunan (12 bulan) sampai dengan bulan Nopember masih terdapat kendala aplikasi sakti dan siman ver2 yaitu sering mengalami error/maintenance dan loading lama	Aplikasi SAKTI Modul Aset dan Persediaan sudah dapat diinput (Semua transaksi sudah bisa dilakukan) karena Periodik Penilaian BMN adalah secara tahunan (12 bulan) sampai dengan bulan Desember masih terdapat kendala aplikasi sakti dan siman ver2 yaitu sering mengalami error/maintenance dan loading lama - masih ada kekurangan kelengkapan berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan penghapusan BMN
Rekomendasi Perbaikan	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-persediaan dan siman ver2	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-modul aset/persediaan dan siman ver2	berkoordinasi dengan pic eselon 1 dan KPKNL terkait kekurangan berkas serta pengajuan tiket halo djpb terkait kendala sakti-modul aset/persediaan dan siman ver2
Rencana Aksi	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2	Tetap dilakukan input komitmen untuk dapat diproses pembayaran oleh keuangan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, serta melakukan pengelolaan sakti persediaan - sakti aset - siman ver2 - Melengkapi kekurangan berkas sesuai kebutuhannya
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	-	-	-
Kondisi Setelah Rencana Aksi	-	-	-
Status Tindak Lanjut	Open	Open	Close

REKAPITULASI KENDALA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2024

Indikator : **34. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri**

Kegiatan :

Keterangan	Oktober	November	December
Kendala/ Permasalahan	- Belum adanya perhitungan otomatis Indeks Pemanfaatan Sistem untuk penilaian Pengelolaan PDN pada aplikasi Siroum - Tarikan data pada aplikasi Sakti masih campur antara pemilihan penyedia dan swakelola	- Belom ada surat edaran terkait perhitungan indeks PDN antara paket penyedia dan swakelola - Belom adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN	- Belom ada surat edaran terkait perhitungan indeks PDN antara paket penyedia dan swakelola - Belom adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN
Rekomendasi Perbaikan	Saat ini tetap dilakukan proses pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	- Ada perhitungan PDN yang jelas antara paket penyedia dan swakelola - Adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN	- Ada perhitungan PDN yang jelas antara paket penyedia dan swakelola - Adanya dashboard monitoring perhitungan indeks PDN
Rencana Aksi	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN
Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN	Melakukan pencatatan dan perhitungan manual untuk penilaian Pengelolaan PDN
Kondisi Setelah Rencana Aksi			
Status Tindak Lanjut	Open	Open	Open

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

LAMPIRAN 4. KERTAS KERJA

MATRIKS CAPAIAN RAPK OKTOBER s.d. DESEMBER 2024

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,54	92,54	92,54	92,54	1430	1537	93,04	100,54	100,54	1570	1689	92,954	100,45	100,45	1666	1790	93,07	100,58	100,58
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,62	90,62	90,62	90,62	578	647	89,34	98,58	98,58	663	739	89,716	99,00	99,00	680	757	89,83	99,13	99,13
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan	94,81	94,81	94,81	94,81	513	543	94,48	99,65	99,65	574	605	94,88	100,07	100,07	615	669	91,93	96,96	96,96

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	hasil pengawasan																			
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,30	85,30	85,30	85,30	89	101	88,12	103,30	103,30	138	160	86,25	101,11	101,11	167	190	87,89	103,04	103,04
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	85,00	85,00	85,00	99	110	90,00	105,88	105,88	99	110	90,00	105,88	105,88	99	110	90,00	105,88	105,88

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,50			84,50	-	-	90,31	-	106,88	-	-	90,31	-	106,88	-	-	90,31	106,88	106,88
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan	96,40			96,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,26	100,89	100,89

BADAN P
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	pembinaan pengawasan Obat dan Makanan																			
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,14			80,14	-	-	86,56	-	108,01	-	-	86,56	-	108,01	-	-	86,56	108,01	108,01
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,50			92,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,04	100,58	100,58

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	97,30	97,30	97,30	-	-	99,61	102,38	102,38	-	-	98,07	100,79	100,79	-	-	98,25	100,97	100,97
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	89,42	89,42	89,42	89,42	-	-	99,07	110,80	110,80	-	-	94,42	105,60	105,60	-	-	94,43	105,60	105,60

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan																			
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	96,00	96,00	96,00	17999	19209	93,70	97,61	97,61	19856	21219	93,58	97,48	97,48	21751	23232	93,63	97,53	97,53
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	70,00	70,00	70,00	70,00	286	399	71,68	102,40	102,40	305	424	71,93	102,76	102,76	316	439	71,98	102,83	102,83

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	memenuhi ketentuan																			
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	70,86	70,86	70,86	447	676	66,12	93,32	93,32	493	735	67,07	94,66	94,66	510	764	66,75	94,21	94,21
15	Indeks Pelayanan Publik	4,95	4,95	4,95	4,95	-	-	5	101,01	101,01	-	-	5	101,01	101,01	-	-	5	101,01	101,01
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi	97,00	91,30	96,00	97,00	-	-	91,56	100,28	94,39	-	-	96,333	100,35	99,31	-	-	100,00	103,09	103,09

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik																			
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberday	95,00	75,00	80,00	95,00	-	-	97,04	129,39	102,15	-	-	99,18	123,97	104,40	-	-	99,18	104,40	104,40

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	aaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota																			
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,20	95,20	95,20	95,20	-	-	97,42	102,33	102,33	-	-	97,43	102,34	102,34	-	-	97,43	102,34	102,34
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan	138	85,80	95,00	138	-	-	86,15	100,41	86,15	-	-	138,00	105,26	100,00	-	-	138	100%	100%

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	Anak Sekolah (PJAS) Aman																			
20	Jumlah desa pangan aman	45	85,00	95,00	45	-	-	85,00	100,00	85,00	-	-	95,00	100,00	95,00	-	-	45	100%	100%
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	100,00	100,00	30	-	-	30,00	100,00	100,00	-	-	30,00	100,00	100,00	-	-	30	100%	100%
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa	100,00	85,00	95,00	100,00	-	-	88,31	103,89	88,31	-	-	94,69	99,67	94,69	-	-	100,00	100%	100%

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	dan diuji sesuai standar																			
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	85,00	95,00	100,00	-	-	88,82	104,49	88,82	-	-	99,67	104,92	99,67	-	-	100,00	100%	100%
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat	70,00	63,57	66,82	70,00	-	-	71,44	112,38	102,06	-	-	82,12	122,90	117,31	-	-	83,01	118,59	118,59

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	dan Makanan																			
25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	95,23			95,23	-	-	-	-	-	-	-	93,98	-	98,69	-	-	93,98	98,69	98,69
26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,25			85,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,37	100,14	100,14
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,50			96,50	-	-	98,06	-	101,62	-	-	98,06	-	101,62	-	-	98,06	101,62	101,62
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	90,86			90,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,37	95,06	95,06
29	Persentase pemenuhan	88,74			88,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,23	100,55	100,55

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP																			
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,00	100,00	100,00	-	-	3,00	100,00	100,00	-	-	3,00	100,00	100,00
31	Nilai Kinerja Anggaran	90,31			90,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,51	103,54	103,54

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

No	Indikator	Target 2024 menggunakan koma dan tanpa satuan%	Target Bulanan (kumulatif) menggunakan koma dan tanpa satuan%			Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
						OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
			OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
	BBPOM di Surabaya																			
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	96,43			96,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	93,33	93,33
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90,00			90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,44	109,38	109,38
34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00			60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,29	130,48	130,48

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN OKTOBER

No	Jenis Produk	Balai Penguji		Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Oktober														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							Tidak legal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab)^	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab ^^	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ^^^	TMK Penandaan dan TMS uji lab ^^^^	TMS Uji (khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel sby diuji sby	Surabaya	137	Targeted	3	0	0	0	0	6	5	5	0	0	0		0	1	5
		sampel sby diuji balai lain				7	0	0	0	0	17	11	11	0	0	0		0	6	11
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	560	Acak	18	0	0	0	1	37	29	28	0	1	0		1	8	29
		sampel sby diuji balai lain				33	0	0	0	1	68	40	39	0	1	0		1	28	40
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
			TOTAL	697		61	0	0	0	2	128	85	83	0	2	0	0	2	43	85
2	Obat Tradisional	sampel sby diuji sby	Surabaya	157	Targeted	20				1	31	11	9	1	1	0	0	2	20	11
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	368	Acak	24				4	66	42	34	4	3	1	0	8	24	42
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	525		44	0	0	0	5	97	53	43	5	4	1	0	10	44	53
3	Obat Kuasi	sampel sby diuji sby	Surabaya	10	Targeted	4				0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	25	Acak	0				0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	6
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	35		4	0	0	0	0	10	6	6	0	0	0	0	0	4	6
4	Suplemen Kesehatan	sampel sby diuji sby	Surabaya	42	Targeted	5				0	9	4	4	0	0	0	0	0	5	4
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	97	Acak	12				0	24	12	12	0	0	0	0	0	12	12
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	139		17	0	0	0	0	33	16	16	0	0	0	0	0	17	16
5	Kosmetik	sampel sby diuji sby	Surabaya	315	Targeted	14	0	0	0	0	38	12	12	0	0	0		0	26	12
		sampel sby diuji balai lain								0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	736	Acak	72	0	0	0	1	149	73	72	0	1	0		1	76	73
		sampel sby diuji balai lain								0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
			TOTAL	1051		86	0	0	0	1	187	85	84	0	1	0	0	1	102	85
6	Rokok	sampel sby diuji sby	Surabaya	4	Targeted					0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji balai lain								0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
			TOTAL	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Surabaya			665	Targeted	53	0	0	0	1	105	43	41	1	1	0	0	2	62	43
	Surabaya			1786	Acak	159	0	0	0	7	350	202	191	4	6	1	0	11	148	202
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2451		212	0	0	0	8	465	245	232	5	7	1	0	13	210	245
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel sby diuji sby	Surabaya	187	Targeted	49				0	65	12	11	1				1	53	12
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0	0	0				0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0	0	0				0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	755	Acak	46				0	88	42	40	2	0	0		2	46	42
		sampel sby diuji balai lain				0				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				16				3	62	33	26	4	3	0		7	29	33
	Total Pangan Balai			233	Targeted	49	0	0	0	0	65	12	11	1	0	0	0	1	53	12
	Total Pangan Balai			905	Acak	62	0	0	0	3	150	75	66	6	3	0	0	9	75	75
2	Fortifikasi	sampel sby uji sby	Surabaya	110	Targeted	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby uji balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby uji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
	Total Fortifikasi Balai			150	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN			1288		111	0	0	0	3	215	87	77	7	3	0	0	10	128	87

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

NOVEMBER

No	Jenis Produk	Balai Penguji		Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	November														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIF (legal/ Palsu)	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab)*	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel sby diuji sby	Surabaya	137		2	0	0	0	0	3	2	2					0	1	2
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	4	0	0	0	0	10	6	6					0	4	6
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	560		8	0	0	0	0	16	11	11					0	5	11
		sampel sby diuji balai lain			Acak	26	0	0	0	0	54	41	40	1				1	13	41
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
			TOTAL	697		40	0	0	0	0	83	60	59	1	0	0	0	1	23	60
2	Obat Tradisional	sampel sby diuji sby	Surabaya	157		14				0	34	20	19	1				1	14	20
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	368		2			0	1	26	24	15	8	1			9	2	24
		sampel sby diuji balai lain			Acak	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	525		16	0	0	0	1	60	44	34	9	1	0	0	10	16	44
3	Obat Kuasi	sampel sby diuji sby	Surabaya	10		0				0	4	4	4					0	0	4
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	25		0				0	0	0	0					0	0	0
		sampel sby diuji balai lain			Acak	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	35		0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4
4	Suplemen Kesehatan	sampel sby diuji sby	Surabaya	42		3				0	8	5	5					0	3	5
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	97		2				0	14	12	12					0	2	12
		sampel sby diuji balai lain			Acak	0				0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0						0	0	0
			TOTAL	139		5	0	0	0	0	22	17	17	0	0	0	0	0	5	17
5	Kosmetik	sampel sby diuji sby	Surabaya	315		21				0	47	33	33					0	14	33
		sampel sby diuji balai lain			Targeted					0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	736		25				0	101	78	76	2				2	23	78
		sampel sby diuji balai lain			Acak					0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
			TOTAL	1051		46	0	0	0	0	148	111	109	2	0	0	0	2	37	111
6	Rokok	sampel sby diuji sby	Surabaya	4		0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
			TOTAL	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Surabaya			665	Targeted	44	0	0	0	0	106	70	69	1	0	0	0	1	36	70
	Surabaya			1786	Acak	63	0	0	0	1	211	166	154	11	1	0	0	12	45	166
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2451		107	0	0	0	1	317	236	223	12	1	0	0	13	81	236
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel sby diuji sby	Surabaya	187		36				0	89	58	48	10				10	31	58
		sampel sby diuji balai lain			Targeted	0				0	0	0	0	0				0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				0	0	0	0	0				0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	755		24				1	70	63	59	3	1	0		4	7	63
		sampel sby diuji balai lain			Acak	0				0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0				2	29	29	26	1	2	0		3	0	29
	Total Pangan Balai			233	Targeted	36	0	0	0	0	89	58	48	10	0	0	0	10	31	58
	Total Pangan Balai			905	Acak	24	0	0	0	3	99	92	85	4	3	0	0	7	7	92
2	Fortifikasi	sampel sby uji sby	Surabaya	110						0	0	0						0	0	0
		sampel sby uji balai lain			Targeted					0	0	0						0	0	0
		sampel sby uji sby dan balai lain								0	0	0						0	0	0
	Total Fortifikasi Balai			150	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN			1288		60	0	0	0	3	188	150	133	14	3	0	0	17	38	150

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

DESEMBER

No	Jenis Produk	Balai Penguji	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WR2uuW6pliVqiEcEYuLzL8F--7OZqFQPxIlk8pVMZIl/edit#gid=853952770	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember												Hasil perhitungan RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
										Hasil uji										
											TMS									
						rusak	TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)	Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA	pembilang	Penyebut	capaian
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel sby diuji sby	Surabaya	137	Targeted	0	0	1	1	1	0	0	0		0	0	1			
		sampel sby diuji balai lain				0	0	4	4	3	1	0	0		1	0	4			
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
		sampel sby diuji sby	Surabaya	560	Acak	0	0	14	14	14	0	0	0		0	0	14			
		sampel sby diuji balai lain				0	0	13	13	13	0	0	0		0	0	13			
		sampel sby diuji sby dan balai lain				0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0			
			TOTAL	697		0	0	32	32	31	1	0	0	0	1	0	32	0,00	0,00	0,00
2	Obat Tradisional	sampel sby diuji sby	Surabaya	157	Targeted	0	1	16	16	12	3	1			4	0	16			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby	Surabaya	368	Acak	0	1	2	2		1	1			2	0	2			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
			TOTAL	525		0	2	18	18	12	4	2	0	0	6	0	18	0,00	0,00	0,00
3	Obat Kuasi	sampel sby diuji sby	Surabaya	10	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby	Surabaya	25	Acak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
			TOTAL	35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Suplemen Kesehatan	sampel sby diuji sby	Surabaya	42	Targeted	0	0	6	6	6					0	0	6			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby	Surabaya	97	Acak	0	0	2	2	2					0	0	2			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
			TOTAL	139		0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00
5	Kosmetik	sampel sby diuji sby	Surabaya	315	Targeted		0	14	14	14					0	0	14			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby	Surabaya	736	Acak		0	28	28	28					0	0	28			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
			TOTAL	1051		0	0	42	42	42	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00
6	Rokok	sampel sby diuji sby	Surabaya	4	Targeted		0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0			
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0			
			TOTAL	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Surabaya			665	Targeted	0	1	41	41	36	4	1	0	0	5	0	41	615	669	91,93%
	Surabaya			1786	Acak	0	1	59	59	57	1	1	0	0	2	0	59	1666	1790	93,07%
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2451		0	2	100	100	93	5	2	0	0	7	0	100			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel sby diuji sby	Surabaya	187	Targeted		0	31	31	30	1				1	0	31	157	180	87,22%
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0	10	10	100,00%
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0	0	0	0
		sampel sby diuji sby	Surabaya	755	Acak		0	19	19	19					0	0	19	593	657	90,26%
		sampel sby diuji balai lain					0	0	0						0	0	0	0	0	0
		sampel sby diuji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0	87	100	87,00%
	Total Pangan Balai			233	Targeted	0	0	31	31	30	1	0	0	0	1	0	31	167	190	87,89%
	Total Pangan Balai			905	Acak	0	0	19	19	19	0	0	0	0	0	0	19	680	757	89,83%
2	Fortifikasi	sampel sby uji sby	Surabaya	110	Targeted		0	0	0						0	0	0	99	110	90,00%
		sampel sby uji balai lain					0	0	0						0	0	0	0	0	0
		sampel sby uji sby dan balai lain					0	0	0						0	0	0	0	0	0
	Total Fortifikasi Balai			150	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	110	90,00%
	TOTAL PANGAN			1288		0	0	50	50	49	1	0	0	0	1	0	50	946	1057	89,50%

2. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU (90,31)

Tabel 2. Realisasi Indeks dan Capaian Kesadaran Masyarakat Per UPT

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	68,00	69,59	101,61%
19	Balai Besar POM di Surabaya	490	84,50	90,31	106,88%
20	Balai POM di Kediri	490	82,42	84,97	103,09%

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA

3. **INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (97,26)**

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

Tabel 2. Capaian Indeks Balai Besar/Balai POM Tahun 2024

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
20	Balai Besar POM di Surabaya	96,4	97,26	100,89%	23	577

4. **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (86,56)**

Tabel 4. Realsiasi Indeks dan Persentase Capaian Kepuasan Masyarakat Per UPT

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	83,20	84,51	101,58%
19	Balai Besar POM di Surabaya	490	80,14	86,56	108,01%
20	Balai POM di Kediri	490	69,11	80,74	116,83%
21	Balai POM di Jember	490	75,97	84,24	110,88%

5. **INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM (93,04)**

No.	UPP	Periode Pelaksanaan	Indeks 2024 (per Unsur)									Indeks 2024	Kategori	Jumlah Responden	Metode Survei	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
12	Balai Besar POM di Surabaya	**1 April s.d. 12 Juli 2024**	90.88	91.02	92.34	92.49	93.07	94.76	95.91	93.97	92.92	93.04	A (Sangat Baik)	464	Online	1. U1 (Persyaratan Pelayanan) 2. U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur) 3. U3 (Waktu Penyelesaian)	1. U1 (Persyaratan Pelayanan): Melakukan kegiatan Forum Komunikasi SKI/SKE yang mengundang pelaku usaha. 2. U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur): Dilakukan sosialisasi melalui cangkruan terhadap semua jenis layanan kepada pengguna layanan. 3. U3 (Waktu Penyelesaian): Dilakukan kegiatan jemput bola dengan klinik pom dan desk untuk mempercepat waktu penyelesaian layanan.	100%

6. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN (98,25)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	30	30	32	32	7	7	277	268	268	277	96,75090253
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3	4	4	4	4	94	93	93	94	98,93617021
		Suplemen Kesehatan			0	0	3	3	5	5	5	5	100
		Kosmetik	3	4	5	5	1	1	56	56	56	56	100
		Pangan	9	9	15	15	22	22	309	309	309	309	100
		Total	45	46	56	56	37	37	741	731	731	741	98,65
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	7	1	1	1	12	6	6	12	50
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	7	7	7	7	29	29	29	29	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	3	3	7	7	7	7	100
		Kosmetik	7	7	2	2	0	0	58	58	58	58	100
		Pangan							0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	7	7	16	10	11	11	106	100	100	106	94,34
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	1	1			11	11	11	11	100
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik			0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan			0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
		Total	0	0	1	1	0	0	11	11	11	11	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0			0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	2	2	0	0	0	0	6	6	6	6	100
		Pangan			0	0	1	1	6	6	6	6	100
		Total	2	2	0	0	1	1	12	12	12	12	100,00
TOTAL			**54**	**55**	**73**	**67**	**49**	**49**	**870**	**854**			**98,25**

7. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER (94,43)

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		Total		RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	40	43	31	18	26	26	222	220	220	222	99,099099
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	30	27	1	1	4	3	86	42	42	86	48,837209
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	1	1	2	1	1	2	50
		Kosmetik	4	2	2	1	2	0	53	41	41	53	77,358491
		Pangan	1	11	54	18	21	18	211	206	206	211	97,630332
		Total	75	83	88	38	54	48	574	510	510	574	88,85
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Pangan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100
		Total	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	100,00
TOTAL			**75**	**83**	**88**	**38**	**54**	**48**	**575**	**511**			**94,43**

8. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU (93,63)

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			Total			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	944	944	892	929	929	873	909	909	820	11209	11209	10369	10369	11209	92,5
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	1026	1026	1018	968	968	889	976	976	953	10700	10700	10212	10212	10700	95,44
3	Rekomendasi CPOTB	Rekomendasi	3	3	3	9	7	7	1	3	3	36	36	36	36	36	100,00
4	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK	Rekomendasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Rekomendasi CPKB	Rekomendasi	2	3	3	6	6	6	4	5	5	37	37	37	37	37	100,00
6	Rekomendasi CPPOB (Menengah & Besar)	Rekomendasi	3	1	1	7	8	8	10	11	11	134	133	133	133	134	99,25
7	Izin CPPOB UMK	Rekomendasi	69	69	52	66	66	52	86	86	75	862	862	729	729	862	84,57
8	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK	Rekomendasi	0	0	0	8	6	6	13	15	15	74	74	74	74	74	100,00
9	Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO	Rekomendasi	0	1	1	4	4	4	5	5	4	11	11	10	10	11	90,9
10	Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA	Rekomendasi	3	15	15	8	7	7	4	3	3	105	87	87	87	105	82,86
11	Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos	Rekomendasi	5	4	4	3	3	3	5	6	6	38	38	38	38	38	100,00
12	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	14	14	14	2	2	2	0	0	0	26	26	26	26	26	100,00
Total			2069	2080	2003	2010	2006	1857	2013	2019	1895	23232	23213	21751	21751	23232	93,63

9. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI (71,98)

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Oktober				November				Desember				Total				RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	35	16	3	2	1	0	5	5	0	0	0	0	0	0	24	14	10	0	24	14	10	
2	Industri Bahan Baku Obat	2		1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	14	9	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	8	7	1	0	8	7	1	
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) (Target gabung dengan IOT)	3		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	65	25	3	0	3	0	1	0	1	0	1	1	0	0	25	17	8	0	25	17	8	
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	16	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	6	3	0	9	6	3	
8	Industri Farmasi (IF)/ Industri OT (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK)	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	9	7	2	0	9	7	2	
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi (Target gabung dengan IOT)	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Masuk target SK)	5		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	1	1	2	1	1	
11	Industri Kosmetik	103	52	3	2	1	0	6	3	3	0	0	0	0	0	52	37	15	0	52	37	15	
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik (Masuk dalam target Industri Kosmetika)	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Industri Pangan	900	294	16	12	2	2	10	8	2	0	11	6	4	1	293	211	79	3	290	211	79	
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	28286	15	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	4	0	16	12	4	
	Surabaya	29467	432	28	18	8	2	25	19	6	0	16	11	4	1	443	316	123	4	439	316	123	71,98

10. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI (66,75)

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	Oktober				November				Desember				Total				RAPK s.d. TW 4 (Jan - Des)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	273	89	13	7	6	0	15	8	5	2	7	1	6	0	91	48	41	2	89	48	41	
2	Apotek	3456	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	16	30	0	46	16	30	
3	Toko Obat	223	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	5	0	9	4	5	
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	28	28	5	2	3	0	6	3	3	0	0	0	0	0	28	18	10	0	28	18	10	
5	Rumah Sakit (RS)	346	45	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	31	14	0	45	31	14	
6	Puskemas	672	36	5	5	0	0	4	3	1	0	3	3	0	0	36	33	3	0	36	33	3	
7	Klinik	1226	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	18	22	0	40	18	22	
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	673	141	4	3	1	0	5	3	2	0	5	3	2	0	141	81	60	0	141	81	60	
11	Fasilitas Distribusi suplemen kesehatan	675	87	4	4	0	0	7	6	1	0	0	0	0	0	87	85	2	0	87	85	2	
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik (Non Notifikasi)	302	141	5	4	1	0	19	18	1	0	1	0	1	0	141	103	38	0	141	103	38	
13	Klinik Kecantikan (Penotifikasi dan Importir)	275	43	4	3	1	0	5	5	0	0	1	0	1	0	43	35	8	0	43	35	8	
14	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	1120	59	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	2	0	59	38	21	0	59	38	21	
	Surabaya	8994	764	47	34	13	0	61	46	13	2	29	17	12	0	766	510	254	2	764	510	254	66,75

11. Indeks Layanan Publik BPOM (5)

Tabel 8. IPP UPP Balai Besar dan Balai POM Tahun 2024

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target 2023	IPP 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Surabaya	4,97	4,95	5,00	Pelayanan Prima
2	Balai Besar POM di Yogyakarta	4,92	4,95	5,00	Pelayanan Prima

12. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK (100,00)

Komoditi	No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Oktober	November	Desember
Pangan	1	Seleksi UMKM Pangan	Januari-Februari	10	10,00	10,00	10,00
	2	Bimtek CPPOB	Maret	20	20,00	20,00	20,00
	3	Fasilitasi pendampingan	Februari - Desember	40	40,00	40,00	40,00
	4	PSB	Maret- Desember	20	20,00	20,00	20,00
	5	Monev	Desember	10	0,00	0,00	10,00
					90,00	90,00	100,00
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	Januari-Februari	10	10,00	10,00	10,00
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	Maret	20	20,00	20,00	20,00
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	Februari - Desember	40	40,00	40,00	40,00
	4	Sertifikasi	Maret - Desember	20	16,67	20,00	20,00
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	April, Juli, Oktober, Desember	10	8,00	9,00	10,00
					94,67	99,00	100,00
Kos	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	Januari-Februari	10	10,00	10,00	10,00
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	Februari - Desember	40	40,00	40,00	40,00
	3	Pelaksanaan pendampingan	Februari - Desember	40	40,00	40,00	40,00
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	November	10	0,00	10,00	10,00
		Total			90,00	100,00	100,00
		%Progress			91,56	96,33	100,00

13. PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (99,18)

NO	Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	Aspek Tim Koordinasi POM (Bobot 30% : ada DAK dan bobot 75% : tidak ada DAK)													Aspek TPPS (Bobot 10% : ada DAK dan bobot 25% : tidak ada DAK)						
		a. Keterlibatan TKPPOM (bobot 1% : ada DAK dan tidak ada DAK)						b. peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (bobot 29% : ada DAK dan bobot 74% : tidak ada DAK)						b. peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (bobot 10 : ada DAK dan bobot 25 : tidak ada DAK)								
		Bobot	% Capaian per Bulan (Kumulatif)			Nilai (Sudah dikali bobot)			% Capaian per Bulan (Kumulatif)			Nilai (Sudah dikali bobot)			Bobot	% Capaian per Bulan (Kumulatif)			Nilai (Sudah dikali bobot)		
			10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12		10	11	12	10	11	12
20	Surabaya	1%	17,86	17,86	17,86	0,18	0,18	0,18	100,00	100,00	100,00	29,00	29,00	29,00	10%	100,00	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00

NO	Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	Aspek DAK Nonfisik BOK POM (Bobot 60% : ada DAK dan bobot 0% : tidak ada DAK)														
		a. pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM (Bobot 15 : ada DAK dan bobot 0 : tidak ada DAK)							b. peningkatan koordinasi tata hubungan kerja (bobot 45 : ada DAK dan bobot 0 : tidak ada DAK)							
		Bobot	% Capaian per Bulan (Kumulatif)			Nilai (Sudah dikali bobot)			Bobot	% Capaian per Bulan (Kumulatif)			Nilai (Sudah dikali bobot)			
			10	11	12	10	11	12		10	11	12	10	11	12	
20	Surabaya	15%	100,00	100,00	100,00	15,00	15,00	15,00	45%	95,24	100,00	100,00	42,86	45,00	45,00	

NO	Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	CAPAIAN (berdasarkan bobot)									KESIMPULAN AKHIR DESK DAN NILAI FINAL	PIC Rorenkeu (TW IV)
		TARGET (KUMULATIF) diisi oleh UPT sesuai dengan target RAPK			TOTAL REALISASI (KUMULATIF)			% CAPAIAN (KUMULATIF)				
		10	11	12	10	11	12	10	11	12		
20	Surabaya	75,00	80,00	95,00	97,04	99,18	99,18	129,38	123,97	104,40	1.Disetujui	Awal

14. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN (97,43)

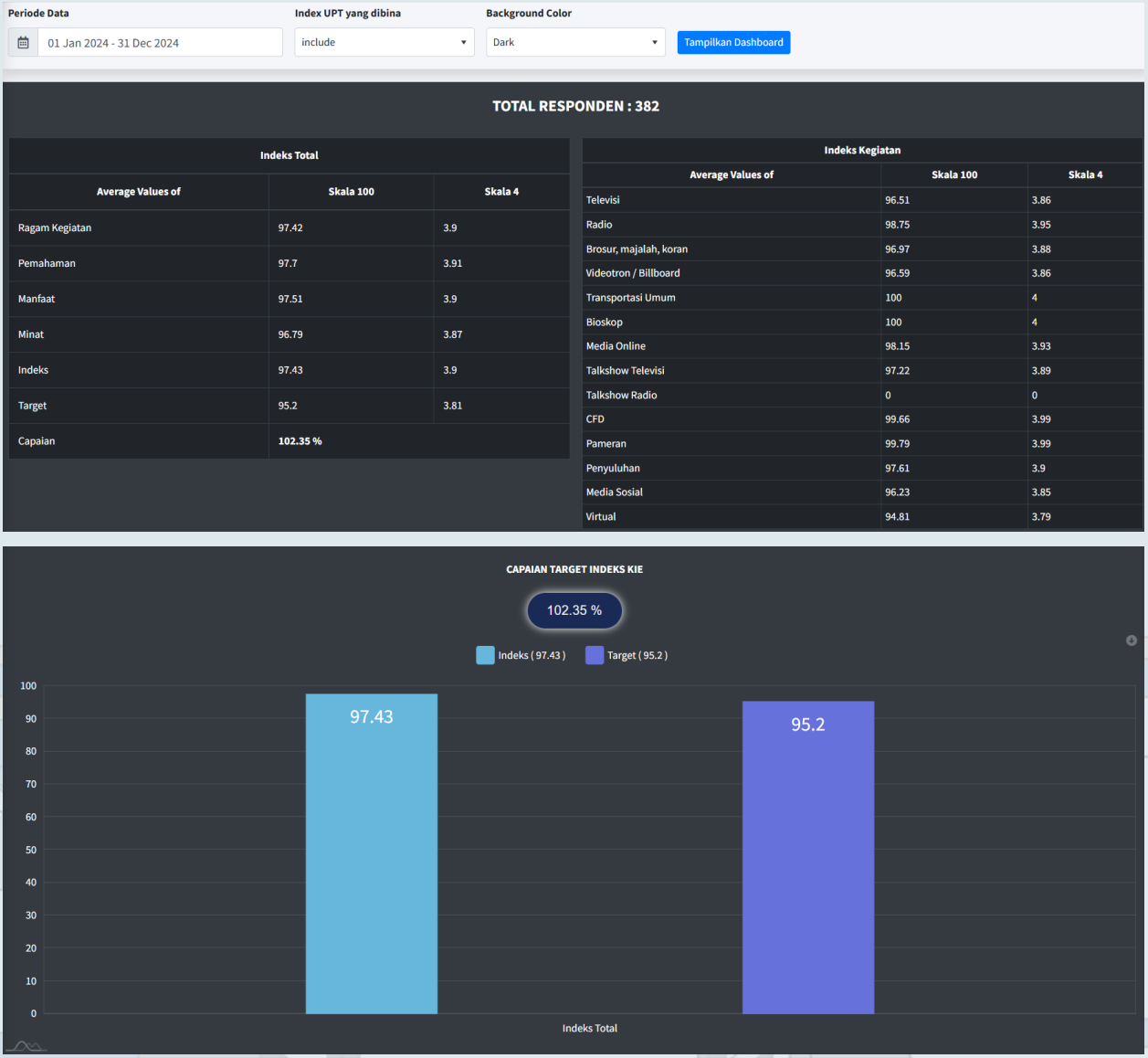

15. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN (138)

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Realisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
						s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - Mei	26	138	20,00	20,00	20,00	138
2	Sosialisasi keamanan pangan (176)	10,00	Maret - Mei			10,00	10,00	10,00	
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah (26)	15,00	April - Juli			15,00	15,00	15,00	
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan (26)	10,00	April - Nov			10,00	10,00	10,00	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Nov			15,00	15,00	15,00	
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (26)	20,00	Agustus - Des			6,15	20,00	20,00	
7	Pengawalan (76)	10,00	Apr- Des			10,00	10,00	10,00	
	Total skor (Tahun N)	**100,00**		**26**	**138**	**86,15**	**100,00**	**100,00**	**138**

16. JUMLAH DESA PANGAN AMAN (45)

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)			Realisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir
					s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Advokasi Kelembagaan Desa (4 kab/kota)	20,00	Januari-Mei	45	20,00	20,00	20,00	45
2	Pengadaan gimick, rapid test kit dll	5,00	TW1-TW2		5,00	5,00	5,00	
3	Pengawalan	10,00	Juni - Desember		10,00	10,00	10,00	
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (8 desa)	15,00	Mei- Agustus		15,00	15,00	15,00	
5	Bimtek Komunitas sekaligus survei ((8 desa)	15,00	Mei-Oktober		15,00	15,00	15,00	
6	Fasilitas Keamanan Pangan (8 desa)	10,00	Juni-Oktober		10,00	10,00	10,00	
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (Pre : 5%; Post 5%)	10,00	Pre: Juni-Oktober Post Oktober-November		10,00	10,00	10,00	
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember		0,00	10,00	10,00	
9	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember		0,00	0,00	5,00	
	Total	**100,00**		**45**	**85,00**	**95,00**	**100,00**	**45**

17. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (30)

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)			Realisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
						s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1	Survey Pasar (6)	5,00	Januari-Mei	6	30	5,00	5,00	5,00	30
2	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor	20,00	Januari-Mei			20,00	20,00	20,00	
3	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	15,00	April-Juni			15,00	15,00	15,00	
4	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 1	15,00	April-Juni			15,00	15,00	15,00	
5	Penyuluhan Pedagang Pasar	10,00	Juni-Agustus			10,00	10,00	10,00	
6	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	10,00	Juni-Agustus			10,00	10,00	10,00	
7	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 2	15,00	September-November			15,00	15,00	15,00	
8	Pengawalan	10,00	Januari-November			10,00	10,00	10,00	
	Total	**100,00**		**6**	**30**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**30**

18. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SAMPEL OBAT DAN MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
10	Oktober	2451	2330	**Benar**	2900	2365	**Benar**	88,31
11	November	2451	2439	**Benar**	2900	2606	**Benar**	94,69
12	Desember	2458	2458	**Benar**	2902	2902	**Benar**	100,00

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
10	Oktober	1052	985	**Benar**	1307	1098	**Benar**	88,82
11	Nopember	1052	1045	**Benar**	1307	1307	**Benar**	99,67
12	Desember	1057	1057	**Benar**	1361	1361	**Benar**	100,00

19. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KEBERHASILAN PENYIDIKAN (83,01)

UPT		Tahapan	Oktober										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Surabaya	Surabaya	SPDP	9	4	2		1,00		0,15	15,00%	71,44%	100,00%	71,44%
		Tahap I			2	1	0,78	0,31	0,4	33,20%			
		P21			3		0,56	0,23	0,3	18,04%			
		Tahap II			2	3	0,22	0,23	0,15	5,20%			
		Total	9	4	9	4							

UPT		Tahapan	Nopember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Surabaya	Surabaya	SPDP	9	4	2		1,00		0,15	15,00%	82,12%	100,00%	82,12%
		Tahap I			0	0	0,78	0,31	0,4	33,20%			
		P21			2	1	0,78	0,31	0,3	24,90%			
		Tahap II			5	3	0,56	0,23	0,15	9,02%			
		Total	9	4	9	4							

UPT		Tahapan	Desember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Surabaya	Surabaya	SPDP	9	4	2		1,00		0,15	15,00%	83,01%	100,00%	83,01%
		Tahap I			0	0	0,78	0,31	0,4	33,20%			
		P21			2	0	0,78	0,31	0,3	24,90%			
		Tahap II			5	4	0,56	0,31	0,15	9,90%			
		Total	9	4	9	4							

20. INDEKS RB BBPOM DI SURABAYA (93,98)

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,89	3,75	7,64	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	3,17	6,17	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,88	5,00	9,88	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	5,00	4,64	9,64	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,94	7,50	14,44	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,79	5,00	9,79	MS
TOTAL PENGUNGKIT						57,55	
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,51	

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,76	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
		Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
	II.	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			15,93	MS
TOTAL HASIL							
NILAI PMPZI						93,98	

21. NILAI AKIP (85,37)

LAMPIRAN II

Surat Dinas Inspektur Utama

Nomor : B-PI.04.7.01.25.02

Tanggal : 2 Januari 2025

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat II Tahun 2024

3. Balai Besar POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
12	Balai Besar POM di Surabaya	**85,37**	20,16	20,16	11,04	16,80	17,21

22. NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN (98,06)

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : 4245139
Email : hubdepom@ipom.go.id; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KA.03.2.07.24.563 — Jakarta, 19 Juli 2024
Lampiran : 6 (enam) halaman
Hal : Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang telah dilakukan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 17 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum Nomor: B-KA.03.25.01.24.84, tanggal: 29 Januari 2024, hal: Jadwal Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024;
2. Penentuan target nilai kearsipan pada masing-masing unit kerja mengacu pada Surat Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor: B-KP.09.01.24.01.24.40, tanggal: 22 Januari 2024, hal: Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian yaitu:
   a. Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM;
   b. Berdasarkan Target indikator kinerja kearsipan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan TW III tahun 2023, dengan hasil reviu apabila capaian kinerja tahun 2022 lebih besar dari pada TW III tahun 2023 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2022 dan apabila capaian kinerja TW III tahun 2023 lebih besar dari pada tahun 2022 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2023;

Pengumuman Nilai Pe...

B. Balai Besar/Balai POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	98,15	AA (Sangat Memuaskan)
2	Balai Besar POM di Surabaya	98,06	AA (Sangat Memuaskan)
3	Balai Besar POM di Bandung	97,63	AA (Sangat Memuaskan)

23. INDEKS PROFESIONALITAS ASN (86,37)

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Yogyakarta	88,28	91,66
Balai Besar POM di Surabaya	86,37	90,86
Balai Besar POM di Serang	86,89	89,15

24. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP (89,23)

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Penilaian SKL BB/Balai POM Tahun 2024.

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan			
31.	Sofifi	70.02	73.32	46.60	63.31	52.83	119.84
32.	Surabaya	89.69	92.70	85.30	89.23	88.74	100.55
33.	Yogyakarta	94.86	99.03	82.05	91.98	89.20	103.12

25. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI UPT YANG OPTIMAL (3)

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW IV		
	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	128	128	131
total_akun_unit	1	1	1
total_individu_login	127	126	130
total_individu_aktif	127	126	130
total_unitbalai_aktif	1	1	1
Aspek Login (%)	29,77	29,53	29,77
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	29,77	29,53	29,77
Perhitungan (%)	99,54	99,06	99,54
Perhitungan per TW	99,72	99,66	99,65
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Login BOC	40	40	40
Akses BCC	60	60	60
Total	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Akses	334	183	71
Perhitungan	494,8	466,45	433,5
Nilai Indeks	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	20	30	10
Jumlah Viewer	2468	5626	1276
Perhitungan Rata2 Berita	19	20	19,17
Perhitungan Rata2 Pengunjung	152,15	156,98	155,7
Indeks Per TW	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

	TW IV		
Aktifitas	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	29	45	19
Jumlah Verifikasi	29	45	19
Perhitungan	100	100	100
Perhitungan per TW	100	100	100
Nilai Indeks per TW	3	3	3
Komposit SPIMKER (20%)	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	Oktober	November	Desember
% Sarana	127,02	125,87	126,42
% Sampling	118,01	112,52	103,83
% Pengujian	90,11	93,47	100
Rata-Rata	111,71	110,62	110,08
Indeks per Bulan	3	3	3
Komposit SIPT	2,4	2,4	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	3	3	3
Indeks Pemutakhiran	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3	3

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SURABAYA

26. NILAI KINERJA ANGGARAN (93,51)

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Role Pilih TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	88,10	98,92	93,51

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

27. NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA (PER SATKER) (90,00)

Data ITKP | Biro Umum Badan POM RI

No	Satuan Kerja	SiRUP	E-Tendering	E-Purchasing	Non E-Tendering dan Non E-Purchasing	E-Kontrak	Total	Status	Aksi
76	BALAI POM DI PANGKAL PINANG	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	90.00	Baik	
77	BALAI BESAR POM DI SURABAYA	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	90.00	Baik	
78	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	20.00	20.00	10.00	20.00	20.00	90.00	Baik	
79	BALAI POM DI GORONTALO	20.00	20.00	15.00	10.00	20.00	85.00	Baik	

28. NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (98,44)

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
34	BBPOM di Samarinda	25,00	70,50	28,65	10,00	19,93	20	20	98,58	sangat baik
35	BBPOM di Surabaya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,79	20	20	98,44	sangat baik
36	BBPOM di Medan	25,00	70,50	28,65	7,50	19,51	20	20	95,66	sangat baik

29. PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (78,29)

-

EFISIENSI KEGIATAN

No	Program/Kegiatan	Output			Input			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	394.553.000	348.165.494	88,24	1,13	0,13	100 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	19164	23213	100,00	1.271.106.000	1.158.671.877	91,15	1,10	0,10	100 %
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	40855	42683	100,00	12.830.560.000	12.679.596.101	98,82	1,01	0,01	100 %
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	3.043.933.000	2.936.206.757	96,46	1,04	0,04	100 %
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	110	117	100,00	420.739.000	420.738.912	100,00	1,00	0,00	100 %
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	768.466.000	768.449.750	100,00	1,00	0,00	100 %
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	16	16	100,00	209.180.000	209.179.500	100,00	1,00	0,00	100 %
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1	100,00	56.943.000	55.939.000	98,24	1,02	0,02	100 %
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	5.186.020.000	5.005.190.351	96,51	1,04	0,04	100 %
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM SURABAYA	9	9	100,00	1.116.144.000	1.070.000.403	95,87	1,04	0,04	100 %
11	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	138	138	100,00	633.934.000	497.780.522	78,52	1,27	0,27	95 %
12	Desa Pangan Aman	45	45	100,00	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51	1,02	0,02	100 %
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	30	30	100,00	512.560.000	506.977.425	98,91	1,01	0,01	100 %
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	131	131	100,00	420.728.000	321.304.321	76,37	1,31	0,31	95 %
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	942	947	100,00	1.096.381.000	1.085.316.466	98,99	1,01	0,01	100 %
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	2451	2459	100,00	1.971.420.000	1.892.214.807	95,98	1,04	0,04	100 %
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	110	110	100,00	73.227.000	48.165.696	65,78	1,52	0,52	92 %
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	432	443	100,00	487.801.000	487.586.126	99,96	1,00	0,00	100 %
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	764	766	100,00	990.949.000	887.522.506	89,56	1,12	0,12	100 %
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	11.047.774.000	10.066.556.848	91,12	1,10	0,10	100 %
21	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	27.830.591.000	27.658.428.280	99,38	1,01	0,01	100 %
	TOTAL			100,00	71.617.386.000	69.339.662.740	96,82	1,03	0,03	100 %

EFISIENSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,54	93,07	100,58	717.991.164	689.144.633	95,98	1,05	0,05	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,62	89,83	99,13	439.429.505	434.994.840	98,99	1,00	0,00	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,81	91,93	96,96	267.718.836	256.962.771	95,98	1,01	0,01	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,30	87,89	103,04	108.760.995	107.663.393	98,99	1,04	0,04	100 %
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	85,00	90,00	105,88	73.227.000	48.165.696	65,78	1,61	0,61	90%
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,50	90,31	106,88	420.739.000	420.738.912	100,00	1,07	0,07	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,40	97,26	100,89	510.624.000	455.462.168	89,20	1,13	0,13	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,14	86,56	108,01	551.168.000	530.739.204	96,29	1,12	0,12	100 %
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,50	93,04	100,58	71.312.000	43.115.308	60,46	1,66	0,66	90 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	97,30	98,25	100,97	52.100.000	51.280.000	98,43	1,03	0,03	100 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	89,42	94,43	105,60	520.494.000	489.776.835	94,10	1,12	0,12	100 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00	93,63	97,53	606.643.000	605.767.082	99,86	0,98	-0,02	75 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	71,98	102,83	488.916.000	479.985.126	98,17	1,05	0,05	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,86	66,75	94,21	772.851.000	699.185.182	90,47	1,04	0,04	100 %
15	Indeks Pelayanan Publik	4,95	5,00	101,01	71.312.000	43.115.308	60,46	1,67	0,67	90 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,00	100,00	103,09	420.728.000	321.304.321	76,37	1,35	0,35	95 %
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,18	104,40	9.604.000	9.603.440	99,99	1,04	0,04	100 %
18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,20	97,43	102,34	12.279.392.000	12.261.356.897	99,85	1,02	0,02	100 %
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	138	138	100,00	633.934.000	497.780.522	78,52	1,27	0,27	95 %
20	Jumlah desa pangan aman	45	45	100,00	1.254.377.000	1.235.671.598	98,51	1,02	0,02	100 %
21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	30	30	100,00	512.560.000	506.977.425	98,91	1,01	0,01	100 %
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	985.710.000	946.107.404	95,98	1,04	0,04	100 %
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	548.190.500	542.658.233	98,99	1,01	0,01	100 %
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	83,01	118,59	1.510.697.000	1.418.165.897	93,87	1,26	0,26	95 %
25	Indeks RB BBPOM di Surabaya	95,23	93,98	98,69	28.734.704.456	28.547.035.059	99,35	0,99	-0,01	75 %
26	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85,25	85,37	100,14	1.934.913.000	1.930.992.120	99,80	1,00	0,00	100 %
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	96,50	98,06	101,62	8.493.500	8.493.430	100,00	1,02	0,02	100 %
28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	90,86	86,37	95,06	370.911.000	334.139.234	90,09	1,06	0,06	100 %
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	88,74	89,23	100,55	16.233.794.000	15.071.747.199	92,84	1,08	0,08	100 %
30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	3,00	3,00	100,00	264.781.000	264.681.528	99,96	1,00	0,00	100 %
31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	90,31	93,51	103,54	86.240.000	80.555.335	93,41	1,11	0,11	100 %
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker)	96,43	90,00	93,33	118.225.900	103.600.579	87,63	1,07	0,07	100 %
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	90,00	98,44	109,38	19.455.144	19.442.963	99,94	1,09	0,09	100 %
34	Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	78,29	130,48	17.389.000	17.387.040	99,99	1,30	0,30	95 %
	TOTAL			102,51	71.617.386.000	69.473.776.680	97,01	1,06	0,06	100 %

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI

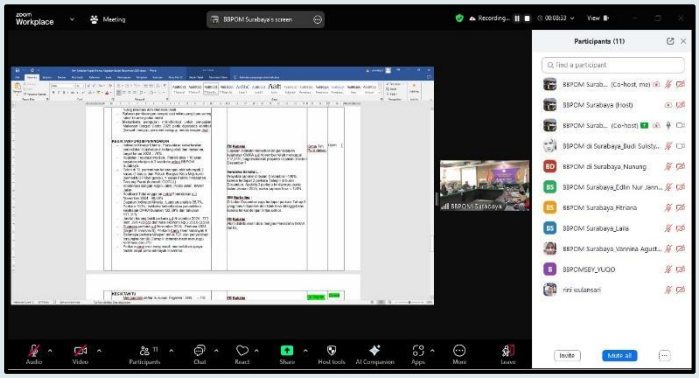

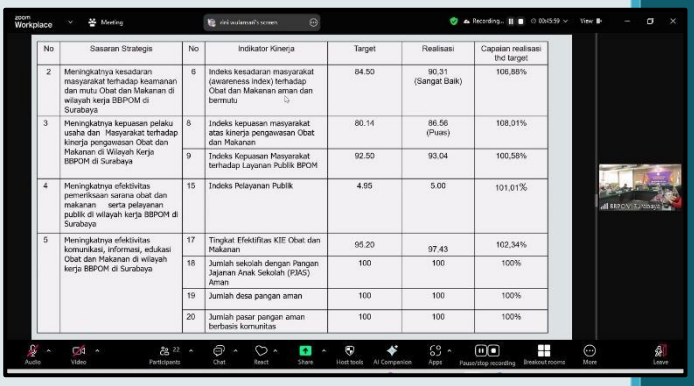

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian realisasi thd target
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat tehadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84.50	90.31 (Sangat Baik)	106,88%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Surabaya	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80.14	86.56 (Puas)	108,01%
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.50	93.04	100,58%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	15	Indeks Pelayanan Publik	4.95	5.00	101,01%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.20	97.43	102,34%
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100	100	100%
		19	Jumlah desa pangan aman	100	100	100%
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100%

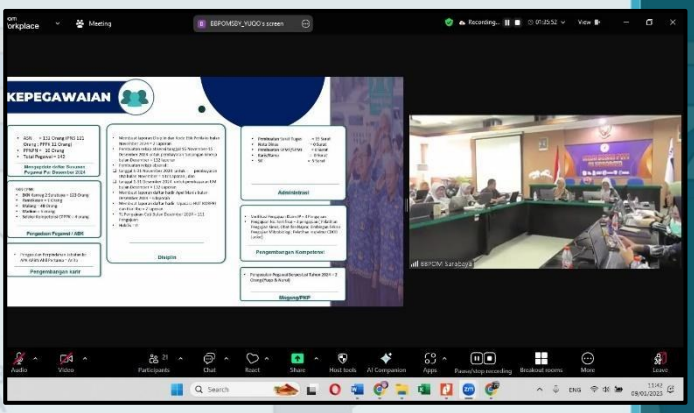

UNDANGAN RAPAT EVALUASI

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

NOTA DINAS

NOMOR : OT.01.02.11A.01.25.04

Yth.	:	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Ketua Tim Seluruh Rencana Kinerja 3. Pejabat Pembuat Komitmen 4. Penyelia 5. Pengelola Kegiatan 6. Panitia / Pejabat Pengadaan
Dari	:	Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
Hal	:	Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2024
Tanggal	:	07 Januari 2025

Mengharap kehadiran bapak / ibu pada acara Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2024 yang akan dilaksanakan pada :

Hari	: Kamis
Tanggal	: 09 Januari 2025
Jam	: 08.30 WIB – selesai
Pemimpin Rapat	: Siti Nurkolina, S.Si, Apt (Notulen dari Bagian Penindakan)
Tempat	: Secara Luring di Aula Gandrung Banyuwangi Balai Besar POM di Surabaya
Daring	: Zoom Meeting dengan link di infokan kemudian
Acara	: 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan bulan Desember 2024, Realisasi IKU dan Realisasi Anggaran 2. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA BADAN POM

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Monitoring dan Evaluasi Bulan Desember 2024
Hari/Tanggal : Kamis / 9 Januari 2025
Jam : 08.30 - 13.00

NO	NAMA	L/P	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Budi Sulistyawati	P	Kabag TU	
2				
3	Siti Nurkolina	P	Penindakan	
4	Nur Dani W. Utomo	L	PFM Ahli Madya	
5	Yuliati	L	Perencana Ahli	
6	Anita yuni puji A.	P	Staf TU	
7	Gestyana Ari	P	Rakam.	
8	Binti Nurrohmah	P	PFM Muda	
9	Indah Ekarini	P	PFM Muda	
10	Jumaatin	P	BBPOM di Sby PFM Muda	
11	Dian Indah O	P	PFM Muda	
12	W. Rahi	P	PFM Muda	
13	Aisyah Hanawati	P	PFM Muda	
14	Ary Choliyatuli	P	PFM Muda	
15	Fitri Hariani	P	PFM Muda	
16	Romdani Achmad S.	L	PFM Ahli Pertama/BBPOM Sby	
17	Lailatul Rechana P	P	PFM Ahli Madya	
18	Retno Chatulistiani P	P	PFM Ahli Madya	
19	Veronika. S.L	P	PFM Ahli Muda	
20	Rini Wulandari	P	PFM Ahli Madya	
21	Nur Zainab	P	PFM Ahli Madya	
22	Nur Hidayah	P	PFM Ahli Muda	
23	Inna Rahmawati	P	PFM Ahli Muda.	
24	A. TUBO	L	Rakam Muda	
25	Agung. W	L	PFM ahli Muda	
26	Tri Yoga A.	L	PFM Ahli pertama	
27	Setyo Utami	P	PFM Ahli Muda	
28	Hesti Sila R	P	PFM Ahli Madya	
29	Purnomo	L	Perancana ahli pertama	
30	Ni Made Suari	P	Perencana ahli Pertama	

NOTULENSI RAPAT EVALUASI

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	: Kamis / 09 Januari 2025
Jam	: 09.00 WIB s.d 12.30 WIB
Pelaksanaan	: Rapat dilakukan secara luring dan daring
Pimpinan Rapat	: Ketua Tim Fungsi Penindakan
Agenda	: Rapat Evaluasi Bulanan Bulan Desember 2024
Peserta Rapat	: Plt. Kepala BBPOM di Surabaya, Kepala Bagian Tata Usaha, Ketua Tim, Penyelia, Pengelola Kegiatan,Panitia/Pejabat Pengadaan

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
1	**Hasil rapat bulan lalu** - Capaian Indikator Kinerja : Laporan analisis 85,7%, Perkara 100%, Indikator keberhasilan penindakan kejahatan OMKA bulanan 122,89% dan tahunan 117,31% - Dengan Capaian Indikator keberhasilan penindakan kejahatan OMKA sd November 2024 sebesar 117.31%, supaya dihitung proyeksi Capaian indikator Desember 2024, dimonitor apakah Capaian akan melebihi 120%		**Siti Nurkolina :** Dengan realisasi 83.01% (dari target tahunan 70%), Capaian indikator keberhasilan penindakan kejahatan OMKA sd Desember 2024 sebesar 118,59% (masih dibawah 120%) **Plt Kabalai :** Selama capaian keberhasilan tidak lewat dari 120% masih bisa ditoleransi	Ketua Tim Penindakan	Closed
2	**MONEV KEGIATAN BULAN DESEMBER 2024** **KEGIATAN FUNGSI PENGUJIAN** - Penyelesaian sampel Lab. Kimia dengan target 4349 setahun, total yang masuk kumulatif 4006 dan penyelesaian kumulatif 4027 - Penyelesaian sampel Lab. Mikro dengan target 1961 setahun, total yang masuk kumulatif 2455 dan penyelesaian kumulatif 2455 - Rata-rata pemenuhan parameter dan timeline 100%		**Yuliadi Kurniawan :** - Untuk alat Microwave apakah sudah dibuatkan nota dinas pengembalian BMN rusak berat? (**open**) - Untuk AC di Lab. Mikro dilakukan penggantian kompressor second karena keterbatasan anggaran untuk membeli yang baru	Ketua Tim Pengujian	Open

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Sampel kasus sudah selesai semua sebanyak 35 sampel (TMS 29, MS 6, HPST 0) - Sampel Pihak III sudah selesai semua sebanyak 8 sampel (TMS 0, MS 0, HPST 8) - Sampel Labkel total sebanyak 699 sampel, (TMS 73 dan MS 620), TMS didominasi boraks dalam kerupuk puli - Realisasi Anggaran sebesar **99,91%** - Verifikasi Metode Analisa (VMA) dengan target tahunan 101 terealisasi 102 (100,99% terhadap target setahun), target sampai bulan Desember 2024 sebanyak 101 terealisasi 102 (100,99% terhadap target bulan berjalan) Lab kosmetik pelaksanaan pengujian sudah selesai, tinggal menyelesaikan laporan - Kalibrasi Internal/Cek Antara Peralatan dengan target tahunan sebanyak 58 terealisasi 58 (100% terhadap target setahun), target sampai bulan Desember 2024 sebanyak 58 terealisasi 58 (100% terhadap target bulan berjalan) - Pemenuhan standard diantaranya ruang lingkup (89,69%), kompetensi (92,7%) dan peralatan (85,3%) dengan nilai SKL tahun 2024 sebesar 89,23% dari target tahun 2024 sebesar 88,74% (pemenuhan terhadap target 2024 sebesar 100,55%) - Selama tahun 2024 telah dilaksanakan Uji Profisiensi sebanyak 12 dengan hasil Memuaskan, Baik dan Inlier - Selama tahun 2024 telah dilaksanakan Uji Kolaborasi sebanyak 8 - Pelatihan personil Fungsi Pengujian sebanyak 15 pelatihan yang diikuti oleh pegawai fungsi Lab (jenis pelatihan sesuai dengan penempatannya) - Permasalahan Laboratorium / Catatan Desember 2024:		- Saluran autoclave dilaboratorium bisa dicek bersama untuk mengecek aliran pembuangannya **Lailatul Rochma Pusponegoro :** akan segera dibuatkan nota dinas terkait pengembalian BMN rusak berat **Ary Chodijayanti** : Kendala lab obat : Regionalisasi lab sebenarnya lebih berfokus pada komoditi obat karena terjadi pertukaran data antar daerah dan hal itu menjadi titik kritis dalam data. Mohon untuk dapat dibuatkan link yang bisa dikunci per baris agar tidak mudah terjadi perubahan data Labkin Interim. Apabila ada perubahan data harus disertai dengan pengantar dari Kepala Balai. Hal tersebut agar petugas lebih *aware* **Nur Zainab :** Agar pihak pengujian memberikan data MS dan TMS untuk acuan inspeksi dalam melakukan pemeriksaan **Vannina Agustyani** : Data pengujian jadi acuan sebagai hasil analisis pihak inspeksi untuk melakukan audit di sarana **Nur Dani Widyo Utomo :** - Untuk mengetahui data sampel MS dan TMS bisa melihat di database		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	Lab. Obat • Selama tahun 2024 untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan SDM untuk menjadi Spesialist CPOB telah dilakukan pengikutsertaan penguji obat sebagai observer pada kegiatan CPOB → Diharapkan penguji yang telah 3 kali menjadi observer dapat menjadi spesialis CPOB secara mandiri dengan dibekali pelatihan yang memadai, untuk penguji obat baik kimia maupun mikrobiologi lainnya diusulkan menjadi observer pada kegiatan CPOB di tahun 2025 • Balai penguji di Regional Surabaya tidak tertib dalam menginput tanggal selesai uji pada link rekap regional yang mengakibatkan terjadi kesalahan jumlah sampel selesai uji saat penginputan data untuk RHPK tiap bulannya, sehingga data RHPK selalu berubah dan mempengaruhi data Laporan Kinerja Interim → Untuk tahun 2025 akan dibuat kesepakatan maksimal pengisian Link rekap regional dan setelah tanggal tersebut link akan dikunci, bila ada perubahan harus ada justifikasi yang jelas **Lab. Pangan** • Microwave Anton Paar Lab Pangan rusak (part discontinue) dan Novawe tidak bisa digunakan secara normal → Pengajuan perbaikan Novawave dan Belanja Modal (Microwave pengganti Anton Paar)		- Agar dilakukan penjadwalkan pembahasan pengisian dan penarikan data base hasil pengujian agar mempermudah proses penginputan data **Yuyun :** Data kosmetik sudah lengkap di database secara parameter uji, namun terdapat nama tempat sampling yang belum lengkap. **Ary Chodijayanti :** - Pernah dilakukan usulan penginputan database besar namun tidak terlaksana secara baik dan konsisten karena tidak dilengkapi oleh petugas **Vannina Agustyani** : - Perlu diaktifkan kembali database dengan dilakukan perbaikan (tidak terjadi double input) agar lebih efektif - Permintaan SPU secara manual akan menambah beban kerja, jadi cukup SIPT **Gestyana Ari Restanti :** - Bahwa selama ini SIPT sebenarnya sudah mengakomodir kebutuhan namun tidak terdapat alamat pabrik, hanya nama pabrik saja. Setiap bulan terdapat laporan penarikan SIPT yang dibagikan ke grup SIPT		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	Lab. Mikro • AC central lab mikro berbunyi bising keras → Sudah lapor TU, sudah diperbaiki pada Bulan Desember tapi sempat bising kembali dan saat ini sudah di TL lagi di awal tahun 2025 dan sudah tidak bising. Apakah perlu dilakukan pengecekan unit kembali karena di 2023 dilakukan penggantian kompresor tapi infonya memakai kompresor second? • Saluran pembuangan autoclave kurang lancar sehingga timbul genangan → Sudah lapor TU secara informal di awal tahun 2025 **Lab. Kosmetik** • HPLC Waters mengalami kerusakan → Telah dilaporkan ke PPK dan telah menghubungi penyedia, menunggu proses perbaikan • AAS membutuhkan pembelian suku cadang untuk uji Hg → Telah dilaporkan ke PPK • Microwave untuk preparasi AAS mengalami kerusakan, vendor berada di Jakarta dan pemeliharaan dilakukan saat vendor ada kegiatan di Surabaya untuk menghindari biaya akomodasi → Telah dilaporkan ke PPK dan telah menghubungi penyedia, menunggu teknisi untuk pengecekan bagian yang mengalami kerusakan		**Irma Rahmawati :** - Mohon apabila terdapat rapat tentang sampling agar petugas Sertifikasi dilibatkan **Rika Yustiarni :** - Mohon untuk dapat dijadwalkan kembali pelatihan tentang uji bromat, mengingat petugas yang sudah mengikuti pelatihan tersebut (Bu Ary) akan dipindahtugaskan ke fungsi lain **Ary Chodijayanti :** - Usul untuk dilakukan diseminasi dengan mengundang petugas dari provider alat **Plt Kabalai :** - Akan dilakukan pengecekan ketersediaan anggaran untuk pengadaan alat-alat laboratorium yang sudah mulai rusak. - Untuk pelaporan kerusakan alat-alat laboratorium agar dilengkapi dokumen administrasinya (notdin, input monev perbaikan, dll). - Harus segera dijadwalkan persiapan monev regionalisasi laboratorium untuk mengantisipasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. - Sepakat agar apabila ada perubahan data Lapkin Intern harus dilengkapi disertai penyampaian ke Kepala Balai.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
			- Setuju SPU melalui sistem supaya data terkumpul dan tidak dua kali kerja, menjadi pertanyaan apakah selama ini SIPT sudah mengakomodir SPU dari hulu ke hilir, sehingga diharapkan untuk dilakukan pembahasan internal sebelum dilakukan pembahasan dan pembuatan renlak. - Untuk pengujian bromat agar dijadwalkan lagi di awal tahun ini dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, serta kegiatan pelatihan yang sudah dilaksanakan agar segera dilakukan diseminasi agar banyak personel laboratorium yang mengetahui.		
	KEGIATAN FUNGSI PEMERIKSAAN INSPEKSI - Pemeriksaan sarana di Bulan Desember 2024 dengan total capaian 45 (45%) dari target 5, dengan rincian sarana: Produksi: 16 (1600 %) dari target 1 Distribusi Obat: 10 (1500 %) dari target 2 Distribusi Non Obat: 19 (950%) dari target 2 - Pemeriksaan sarana s.d Desember 2024 dengan total capaian1209 (101,09%) dari target 1196, dengan rincian sarana: Produksi: 443 (102.55 %) dari target 432 Distribusi Obat: 295 (100,68%) dari target 293 Distribusi Non Obat: 471 (100%) dari target 471 - Capaian pemeriksaan sarana produksi s.d Desember 2024: % capaian sarana= 102,55%, %MK=71,98%		**Plt Kabalai :** - Untuk kosmetik targeted apakah masih bisa diupayakan, sehingga sebaiknya dikomunikasikan secara internal sebelum dilakukan finalisasi (**open**) - Terkait program akselerasi CPKB yang merupakan program uji coba dan pilot projectnya dilakukan oleh BBPOM Surabaya dengan mendapatkan predikat hasil yang baik. - Belum didapatkan rootcause terkait IKU sertifikasi yang tidak tercapai, jadi harus ada upaya untuk diatur agar range target bisa kita capai. **Gestyana Ari Restanti :** - Ada 6 IKU yang tidak tercapai, 2 diantaranya adalah persentase makanan MS dan obat yang aman dan bermutu. Apakah hal tersebut sudah dapat diterima atau ada upaya lain terkait hal itu.	Ketua Tim Inspeksi	Open

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Capaian pemeriksaan sarana distribusi s.d Desember 2024: % capaian sarana= 102,26%, %MK=66,75% - Dari 4 indikator kinerja sarana terdapat 1 indikator yang tidak tercapai, yaitu persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (target: 70.86, realisasi 66.75, capaian 94,21) - IKU Sarana Produksi MK : Total %MK s.d Des = 71,98%, Target IKU vs Capaian IKU = 102,83% - IKU Sarana Distribusi MK : Total %MK s.d Des = 66,75%, Target IKU vs Capaian IKU = 94,21% - Realisasi anggaran s.d Desember 2024 sejumlah 99.64% - Capaian sampling bulan Desember : target 31 terealisasi 39 dengan % realisasi Des terhadap target Des sebesar 79.48% (note: samplel obat, OT, Kos dan Kuasi tidak tercapai terhadap target perbulan dikarenakan bulan sebelumnya terdapat kelebihan pembelian sampel) - Capaian sampling per tahun : target 3503 terealisasi 3516 dengan % realisasi s.d Des terhadap target per tahun sebesar 100.37% (MK=3424 TMK=92) - Realisasi sampling total s.d Des : Total Obat (indikator) = 2451, Total Pangan = 1052, Total sampel = 3503 Justifikasi Kelebihan obat 8 sampel disebabkan : Terdapat permintaan lab utk pemenuhan verifikasi dan RL Pengujian serta terdapat pengawasan obat beredar yg sdh lama tdk disampling (ditemukan di peredaran) Justifikasi Kelebihan Pangan 5 sampel disebabkan : 2 sampel untuk Kajian (Acak- Maret dan Juli) 3 sampel untuk RL Pengujian Kimia utk verifikasi metode (September)—Terigu,selai,buah kaleng		**Lailatul Rochma Pusponegoro :** - Penyumbang TMS pada pangan cukup banyak baik dari segi mikrobilogi maupun uji k imia, hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil pengujian lab.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Indikator Kinerja Sampling yang belum tercapai : %Makanan yang MS (target = 90.62, realisasi s.d Des = 89.83, Capaian kinerja = 99,13%) % Obat yang aman & bermutu berdasarkan hasil pengawasan (target = 90.62, realisasi s.d Des = 89.83, Capaian kinerja = 99,13%) - Capaian total pengawasan iklan bulan Des : target 139 terealisasi 115 dengan % realisasi bulan Des sebesar 82.73% - Capaian total pengawasan iklan per tahun : target 1698 terealisasi 1734 dengan % realisasi bulan Des terhadap target/tahun sebesar 102.12% - Permasalahan : Pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan di Inspeksi 2020 – 2021 beberapa belum terinput dan tahun 2022 s.d 2024 belum terinput semua Saran : Pengarsipan tahun 2020 – 2024 bisa menggunakan jasa pihak ke-3 Pengarsipan tahun 2025 akan diinput Mandiri				
	SERTIFIKASI Capaian Kegiatan Sertifikasi s.d Bulan Desember sbb : - Penerbitan SKI : jumlah s/d Des = 11209, rata-rata SLA s/d Des = 3.03 jam - Penerbitan SKI : jumlah s/d Des = 10700, rata-rata SLA s/d Des = 5.36 jam - Audit Sarana Produksi : Pangan Skala Usaha Menengah Besar = 134 Pangan Usaha Mikro Kecil (verifikasi penerbitan IP CPPOB) = 74 Industri Kosmetik = 37 Usaha Obat Tradisional = 36		**Plt Kabalai :** - Penghargaan program akselerasi CPKB yang diperoleh BBPOM Surabaya pada bulan Desember 2024 ternyata merupakan uji coba. Semoga di tahun ini program akselerasi tersebut tetap dapat dilakukan meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.	Ketua Tim sertifikasi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Audit Sarana Distribusi : Audit surveilan SMKPO = 11 PBF = 105 Sarana distribusi kosmetik (pemohon notifikasi kosmetik) = 38 Audit dalam rangka penerbitan SKI = 12 - Audit Bersama Pusat : Sertifikasi CPPOB = 4 Sertifikasi CPKB = 13 Sertifikasi CPOTB = 0 Sertifikasi CDOB = 5 Audit SKI dengan Pusat = 3 - Pendampingan UMKM : Sarana pangan = 1 Sarana kosmetik = 2 Konsultasi denah kosmetik = 1 - Capaian IKU : Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu = 97.52% Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = 103,09% Indeks Kepuasan Pelaku Usaha = 100.79% - Kegiatan sertifikasi : Klinik POM di Diskopindag Kota Malang 16-17 Desember 2024 Klinik POM di Kota Batu tanggal 23-24 Desember 2024 Klinik POM di Kabupaten Lamongan 27 Desember 2024 Klinik POM di Kabupaten Nganjuk 30-31 Desember 2024 - Realisasi anggaran = 99.97%		**Irma Rahmawati :** - Target IKU 5 tahun mendatang sudah dapat draft manual IKU, namun IKU sertifikasi tidak akan masuk indeks layanan publik. Target dan penilaian oleh Hukor. - Tahun 2025 ada banyak perubahan terutama update NPWP dari 15 digit ke 16 digit, verifikasi data pelaku usaha importir dan eksportir akan membutuhkan tenaga - Sikronisasi data OSS dan e-sertifikasi membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih untuk melakukan verifikasi perusahaan yang terdaftar.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	KEGIATAN FUNGSI INFOKOM - Capaian realisasi terhadap target untuk seluruh sasaran strategis yang diampu telah mencapai 100% atau > 100% - Index Persepsi Anti Korupsi (IPAK) BBPOM di Surabaya untuk bulan Desember sebesar 3,87 - Index Persepsi Pelayanan (IPP) BBPOM di Surabaya untuk bulan Desmber sebesar 3,69 - Realisasi Output seluruh kegiatan telah mencapai target - Realisasi anggaran s.d Desember sebesar 99.996% - KIE melalui media elektronik bulan Desember 2024 (koran: 2 paket, transportasi: 2 paket) - Realisasi KIE Tomas tahun 2024 mencapai target 100% - KIE Obat dan Makanan bulan Desember 2024 (Cangkru'an: 50, Klinik POM: 89) - Desa Pangan Aman telah mencapai 100%, yaitu kegiatan pengawalan, advokasi (4 kabupaten), Bimkom, fasilitasi tahap I dan pengawasan keamanan pangan tahap I dan II (8 desa), pengadaan paket informasi test kit, monev dan Lomba. Bulan Desember sedang tahap seleksi Tingkat Prov untuk Lonba Desa Pangan Aman - Progres Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah mencapai 100%. Bulan Desember sedang tahap seleksi Tingkat Prov untuk Lomba PJAS - Pasar Pangan Aman dari Bahan Berbahaya, Progres s/d Desember 2024 mencapai 100 % (Keg pengawalan, survey, advokasi, Bimtek Kader, Monev Tahap 1 dan 2, penyuluhan dan kampanye di 6 pasar). Bulan Desember sedang tahap seleksi Tingkat Prov untuk Lomba PPABK - Rencana kegiatan tahun 2025: Prioritas nasional : Kabupaten Pacitan KIE Tomas: Sidoarjo, Kota Surabaya, Jombang, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Blitar, Kediri danTulungagung		**Plt Kabalai** : - Terkait KIE untuk lokasi di Jember dan Kediri akan dilakukan secara mandiri oleh balai setempat namun mekanismenya belum ditata, apabila sudah bisa dilaksanakan maka efeknya BBPOM di Surabaya tidak terlalu terfosir dalam hal anggaran dan tenaga sehingga kita lebih bisa fokus terhadap target sendiri. - Diharapkan ada usulan/ masukan terkait renovasi ruangan pelayanan publik. Bea Cukai Juanda dapat menjadi salah satu referensi - Agar Survey IPP dan IPAK dapat dikawal dengan baik karena terkait penilaian WBBM - Untuk tim PPID BBPOM Surabaya sebagai juara 2 PPID tingkat Provinsi Jatim akan diberikan chalenge tersendiri agar lebih meningkat lagi dan direncanakan kunjungan ke Instansi BKKBN Jatim sebagai juara 1 dan diharapkan status kita "menuju infomatif" bisa meningkat menjadi "status informatif".	Ketua Tim Infokom	Closed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Sosialisasi : Cangkru'an, KIE Stunting, Media Sosial, ILM Stunting, Media Sosial, ILM, SAKA POM - ULPK : Layanan Informasi dan Pengaduan **KEGIATAN FUNGSI PENINDAKAN** - Indikator Kinerja Utama : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan, target tahun 2024 = 70% - Kegiatan / operasi intelijen : Patroli siber 110 akun (komoditi kosmetik 25 akun, komoditi obat dan pangan 15 akun, komoditi suplemen makanan 25 akun dan komoditi obat tradisional 45 akun) Kegiatan Intelijen di 3 kab/kota wilker BBPOM Surabaya dengan rincian 1 kegiatan intelijen tertutup dan 2 kegiatan intelijen terbuka - Telah dilaksanakan bantuan personil dalam rangka Kegiatan Operasi Penindakan di wilker Balai POM di Jember oleh PPNS BBPOM di Surabaya - Kegiatan Pemberkasan : • Kegiatan Tahap II (Bojonegoro) • Koordinasi dalam rangka penyelesaian berkas perkara (Malang, Probolinggo, Gresik, Sidoarjo) • Mengantar Surat Apnggilan Tahap II • Sidang perkara tersangka an. R di Pengadilan Negeri Mojokerto - Telah dilakasanakan TL permintaan keterangan ahli sebanyak 2 kasus dari Polres Kota Batu (komoditi OOT LL) - Koordinasi dengan Kejati Jatim dan Polda Jatim - Dilaksanakan TL Pengaduan Masyarakat dugaan pemalsuan produk SNOW LAB - Sebagai Narasumber Program Hukum JTV		**Siti Nurkolina :** - Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Kantor Rupbasan Medaeng tahun 2024 bilamana diperlukan penitipan BB temuan hasil operasi penindakan, disarankan dibuat PKS antara BBPOM Surabaya dan Kanwil Dirjen PAS Surabaya. Konfirmasi ke Pusat, telah ada MoU antara Kedep IV dan Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang masih berlaku sd Desember 2025. Bila memungkinkan mohon bisa difasilitasi untuk kegiatan tsb di tahun 2025 ini - Beberapa hal yang dapat disampaikan terkait temuan hasil audit kinerja berbasis risiko Fungsi Penindakan th 2024 oleh Inspektorat sbb : • Penanggungjawab Alat Khusus Intelijen, apakah akan dibuat SK Penanggungjawab atau bentuk penugasan lainnya, karena sebenarnya di ruangan telah ada PJ DBR • Terkait pembersihan gudang barang bukti di Buduran Sidoarjo yang belum dapat dilaksanakan secara rutin, karena keterbatasan anggaran, diharapkan proses pindah gudang segera terealisasi agar dapat menghemat anggaran • pengadaan/ketersediaan anggaran)		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Persentase Realisasi anggaran s.d Desember 2024 sebesar 99.99% - Realisasi output dan capaian indikator kinerja s.d Desember 2024 tercapai 118.59% - Capaian indikator kinerja s.d Desember 2024: Realisasi = 83.01 Capaian s.d Des = 118.59 - Capaian terhadap terget tahunan = 118.59 - Progres perkara s.d Desember 2024 : Perkara 2024 dengan target 9 → realisasi = 9, SPDP = 2, Tahap 1 = 0, P21 = 2, Tahap 2 = 5 Perkara carry over → realisasi = 4, SPDP = 0, Tahap 1 = 0, P21 = 0, Tahap 2 = 4 Notes : Carry Over : 2016 sd 2023 : (8 perkara, td : 7 Perkara P21-A , 1 Perkara Tsk. DPO) Perkara 2024, TL 2025 : (4 Perkara, td : 3 Perkara Rah 2-Januari 2025, 1 Perkara P-19) - Jumlah barang bukti perkara s.d Desember 2024 sejumlah 771 item / 291.423 pcs dengan nilai keekonomian Rp 2.203.603.500,- didominasi oleh komoditas OT TIE (98.62%) - Kendala/permasalahan : • Beberapa perkara di tahap penyerahan tersangka dan BB (Tahap II) tertunda, menunggu konfirmasi dari JPU • Perkara carry over 2016 sd 2023 yang masih memerlukan upaya tindak lanjut yaitu sebanyak 8 perkara, sedangkan perkara 2024 yang berlanjut di tahun 2025 sebanyak 4 Perkara		• Untuk kelengkapan pengaman gudang barang bukti (teralis dan CCTV) di kantor JL. Karangmenjangan 20, timeline pemenuhan disampaikan sd Desember 2025 (mengikuti kesiapan • Terkait pemusnahan barang bukti *carry over* perkara SP3 senilai kurang lebih 133 juta telah dibuat surat usulan penambahan anggaran ke Rorenkeu. Sebagai informasi alokasi anggaran pemusnahan BB th 2025 hanya tersedia sekitar Rp. 500 ribu rupiah • Manrisk Fungsi Penindakan akan direviu dan dibahas lebih lanjut bersama Tim SPIP **Yuliadi Kurniawan :** - Terkait permohonan teralis di gudang BB Kantor BBPOM Surabaya, sudah dilakukan peninjauan bersama dengan petugas Penindakan. Pemasangan teralis bisa diupayakan memakai anggaran gedung. Untuk CCTV di gudang BB kantor bisa memakai DVR di ruangan penindakan dengan cara menarik kabel panjang, akan segera dilakukan penawaran ke pihak ketiga terkait hal itu **Veronika Sandra Lolita** : - Terkait temuan audit Inspektorat di fungsi Penindakan, akan dilakukan pengiriman nota dinas ke fungsi Infokom, Pemeriksaan dan Pengujian untuk permintaan data untuk kepentingan analisis cegah tangkal.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
			Plt Kabalai : - Untuk kebutuhan SK penanggungjawab alsus fungsi penindakan agar teman-teman Penindakan berdiskusi dengan Balai lain dan apabila diharuskan maka akan segera diterbitkan SK penangungjawab alsus di penindakan	Kabag TU	Open
			- Agar teman-teman penindakan bisa berkoordinasi dengan teman-teman Infokom terkait pembuatan PKS penitipan barang bukti dengan Kanwil Dirjen PAS Kementerian Kumham Jatim	Katim Infokom – Katim Penindakan	Open
			- Terkait kegiatan pembersihan rutin gudang Barang bukti yang jadi temuan audit, komunikasi dengan PPK dll akan segera kita lakukan. Untuk kelengkapan gudang BB dikantor akan disegerakan terutama CCTV dan teralis terkait keamanan gudang BB.	Kabag TU/PPK	Open
			Nur Dani Widyo Utomo: - Reviu manrisk bisa disesuaikan waktunya dengan jadwal reviu yang telah diagendakan Tim SPIP, pemenuhan timeline bisa di Juli 2025	Ketua Satgas SPIP	Open
	KEGIATAN TATA USAHA - Melakukan update daftar Susunan Pegawai per Desember 2024 : ASN = 132 Orang (PNS 121 Orang ; PPPK 12 Orang), PPNPN = 10 Orang Total Pegawai = 142 orang		**Plt Kabalai :** - Mohon untuk tetap dikawal IKU tahun 2025 agar sesuai target perencananaan - Terkait capaian indeks RB di tahun 2024 yang masih < 93% dan harapannya tercapai nilai 95%. Agar anggota setiap area untuk mengawal prosesnya	Ka Bagian Tata Usaha	Closed

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penang gung jawab	Status
	- Pengadaan pegawai /ABK BKN Kanreg 2 Surabaya = 123 orang Pamekasan = 1 Orang Malang = 48 Orang Madiun = 6 orang Seleksi Kompetensi CPPPK = 4 orang - Pengembangan karir: pengusulan perpindahan jabatan ke APK APBN Ahli Pertama an. Anita - Disiplin : • Membuat laporan Disiplin dan Kode Etik Perilaku bulan November 2024 = 2 Laporan • Pembuatan rekap absensi tanggal 16 November-15 Desember 2024 untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember = 132 laporan • Membuat laporan daftar hadir Apel Manis bulan Desember 2024 = 6 laporan • Membuat laporan daftar hadir Upacara HUT KORPRI dan Hari Ibu = 2 laporan • TL Pengajuan Cuti Bulan Desember 2024 = 111 Pengajuan • Hukdis = 0 - Administrasi : • Pembuatan Surat Tugas = 15 Surat • Nota Dinas = 0 Surat • Pembuatan SPMT/SPMJ = 0 Surat • Karis/Karsu = 0 Surat • SK = 5 Surat		- Capaian nilai SAKIP BBPOM di Surabaya masih tertinggi yaitu diangka 85%, agar terus dikawal untuk tetap mempertahankan - Terkait SPIP, tahun 2024 dilakukan pelatihan MRO. Tim SPIP dan pegawai yang dinyatakan kompeten diharapkan selalu mengawal keberlanjutan dan selalu mengindetifikasi *rootcausenya*, agar program sosialisasi setiap minggu melalui apel manis tetap dijalankan. - Akan dilaksanakan pelatihan SPIP dengan penyebaran peserta tiap fungsi - Tahun 2025 banyak anggaran masih dibintang, agar katim tetap melaksanakan rencana sesuai FO asal tidak melebihi. - Terkait penyusunan SKP 2025 masih menunggu arahan pusat - Dengan adanya program SPPI maka harus dilaksanakan pembelajaran materi 16 JP yang harus langsung selesai, dan hampir 7000 personel yang harus dilatih. - Terkait Makan Bergizi Gratis di wilayah Jatim yang direncankana *kick off* pada minggu kedua bulan ini di Kab. Pacitan dan Madiun, agar dapat mendukung program kerja presiden tersebut. Mohon bantuan rekan-rekan untuk dapat menyiapkan diri melakukan pengujian sampel MBG setiap hari. Lokus di surabaya lebih diprioritaskan mengingat wilayah Kota Surabaya sering menjadi sorotan. - Rotasi pegawai tahun 2025 sudah dilakukan dibulan ini dengan harapan agar setiap pegawai lebih bisa mengembangkan kompetensi di berbagai fungsi.		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penang gung jawab	Status
	- Pengembangan kompetensi : • Verifikasi Pengajuan Klaim JP = 3 Pengajuan • Pengajuan No. Sertifikat = 3 pengajuan (Pelatihan Pengujian Kimia, Obat dan Napza; Bimbingan Teknis Pengujian Mikrobiologi; Pelatihan Inspektur CDOB Junior) - Magang/PKP: Pengusulan Pegawai Berpestasi Tahun 2024 = 2 Orang (Yuqo & Nurul) - Nilai IP ASN per tanggal 27 Desember 2024 : Pegawai dengan nilai fungsional kurang = 4 orang Pegawai dengan nilai seminar kurang = 1 - Total nilai IP ASN = 86.45 (95.15% dari target) - Persuratan : • Arsip masuk: 256 surat masuk, 73 laporan • Surat keluar: 12 surat, 1 sampel regional masuk, 1 sampel keluar • Penomoran naskah: 350 nomor • Kontrol naskah dinas: 295 nomor - Perlengkapan : • Pemeliharaan: 16 unit AC • Perbaikan sarpras: 62 unit lampu diganti • Pengelolaan ATK: 17 form permintaan • Pengelolaan reagen: 26 form permintaan • Aset BMN: Terdapat transaksi pembelian beberapa AC, Access Point, GCMS dan peralatan yang melekat, regulator gas, serta beberapa barang ekstrakomptabel • Input persediaan: Input transaksi persediaan berupa pembelian dan pemakaian bulan Desember 2024				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	• Perbaikan/pemeliharaan kendaraan: 2 Kendaraan dinas operasional dan service rutin 4 kendaraan dinas operasional - SIPT pemeriksaan sarana rutin 2024 per 31 Desember 2024 sebesar 100% - Persentase SIPT Hasil Uji Selesai dari total SIPT Masuk Pengujian sebesar 100% - Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC-SPIMker : 1 (kurang dimanfaatkan) - Realisasi anggaran s.d Desember 2024 (berdsarkan aplikasi OMSPAN) → %realisasi pada aplikasi OMSPAN masih memperhitungkan pagu yang diblokir - Realisasi anggaran s.d Desember 2024 (Per-5/PB/2024): 97.01% (pagu total), 99.75% (pagu revisi) - Nilai Kinerja Anggraan (NKA) tahun 2024: s.d pelaksanaan rapat evaluasi tanggal 9 Januari 2025, nilai EKA tahun 2024 berlum terbit - Capaian IKU → Sampai dengan pelaksanaan rapat Evaluasi Bulanan: • Terdapat 6 IKU tidak mencapai target yang ditetapkan • Terdapat 5 IKU yang belum terbit nilainya • Terdapat 6 IKU yang mencapai target yang ditetapkan • Terdapat 17 IKU yang melampaui target yang ditetapkan. - Nilai kinerja organisasi (NPSS) 2024 belum dapat dihitung karena beberapa nilai IKU belum terbit - Capaian Indeks RB Tahun 2024 sebesar 93.98 dari target 2024 sebesar 95.23 (%capaian sebesar 98.69%) → Tidak Tercapai				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	- Indeks RB/Balai POM → BBPOM di Surabaya berada di peringkat 2 dengan nilai 93.98 - Pencapaian SPIP 2024 dengan jumlah nilai 2.0 (naik dari tahun sebelumnya) dan nilai maturitas 0.125 (naik dari tahun sebelumnya) - Evaluasi terhadap Plan Of Action SPIP 2024: telah dilaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi target (8 target kegiatan) - Uraian kelemahan manajemen risiko BBPOM di Surabaya (hasil penilaian Inspektorat) : • Manajemen risiko belum belum direncanakan dan didokumentasikan secara memadai • Belum memberikan masukan kepada manajemen terkait kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko - Masih terdapat uraian risk event dan terdapat atribut pengendalian yang tidak relevan dengan aktivitas pengendalian • Masih terdapat ketidakselarasan kategori risiko dengan penyebab risiko • Belum terdapat dokumentasi yang memadai terkait arahan/masukan dari atasan/ketua tim • Uraian tugas manajemen risiko dalam SKP belum untuk seluruh pegawai - Progres dan Rencana tindak lanjut audit PIBR - Plan Of Action SPIP 2025				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Uraian	Topik	Tanggapan/Arahan/Rencana Tindak Lanjut	Penanggung jawab	Status
	KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA - Monev Pengadaan barang/jasa s.d Desember 2024 : dari seluruh pengadaan barang/jasa (31 pengadaan) → kontrak/pengadaan sudah selesai 100% Notes : Pengadaan Sewa Rumah Dinas pada Bulan Desember pagu dialihkan untuk belanja lainnya karena tidak akan ada realisasi s.d akhir tahun - Realisasi anggaran s.d Desember 2024 : • Belanja modal: 91.87% • Belanja barang: 97.35% • Belanja pegawai: 99.26% • Total anggaran: 96.99% - Perencanaan anggaran s.d Desember 2024: Nilai aplikasi SIRUP → 103.02% - Realisasi belanja BJ PDN dari Pagu anggaran sumber data aplikasi Sakti: • Belanja barang dan jasa: 97.35% • Belanja modal: 91.87% - Presentase capaian indikator belanja produk dalam negeri: 82.32%			Panitia/Pejabat Pengadaan	Closed

Mengetahui,
Plt. Kepala Balai Besar POM di Surabaya,

Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt

Notulis,

1. Adityo Kuswantoro, S.H .....
2. Tri Yoga Aldila, S.KM .....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara